



PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN UTARA

2023

LPPD

LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH

PROVINSI
KALIMANTAN UTARA



DR. (H.C.) H. Zainal A. Paliwang, M.Hum
Gubernur Kalimantan Utara



Dr. Yansen TP, M.Si
Wakil Gubernur Kalimantan Utara



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrohim,

Assalamualikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat ALLAH SWT, Tuhan yang Maha Esa karena



hanya dengan bimbingan dan tuntunan-Nya jualah, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berpedoman pada pasal 69 ayat (1) Undang–undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Penyusunan LPPD merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, fungsi dan strategi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 – 2026 dalam pelaksanaan dari Visi, Misi dan Tujuan yang telah ditetapkan dan untuk mengetahui perkembangan yang terjadi sebagai bahan untuk pembinaan, pengawasan, pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di daerah dalam rangka mewujudkan Kalimantan Utara yang Berubah, Maju dan Sejahtera. Kepada semua pihak yang telah terlibat dalam membantu dan berkontribusi dalam penyelesaian penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023 ini diucapkan terima kasih. Semoga LPPD ini dapat menjadi referensi bagi Pemerintah Pusat dalam memberikan panduan dan pembinaan kepada Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan.



Demikian LPPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023 kami sampaikan, semoga segala upaya kita dalam mengemban tugas-tugas pemerintahan daerah mendapatkan Rahmat dan Ridho ALLAH SWT. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Tanjung Selor, 29 Maret 2024

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA



[Handwritten signature]

DR. (H.C.). H. Zainal A. Paliwang, SH, M.Hum



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.1.1 Penjelasan Umum	1
1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah	11
1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal	60
BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	79
2.1 Capaian Kinerja Makro	79
2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	83
2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	83
2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	135
2.2.3 Indikator Kinerja Kunci untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	146
2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah	149
a. Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja	149
b. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target perjanjian kinerja 151	
c. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Tahun Sebelumnya	154
d. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Dalam Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD/RENSTRA)	158
e. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan Dengan Hasil (Kinerja) Yang Telah Dicapai	165
f. Analisis Program dan Kegiatan yang mendukung Pencapaian Target Kinerja 169	
BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN	197
1. Dasar Hukum	197
2. Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan	198
a. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara	198
b. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	199
c. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	199
d. Dinas Pariwisata	200
3. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan	200
a. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara	200



b. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	202
c. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara	203
d. Dinas Pariwisata.....	203
3.1 Tugas Pembantuan Pusat yang dilaksanakan oleh Daerah Provinsi	205
3.2 Tugas Pembantuan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota	217
3.3 Permasalahan dan Kendala.....	217
3.4 Saran dan Tindak Lanjut	219
BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL	222
4.1. Urusan Pendidikan.....	222
4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar	222
4.1.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah	222
4.1.1 Realisasi	223
4.1.2 Alokasi Anggaran	227
4.1.3 Dukungan Personil	227
4.1.4 Permasalahan dan Solusi	228
4.2. Urusan Kesehatan.....	229
4.2.1 Jenis Pelayanan Dasar	229
4.2.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Oleh Daerah.....	230
4.2.3 Realisasi	231
4.2.4 Alokasi Anggaran	235
4.2.5 Dukungan Personil	235
4.2.6 Permasalahan dan Solusi	235
4.3. Urusan Pekerjaan Umum	237
4.3.1 Jenis Pelayanan Dasar	237
4.3.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah	238
4.3.3 Realisasi	238
4.3.4 Alokasi Anggaran	238
4.3.5 Dukungan Personil	239
4.3.6 Permasalahan dan Solusi	240
4.4. Urusan Perumahan Rakyat.....	240
4.4.1 Jenis Pelayanan Dasar	240
4.4.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah	241
4.4.3 Realisasi	242
4.4.4 Alokasi Anggaran	244



4.4.5 Dukungan Personil	244
4.4.6 Permasalahan dan Solusi	244
4.5. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	245
4.5.1 Jenis Pelayanan Dasar	245
4.5.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah	245
4.5.3 Realisasi	246
4.5.4 Alokasi Anggaran	247
4.5.5 Dukungan Personil	248
4.5.6 Permasalahan dan Solusi	248
4.6. Urusan Sosial	250
4.6.1 Jenis Pelayanan Dasar	250
4.6.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah	250
4.6.3 Realisasi	251
4.6.4 Alokasi Anggaran	252
4.6.5 Dukungan Personil	253
4.6.6 Permasalahan dan Solusi	253
4.7. Program dan Kegiatan	255
4.7.1 Bidang Pendidikan	255
4.7.2 Bidang Kesehatan	256
4.7.3 Bidang Urusan Pekerjaan Umum	257
4.7.4 Bidang Urusan Perumahan Rakyat	258
4.7.5 Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat	259
4.7.6 Bidang Sosial	260
BAB V PENUTUP	261



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.1.1 Penjelasan Umum

a. Undang-undang Pembentukan Daerah

Provinsi Kalimantan Utara merupakan provinsi ke-34 di Indonesia, mempunyai potensi dan kekayaan sumber daya alam, wilayah daratan yang luas, dan wilayah laut yang menyimpan ragam kekayaan serta keanekaragaman penduduk dengan kekayaan budaya yang unik dan menarik. Provinsi Kalimantan Utara dibentuk berdasarkan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2012 yang disahkan menjadi provinsi dalam rapat paripurna DPR pada tanggal 25 Oktober 2012. Provinsi Kalimantan Utara terbagi menjadi 5 wilayah administrasi yang terdiri atas 1 (satu) kota dan 4 (empat) kabupaten yakni Kota Tarakan, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Tana Tidung dengan ibukota Provinsi di Kecamatan Tanjung Selor. Sebagai provinsi terdepan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, provinsi Kalimantan utara akan dihadapi dengan berbagai tantangan pembangunan yang harus segera diselesaikan.

b. Kondisi Geografis Daerah Provinsi Kalimantan Utara

Provinsi Kalimantan Utara merupakan Provinsi ke-34 di Indonesia dan merupakan provinsi termuda dari seluruh Provinsi yang ada di Indonesia. Kalimantan Utara merupakan sebuah Provinsi di Pulau Kalimantan yang memiliki luas $\pm 75.467,70$ km² dan terletak di utara Pulau Kalimantan yang terletak diantara garis 114°35'22" BT 118°03'00" BT - 4°24'55" LU 1°21'36" LU.

Provinsi Kalimantan Utara merupakan Provinsi yang berbatasan langsung dengan Negara tetangga Malaysia, tepatnya dengan bagian Sabah, Sarawak, dan Malaysia. Untuk daerah daratan terdekat + 1.038 km garis perbatasan antara Provinsi Kalimantan Utara di Tanjung Selor, yang juga merupakan ibukota Kabupaten Bulungan. Provinsi Kalimantan Utara Berbatasan dengan:

- Batas Utara : Negara Malaysia Bagian Sabah;
- Batas Selatan : Kabupaten Kutai Barat, Kutai Timur, Kutai Kertanegara dan Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur;
- Batas Timur : Laut Sulawesi
- Batas Barat : Negara Malaysia Bagian Serawak



Secara geografis Provinsi Kalimantan Utara memiliki luas wilayah administratif yaitu ± 75.467,70 Km², terdiri dari:

Tabel 1. 1

Luas Wilayah Menurut Kabupaten/Kota

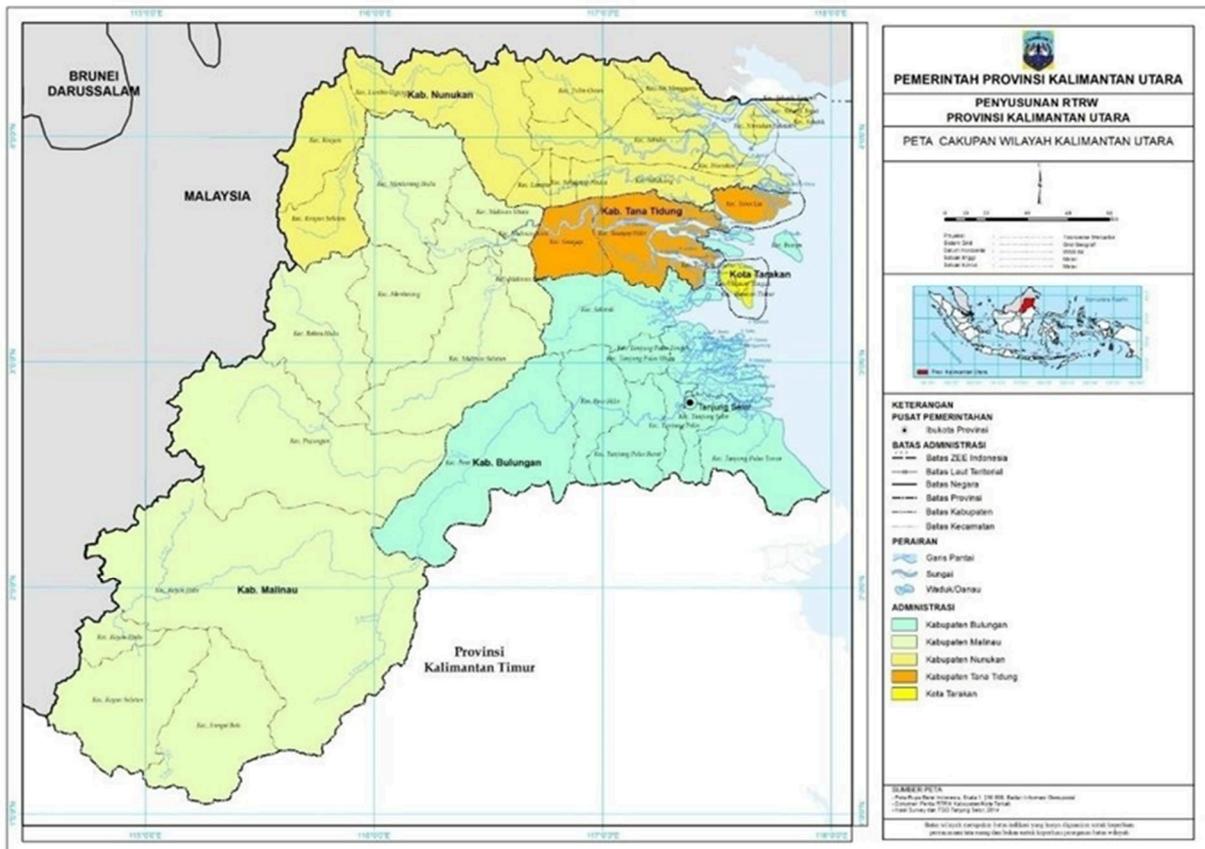
KABUPATEN/KOTA	LUAS (KM ²)	PERSENTAS E	JUMLAH KECAMATAN	JUMLAH DESA/KELURAHAN
Kabupaten Bulungan	13.925,72	18,45	10	81
Kabupaten Malinau	42.620,70	56,48	15	109
Kabupaten Nunukan	13.841,90	18,34	22	240
Kabupaten Tana Tidung	4.828,58	6,40	5	32
Kota Tarakan	250,80	0,33	4	20
Kalimantan Utara	75.467,70	100,00	53	482

Sumber. BPS Kaltara, Provinsi Kalimantan Utara Dalam Angka 2023

Secara administratif, wilayah Provinsi Kalimantan Utara terbagi menjadi 5 wilayah daerah otonom kabupaten/kota dengan persebaran seperti yang disajikan pada Tabel 1.1 dan Gambar 1.1.

Gambar 1. 1

Peta Cakupan Wilayah Kalimantan Utara



Sumber: RTRW Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017-2037



c. Jumlah Penduduk Provinsi Kalimantan Utara

Penduduk Provinsi Kalimantan Utara menurut data dari konsolidasi bersih semester 2 tahun 2023 Ditjen Dukcapil Kemendagri RI berjumlah 747.415 jiwa, terdiri dari penduduk Kabupaten Bulungan sebanyak 165.775 jiwa, Kabupaten Malinau 85.073 jiwa, Kabupaten Nunukan 217.923 jiwa, Kabupaten Tana Tidung 28.684 jiwa dan Kota Tarakan 249.640 jiwa. Jika dilihat dari persebaran disetiap wilayah, Provinsi Kalimantan Utara memiliki kepadatan penduduk sebesar 9,90 jiwa/km², dengan Kota Tarakan sebagai wilayah terpadat dengan kepadatan penduduk sebesar 995,86 jiwa/km², kemudian Kabupaten Nunukan sebesar 15,74 jiwa/km², Kabupaten Bulungan sebesar 11,90 jiwa/km², Kabupaten Tana Tidung 5,94 jiwa/km², dan Kabupaten Malinau sebesar 2,00 jiwa/km².

Tabel 1. 3

**Rekapitulasi Data Kependudukan Per Kabupaten Dan Kota Se-Kalimantan Utara
Per Jenis Kelamin Dilengkapi Dengan Jumlah Kecamatan**

NO	NAMA WILAYAH	JENIS KELAMIN (JIWA)		JUMLAH PENDUDUK (JIWA)	LUAS WILAYAH (KM ²)	KEPADATAN PENDUDUK (JIWA/KM ²)	JUMLAH KECAMATAN
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN				
1	BULUNGAN	87.393	78.382	165.775	13.926	11,90	10
2	MALINAU	44.851	40.222	85.073	42.621	2,00	15
3	NUNUKAN	115.669	102.254	217.923	13.842	15,74	21
4	TANA TIDUNG	15.061	13.623	28.684	4.829	5,94	5
5	KOTA TARAKAN	129.365	120.595	249.960	251	995,86	4
TOTAL SEMESTER 2/2023		392.339	355.076	747.415	75.469	9,90	55

Sumber Data: Dinass Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi Kalimantan Utara 2023



d. Jumlah Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Utara

Provinsi Kalimantan Utara berasal dari sebagian wilayah Provinsi Kalimantan Timur, yang cakupan wilayahnya terdiri dari 4 Kabupaten dan 5 Kota yaitu :

- Kabupaten Bulungan;
- Kota Tarakan;
- Kabupaten Malinau;
- Kabupaten Nunukan; dan
- Kabupaten Tana Tidung.

e. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara

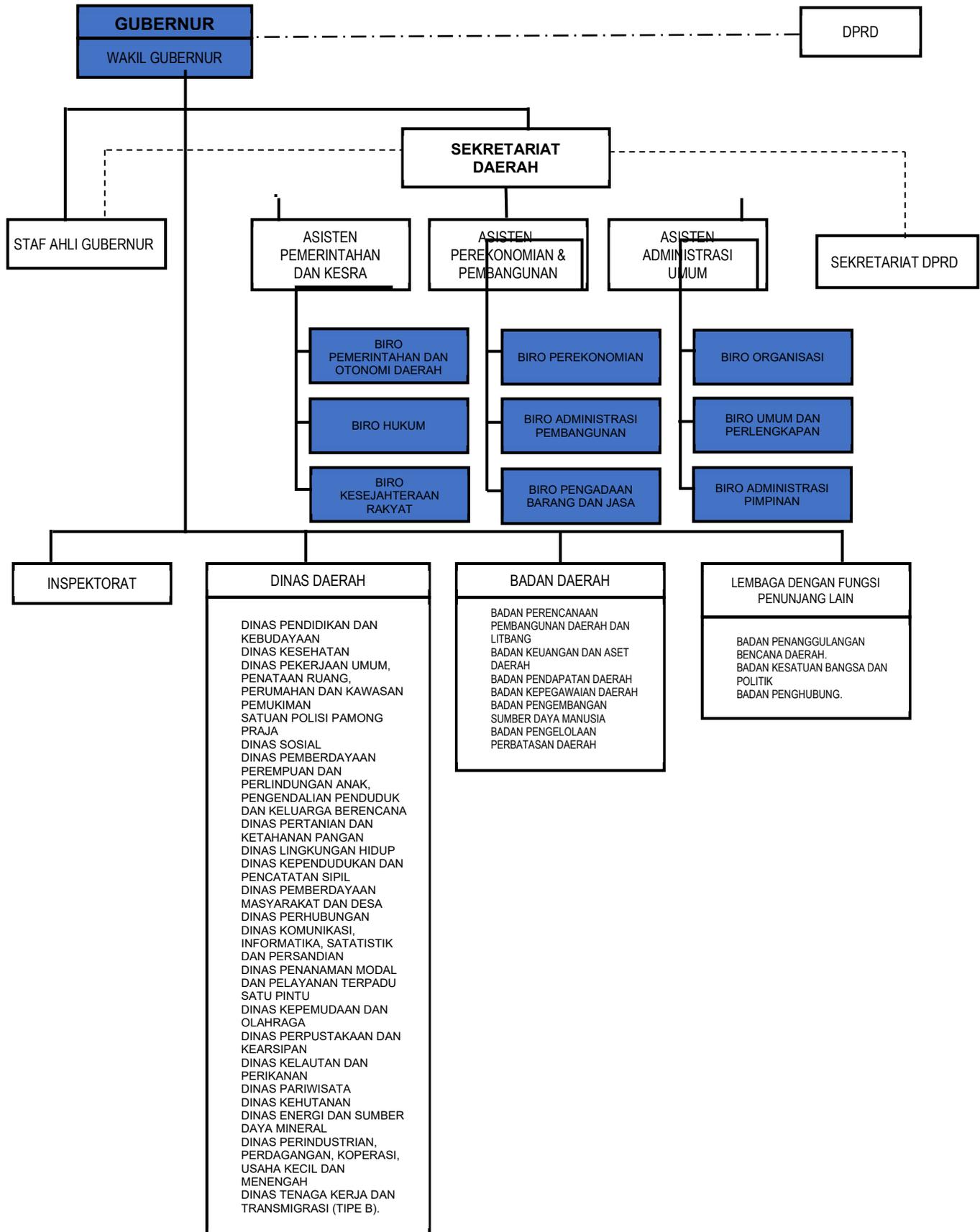
Perangkat daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Pada pemerintahan daerah, perangkat daerah terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas dan Badan. Untuk Provinsi Kalimantan Utara, perangkat daerah terdiri atas :

1. Sekretariat Daerah terdiri dari 3 (tiga) Asisten yang masing-masing membawahi 3 (tiga) Biro;
2. Sekretariat DPRD;
3. Inspektorat;
4. Satuan polisi Pamong Praja;
5. Dinas terdiri atas 20 (dua puluh) Dinas;
6. Badan terdiri atas 9 (delapan) Badan;
7. Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kalimantan Utara

Untuk lebih jelasnya mengenai unsur perangkat daerah tersebut dapat dilihat pada struktur dibawah ini :



Gambar 1. 2
Struktur Organisasi Provinsi Kalimantan Utara





Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Utara, per Desember 2023, ASN pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara berjumlah 4.865 orang yang terdiri dari 4.356 PNS dan 509 PPPK. Angka tersebut termasuk ASN yang merupakan tenaga pendidik dan tenaga Kesehatan, sementara jumlah ASN berdasarkan penyebarannya per perangkat daerah dapat dilihat pada tabel 1.5 di bawah ini.

Tabel 1. 3
Jumlah ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tidak Termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan Berdasarkan Penyebaran di Perangkat Daerah Tahun 2023

NO	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH ASN
1	Badan Kepegawaian Daerah	34
2	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	30
3	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	60
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	39
5	Badan Pendapatan Daerah	41
6	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	25
7	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	37
8	Badan Penghubung	21
9	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Litbang	54
10	Biro Administrasi Pembangunan	23
11	Biro Administrasi Pimpinan	30
12	Biro Hukum	35
13	Biro Kesejahteraan Rakyat	24
14	Biro Organisasi	26
15	Biro Pemerintahan Dan Otonomi Daerah	26
16	Biro Pengadaan Barang Dan Jasa	44
17	Biro Perekonomian	30
18	Biro Umum	67
19	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral	37
20	Dinas Kehutanan	45
21	Dinas Kelautan Dan Perikanan	52
22	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	31
23	Dinas Kesehatan	63
24	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian	40
25	Dinas Lingkungan Hidup	32



NO	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH ASN
26	Dinas Pariwisata	27
27	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman	95
28	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	34
29	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	42
30	Dinas Pemuda Dan Olahraga	37
31	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	37
32	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	62
33	Dinas Perhubungan	56
34	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	46
35	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	33
36	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	73
37	Dinas Sosial	42
38	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	38
39	Inspektorat	55
40	Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kalimantan Utara	860
41	Satuan Polisi Pamong Praja	38
42	Sekretariat Daerah	7

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah 2024

f. Realisasi APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah)

Berdasarkan laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara tahun 2023 unaudited, realisasi PAD terhadap total anggaran pada APBD Kalimantan Utara tahun 2023 sebesar 102,50 %, sedangkan untuk belanja daerah sebesar 90,09 %. Secara rinci realisasi anggaran pendapatan dan belanja dapat dilihat dalam table 1.4 berikut ini.


Tabel 1. 4
Realisasi APBD Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2023

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%	LEBIH/KURANG
PENDAPATAN	Rp 3.117.817.961.109	Rp 3.085.740.557.050	99%	Rp 32.077.404.059
PENDAPATAN ASLI DAERAH	Rp 956.174.904.915	Rp 980.064.090.123	102%	-Rp 23.889.185.208
Pendapatan Pajak Daerah	Rp 672.259.678.341	Rp 717.253.715.401	107%	-Rp 44.994.037.060
Pendapatan Retribusi Daerah	Rp 21.201.750.303	Rp 17.390.165.163	82%	Rp 3.811.585.140
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	Rp 37.088.203.219	Rp 10.114.672.311	27%	Rp 26.973.530.908
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	Rp 225.625.273.052	Rp 235.310.494.144	104%	-Rp 9.685.221.092
PENDAPATAN TRANSFER	Rp 2.161.293.056.194	Rp 2.104.954.266.065	97%	Rp 56.338.790.129
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN	Rp 2.136.626.729.194	Rp 2.080.287.939.065	97%	Rp 56.338.790.129
Dana Bagi Hasil	Rp 734.927.228.194	Rp 689.779.609.710	94%	Rp 45.147.618.484
Dana Alokasi Umum	Rp 1.117.056.623.000	Rp 1.117.056.619.340	100%	Rp 3.660
Dana Alokasi Khusus	Rp 284.642.878.000	Rp 273.451.710.015	96%	Rp 11.191.167.985
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA	Rp 24.666.327.000	Rp 24.666.327.000	100%	Rp -
Dana Insentif Daerah (DID)	Rp 24.666.327.000	Rp 24.666.327.000	100%	Rp -
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	Rp 350.000.000	Rp 717.243.966	205%	-Rp 367.243.966
Pendapatan Hibah	Rp 350.000.000	Rp 341.658.000	98%	Rp 8.342.000
Pendapatan Lainnya	Rp -	Rp 375.585.966	0%	-Rp 375.585.966
BELANJA	Rp 2.941.027.294.635	Rp 2.649.601.972.901	90%	Rp 291.425.321.734



URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%	LEBIH/KURANG
BELANJA OPERASI	Rp 2.191.417.602.060	Rp 2.001.029.528.392	91%	Rp 190.388.073.668
Belanja Pegawai	Rp 836.780.466.444	Rp 767.029.049.418	92%	Rp 69.751.417.026
Belanja Barang	Rp 1.161.983.446.188	Rp 1.055.612.392.662	91%	Rp 106.371.053.526
Belanja Subsidi	Rp 16.601.106.700	Rp 16.513.140.465	99%	Rp 87.966.235
Belanja Hibah	Rp 175.168.782.728	Rp 161.141.184.381	92%	Rp 14.027.598.347
Belanja Bantuan Sosial	Rp 883.800.000	Rp 733.761.466	83%	Rp 150.038.534
BELANJA MODAL	Rp 734.609.692.575	Rp 639.178.182.299	87%	Rp 95.431.510.276
Belanja Tanah	Rp 34.498.679.061	Rp 30.379.184.731	88%	Rp 4.119.494.330
Belanja Peralatan dan Mesin	Rp 129.605.473.277	Rp 106.792.727.094	82%	Rp 22.812.746.183
Belanja Bangunan dan Gedung	Rp 392.475.161.852	Rp 344.125.944.533	88%	Rp 48.349.217.319
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp 175.420.844.060	Rp 155.513.502.679	89%	Rp 19.907.341.381
Belanja Aset Tetap Lainnya	Rp 2.131.534.325	Rp 1.904.007.132	89%	Rp 227.527.193
Belanja Aset Lainnya	Rp 478.000.000	Rp 462.816.130	97%	Rp 15.183.870
BELANJA TAK TERDUGA	Rp 15.000.000.000	Rp 9.394.262.210	63%	Rp 5.605.737.790
Belanja Tak Terduga	Rp 15.000.000.000	Rp 9.394.262.210	63%	Rp 5.605.737.790
TRANSFER	Rp 570.904.603.185	Rp 538.778.797.545	94%	Rp 32.125.805.640
TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA	Rp 570.904.603.185	Rp 538.778.797.545	94%	Rp 32.125.805.640
Bagi Hasil Pajak	Rp 386.449.403.185	Rp 368.800.299.772	95%	Rp 17.649.103.413
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	Rp 184.455.200.000	Rp 169.978.497.773	92%	Rp 14.476.702.227



URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%	LEBIH/KURANG
SURPLUS / DEFISIT	-Rp 394.113.936.711	-Rp 102.640.213.396	26%	-Rp 291.473.723.315
PEMBIAYAAN	Rp 424.113.936.711	Rp 331.447.368.711	78%	Rp 92.666.568.000
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	Rp 409.113.936.711	Rp 316.447.368.711	77%	Rp 92.666.568.000
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	Rp 409.113.936.711	Rp 316.447.368.711	77%	Rp 92.666.568.000
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	Rp 15.000.000.000	Rp 15.000.000.000	100%	Rp -
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	Rp 15.000.000.000	Rp 15.000.000.000	100%	Rp -
PEMBIAYAAN NETTO	Rp 394.113.936.711	Rp 301.447.368.711	76%	Rp 92.666.568.000
SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	Rp -	Rp 198.807.155.316		-Rp 198.807.155.316

Sumber : BKAD 2023

1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah

a. Permasalahan Strategis Daerah

Berdasar pada kondisi yang ada pada saat ini dan dinamika perkembangannya dalam beberapa tahun sebelumnya, maka dapat dirumuskan permasalahan strategis daerah Provinsi Kalimantan Utara. Secara umum permasalahan disimpulkan dari pencermatan trend yang ada; untuk unsur bersifat baik yang cenderung menurun atau unsur tidak baik yang cenderung meningkat. Keduanya merupakan hal yang diangkat sebagai permasalahan. Demikian pula kondisi yang tidak sesuai atau di bawah standar adalah permasalahan. Kemudian kondisi yang jauh dari aspirasi yang ada, termasuk aspirasi resmi yang tertuang dalam berbagai dokumen perencanaan, merupakan permasalahan pembangunan. Permasalahan terbagi menurut aspek yakni:

- 1) Aspek Kesejahteraan Masyarakat yang terdiri dari : Kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia, Ketahanan Pangan dan Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan terhadap PDRB.
- 2) Aspek Pelayanan Umum yang meliputi pelayanan dasar (Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat dan Sosial). dan pelayanan wajib non dasar (Tenaga Kerja, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pangan, Pertanahan, Lingkungan Hidup, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Penanaman Modal, Kepemudaan dan Olah Raga, Statistik, Persandian, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Kelautan dan Perikanan, Pariwisata, Pertanian, Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral, Perdagangan, Perindustrian, Transmigrasi).
- 3) Aspek Daya Saing : Daya saing merupakan salah satu aspek yang harus di tumbuhkan dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan Provinsi Kalimantan Utara. Kemampuan daya saing wilayah sebagai salah satu tantangan besar di masa depan. Era globalisasi ini membutuhkan dukungan daya saing yang tinggi, terlebih Provinsi Kalimantan Utara berada di beranda depan wilayah Indonesia yang



berhadapan dengan Malaysia. Permasalahan daya saing daerah provinsi nampak dari nilai tukar petani yang masih fluktuatif, persentase desa swasembada yang masih sedikit dibandingkan total jumlah desa, dan angka kriminalitas yang masih relatif tinggi.

- 4) Permasalahan Spesifik Kalimantan Utara : Setiap wilayah memiliki kekhasan sendiri terkait dengan karakteristik, sosial, budaya, maupun kondisi fisik. Agar pembangunan dapat mengakomodasi spesifikasi wilayah, maka perlu memperhatikan permasalahan spesifik yang dihadapi. Antara lain : Perbatasan dan Heart of Borneo.

b. Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026, adalah

“Terwujudnya Provinsi Kalimantan Utara Yang Berubah, Maju dan Sejahtera”.

dengan penjelesan sebagai berikut:

- *Berubah* : adalah suatu kondisi kehidupan pada berbagai lini dalam rangka membangun daerah yang diawali dari lini paling bawah, dengan perubahan paradigma dalam konsep membangun daerah melalui sinergisitas antara Pemerintah, Masyarakat dan Swasta dalam tata kelola yang efisien, efektif dan produktif dengan pemberdayaan sumber daya daerah berbasis komunitas pada Kabupaten/kota sebagai pilar provinsi; terwujudnya peran aktif segenap stakeholder secara terpadu, dan harmonis dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Utara secara otonom.
- *Maju* : suatu kondisi kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan politik di Provinsi Kalimantan Utara yang ditandai oleh meningkatnya mutu dan jangkauan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik; berkembangnya ekonomi desa dan kelurahan serta daerah yang mengandalkan pada kegiatan yang produktif, bernilai tambah tinggi, berkualitas untuk menciptakan kesempatan kerja dan mengurangi kemiskinan, dan bertumpu pada peran serta usaha kecil rumah tangga, usaha menengah dan koperasi; terbangunnya prasarana dan sarana yang modern, terpadu, dan merata sampai ke seluruh desa; terwujudnya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan;



serta berkembangnya kerjasama dan kemitraan usaha kecil, menengah dan koperasi dengan usaha besar yang adil dan saling menguntungkan.

- *Sejahtera* : suatu kondisi Provinsi Kalimantan Utara yang ditandai oleh meningkatnya mutu dantaraf hidup rakyat Provinsi Kalimantan Utara secara terus menerus; terpenuhinya hak-hak dasar rakyat terutama pangan dan gizi, pendidikan, kesehatan, air bersih, pendidikan, perumahan, dan pekerjaan; berkembangnya nilai-nilai agama, etika dan moralita, serta nilai-nilai keutamaan sosial budaya; terwujudnya kehidupan yang rukun, damai, nyaman, penuh toleransi, harmonis, dan bebas dari segala bentuk gangguan, konflik dan tindak kejahatan; serta terbangunnya kesetaraan, kemitraan, toleransi, gotong royong dan tanpa diskriminasi dalam pengelolaan sumber daya, pelayanan publik, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Dalam rangka mewujudkan visi yang telah ditetapkan beserta berbagai butir penjelasannya, maka dirumuskan misi yaitu rumusan umum tentang upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Berlandaskan pada makna visi Provinsi Kalimantan Utara yakni Terwujudnya Provinsi Kalimantan Utara Yang Berubah, Maju dan Sejahtera, ada 14 (empat belas) misi yang akan dilaksanakan lima tahun ke depan yaitu:

1. Mewujudkan Kalimantan Utara, yang aman, nyaman dan damai melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
2. Mewujudkan sistem Pemerintahan provinsi yang di topang oleh Tata Kelola Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai pilar utama secara profesional, efisien, efektif, dan fokus pada sistem penganggaran yang berbasis kinerja.
3. Mewujudkan pembangunan Sumber Daya Manusia yang sehat, cerdas, kreatif, inovatif, berakhlak mulia, produktifitas dan berdaya saing dengan berbasis Pendidikan wajib belajar 16 Tahun dan berwawasan.
4. Mewujudkan pemanfaatan dan pengelolaan Sumber Daya Alam dengan nilai tambah tinggi dan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan, secara efisien, terencana, menyeluruh, terarah,



terpadu, dan bertahap dengan berbasiskan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

5. Mewujudkan peningkatan pembangunan infrastruktur pedesaan, pedalaman, perkotaan, pesisir dan perbatasan untuk meningkatkan mobilisasi dan produktifitas daerah dalam rangka pemerataan pembangunan
6. Mewujudkan peningkatan ekonomi yang berdaya saing, dan mengurangi kesenjangan antar wilayah serta meningkatkan ketahanan pangan dengan berorientasi pada kepentingan rakyat melalui sektor perdagangan, jasa, industri, pariwisata, dan pertanian dalam arti luas dengan pengembangan infrastruktur yang berkualitas dan merata serta meningkatkan konektivitas antar kabupaten/kota.
7. Mewujudkan kualitas kerukunan kehidupan beragama dan etnis dengan berbagai latar belakang budaya dalam kerangka semangat Kebhinekaan di provinsi Kalimantan Utara.
8. Mewujudkan ketahanan Energi dan pengembangan PLTA serta energi terbarukan dengan pemanfaatan potensi daerah.
9. Mewujudkan peningkatan kualitas kesetaraan gender dan Melinial dalam pembangunan.
10. Mewujudkan perlindungan dan pemberdayaan Koperasi dan UMKM.
11. Meningkatkan kinerja Pembangunan dan Investasi Daerah dengan melibatkan Pengusaha dan investor Lokal serta Nasional.
12. Memberi bantuan pengembangan sektor produktif dan potensi strategis di setiap desa dan kelurahan melalui Pengembangan Produk lokal masing-masing Kabupaten/Kota.
13. Mewujudkan pembangunan yang berbasiskan RT/Komunitas dalam upaya gerakan membangun desa menata kota, serta memberi Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota sebagai pilar provinsi sesuai kemampuan APBD setiap Tahun.
14. Mewujudkan Tanjung Selor menjadi DOB sebagai Ibu Kota Provinsi Kalimantan Utara serta Beberapa DOB yang telah diusulkan yaitu; Kota Sebatik, Kabupaten Kabudaya, Kabupaten Kerayan, Kabupaten Apo Kayan.

Visi merupakan tujuan/harapan/cita-cita yang diinginkan. Sedangkan misi merupakan langkah atau penjabaran apa yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi.

c. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah

Program-program pembangunan daerah sangat menentukan pencapaian target indikator kinerja tujuan dan sasaran Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Utara tahun 2021–2026. Selain itu, secara keseluruhan program-program pembangunan harus mengarah pada terlaksananya misi pembangunan daerah, yang mewujudkan Kalimantan Utara yang berubah, maju dan sejahtera. Dimana program-program pembangunan daerah tersebut diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah.

Diperlukan pendekatan yang sifatnya operasional yang dapat mengarahkan agar program-program pembangunan dapat secara tepat menjalankan misi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dan kemudian mewujudkan visi. Pendekatan yang sifatnya operasional dalam rangka mencapai keberhasilan pembangunan Provinsi Kalimantan Utara periode tahun 2021–2026 adalah: (1) Pendekatan Prioritas Pembangunan; dan (2) Pendekatan Gerakan Kaltara Rumah Kita. Ilustrasi pendekatan Prioritas Pembangunan dan Gerakan Kaltara Rumah Kita yang pelaksanaannya melalui berbagai program pembangunan dalam rangka melaksanakan misi untuk mencapai tujuan dan visi pembangunan Provinsi Kalimantan Utara.

Berdasarkan visi pembangunan daerah provinsi Kalimantan Utara periode RPJMD tahun 2021–2026 menginginkan Kalimantan Utara “Berubah, Maju dan Sejahtera”. Berubah, maju dan sejahteranya Kalimantan Utara dicapai melalui 14 misi pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Utara, dimana 14 misi tersebut dimaksudkan untuk mencapai 16 tujuan yang ditetapkan. Secara operasional tujuan-tujuan tersebut dapat dicapai dengan pelaksanaan berbagai program yang dilaksanakan melalui pendekatan Prioritas Pembangunan dan Gerakan Kaltara Rumah Kita.

Program-program pembangunan Provinsi Kalimantan Utara sesuai dengan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah serta sesuai dengan pendekatan Prioritas Pembangunan dan Gerakan Kaltara Rumah Kita adalah sebagaimana tersaji pada Tabel berikut :



Tabel 1. 5
Rencana Program Prioritas disertai dengan Kebutuhan Pendanaan
Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023-2026

Kode	Misi./Tujuan / Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcomes)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	Misi 1: Mewujudkan Kalimantan Utara, Yang Aman, Nyaman Dan Damai Melalui Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik																
	Tujuan: Terjaganya Kondusifitas Wilayah	Indeks Ketahanan Nasional	Point	2.65	2.75	2.78	2.80	2.82	2.85	2.85							
	Sasaran 1: Meningkatkan Keamanan Dan Ketertiban Wilayah	Angka kriminalitas tertangani Indeks Demokrasi Indonesia	persen Point	100% 83.45	100% 83.50	100% 83.60	100% 83.70	100% 83.80	100% 83.90	100% 83.00							
8.01.03	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemihkada/Pilpres/Pileg	Persen	76	78	2.659.266.606	80	2.659.266.606	82	2.690.895.534	84	2.731.895.534	86	2.758.895.534	86	13.500.219.814	Bidang Politik Dalam Negeri
	Sasaran 2: Meningkatkan Kualitas Penanganan Bencana	Indeks Risiko Bencana	Point	153.62	153.62	-	153.62	-	153.62	-	153.62	-	153.62	154			
1.05.03	Program Penanggulangan Bencana	Persentase penyelesaian dokumen sampai dengan dinyatakan sah / legal	Persen	10	30	2.100.000.000	50	500.000.000	65	1.000.000.000	80	600.000.000	100	1.600.000.000	100	5.800.000.000	BPBD
		Persentase Penanganan Pra Bencana	Persen	20	30	1.825.000.000	40	2.550.000.000	50	2.550.000.000	60	2.550.000.000	70	2.450.000.000	70	11.925.000.000	BPBD
		Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	Persen	100	100	1.800.000.000	100	2.230.000.000	100	2.440.000.000	100	2.500.000.000	100	2.500.000.000	100	11.470.000.000	BPBD
8.01.02	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persentase Kebijakan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan yang dilaksanakan	Persen	100	100	68.242.796	100	68.242.796	100	98.242.796	100	134.659.130	100	164.659.130	100	534.046.648	Bidang Ideologi Kebangsaan dan Karakter Bangsa
8.01.04	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Dibina dan Diawasi	Persen	100	100	44.553.109	100	44.553.109	100	55.553.109	100	73.553.109	100	86.353.109	100	304.565.545	Bidang Ketahanan Ekososbud, agama dan Ormas



Kode	Misi./Tujuan / Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcomes)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
8.01.05	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase Kebijakan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang dilaksanakan	Persen	100	100	38.296.650	100	38.296.650	100	51.296.650	100	64.296.650	100	82.296.650,00	100	192.186.600	Bakesbangol
8.01.06	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Tingkat Penanganan Konflik Sosial Di Masyarakat	Persen	100	100	148.720.839	100	158.720.749	100	164.720.839	100	291.560.817	100	384.860.817	100	1.148.584.061	Bakesbangol
<p>Misi 2: Mewujudkan Sistem Pemerintahan Provinsi Yang Di Topang Oleh Tata Kelola Pemerintah Kabupaten/Kota Sebagai Pilar Utama Secara Profesional, Efisien, Efektif, Dan Fokus Pada Sistem Penganggaran Yang Berbasis Kinerja.</p>																	
	Tujuan : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Transparan, Akuntabel Dan Inovatif	1. Indeks Reformasi Birokrasi	Point	B	B		B		BB		BB		BB		A		
	Sasaran : Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Profesional, Efisien, Efektif, Dan Fokus Pada Sistem Penganggaran Yang Berbasis Kinerja.	1. Predikat SAKIP	predikat	BB	BB		BB		BB		BB		A		A		
		2. Maturitas SPIP	Point	3.08	3.1		3.2		3.3		3.4		3.5		3.5		
		3. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Predikat	Baik	Baik		Baik		Baik		Baik		Baik		Baik		
		4. Indeks Maturitas SPBE	point	2.3	2.6		2.9		3.2		3.5		3.8		3.8		
5.03.02	Program Kepegawaian Daerah	Tingkat pemenuhan kebutuhan ASN	Persen	-	63.19	2.332.815.020	67,78	2.452.302.574	72,37	2.676.489.873	76,7	2.706.489.873	81,3	9.352.985.482	81,3	19.521.082.822	Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pegawai
		Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi (PNS Tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)	Persen		84.59		85.44		86.20		86.75		87.20		87.23		
		Rasio Pegawai Fungsional (PNS Tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)	Persen		19.60		20.17		20.68		21.45		21.95		21.95		



Kode	Misi./Tujuan / Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcomes)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
		Persentase PNS yang Memperoleh Predikat Baik dan Sangat Baik	Persen		97.40		97.60		97.80		98.00		98.50		98.50		
5.04. 02	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase Jabatan Struktural bersertifikat Kompetensi dan ber-SITPL	Persen	65%	80%	1.754.729.957	80%	1.854.596.992	80%	2.247.365.483	90%	2.757.729.957	90%	3.254.729.957	90%	11.869.152.346	BPSDM
		Persentase Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi dan ber-SITPL (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	65%	80%		80%		80%		90%		90%		90%		
5.01. 02	Program Perencanaan, Pengendalian , Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rata-rata capaian program pembangunan daerah	Persen		80	4.643.284.536	85	4.707.334.059	90	5.124.092.096	95	5.574.611.560	100	6.143.307.948	100	26.192.630.199	Bappeda dan Litbang
5.01. 03	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase konsistensi program dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan program perangkat daerah	Persen		100	3.322.391.609	100	3.620.327.052	100	4.020.093.814	100	4.448.693.444	100	4.527.340.626	100	19.938.846.544	Bappeda dan Litbang
5.02. 02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase penetapan APBD dan penyusunan LKPD yang tepat waktu	Persen	100	100	580.920.000.000	100	582.430.435.994	100	582.440.185.994	100	582.149.935.994	100	582.159.685.994	100	2.910.100.243.976	BKAD
5.02. 03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase barang milik daerah yang dikelola	Persen	100	100	5.450.000.000	100	5.945.000.000	100	6.250.000.000	100	6.650.000.000	100	6.750.000.000	100	31.045.000.000	BKAD
5.02. 04	Program Pengelola Pendapatan Daerah	Persentase Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persen	100	100	1.467.836.074	100	1.657.728.282	100	1.787.862.933	100	1.941.194.350	100	2.035.561.998	100	8.890.183.637	Bapenda
4.01. 02	Program Penataan Organisasi	Persentase perangkat daerah yang telah ditata organisasinya	Persen	100	100	1.286.500.000	100	1.336.500.000	100	1.417.500.000	100	1.417.500.000	100	1.498.500.000	100	6.956.500.000	Sekretariat Daerah, Biro Organisasi
4.01. 03	Program Pemerintahan Dan Otonomi Daerah	Persentase Bahan Kebijakan Lingkup Pemerintahan Dan Otonomi Daerah Yang Ditindaklanjuti	Persen	100	100	2.170.937.951	100	2.289.157.675	100	2.411.243.358	100	2.542.809.525	100	2.655.009.010	100	12.069.157.519	Sekretariat Daerah, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Persentase Dokumen Persyaratan Pemekaran Daerah Yang Di Verifikasi															
4.01. 05	Program Fasilitasi Dan Koordinasi	Persentase Produk Perundang- Undangan Bantuan Hukum Dan HAM Serata Penyelesaian Masalah Hukum Yang Di	Persen	-	100	2.586.000.000	100	2.631.000.000	100	2.726.000.000	100	2.861.000.000	100	2.941.000.000	100	13.745.000.000	Sekretariat Daerah, Biro Hukum



Kode	Misi, /Tujuan / Sasaran / Program / Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcomes)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
4.01.06	Hukum Program Perekonomian Dan Pembangunan	Fasilitasi Persentase Bahan Kebijakan Lngkup Perekonomian Dan Pembangunan Yang Ditindaklanjuti	Persen	-	90	3.395.478.550	90	4.285.026.405	90	4.713.529.046	95	5.184.881.950	95	5.703.370.145	95	23.282.286.097	Sekretariat Daerah, Biro Perekonomian
4.01.07	Program Kebijakan Dan Pelayanan Pengadaan Barang Dan Jasa	Persentase pengadaan barang dan jasa yang dilakukan secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil, atau tidak diskriminatif, dan akuntabel	Persen	100	100	935.000.000	100	942.000.000	100	1.009.000.000	100	995.000.000	100	1.060.000.000	100	4.941.000.000	Sekretariat Daerah, Biro Pengadaan Barang dan Jasa
4.01.08	Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	Persentasi Program Kebijakan Administrasi Pembangunan yang Tercapai	Persen	90	90	1.030.000.000	90	1.040.000.000	90	1.090.000.000	90	1.121.500.000	90	1.165.650.000	90	5.447.150.000	Sekretariat Daerah, Biro Administrasi Pembangunan
4.02.02	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	Persentase Pelaksanaan Fungsi DPRD yang Difasilitasi sesuai SOP	Persen	100	100	51.741.706.832	100	87.830.000.000	100	88.080.000.000	100	88.330.000.000	100	88.580.000.000	100	404.561.706.832	Sekretariat DPRD
2.16.02	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi	Persen	80	85	40.550.000.000	87	42.894.208.611	90	46.200.000.000	92	49.050.000.000	95	53.450.000.000	95	232.144.208.611	Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian
2.16.03	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	1. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo 2. Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Persen	53.66	78.04	2.951.589.077	87.80	3.270.516.664	95.12	3.805.477.702	95.12	4.105.477.702	95.12	5.147.882.120	95.12	16.329.354.189	Bidang APTIKA
			Persen	65	70		75		85		90		95		95		
5.05.02	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase hasil penelitian yang diimplementasikan dalam perencanaan pembangunan	Persen		80	1.724.016.242	85	1.693.741.340	90	1.435.420.959	95	1.499.262.554	100	1.379.564.669	100	7.732.005.764	Bappeda dan Litbang
6.01.02	Program Penyelenggara Pengawasan	Persentase OPD yang Menjadi Obyek Pengawasan Berbasis Resiko	Persen	35	35	4.705.513.756	36	4.627.516.449	37	4.415.513.756	39	4.455.513.756	40	5.280.484.450	40	23.484.542.167	INSPEKTOR AT
6.01.03	Program Perumusan Kebijakan,	Persentase Pengaduan Masyarakat yang Diselesaikan Persentase OPD yang Menerapkan SPIP	Persen	40	40	5.054.246.489	40	5.154.246.489	40	5.324.246.489	40	5.264.246.489	40	5.665.540.403	40	26.462.526.359	INSPEKTOR AT



Kode	Misi./Tujuan / Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcomes)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
	Pendampingan Dan Asistensi																
	Misi 3: Mewujudkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Sehat, Cerdas, Kreatif, Inovatif, Berakhlak Mulia, Produktif Dan Berdaya Saing Dengan Berbasis Pendidikan Wajib Belajar 16 Tahun Dan Berwawasan Kebangsaan																
	Tujuan: Mewujudkan Sdm Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing.	Indeks Pembangunan Manusia	point	70.63	71.32	-	71.45		71.58		71.71		71.84		71.84		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Sasaran: Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	1. Angka Harapan Hidup	tahun	72.59	72.63	-	72.68	-	72.73	-	72.78	-	72.80		72.80		Dinas Kesehatan
1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rasio daya tampung rumah sakit rujukan	Persen	0.091	0.141	31.070.000.000	0.191	31.700.000.000	0.241	32.980.000.000	0.291	34.360.000.000	0.341	35.920.000.000	0.341	166.030.000.000	Dinas Kesehatan
		Persentase RS Rujukan provinsi yang terakreditasi	Persen	100	100		100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan
		Persentase Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	Persen	100	100		100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan
		Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan Berisiko pada situasi KLB provinsi	Persen	100	100		100		100		100		100		100		Dinas Kesehatan
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase lembaga/keompok masyarakat yang mendapatkan advokasi kesehatan, pemberdayaan dan penggalangan kemitraan	Persen	100	100	750.000.000	100	900.000.000	100	1.050.000.000	100	1.200.000.000	100	1.350.000.000	100	5.250.000.000	Dinas Kesehatan
2.09.03	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Peningkatan skor pph		80.5	82,6	149.923.349	83,6	146.921.173	84,7	149.215.068	85,7	148.805.053	86,8	142.874.886	86,8	737.739.530	DPKP
1.02.03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase puskesmas di kabupaten/kota yang 9 jenis tenaga kesehatannya sesuai standar	Persen	53	62,5	1.100.000.000	72	1.200.000.000	80	1.300.000.000	90	1.400.000.000	100	1.500.000.000	100	6.500.000.000	Dinas Kesehatan
	Sasaran: Meningkatkan Kualitas Pendidikan Dan Kebudayaan	1. Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	12.93	13.15	-	13.28	-	13.45	-	13.60	-	13.75		13.75		
		2. Angka Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	9.00	9.27	-	9.40	-	9.53	-	9.68	-	9.82		9.82		



Kode	Misi./Tujuan / Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcomes)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1.01.02	Masyarakat Program Pengelolaan Pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Menengah	Indeks	94:19:00	100	221.670.876.460	100	290.798.468.413	100	225.956.975.561	100	191.302.312.770	100	183.869.254.450	100	1.113.597.887.654	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Menengah	Indeks	66:22:00	100		100		100		100		100		100			
		Angka Partisipasi Khusus (APK) Pendidikan Khusus	Indeks	94:19:00	100		100		100		100		100		100			
		Angka Pendidikan Murni (APM) Pendidikan Khusus	Indeks	100	100		100		100		100		100		100			
		Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Literasi yang Memenuhi Kompetensi Minimum	Persen	0	57:02:00		58:02:00		59:02:00		60:02:00		61:02:00		61:02:00			61:02:00
		Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Numerasi yang Memenuhi Kompetensi Minimum	Persen	0	26:05:00		27:04:00		28:03:00		29:02:00		30:01:00		30:01:00			30:01:00
		Persentase Lulusan SMK yang Bekerja sesuai Bidang Kompetensinya	Persen	52:02:00	56:05:00		56:05:00		57		57		58		58			58
		Persentase Lulusan SMA yang Diterima sesuai Jurusanannya	Persen	42:07:00	57:07:00		61:13:00		65:02:00		69:27:00		69:27:00		69:27:00			69:27:00
		Persentase Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus yang Terakreditasi Minimal B	Persen	83:17:00	100		100		100		100		100		100			100
		Persentase Pendidikan dan Tenaga Pendidikan yang Sejahtera	Persen	83:17:00	84:02:00		84.87		85.72		86.57		87.42		87.42			87.42
2.23.02	Program Pembinaan Perpustakaan	Jumlah Pembinaan perpustakaan yang dilaksanakan	perpustakaan		15	5.836.708.966	15	5.894.790.305	15	6.027.120.078	15	6.130.427.528	15	6.654.911.433	15	30.743.958.310	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
		Jumlah Pustakawan yang dibina	orang		50		50		50		50		50		50			
2.22.02	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase kekayaan dan keragaman budaya daerah yang direvitalisasi	Persen	52.94	55.88	1.917.498.365	58.82	2.878.491.755	61.76	2.460.299.273	64.8	2.166.170.137	67.64	2.035.298.592	67.64	11.457.758.122	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
2.22.03	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase kesenian tradisional yang direvitalisasi	Persen	30	40	535.115.823	42	803.300.025	44	686.595.146	46	604.512.596	48	567.990.305	48	3.197.513.894	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.04	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang ditempatkan sesuai analisis kebutuhan per wilayah	Persen	45.82	46.71	713.487.764	47:06:00	803.300.025	48:49:00	915.460.195	49:38:00	806.016.795	50:27:00	757.320.406	50:27:00	3.995.585.184	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	



Kode	Misi./Tujuan / Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcomes)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Sasaran 3: Meningkatnya Kemandirian Sosial Ekonomi Masyarakat	1. Angka Kemiskinan	Persen	6.80	7.00-6.73	-	6.70-6.00	-	6.10-5.90	-	5.80-5.70	-	5.60-5.20	5.60-5.20			
		2. Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	4.97	4.56	-	4.45	-	4.33	-	4.22	-	4.11	4.11			
1.06.02	Program Pemberdayaan Sosial	Jumlah SDM kesejahteraan sosial yang mengikuti pelatihan kompetensinya	orang	100	100	170.400.000	100	170.400.000	100	170.400.000	100	170.400.000	100	170.400.000	100	852.000.000	Dinas Sosial
2.14.04	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	Indeks Ketentraman	Indeks	61.2	62.71	45.701.011	64.83	65.889.634	66.95	108.644.715	69.31	146.863.486	71.1	192.572.453	71.1	19.100.000.000	DPPAPPKB
		Indeks Kemandirian		53.5	55.01		57.13		58.25		61.61		63.1		63.1		
		Indeks Kebahagiaan		55.2	56.7		58.83		60.95		63.31		65.6		65.6		
1.06.05	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Jumlah keluarga miskin yang terlayani	KPM (kelompok penerima manfaat)	1000	1100	160.000.000	1200	160.000.000	1300	160.000.000	1400	160.000.000	1500	160.000.000	1500	800.000.000	Dinas Sosial
1.06.04	Program Rehabilitasi Sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlarant yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	orang	5	5	1.057.500.000	6	2.065.000.000	7	2.168.000.000	8	2.225.000.000	9	2.297.000.000	9	9.812.500.000	Dinas Sosial
		Jumlah anak terlarant yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	orang	600	650		700		750		800		850		850		
		Jumlah lanjut usia terlarant yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	orang	40	42		44		46		48		50		52		
		Jumlah gelandangan dan pengemis yang dipulangkan ke kampung halamannya	orang	12	20		28		36		44		52		52		
1.03.11	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli	Orang	67	130	4.875.000.000	130	4.813.000.000	130	4.861.130.000	130	4.958.352.600	130	5.057.519.652	650	24.565.002.252	Dinas PUPR-PERKIM Provinsi Kalimantan Utara
2.07.03	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Persen		1.25	110.000.000	1.75	170.000.000	1.75	220.000.000	1.75	225.000.000	1.75	245.000.000	3.25	970.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Juta/Tenaga Kerja		183.77		187.4		191.71		195.68		199.65		199.65		
2.07.04	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas	Persen		45.73	100.000.000	47.73	90.000.000	47.73	90.000.000	47.73	95.000.000	47.73	140.000.000	47.73	515.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi



Kode	Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcomes)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
		daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.																i	
Misi 4. Mewujudkan Pemanfaatan Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Dengan Nilai Tambah, Berwawasan Lingkungan Yang Berkelanjutan, Secara Efisien, Terencana, Menyeluruh, Terarah, Terpadu, Dan Bertahap Dengan Berbasis Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi;																			
	Tujuan : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Point	78.98	78.27	-	78.46	-	78.62	-	78.90	-	79.05		79.05				
	Sasaran 1: Terwujudnya Pembangunan Rendah Karbon	Tingkat penurunan emisi GRK	Ton CO2-Eq	3,726,591	5,268,945	-	6,523,255	-	7,774,605	-	9,018,675		10,252,006		10,252,006				
2.11.03	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Pencapaian status mutu air Memenuhi	Persen	48	49	2.020.000.000	52	2.070.000.000	55	2.670.000.000	57	2.170.000.000	60	2.820.000.000	60	11.750.000.000		DLH	
2.11.08	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase orang/masyarakat/lembaga yang berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup	Persen	5	5	250.000.000	5	250.000.000	5	250.000.000	5	250.000.000	5	250.000.000	25	1.250.000.000		DLH	
2.11.09	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase masyarakat/Lembaga/Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang mendapat penghargaan dibidang Lingkungan Hidup	Persen	8	10	100.000.000	12,00	100.580.612	14,00	150.000.000	16,00	150.000.000	18,00	150.000.000	18,00	650.580.612		DLH	
	Sasaran 2 : Meningkatkan Kualitas Air, Udara Dan Lahan	Indeks Kualitas Air	Point	60.47	54.92		55.02		55.12		55.30	-	55.50		55.50				
		Indeks Kualitas Udara	Point	94.23	91.32		91.43		91.54		92.00	-	92.15		92.15				
		Indeks Tutupan Lahan	Point	79.03	99.53		99.89		100		100		100		100				
1.03.04	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Indeks kualitas air laut	Point	74.74	73.51		74.12		74.74		75.15		75.15		75.15				
		Jumlah Pengelolaan Sampah Regional	Unit	0	0	750.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000	25%	1.926.960.000	25%	2.751.960.000		Dinas PUPR-PERKIM Provinsi Kalimantan Utara	
1.03.12	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah kegiatan penyelenggaraan penataan ruang yang dilaksanakan	Kegiatan	2	41	10.367.454.328	29	10.367.454.328	29	10.367.454.328	31	10.367.454.328	31	10.367.454.328	152	51.837.271.640		Dinas PUPR-PERKIM Provinsi Kalimantan	



Kode	Misi./Tujuan / Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcomes)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2.11.11	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Sampah yang dikelola	Persen	60	68	350.000.000	76	350.000.000	84	1.000.000.000	92	1.250.000.000	100	1.250.000.000	100	4.200.000.000	Utara DLH
2.11.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Lingkungan Hidup (Pplh) Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan	Persentase pelaku usaha dan/Kegiatan kegiatan yang taat atas Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi	Persen	23	50	400.000.000	55	900.000.000	60	400.000.000	65	900.000.000	70	400.000.000	70	3.000.000.000	DLH
2.11.07	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mha), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan Pplh																Program Tidak Terpakai
2.11.08	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase orang/masyarakat/lembaga yang berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup	Persen	5	5	250.000.000	5,00	250.000.000	5,00	250.000.000	5,00	250.000.000	5,00	250.000.000	25,00	1.250.000.000	DLH
2.11.10	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditangani	Persen	100	100%	190.000.000	100%	190.000.000	100%	190.000.000	100%	190.000.000	100%	190.000.000	100%	950.000.000	DLH
3.29.02	Program Pengelolaan Aspek Kegeologian	Percentase Izin Pemanfaatan air tanah yang sesuai dengan aturan	Persen	23,65	33	190.000.000	51,52	175.000.000	68,18	195.000.000	84,85	220.000.000	100,00	150.000.000	100,00	930.000.000	DINAS ESDM
3.29.03	Program Pengelolaan Mineral Dan Batubara	IUP Taat aturan	Jumlah IUP	23	24	160.000.000	25	190.000.000	26	200.000.000	27	195.000.000	28	216.000.000	28	961.000.000	DINAS ESDM
2.11.04	Program Pengelolaan Keanekaraga	Persentase Peningkatan Luasan Taman Keaneekaragaman hayati	Persen	5	10	350.000.000	23	250.000.000	25	220.000.000	27	250.000.000	30	620.000.000	30	1.690.000.000	DLH



Kode	Misi, / Tujuan / Sasaran / Program / Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcomes)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
	man Hayati (Kehati)	(KEHATI)															
3.28.03	Program Pengelolaan Hutan	Persentase Peningkatan Produksi Hasil Hutan	Persen	10	10	2.700.000.000	10	2.970.000.000	10	2.070.696.603	10	3.208.342.023	10	2.385.929.155	50	13.334.967.241	UPTD KPH BULUNGAN
	Program Pengelolaan Hutan	Persentase Peningkatan Produksi Hasil Hutan	Persen	6	10	4.285.267.173	10	4.439.732.245	10	4.729.596.063	10	4.921.842.023	10	5.079.429.155	50	23.455.866.659	UPTD KPH MALINAU
	Program Pengelolaan Hutan	Persentase Peningkatan Produktivitas Hasil Hutan	Persen	50	10	4.289.367.173	10	4.393.832.245	10	4.423.696.063	10	4.415.342.023	10	4.453.929.155	10	21.976.166.659	UPTD KPH TARAKAN
	Program Pengelolaan Hutan	Persentase Peningkatan Produksi Hasil Hutan	Persen	6	10	3.750.000.000	10	3.750.000.000	10	3.950.000.000	10	4.150.000.000	10	4.450.000.000	50	20.050.000.000	UPTD KPH TANA TIDUNG
	Program Pengelolaan Hutan	Persentase peningkatan produktivitas hasil hutan	Persen	6	10	4.189.367.173	10	4.343.832.245	10	4.633.696.063	10	4.896.342.023	10	5.203.929.155	50	23.267.166.659	UPTD KPH NUNUKAN
	Program Pengelolaan Hutan	Persentase peningkatan produktivitas hasil hutan	Persen	6	10	3.650.000.000	10	3.340.1403.060	10	3.5467.375.784	10	37.712.384.032	10	39.608.022.373	50	178.139.185.249	DISHUT
3.28.04	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	Persentase Kawasan yang dikelola	Persen	5	10	650.000.000	10	750.000.000	10	950.000.000	10	950.000.000	10	1.050.000.000	10	4.350.000.000	DISHUT
3.28.05	Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	Jumlah ijin PS yang diterbitkan (58 Unit Tahun 2020)	Izin	10	10	895.000.000	10	895.000.000	10	945.000.000	10	995.000.000	10	1.045.000.000	10	4.775.000.000	UPTD KPH TANA TIDUNG
3.28.05	Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	Jumlah Ijin Perhutanan Sosial yang Diterbitkan	Izin	7	9		10	700.000.000	10	900.000.000	11	900.000.000	11	950.000.000	51	4.150.000.000	UPTD KPH TARAKAN
3.28.05	Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	Jumlah ijin PS yang diterbitkan	Izin	9	5	1.064.367.173	5	949.832.245	5	550.000.000	5	1.090.000.000	5	615.000.000	25	4.269.199.418	UPTD KPH BULUNGAN



Kode	Misi./Tujuan / Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcomes)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
	Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	Jumlah ijin PS yang diterbitkan	Izin	-	5 Izin	800.000.000	5 Izin	800.000.000	5 Izin	800.000.000	5 Izin	800.000.000	5 Izin	800.000.000	25 Izin	4.000.000.000	UPTD KPH Numukan
	Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	Jumlah ijin PS yang diterbitkan		-	9	400.000.000	9	400.000.000	9	400.000.000	9	550.000.000	9	700.000.000	45	2.450.000.000	UPTD KPH Malinau
	Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	Jumlah ijin PS yang diterbitkan		43	4	3.918.089.663	4	4.150.000.000	4	4.150.000.000	4	4.700.000.000	4	4.700.000.000	20	21.618.089.663	DISHUT
3.28.06	Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Das)	Luas DAS yang dipulihkan	Ha	100	200	3.100.000.000	250	2.600.000.000	100	2.600.000.000	100	2.600.000.000	100	3.000.000.000	750	13.900.000.000	Dinas Kehutanan Pemprov Kaltara
Misi 5: Mewujudkan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan, Pedalaman, Perkotaan, Pesisir Dan Perbatasan Untuk Meningkatkan Mobilisasi Dan Produktifitas Daerah Dalam Rangka Pemerataan Pembangunan.																	
	Tujuan: Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Dasar	Indeks Layanan Infrastruktur	Point	3,25	3,55		3,70		3,85		4,00		4,15		4,15		Dinas PUPR
	Sasaran 1: Meningkatkan Aksesibilitas Dan Konektivitas Antar Pusat-Pusat Kegiatan	Cakupan layanan transportasi antar pusat kegiatan	Persen	55	55	-	65	-	80	-	82	-	85	-	85	-	Dinas PUPR
1.03.10	Program Penyelenggaraan Jalan	Rasio kemantapan jalan	Persen	15,313	12,694	95.000.000.000	13,891	95.000.000.000	15,089	95.000.000.000	16,491	95.000.000.000	17,748	95.000.000.000	17,748	475.000.000.000	Dinas PUPR-PERKIM Provinsi Kalimantan Utara
1.03.	Program																Tidak ada



Kode	Misi./Tujuan / Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcomes)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
06	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase																	pada renstra Dinas PUPR-PERKIM Provinsi Kalimantan Utara
2.15.02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	1. persentase sarana dan prasarana angkutan jalan yang beroperasi;	Persen	25,00	25,00	6.078.308.473,94	25,00	10.773.346.578,02	25,00	11.189.116.124,19	25,00	12.249.354.990,37	37,50	13.180.178.136,36	37,50	118.839.300.000,00		Dishub
		2. persentase fasilitas keselamatan jalan yang tersedia;	Persen	39,90	42,00		43,50		45,00		46,00		47,00		47,00			
2.15.03	Program Pengelolaan Pelayaran	1. persentase prasarana angkutan pelayaran yang beroperasi;	Persen	57,58	57,58	15.051.278.907,35	57,58	7.475.770.694,95	57,58	9.287.045.688,19	57,58	8.491.300.449,63	57,58	10.284.115.511,10	57,58	105.150.000.000,00		DISHUB
	Sasaran 2: Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar	1. Cakupan layanan Air Bersih	Persen	56,10	63,73	-	64,92	-	66,11	-	67,30	-	68,50	-	68,50			Dinas PUPR-PERKIM Provinsi Kalimantan Utara
		2. Cakupan akses dan layanan telekomunikasi	Persen	91,28	85	-	88	-	91	-	95	-	98	-	98			
1.4.3	Program Kawasan Permukiman	Persentase Luas kawasan kumuh 10 - 15 Ha yang ditangani	Persen	2,502	5,75	5.450.000.000	5,75	5.450.000.000	5,75	5.450.000.000	5,75	5.450.000.000	5,75	5.450.000.000	28,75	27.250.000.000,00		
1.4.5	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU	Persen	0	20	7.000.000.000	20	7.000.000.000	20	7.000.000.000	20	7.000.000.000	20	7.000.000.000	100	35.000.000.000,00		Dinas PUPR-PERKIM Provinsi Kalimantan Utara
2.16.02	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi	Persen	0	60	5.325.000.000	65	5.484.750.000	70	5.592.649.454	75	6.205.849.454	80	6.200.000.000	80	28.808.248.908		Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian
2.16.03	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	1. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Persen	54	78,04	2.951.589.078	87,8	3.270.516.664	95,12	3.805.477.702	95,12	4.105.477.702	95,12	5.147.882.120	95,12	16.329.354.189		Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian
		2. Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Persen	65	70		75		85		90		95		95			
1.03.03	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan	Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang	Persen	0	0	1.000.000.000	0	1.077.200.000	25	1.516.100.000	0	1.516.100.000	50	1.516.100.000	50	6.625.500.000		SPAM regional belum tersedia



Kode	Misi./Tujuan / Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcomes)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
	Air Minum	memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota															
1.03.05	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rasio Jumlah Penduduk yang memperoleh layanan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah Domestik Regional	Persen	0	0	1.000.000.000	0	25.000.000	0	25.000.000	25%	1.077.200.000	0	25.000.000	25%	2.152.200.000	Dinas PUPR-PERKIM Provinsi Kalimantan Utara
1.03.07	Program Pengembangan Permukiman	Presentase Infrastruktur dasar yang terbangun pada Kawasan Permukiman Strategis Daerah Provinsi	Persen	22	35	16.366.000.000	56	13.062.000.000	61	12.691.000.000	66	12.691.000.000	71	14.258.000.000	71	69.068.000.000	Dinas PUPR-PERKIM Provinsi Kalimantan Utara
Misi 6. Mewujudkan Peningkatan Ekonomi Yang Berdaya Saing, Pertumbuhan Ekonomi Dan Mengurangi Kesenjangan Antar Wilayah Serta Meningkatkan Ketahanan Pangan Dengan Berorientasi Pada Kepentingan Rakyat Melalui Sektor Perdagangan, Jasa, Industri, Pariwisata, Dan Pertanian Dalam Arti Luas Dengan Pengembangan Infrastruktur Yang Berkualitas Dan Merata Serta Meningkatkan Konektivitas Antar Kabupaten/Kota																	
	Tujuan: Mewujudkan Ekonomi Daerah Yang Berdaya Saing	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	-1.11	5.4-6.3	-	5.36-6.26	-	5.05-5.95	-	5.20-6.10	-	5.25-6.15	-	5.25-6.15		
	Sasaran: Meningkatkan Produktivitas Dan Nilai Tambah Sektor Pertanian, Perdagangan, Jasa, Industri, Pariwisata	1. Laju Pertumbuhan PDRB sektor pertanian	persen	16.48	16.75		17.00		17.35		17.75		18.00		18.00		
		Nilai PDRB (ADHK)	Point	60743.20	67428.38		71152.52		75261.07		79826.93		84925.31		84925.31		
		2. Nilai Tukar Petani		103,43	103,50	-	103,57	-	103,65	-	103,75	-	104	-	104		
		3. Nilai Tukar Nelayan		102.85	104.41	-	104.71	-	104.93	-	105.11	-	105.26	-	105,26		
		4. Indeks Ketahanan Pangan	Point	71,90	72,10	-	72,50	-	73,10	-	73,70	-	74,30	-	74,30		
		Nilai PDRB (ADHB)	Point	100544,34	116258,22		126247,17		136635,64		148825,30		162016,21		162016,21		
		3. Laju Pertumbuhan PDRB sektor industri	Persen	-3,85	7,20	-	6,73	-	6,32	-	7,37	-	6,86	-	6,86		
		4. Laju Pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan	Persen	0,42	1,00	-	1,80	-	2,00	-	2,40	-	2,80	-	2,80		
		5. Pengeluaran per kapita	Point	8,756	8,483	-	8,234	-	7,985	-	7,736	-	7,487	-	7,487		
		6. Jumlah kunjungan wisatawan	Orang	562,813	590,954	-	626,411	-	670,260	-	723,880	-	796,268	-	796,268		
3.27.02	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Jumlah Produksi Tanaman Pangan	Ton	65596	68.246	4.995.007.189	69.611	5.126.838.036	71.003	5.242.028.724	72.423	5.275.615.316	73.872		73.872	26.596.400.469	DPKP
		Jumlah Produksi Hortikultura	Ton	123796	129.817		132.414		135.062		137.763		140.519		140.519		DPKP
		Jumlah Produksi Peternakan	Ton	9560	9.762		9.958		10.157		10.360		10.567		10.567		DPKP
		Jumlah Produksi Pekarbanan	Ton	513018	542.924		553.782		564.858		576.155		587.678		587.678		DPKP



Kode	Misi./Tujuan / Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcomes)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
3.27.03	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Peningkatan Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persen	100	100	1.121.377.895	100	1.229.872.401	100	1.385.192.481	100	1.520.763.836	100	1.472.329.131	100	6.729.535.745	DPKP
3.27.04	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase peningkatan derajat kesehatan hewan	Persen	0,5	1,5	776.676.081	2	802.805.727	2,5	895.558.404	3	968.204.483	3,5	975.446.010	3,5	4.418.690.705	DPKP
		Persentase Unit Usaha Peternakan yang Terlayani Pengajuan Permohonan Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan	Persen	100	25		25		25		25		25		25		
3.27.05	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase fasilitasi penanggulangan bencana	Persen	40	47	341.288.925	50	355.454.451	53	319.438.929	56	341.656.402	60	339.470.730	60	1.697.309.437	DPKP
3.27.06	Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase jumlah usulan usaha pertanian	Persen	100	82	650.886.735	85	573.466.515	87	591.021.839	90	611.886.379	100	598.931.523	100	3.026.192.991	DPKP
3.27.07	Program Penyuluhan Pertanian	Jumlah tenaga penyuluh dan petani yang meningkat kompetensinya	orang	163	734	1.304.211.248	734	1.270.157.239	734	1.284.934.121	734	1.280.913.899	734	1.232.153.018	734	6.372.369.525	DPKP
2.09.02	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	cakupan kelompok tani penerima manfaat	Persen	100	100	170.644.462	100	172.987.833	100	167.496.068	100	180.946.945	100	173.735.862	100	865.811.170	DPKP
2.09.03	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Peningkatan skor pph	Point	80,5	82,6	149.923.349	83,6	146.921.173	84,7	149.215.068	85,7	148.805.053	86,8	142.874.886	86,8	737.739.530	DPKP
2.09.04	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase desa rentan rawan pangan	Persen	20	14	24.377.780	11	23.696.963	9	23.928.010	7	23.808.809	5	22.859.982	5	118.671.544	DPKP
2.09.	Program	Persentase pangan segar asal	Persen	100	100	78.008.897	100	80.569.676	100	86.140.835	100	90.473.472	100	86.867.931	100	422.060.811	DPKP



Kode	Misi./Tujuan / Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcomes)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
05	Pengawasan Keamanan Pangan	tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan kemandirian pangan															
3.25. 02	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil	Persentase luasan pengelolaan ruang laut yang dikelola	Persen	41.37	50.88	1.250.000.000	69,34	1.263.750.000	78,85	1.277.651.250	88,36	1.033.364.331	97,87	1.044.731.339	97,87	5.869.496.920	DKP
3.25. 05	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Jumlah Pelaku Usaha Yang Diawasi	Pelaku Usaha	182	331	800.000.000	331	808.800.000	336	817.696.800	400	826.691.465	400	835.785.071	1.798	4.088.973.336	DKP
2.25. 03	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	25.804	33.326	2.935.000.000	34.411	4.224.083.697	35.381	4.788.479.281	36.259	7.590.806.739	37.061	9.122.740.748	176.438	28.661.110.465	DKP
3.25. 04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	536.898	601.358	6.350.000.000	614.370	6.412.013.002	626.010	6.474.708.147	636.540	6.538.092.939	646.153	6.602.174.963	3.124.430	32.376.989.051	DKP
3.25. 06	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah Ragam Produk olahan hasil perikanan dan pemasarannya	Produk	19	20	600.000.000	21	606.600.000	22	613.272.600	23	620.018.599	24	626.838.803	24	3.066.730.002	DKP (UPT MHP)
3.31. 02	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Persentase Perencanaan dan pembangunan industri yang terlaksana	Persen	0	17%	300.000.000	33%	970.000.000	50%	1.019.701.412	67%	1.020.000.000	100%	1.020.000.000	100%	4.330.000.000	Dinas Perindagkop dan UKM
3.30. 03	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Sarana Perdagangan Yang terbangun	Persen	25%	25%	3.150.000.000	25%	3.000.000.000	25%	3.399.004.706	-	3.500.000.000	-	4.150.000.000	100	17.200.000.000	Dinas Perindagkop dan UKM
3.30. 04	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting antar waktu	Persen	6%	6%	1.100.000.000	6%	620.000.000	6%	859.748.249	6%	1.390.000.000	6%	1.100.000.000	6%	5.070.000.000	Dinas Perindagkop dan UKM
3.30. 02	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	kontribusi nilai ekspor yang menggunakan Surat Keterangan Asal (SKA) dalam 1 (satu) tahun	Persen	87%	90%	150.000.000	93%	165.000.000	95%	179.947.308	97%	227.500.000	98%	210.000.000	98%	932.500.000	Dinas Perindagkop dan UKM
3.30. 05	Program Pengembang	Persentase Pertumbuhan Pelaku Ekspor Kalimantan	Persen	0%	16%	795.000.000	8%	760.000.000	5%	799.765.813	7%	895.000.000	7%	1.305.000.000	7%	4.555.000.000	Dinas Perindagkop



Kode	Misi./Tujuan / Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcomes)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
3.30.06	Program Standarisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase penurunan barang beredar yang tidak sesuai standar	Persen	3,5%	1%	600.000.000	1%	530.000.000	1%	479.859.488	0,5%	510.000.000	0,5%	420.000.000	4%	2.540.000.000	dan UKM Dinas Perindagkop dan UKM
3.30.07	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase Kontribusi produk dalam negeri dalam konsumsi rumah tangga	Persen	0	80%	170.000.000	80%	480.000.000	85%	629.815.578	90%	630.000.000	90%	630.000.000	90%	2.540.000.000	Dinas Perindagkop dan UKM
3.26.05	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM pariwisata dan ekraf yang ahli	Orang	483	500	169.218.754	500	224.218.754	500	298.479.617	500	297.218.754	500	386.623.974	2500	1.375.759.852	Dinas Pariwisata
3.26.02	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Peningkatan daya tarik destinasi yang dikembangkan	DTW	10	1	187.275.296	4	281.963.415	8	579.498.279	8	597.700.082	12	772.275.561	29	2.418.712.632	Dinas Pariwisata
3.26.03	Program Pemasaran Pariwisata	Jumlah pemasaran pariwisata	Kali	20	50	171.513.828	50	184.513.828	50	226.513.828	50	311.513.828	50	316.513.828	250	1.210.569.139	Dinas Pariwisata
3.26.04	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah produk usaha ekonomi kreatif	Produk	29	50	209.286.108	50	298.173.478	50	329.173.478	50	332.173.478	50	375.173.478	250	1.543.980.021	Dinas Pariwisata
Misi 7: Mewujudkan Kualitas Kerukunan Dan Kehidupan Beragama, Etnis Dan Latar Belakang Budaya Dalam Kerangka Semangat Kebhinnekaan Di Provinsi Kalimantan Utara.																	
	Tujuan: Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Yang Harmonis	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Point	78.00	79.25	-	80.60	-	81.70	-	82.80	-	83.30		83.30		
	Sasaran: Meningkatkan Toleransi Antar Umat Beragama	1. Skor Dimensi Toleransi	Point	77.98	78.18		79.25		80.08		81.15		82.51		82.51		
		2. Skor Dimensi Kesetaraan	Point	78.20	78.90		79.25		79.80		80.21		80.75		80.75		
		3. Skor Dimensi Kerjasama	Point	78.14	78.97		79.24		79.94		80.18		80.55		80.55		
8.01.02	Program Penguatan Ideologi	Persentase Kebijakan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan yang dilaksanakan	Persen	100	100	68.242.796	100	68.242.796	100	98.242.796	100	134.659.130	100	164.659.130	100	534.046.648	BAKESBAN GPOL



Kode	Misi./Tujuan / Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcomes)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
8.01.03	Pancasila dan Karakter Kebangsaan Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemihukada/Pilpres/Pileg	Persen	100	78	2.659.266.606	80	2.659.266.606	82	2.690.895.534	84	2.731.895.534	86	2.758.895.534	86	13.500.219.814	Bidang Politik Dalam Negeri
8.01.04	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	Persentase Organisasi Masyarakat yang Dibina dan Diawasi		100	100	44.553.109	100	44.553.109	100	55.553.109	100	73.553.109	100	86.353.109	100	304.565.545	Bidang Ketahanan Ekososbud, agama dan Ormas
Misi 8: Mewujudkan Ketahanan Energi Dan Pengembangan Pita Serta Mengembangkan Energi Terbarukan Dengan Pemanfaatan Potensi Daerah.																	
	Tujuan: Mewujudkan Ketahanan Energi Daerah	Nilai intensitas energi (TOE/Milyar Rupiah)	TOE	0,05	0.130		0.190		0.270		0.380		0.270		0,270		
	Sasaran: Meningkatkan Aksesibilitas Terhadap Penggunaan Listrik Dan Energi Baru Terbarukan	1. Cakupan rumah tangga teraliri listrik 2. Rasio elektrifikasi Terhadap 3. Nilai Bauran Energi	Persen Rasio Persen	164,479 77,97 0	177,382 85,16 3,93%		187,639 90,08 4,68%		198,045 95,08 5,43%		203,374 97,64 6,18%		208,295 100 6,93%		208,295 100,00 6,93%		
3.29.06	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	1.) Jumlah Rumah Tangga Berlistrik 2.) Rasio Elektrifikasi	KK Persen	167,300 80,32%	1,177,382 85,16%	517.500.000	1,187,639 90,08%	527.500.000	1,198,045 95,08%	545.000.000	1,203,374 97,64%	545.000.000	1,208,295 100%	555.000.000	1,208,295 100%	2.690.000.000	DINAS ESDM
3.29.05	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	Kapasitas Pembangkit EBT (TOE/Milyar Rupiah)	TOE/Milyar Rupiah	188,382 735	223,747 824	310.000.000	362,290885	260.000.000	213,6547	285.000.000	201,72855	295.000.000	201,22640	305.000.000	201,22640	1.455.000.000	DINAS ESDM
Misi 9: Mewujudkan Peningkatan Kualitas Kesetaraan Gender Dan Milenial Dalam Pembangunan																	
	Tujuan: Mewujudkan Kesetaraan Gender Dan Milenial Dalam Pembangunan	1. Indeks Pembangunan Gender	Point	87,00	87,87	-	89,10	-	90,60	-	92,10	-	94,30		94,30		



Kode	Misi, /Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcomes)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
	Sasaran 1: Meningkatkan Pengarus-Utamaan Gender	Rasio Angka Harapan Hidup Perempuan : Laki	Point	1,050	1,040	1,030	1,020	1,010	1	1							Dinkes
		Rasio Rata-Rata Lama Sekolah Perempuan : Laki	Point	0,910	0,940	0,950	0,970	0,980	1	1							Disdik
		Rasio Angka Harapan Lama Sekolah Perempuan : Laki	Point	1,020	1,015	1,010	1,006	1,003	1	1							Disdik
		Rasio Pengeluaran Perkapita Perempuan : Laki	Point	0,45	0,50	0,60	0,65	0,70	0,80	0,80							DPPA
2.08.02	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase ARG Pada Belanja Langsung APBD	Persen	2.37	2	45.701.011	3	65.889.634	3	108.644.715	3	146.863.486	3	192.572.453	3	559.671.300	DP3AP2KB Kaltara
2.08.03	Program Perlindungan Perempuan	Rasio kekerasan Terhadap Perempuan Termasuk TPPO(Per Seratus Ribu penduduk Perempuan)	Persen	49	49	45.701.011	47	65.889.634	45	108.644.715	43	146.863.486	41	192.572.453	39	559.671.300	DP3AP2KB Kaltara
2.08.04	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja TPAK Perempuan	Persen	47.62	47.64	45.701.011	47,66	65.889.634	47,68	108.644.715	47,70	146.863.486	47,72	192.572.453	47,74	559.671.300	DP3AP2KB Kaltara
2.08.07	Program Perlindungan Khusus Anak	Indeks Perlindungan Anank (IPA)	Indeks	63.1	63,71	45.701.011	64,00	65.889.634	65,00	108.644.715	66,00	146.863.486	67,00	192.572.453	68,00	559.671.300	DP3AP2KB Kaltara
	Sasaran 2: Meningkatkan Peran Serta Pemuda Dalam Pembangunan	Indeks Pembangunan Pemuda	Point	57.18	57.20		57.40		57.60		58		58.50		58.50		
2.19.02	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	1. Persentase pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	Persen		10	300.000.000	15	150.000.000	15,5	100.000.000	20	100.000.000	20,5	100.000.000	20,5	750.000.000	Dinas Pemuda dan Olahraga
		2. Persentase pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda	Persen		10		15		15,5		20		20,5		20,5		
		3. Persentase pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	Persen		10		15		15,5		20		20,5		20,5		
2.19.03	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	1. Persentase Atlet berprestasi yang dibina	Persen		10	500.000.000	12,5	300.000.000	15	200.000.000	17,5	190.000.000	20	400.000.000	20	1.590.000.000	Dinas Pemuda dan Olahraga
		2. Jumlah Sarana Prasarana Olahraga Prestasi yang Tersedia	Prasarana		1		1		1		1		1		5		



Kode	Misi./Tujuan / Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcomes)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
2.07.03	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Persen		1,25	110.000.000	1,75	170.000.000	1,75	220.000.000	1,75	225.000.000	1,75	245.000.000	3,25	970.000.000	Disnakertrans
		Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Juta/Tenaga Kerja		183,77		187,74		187,74		187,74		187,74		199,65		
2.19.04	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase pemuda yang difasilitasi dalam pendidikan kepramukaan	Persen		10	211.708.966	10,5	204.790.306	12	112.120.078	12,5	105.427.528	12,5	279.911.444	12,5	913.958.323	Dinas Pemuda dan Olahraga
Misi 10: Mewujudkan Perlindungan Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Umkm																	
	Tujuan: Mewujudkan Ketahanan Ekonomi Kerakyatan	Laju pertumbuhan koperasi dan UMKM	Persen	0	6,71	-	7,14	-	7,41	-	7,45	-	7,50		7,50		
	Sasaran: Meningkatkan Produktivitas Dan Daya Saing Koperasi Dan Umkm	Pertumbuhan Koperasi Sehat	Persen	-	5	-	5	-	5	-	5	-	5		5		
		Persentase pertumbuhan kredit perbankan kepada UMKM	persen	5,19	5,69		6,19		6,69		7,19		7,60		7,60		
2.17.06	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi																
2.17.07	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase UMKM Yang mengakses KUR	Persen	52,67	54,67	750.000.000	56,67	825.000.000	58,67	907.234.344	60,67	998.250.000	62,67	1.098.075.000	62,67	4.578.825.000	Dinas Perindagkop dan UKM
2.17.02	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam																Dinas Perindagkop dan UKM, Program tidak dilaksanakan lagi
2.17.03	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Jumlah koperasi yang melakukan RAT	Persen	13,64	18,28	180.000.000	23,58	198.000.000	26,89	209.938.526	31,52	222.000.000	36,16	400.000.000	36,16	1.210.000.000	Dinas Perindagkop dan UKM
2.17.05	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase pengurus/pengawas yang menyampaikan RAT	Persen	0	50	120.000.000	54	240.000.000	61	359.894.616	66	360.000.000	71	600.000.000	71	1.680.000.000	Dinas Perindagkop dan UKM



Kode	Misi./Tujuan / Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcomes)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
	Bagi Koperasi Yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi																
2.17.08	Program Pengembangan Umkm	Persentase UMKM yang diberikan pelatihan peningkatan daya saing dan fasilitasi pemasaran hasil produk UMKM	Persen	2%	3,5%	1.800.000.000	5,0%	1.800.000.000	6,5%	1.799.473.079	8%	1.800.000.000	9,5%	1.800.000.000	9,5%	9.000.000.000	Dinas Perindagkop dan UKM
2.17.04	Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usk Koperasi																Dinas Perindagkop dan UKM, Program tidak dilaksanakan lagi
Misi 11. Meningkatkan Kinerja Pembangunan Dan Investasi Daerah Dengan Melibatkan Pengusaha Dan Investor Lokal Serta Nasional.																	
	Tujuan: Mewujudkan Iklim Investasi Yang Kondusif	Rata-rata Pertumbuhan realisasi investasi	Persen	-43	10	-	28	-	3	-	3	-	8	-	8		
	Sasaran: Meningkatnya Kepastian Hukum Berinvestasi	Rata-rata Pertumbuhan Nilai Investasi	Persen	46	90	-	95	-	85	-	90	-	90	-	90		
2.18.04	Program Pelayanan Penanaman Modal	Indeks kepuasan Masyarakat (IKM) atas pelayanan perizinan	Persen	89,15%	90%	222.942.822	90,5%	208.043.714	91,5%	222.761.550	92%	300.426.317	92,50%	415.702.889	93,00%	1.369.877.292	DPMPSTP
2.18.06	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase informasi yang tersampaikan kepada masyarakat	Persen	100	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	55.000.000	100	65.000.000	100	270.000.000	DPMPSTP
2.18.02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase peningkatan jumlah pelaku usaha	Persen	100	100	130.930.500	100	146.785.930	100	181.498.173	100	251.317.710	100	275.936.815	100	986.469.128	DPMPSTP
2.18.03	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase peningkatan jumlah peminat investasi	Persen	100	100	65.410.659	100	75.576.229	100	81.711.540	100	93.954.780	100	135.417.890	100	452.071.098	DPMPSTP
2.18.05	Program Pengendalian	Persentase peningkatan realisasi investasi PMA dan	Persen	43	90	90.519.834	95	104.161.766	85	111.651.727	85	127.777.930	90	171.390.540	93	605.501.797	DPMPSTP



Kode	Misi/Tujuan / Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcomes)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Pelaksanaan	PMDN															
	Misi 12: Memberi Bantuan Pengembangan Sektor Produktif Dan Potensi Strategis Di Setiap Desa Dan Kelurahan Melalui Pengembangan Produk Lokal Masing-Masing Kabupaten/Kota;																
	Tujuan: Mewujudkan Pemerataan Pendapatan Antar Wilayah Yang Berkeadilan	Indeks Williamson	Poin	0,18	0,18		0,17		0,16		0,16		0,15		0,15		
	Sasaran : Menurunnya Kesenjangan Pendapatan Masyarakat	Indeks Gini	Poin	0,292	0,284		0,283		0,282		0,281		0,280		0,280		
3.31.02	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Persentase Perencanaan dan pembangunan industri yang terlaksana	Persen	0	17	300.000.000	33	970.000.000	50	1.019.701.412	67	1.020.000.000	100	1.020.000.000	100	4.330.000.000	Dinas Perindagkop dan UKM
2.09.03	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Peningkatan skor pph	Poin	80,5	82,6	149.923.349	83,6	146.921.173	84,7	149.215.068	85,7	148.805.053	86,8	142.874.886	86,8	737.739.530	DPKP
3.28.03	Program Pengelolaan Hutan	Persentase peningkatan produktivitas hasil hutan	Persen	6	10	31.650.000.000	10	33.401.403.060	10	35.467.375.784	10	37.712.384.032	10	39.608.022.373	50	178.139.185.249	DISHUT
3.25.06	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah Ragam Produk olahan hasil perikanan dan pemasarannya	Produk	19	20	600.000.000	21	606.600.000	22	613.272.600	23	620.018.599	24	626.838.803	24	3.066.730.002	DKP KALTARA
3.26.04	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah produk usaha ekonomi kreatif	Produk	29	50	209.286.108	50	298.173.478	50	329.173.478	50	332.173.478	50	375.173.478	250	1.543.980.021	Dinas Pariwisata
	Misi 13: Mewujudkan Pembangunan Yang Berbasiskan Rt/Komunitas Dalam Upaya Gerakan Membangun Desa Menata Kota Serta Memberi Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota Sebagai Pilar Provinsi Sesuai Kemampuan Apbd Setiap Tahun.																
	Tujuan: Mewujudkan Pembangunan Desa Yang Berkualitas	Proporsi desa tertinggal dan desa sangat tertinggal	Persen	52,34	40,72	-	36,24	-	31,32	-	29,95	0-	20,13	-	20,13	-	
	Sasaran:	1. Jumlah Desa Mandiri	Jumlah	19	34	-	37	-	40	-	43	-	46	-	46	-	



Kode	Misi./Tujuan / Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcomes)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
	Meningkatnya Kemandirian Desa	2. Jumlah desa tertinggal dan sangat tertinggal	Jumlah	234	182		162		140		116		90		90		
2.13.02	Program Penataan Desa	Persentase Desa yang dilakukan fasilitasi penataan Desanya	persen	0	6	67.018.859	11	0	17	54.261.456	22	0	28	0	84	121.280.315	DPMD
2.13.03	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase Kabupaten yang melakukan peningkatan Kerjasama Desa	Persen	25	25	0	50	0	75	90.344.759	100	102.284.283	100	117.769.650	100	310.398.693	DPMD
2.13.04	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Kabupaten/Kota yang Pemerintahan desa dan kelurahannya telah dibina sesuai regulasi yang berlaku	Persen	25	100	358.762.713	100	446.826.667	100	385.340.329	100	497.752.516	100	573.109.944	100	2.261.792.169	DPMD
2.13.05	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Kabupaten/Kota yang Lembaga Kemasyarakatan dibina	Persen	100	100	468.141.988	100	491.280.831	100	582.659.195	100	659.733.626	100	759.614.245	5	2.961.429.885	DPMD
Misi 14: Mewujudkan Tanjung Selor Menjadi DOB Sebagai Ibu Kota Provinsi Kalimantan Utara Serta Beberapa Dob Yang Telah Diusulkan Yaitu; Kota Sebatik, Kabupaten Kabudaya, Kabupaten Krayan, Kabupaten Apo Kayan.																	
	Tujuan: Mewujudkan Percepatan Pembentukan DOB	Tahapan Pembentukan DOB yang dipenuhi	Kecamatan	-	-	-	4	-	1	-	-	-	-	-	5		
	Sasaran: Meningkatkan Pengembangan Wilayah Administrasi Kecamatan Untuk Pemenuhan Syarat Pembentukan Dob Yang Diusulkan	Jumlah wilayah administrasi pemerintahan yang dikembangkan	Kecamatan	-	-	-	4	-	1	-	-	-	-	-	5		
5.06.02	Program Pengelolaan Perbatasan	persentase kecamatan perbatasan yang dikelola	Persen	-	50	1.500.000.000	55	1.550.000.000	60	1.750.000.000	65	2.099.000.000	70	2.092.000.000	Baik	2.092.000.000	Badan Pengelola Perbatasan
1.03.08	Program Penataan Bangunan Gedung	Presentase Jumlah Bangunan Gedung yang refresentatif untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Persen	22%	22%	123.398.243.978	22%	129.530.799.59	22%	150.395.462.59	31%	162.186.039.99	53%	187.725.169.23	53%	753.235.715.39	Dinas PUPR-PERKIM Provinsi Kalimantan Utara

d. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan

Tahapan pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun periode 2021-2026 memasuki tahun ketiga. Dalam rangka mencapai visi pembangunan Provinsi Kalimantan Utara Tahun periode 2021-2026, maka ditetapkan tema atau fokus pembangunan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023 yaitu **“Pengembangan Industri Dan Peningkatan Nilai Tambah Produk Industri Berbasis Sumber Daya Lokal”**.

Tema ini mengisyaratkan bahwa pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2023 harus diarahkan pada pengembangan dan penguatan industri secara luas, meliputi: (1) industri primer, seperti pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan dan pertambangan; (2) industri pengolahan; (3) industri ketenagalistrikan; (4) industri perdagangan dan jasa; (5) industri pariwisata dan ekonomi kreatif; (6) industri kecil dan menengah, dan industri lainnya. Karena, industri industri tersebut merupakan industri yang menopang hajat hidup masyarakat sekaligus sebagai industri yang mendorong terjadinya peningkatan pertumbuhan ekonomi Kalimantan Utara serta dapat memberikan nilai tambah sesuai dengan rantai nilai industrinya. Selain itu, pengembangan dan penguatan industri-industri tersebut berarti mendorong terjadinya peningkatan investasi. Namun, peningkatan investasi dalam industri harus didukung oleh pembangunan dan pengembangan infrastruktur.

Adapun Program dan Kegiatan yang menunjang pembangunan daerah berdasarkan RKPD Tahun 2023 sebagai berikut



Tabel 1.6

Kegiatan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023

NO	DINAS/BIRO/BADAN	CABANG	KEGIATAN
1	DINAS PENDIDIKAN		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
			Administrasi Umum Perangkat Daerah
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan
			Pengelolaan Pendidikan Khusus
			Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi
			Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
			Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi
			Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi
			Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi
			Pengelolaan Museum Provinsi
		CABANG DINAS TARAKAN	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
			Administrasi Umum Perangkat Daerah
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas
		CABANG DINAS NUNUKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
			Administrasi Umum Perangkat Daerah
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	



NO	DINAS/BIRO/BADAN	CABANG	KEGIATAN
		CABANG DINAS MALINAU	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan
		UPTD TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas
		UPT TAMAN BUDAYA	Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
2	DINAS KESEHATAN		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)



NO	DINAS/BIRO/BADAN	CABANG	KEGIATAN
			Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi
			Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi
			Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi
3	RSUD TARAKAN		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Peningkatan Pelayanan BLUD
			Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
			Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi
			Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi
			Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi
4	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
			Administrasi Umum Perangkat Daerah
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota
			Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota



NO	DINAS/BIRO/BADAN	CABANG	KEGIATAN
			Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi Penyelenggaraan Jalan Provinsi Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang provinsi Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah



NO	DINAS/BIRO/BADAN	CABANG	KEGIATAN
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
7	DINAS SOSIAL		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi
		UPTD PANTI SOSIAL	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti
8	DINASTENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah



NO	DINAS/BIRO/BADAN	CABANG	KEGIATAN
			Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi Pengelolaan Informasi Pasar Kerja Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan
9	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Provinsi Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi



NO	DINAS/BIRO/BADAN	CABANG	KEGIATAN
			<p>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal</p> <p>Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal</p>
		UPTD PERLINDUNGAN PEREPUAN DAN ANAK	<p>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</p> <p>Administrasi Umum Perangkat Daerah</p> <p>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p>
10	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN		<p>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</p> <p>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</p> <p>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</p> <p>Administrasi Umum Perangkat Daerah</p> <p>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</p> <p>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi</p> <p>Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan</p> <p>Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan</p> <p>Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman</p> <p>Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan</p> <p>Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain</p> <p>Penataan Prasarana Pertanian</p> <p>Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</p> <p>Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi</p> <p>Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha</p>



NO	DINAS/BIRO/BADAN	CABANG	KEGIATAN
			Produk Hewan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan
		UPT LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penataan Prasarana Pertanian Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan
11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional
		UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup



NO	DINAS/BIRO/BADAN	CABANG	KEGIATAN
12	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pelayanan Pendaftaran Kependudukan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan Pelayanan Pencatatan Sipil Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi Penyediaan Profil Kependudukan
13	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat Fasilitasi Kerja Sama antardesa yang Menjadi Kewenangan Provinsi Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota
14	DINAS PERHUBUNGAN		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah



NO	DINAS/BIRO/BADAN	CABANG	KEGIATAN
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
			Administrasi Umum Perangkat Daerah
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi
			Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi
			Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B
			Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi
			Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi
			Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan
			Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
			Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
			Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
			Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Intern
			Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
			Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional
			Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
			Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian
15	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
			Administrasi Umum Perangkat Daerah
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah



NO	DINAS/BIRO/BADAN	CABANG	KEGIATAN
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi
16	DINAS PENANAMAN MODAL		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi
17	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi



NO	DINAS/BIRO/BADAN	CABANG	KEGIATAN
			Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga
			Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi
18	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
			Administrasi Umum Perangkat Daerah
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi
			Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi
			Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi
			Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi
			Pencarian Arsip Statis Provinsi yang dinyatakan Hilang
19	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
			Administrasi Umum Perangkat Daerah
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi
			Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil
			Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil
			Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
			Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi
			Pendaftaran Kapal Perikanan di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT
			Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut
			Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil
			Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
			Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah



NO	DINAS/BIRO/BADAN	CABANG	KEGIATAN
		UPT PELABUHAN PERIKANAN TENGGAYU II	Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
20	DINAS PARIWISATA		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan
21	DINAS KEHUTANAN		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi



NO	DINAS/BIRO/BADAN	CABANG	KEGIATAN
		UPT KPH KABUPATEN BULUNGAN	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
			Administrasi Umum Perangkat Daerah
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi
			Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara
			Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi
			Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)
			Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan
		UPT KPH KOTA TARAKAN	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
			Administrasi Umum Perangkat Daerah
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi
			Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)
			Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung
			Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara
			Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi
		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	
		UPT KPH KABUPATEN NUNUKAN	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
			Administrasi Umum Perangkat Daerah
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi
			Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)
			Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi
			Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)
			Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	



NO	DINAS/BIRO/BADAN	CABANG	KEGIATAN
		UPT KPH KABUPATEN MALINAU	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi
		UPT KPH KABUPATEN TANA TIDUNG	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan
22	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi



NO	DINAS/BIRO/BADAN	CABANG	KEGIATAN
			Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi
			Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana
23	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
			Administrasi Umum Perangkat Daerah
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
			Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan
			Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah
			Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)
			Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas
			Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi
			Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan
			Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi
			Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota
			Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota
			Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
			Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi
			Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi
			Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPI, IUKI dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)
			Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi



NO	DINAS/BIRO/BADAN	CABANG	KEGIATAN
24	SEKRETARIAT DAERAH		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan Fasilitasi Keprotokolan Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Pelaksanaan Otonomi Daerah Fasilitasi Kerjasama Daerah Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan Fasilitasi Bantuan Hukum Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah
25	INSPEKTORAT		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah



NO	DINAS/BIRO/BADAN	CABANG	KEGIATAN
			Administrasi Umum Perangkat Daerah
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Penyelenggaraan Pengawasan Internal
			Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
			Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
			Pendampingan dan Asistensi
26	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
			Administrasi Umum Perangkat Daerah
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
			Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
			Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
			Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
			Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
			Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
			Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
			Pengembangan Inovasi dan Teknologi
27	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
			Administrasi Umum Perangkat Daerah
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
			Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota
			Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
			Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
			Pengelolaan Barang Milik Daerah
	BADAN PENDAPATAN		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah



NO	DINAS/BIRO/BADAN	CABANG	KEGIATAN
28	DAERAH		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
			Administrasi Umum Perangkat Daerah
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
		UPTD BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
			Administrasi Umum Perangkat Daerah
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
		UPTD BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA TARAKAN	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
			Administrasi Umum Perangkat Daerah
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		UPTD BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
			Administrasi Umum Perangkat Daerah
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		UPTD BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MALINAU	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
			Administrasi Umum Perangkat Daerah
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		UPTD BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
			Administrasi Umum Perangkat Daerah
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			



NO	DINAS/BIRO/BADAN	CABANG	KEGIATAN
			Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
29	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
			Administrasi Umum Perangkat Daerah
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
			Mutasi dan Promosi ASN
			Pengembangan Kompetensi ASN
			Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
			30
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Pengembangan Kompetensi Teknis			
Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional			
31	SEKRETARIAT DPRD		
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
			Administrasi Umum Perangkat Daerah
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD
			Pembahasan Kebijakan Anggaran
			Peningkatan Kapasitas DPRD
			Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
			Fasilitasi Tugas DPRD
			Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
			Layanan Administrasi DPRD
BADAN PENGHUBUNG			Administrasi Umum Perangkat Daerah



NO	DINAS/BIRO/BADAN	CABANG	KEGIATAN
32			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pelaksanaan Pelayanan Penghubung
33	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan Monitoring dan Evaluasi
34	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan Pemerintahan terdiri dari urusan Pemerintahan absolut, urusan Pemerintahan konkruen, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintah absolut merupakan urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan pemerintah konkruen adalah urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Urusan Pemerintah konkruen yang menjadi kewenangan daerah adalah Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitandengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar. Pelayanan dasar dimaksud meliputi pelayanan dasar bidang pendidikan, pelayanan dasar bidang kesehatan, pelayanan dasar bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, pelayanan dasar bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pelayanan dasar bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, pelayanan dasar bidang sosial.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, desentralisasi diselenggarakan dengan pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah untuk mengurus sendiri urusan pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah antara lain dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggungjawab, dengan pengertian bahwa penanganan urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah dalam rangka memberdayakan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Agar otonomi daerah dapat dilaksanakan sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai, Pemerintah wajib melakukan pembinaan dan pengawasan berupa pemberian pedoman, standar, arahan, bimbingan, pelatihan, supervisi, pengendalian, koordinasi, monitoring dan evaluasi. Hal ini dimaksudkan agar kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah tetap sejalan dengan tujuan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka Standar Pelayanan Minimal (SPM) tidak lagi dimaknai dalam kontekstual sebagai norma, standar, prosedur, dan kriteria. Batasan pengertian SPM secara tekstual memang tidak berubah, yaitu bahwa SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal, namun terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar, kriteria penetapan SPM, dan mekanisme penerapan SPM.

Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari Pemerintah Daerah sesuai dengan ukuran- ukuran yang ditetapkan oleh Pemerintah. Oleh karena itu, baik dalam perencanaan maupun penganggaran, wajib diperhatikan prinsip-prinsip SPM yaitu sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian. SPM juga diposisikan untuk menjawab isu-isu krusial dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dalam pelayanan dasar yang bermuara pada terciptanya kesejahteraan masyarakat. Upaya ini sangat sesuai dengan apa yang secara normatif dijamin dalam konstitusi sekaligus untuk menjaga kelangsungan kehidupan berbangsa yang serasi, harmonis dan utuh dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Untuk memberikan pelayanan publik secara maksimal kepada masyarakat, yang berorientasi terhadap terwujudnya pelayanan publik yang prima, maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam menyelenggarakan pelayanan dasar dengan tujuan peningkatan pelayanan prima yang secara langsung menyentuh kepentingan masyarakat umum sehingga terwujud suatu pelayanan prima menuju *Good Governance*. Penerapan SPM juga dianggap sebagai tindakan yang logis bagi Pemerintah Daerah karena:

- a. Kemampuan masing-masing daerah sangat berbeda, sehingga sulit bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan semua kewenangan/fungsi yang ada. Keterbatasan dana, sumber daya aparatur, kelengkapan, dan faktor lainnya membuat Pemerintah Daerah harus mampu menentukan jenis-jenis pelayanan yang minimal harus disediakan bagi masyarakat.
- b. Kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah menjadi lebih terukur SPM yang disertai tolok ukur pencapaian kinerja yang logis dan riil akan memudahkan bagi masyarakat untuk memantau kinerja aparatnya sebagai salah satu unsur terciptanya penyelenggaraan yang baik.

a. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Laporan Standar Pelayanan Minimal adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor Tahun 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penerapan Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Penerapan Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di daerah Kabupaten/ Kota;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
12. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

b. Kebijakan Umum

Strategi pembangunan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan dan program-program. Kebijakan merupakan arah/keputusan yang ditetapkan oleh instansi pemerintah sebagai dasar untuk

dijadikan pedoman, pegangan/petunjuk dalam melaksanakan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran. Kebijakan dan program pembangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara untuk mencapai sasaran meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan kebijakan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, dengan program penyempurnaan sistem manajemen pelayanan publik. Sistem yang demikian diharapkan akan dapat memenuhi kebutuhan data dan informasi diberbagai tingkatan administrasi dalam rangka peningkatan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

SPM yang telah ditetapkan Pemerintah menjadi salah satu acuan bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara untuk menyusun perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menyusun rencana pencapaian SPM yang memuat target tahunan pencapaian SPM dengan mengacu pada batas waktu pencapaian SPM sesuai dengan Peraturan/Keputusan Menteri. Rencana pencapaian SPM dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD). Target tahunan pencapaian SPM dituangkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) sesuai klasifikasi belanja daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Kebijakan umum penyelenggaraan Pemerintahan di Provinsi Kalimantan Utara sesuai dengan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026 yaitu ***“Terwujudnya Provinsi Kalimantan Utara yang Berubah, Maju dan Sejahtera”***.

1.

Kebijakan Umum Bidang Pendidikan

Dalam upaya menyelenggarakan pendidikan yang bermutu dan berkualitas serta merata diperlukan peran serta berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun masyarakat. Dalam hal mewujudkan terlaksananya layanan pendidikan yang berkualitas bagi seluruh masyarakat Provinsi Kalimantan Utara maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berupaya mendukung tercapainya keberhasilan visi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026 yaitu ***“Terwujudnya Provinsi Kalimantan Utara yang Berubah, Maju dan Sejahtera”*** dan misi ke- 3 yaitu mewujudkan pembangunan Sumber Daya

Manusia yang sehat, cerdas, kreatif, inovatif, berakhlak mulia, produktifitas dan berdaya saing dengan berbasiskan Pendidikan wajib belajar 16 Tahun dan berwawaskan, hal tersebut sejalan dengan Peraturan Pemerintah nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), yang menitik beratkan pada pemenuhan layanan dasar bagi masyarakat. Berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam mewujudkan layanan pendidikan yang bermutu dan berkualitas bagi masyarakat, maka penting untuk menyelaraskan kebijakan bidang pendidikan dalam rangka menunjang misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Untuk mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang merata, berkualitas dan terjangkau dapat dilaksanakan dengan cara meningkatkan akses dan kualitas. Untuk membangun kemandirian tersebut dilaksanakan dengan cara meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan bagi masyarakat di wilayah Provinsi Kalimantan Utara.

2. Kebijakan Umum Bidang

Kesehatan

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan menjelaskan bahwa fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitative yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

Fasilitas yang seharusnya seperti Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) seperti puskesmas pembantu, puskesmas induk, rumah sakit umum pratama, klinik pratama, praltek dokter serta Fasilitas Kesehatan Rujukan seperti rumah sakit umum, dan fasilitas kefarmasian.

Dalam implementasi sistem kesehatan nasional prinsip *managed care* diberlakukan, dimana terdapat 4 (empat) pilar yaitu Promotif, Preventif, Kuratif dan Rehabilitatif. Prinsip ini akan memberlakukan pelayanan kesehatan akan difokuskan di Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) untuk itu kualitas fasilitas kesehatan ini harus dijaga, mengingat efek dari implementasi Jaminan Kesehatan Nasional ke depan akan mengakibatkan naiknya permintaan (*demand*) masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan karena kepastian jaminan sudah didapatkan. Salah satu upaya terhadap penguatan fasilitas kesehatan diharapkan tenaga-tenaga medis maupun non medis yang ada memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam menangani pasien dan yang tidak kalah penting adalah *human relation* petugas kesehatan terhadap pasien dan keluarga pasien.

3. Kebijakan Umum Bidang

Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa setiap OPD dalam menyusun Rencana Strategi (Renstra) OPD tidak lagi mencantumkan visi dan misi, karena setiap OPD berpedoman pada visi dan misi Kepala Daerah. Oleh karena itu, setiap Perangkat Daerah menyusun Renstra dengan dimulai dari Tujuan dan Sasaran. Adapun tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara sebagai berikut:

- Tujuan

Dalam rangka mencapai visi dan misi Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026, harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional, berupa tujuan dan sasaran organisasi. Tujuan dari Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara adalah:

- Meningkatkan ketatalaksanaan kelembagaan sesuai tugas pokok dan fungsi kelembagaan;
- Meningkatkan pemenuhan prasarana dasar wilayah;
- Meningkatkan ketahanan pangan dan sumber daya air;
- Meningkatkan rumah layak huni dan terjangkau;
- Meningkatkan konektivitas daerah.

- Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Untuk mencapai tujuan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara tahun 2021-2026 tersebut di atas, ditetapkan sasaran sebagai berikut :

- Mewujudkan Kawasan Permukiman yang layak dan berkelanjutan;
- Mewujudkan Infrastruktur Sumber Daya Air yang berkualitas;

- Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Perumahan yang terpadu dan berkelanjutan; dan
- Mewujudkan Infrastruktur jalan dan jembatan yang mantap dan terhubung antar daerah.

4. Kebijakan Umum Bidang

Trantibumlinmas

Penyusunan Kebijakan umum daerah harus didasarkan pada Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih dengan memperhitungkan semua potensi, peluang dan kendala serta ancaman yang mungkin timbul. Oleh karena itu kebijakan umum disusun atas dasar kebutuhan nyata daerah seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan partisipasi dan peran serta masyarakat, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan prasarana dasar, serta pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Utara 2021 – 2026 yang merupakan penjabaran visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara perlu disusun kebijakan umum pembangunan daerah yang berkaitan dengan program Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara sebagai arahan dalam merumuskan kebijakan setiap OPD maupun yang bersifat lintas OPD guna mencapai kinerja yang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Cakupan pelayanan dasar yang menjadi indikator SPM Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan amanat Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal, maka seiring dengan terbitnya produk legislasi nasional seperti Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dilanjutkan dengan turunannya dalam produk legislasi daerah Provinsi Kalimantan Utara yang mengatur kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok, fungsi dan uraian tugas serta tata kerjanya, telah menyebabkan perubahan cakupan indikator SPM Satuan Polisi Pamong Praja antara lain : Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum;

Sebagian program pembangunan daerah dan kegiatan yang tertuang dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Utara (2021-2026) yang tercover dalam cakupan cakupan yang menjadi indikator SPM Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana dijelaskan diatas, merupakan dampak dari perubahan regulasi yang telah mengakibatkan 'meluasnya' cakupan indikator kelembagaannya pada tahun 2023 ini, antara lain:

1. Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum lintas daerah kab/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi
2. Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur

5.

Kebijakan Umum Bidang Sosial

Pembangunan bidang kesejahteraan sosial merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat, dengan memastikan kehadiran Negara dalam menyelesaikan permasalahan ditengah-tengah masyarakat secara cepat, efektif, dan bermartabat. Otonomi Daerah di Indonesia memasuki babak baru dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang mengamanatkan bahwa urusan sosial adalah urusan wajib dan pelayanan dasar bagi Pemerintah Daerah yang harus menjadi prioritas pembangunan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Dalam hal kewenangan dalam penanganan PPKS maka penyelenggaraan rehabilitasi sosial bagi PPKS yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi adalah penanganan langsung di dalam panti kecuali eks Napza dan HIV/ AIDS. Selanjutnya melalui Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), jenis pelayanan dasar pada SPM Sosial Daerah Provinsi terdiri atas :

1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam panti.
2. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam panti.
3. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam panti.
4. Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di dalam panti.
5. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah Tanggap Cepat Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Provinsi

Dalam rangka upaya menuju pencapaian visi pembangunan daerah Kalimantan Utara tahun 2021-2026 yang sesuai dengan Urusan Sosial, misi Pembangunan Daerah, Yaitu:

- Mewujudkan pembangunan Sumber Daya Manusia yang sehat, cerdas, kreatif, inovatif, berakhlak mulia, produktifitas dan berdaya saing dengan berbasiskan Pendidikan wajib belajar 16 Tahun dan berwawaskan;

Muatan Standar Pelayanan Minimal telah terintegrasi ke dalam Kebijakan Umum Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yang tertuang di dalam RPJMD

Kalimantan Utara Tahun 2021-2026, untuk urusan wajib yang terkait dengan Urusan Sosial, baik dalam rencana penerapan maupun capaian SPM.

c. Arah Kebijakan

Strategi pembangunan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan dan program-program. Kebijakan merupakan arah/ketentuan yang ditetapkan oleh instansi pemerintah sebagai dasar untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam melaksanakan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran. Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi kumpulan beberapa kegiatan yang sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai tujuan dan sasaran.

1.

Arah Kebijakan Bidang Pendidikan

Pendidikan berkualitas yang merata di seluruh wilayah Kaltara dapat dilihat dari luasnya aksesibilitas serta kemudahan masyarakat dalam menjangkau layanan Pendidikan yang ada di Kalimantan Utara. Hal ini secara tidak langsung akan meningkatkan angka partisipasi penduduk usia pendidikan menengah serta mutu dan kualitas pelayanan pendidikan sehingga mendukung terwujudnya Provinsi Kalimantan Utara yang Berubah, Maju dan Sejahtera.

Adapun untuk keperluan pengukuran ketercapaian tujuan pembangunan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan diperlukan sejumlah sasaran yang menggambarkan kondisi yang harus dicapai. Sasaran untuk tiap tujuan tersebut adalah sebagai sasaran strategis untuk mewujudkan Pendidikan Berkualitas Yang Merata Di Seluruh Wilayah Kaltara dengan :

- 1) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pendidikan; dan
- 2) Meningkatnya mutu pendidikan

Mengacu kepada tujuan dan sasaran Disdikbud, maka strategi pembangunan pendidikan dan kebudayaan di Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut.





Tabel 1. 7

Strategi Pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2021-2026

VISI (RPJMD)		TERWUJUDNYA PROVINSI KALIMANTAN UTARA YANG BERUBAH, MAJU, DAN SEJAHTERA			
MISI (RPJMD)		Mewujudkan pembangunan SumberDaya Manusia yang sehat, cerdas, kreatif, inovatif, berakhlak mulia, produktif dan berdaya saing dengan berbasiskan Pendidikan wajib belajar 16 tahun dan berwawasan			
Tujuan		Sasaran		Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya pendidikan berkualitas yang merata di seluruh wilayah Kaltara	1	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pendidikan	1	Optimalisasi angka partisipasi pendidikan Menengah dan SLB	Memenuhi kebutuhan daya tampung untuk semua jenjang pendidikan melalui pembangunan maupun rehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan
					Membina sekolah swasta agar kualitasnya seajaajr atau bahkan lebih baik dari sekolah negeri dengan tetap mempertahankan keunggulan tertentu sesuai ciri khasnya sebagai sekolah swasta
					Mengoptimalkan pelaksanaan SPM bidang pendidikan melalui pemberian perlengkapan dasar peserta didik dan pelaksanaan program retrieval untuk anak putus sekolah
					Membina satuan pendidikan menengah untuk membuka pendidikan inklusif untuk membantu anak-anak yang memiliki kondisi tidaksekolah atau berkebutuhan khusus
					Menyediakan layanan pendidikan untuk anak dari daerah 3T yang tidak memungkinkan pembangunan sekolah di daerahnya melalui sekolah garis depan atau sekolah berasrama
					Memberikan mekanisme belajar (seperti cara penyampaian materi pelajaran dan pelaksanaan asesmen) yang disesuaikan dengan kondisi hidup anak, khususnya yang berada di wilayah pedalaman
					Mendukung pendidikan berbasis masyarakat untuk dapat mendorong anak-anak yang tidak bersekolah untuk kembali mengikuti Pendidikan baik jalur formal maupun nonformal
					Membuka ruang kerja sama yang erat dengan DU/DI, dimana DU/DI dapat langsung terlibat dalam peningkatan kualitas pembelajaran termasuk mengembangkan kurikulum pada SMK yang disesuaikan dengan (1) Permintaan pasar dan kebutuhan DU/DI (Demand Driven), (2)Kebersambungan (link) antara pengguna lulusan pendidikan dan penyelenggaraan pendidikan kejuruan serta, dan (3) kecocokan (match) antara pekerja dengan pemberi kerja
					Mengembangkan SMK menjadi Centers of Excellence guna mempercepat peningkatan kapasitas guru dan pembelajaran siswa-siswi SMK di Kalimantan Utara



				<p>Optimalisasi program Sekolah penggerak di satuan pendidikan SMA dan SLB melaluipenguatan sumberdaya manusia (SDM) sekolah berupa program pelatihan dan pendampingan intensif serta pembelajaran dengan paradigbaru (berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter), perencanaan berbasis data, penggunaan berbagai platform digital yang bertujuan mengurangi kompleksitas dan meningkatkan efisisensi serta pendampinganprogram kemitraan antara Kemendikbuddan Pemerintah Daerah</p> <p>Berkorrdinasi dan bekerja sama dengan satuan pendidikanterkait dengan satuan Pendidikan terkait pemutakhiran database lulusan sehingga lulusan yang melanjutkan pendidikan, bekerja atau berwirausaha dapat ditelusuri dan dibina untuk melanjutkan Pendidikan yang lebih tinggi</p> <p>Memperkuat peran pengawas sekolahdan kepala sekolah sebagai pemimpin intruksional, pendamping bagi guru, dan mendukung pembantuan komunitas pembelajar sekolah, dan</p> <p>Mengembangkan kompetensi pengawas sekolah dan kepala sekolah dalam peran mereka untuk menjaga kinerja guru secara efektif dan memberikan umpan balik yang kontruksi terhadap guru</p> <p>Mengembangkan pembinaan karir pendidik dan tenaga kependidikan yang terintegrasi dengan pengembangkompetensiuntuk meningkatkan profesionalitas dan motivasi dalam rangka meningkatkan karir serta penguatan kualitas layanan pendidikan</p> <p>Meningkatnkan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan melalui pemberian insentif dan honorarium untuk jenjang sekolah menengah dan SLB</p> <p>Mendorong penerapan penilaiann formatif pendidikan, seperti asesmen Kompetensi Minmu (AKM), survei karakter, dan survey lingkungan belajar, untuk memonitor hasil pembelajaran dan menyediakan informasi diagnostik guru</p> <p>Membina Satuan Pendidikan dalam rangka penerapan Standar Nasional Pendidikan untuk meningkatkan proses pembelajaran di ruang kelas serta indikator kinerja akuntabilitas guru</p> <p>Melakukan pemetaan pendidik dan tenaga berpendidikan dalam rangka pemerataan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan profesional baik di daerah perkotan maupun pedesaan dan 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) untuk mendukung pembelajaran berkualitas</p> <p>Meningkatkan sumberdaya khususnya dalam hal pengawasan dan pelaporan penggunaan dana bantuan pendidikan ke sekolah baik dari Pemerintah Pusat maupaun Pemerintah Daerahsehingga dapat terlaksana dengan efektif dan efisien</p> <p>Menambah dan mengembangkan sumber daya di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara agar dapat mengakomodasi secaa optimal fungsi-fungsi yang dibuuhkan bagi penyelenggaraan pelayanan publik bidang pendidikan dan kebudayaan yang profesional dan berbasis kompetensi</p>
--	--	--	--	---

2.

Arah Kebijakan Bidang Kesehatan

Arah kebijakan bidang Kesehatan di Provinsi Kalimantan Utara mengacu pada arah kebijakan kementerian Kesehatan yang mengacu pada 3 (tiga) hal penting yakni:

- a. Penguatan Pelayanan Kesehatan Primer (Primary Health Care). Puskesmas merupakan faskes yang berperan penting dalam penguatan ini dengan 4 jenis upaya yaitu: meningkatkan dan memberdayakan masyarakat, melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat, melaksanakan Upaya Kesehatan Perseorangan, dan memantau dan mendorong pembangunan berwawasan kesehatan.
- b. Penerapan Pendekatan Keberlanjutan Pelayanan (Continuum of Care). Pendekatan ini dilaksanakan melalui peningkatan cakupan, mutu, dan keberlangsungan upaya 82 pencegahan penyakit dan pelayanan kesehatan ibu, bayi, balita, remaja, usia kerja, dan usia lanjut. Tindak lanjut dari pendekatan ini yaitu adanya penetapan SPM kesehatan melalui peraturan menteri kesehatan, di mana penerapan SPM kesehatan merupakan bagian dari penilaian kinerja kepala daerah.
- c. Penerapan Pendekatan Keberlanjutan Pelayanan (Continuum of Care). Pendekatan ini dilaksanakan melalui peningkatan cakupan, mutu, dan keberlangsungan upaya 82 pencegahan penyakit dan pelayanan kesehatan ibu, bayi, balita, remaja, usia kerja, dan usia lanjut. Tindak lanjut dari pendekatan ini yaitu adanya penetapan SPM kesehatan melalui peraturan menteri kesehatan, di mana penerapan SPM kesehatan merupakan bagian dari penilaian kinerja kepala daerah

Demi terwujudnya visi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara yaitu ***“terwujudnya Provinsi Kalimantan Utara yang Berubah Maju dan Sejahtera”*** serta untuk mewujudkan misi ke-3 yaitu mewujudkan pembangunan Sumber Daya Manusia yang sehat, cerdas, kreatif, inovatif, berakhlak mulia, produktif dan berdaya saing dengan berbasiskan Pendidikan wajib belajar 16 Tahun dan berwawasan, arah kebijakan bidang kesehatan dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 1. 8

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026

VISI (RPJMD)		TERWUJUDNYA PROVINSI KALIMANTAN UTARA YANG BERUBAH, MAJU, DAN SEJAHTERA			
MISI (RPJMD)		Mewujudkan pembangunan SumberDaya Manusia yang sehat, cerdas, kreatif, inovatif, berakhlak mulia, produktif dan berdaya saing dengan berbasiskan Pendidikan wajib belajar 16 tahun dan berwawasan			
Tujuan		Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Kesehatan Tahun 2021-2026	1	Meningkatnya Status Kesehatan Ibu dan Anak	1	Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Penyediaan fasilitas pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP rujukan, UKM dan UKM rujukan tingkat daerah provinsi
					Penyediaan layanan kesehatan untuk UKP rujukan, UKM dan UKM rujukan tingkat daerah provinsi
					Penyelenggaraan sistem informasi kesehatan secara terintegrasi
					Penerbitan izin Rumah Sakit kelas B dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah provinsi
					Pengadaan Alat Kesehatan RS
					Pembangunan Gedung Bedah Central dan Jantung Terpadu serta Radioterapi
					Pengadaan SIMRS yang terintegrasi
					Menjadikan RSUD Tarakan Provinsi Kaltara Rumah Sakit Tipe A
					Pengadaan Kebutuhan Mesin Oksigen Generator untuk penanganan Covid -19
					Pengembangan Pelayanan dengan mengusulkan pengadan Alat Cathlab dan Radioterapi
	2	Meningkatnya Perluasan Akses dan Mutu serta Pemerataan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	2	Peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	Perencanaan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan untuk UKM dan UKP provinsi (Dokter Spesialsi dan SubSpesialis)
					Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah provinsi
Penerbitan pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) cabang dan cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)					
Penerbitan izin usaha kecil obat tradisional (ukot)					
3	Menurunnya angka kesakitan	3	Sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	Advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah provinsi	
				4	Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan
					Pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) tingkat daerah provinsi

3.

Arah Kebijakan Bidang Pekerjaan Umum

dan Perumahan Rakyat

Arah Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara merupakan kebijakan perangkat daerah sebagai arahan strategis yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara, terdiri dari :

- a. Mewujudkan Penyelenggaraan Jalan Provinsi;
- b. Mewujudkan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi;
- c. Mewujudkan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi;
- d. Mewujudkan Kebijakan Khusus terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
- e. Mewujudkan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota;
- f. Mewujudkan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional;
- g. Mewujudkan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional;
- h. Mewujudkan Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi;
- i. Mewujudkan Penetapan Rencana Tata Ruang dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi;
- j. Mewujudkan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang;
- k. Mewujudkan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi;
- l. Mewujudkan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi;
- m. Mewujudkan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota;
- n. Mewujudkan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota; dan
- o. Mewujudkan Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi;
- p. Mewujudkan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi;

- q. Mewujudkan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi;
- r. Mewujudkan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha;
- s. Mewujudkan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha;
- t. Menyelenggarakan urusan PSU Permukiman.

4.

Arah Kebijakan Bidang Trantibumlinmas

Sebagai Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi pada sektor penyelenggaraan keamanan, ketertiban dan pelaksanaan Peraturan Daerah maka Satuan Polisi Pamong Praja menjabarkan tujuan dan sasaran dengan cukup terarah pada kerangka pembangunan Provinsi namun tetap mengerucut pada pola sektor penyelenggaraan keamanan, ketertiban dan pelaksanaan Peraturan Daerah.

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi dan kebijakan yang secara teknis disesuaikan dengan koridor perencanaan pembangunan secara menyeluruh. Penyusunan strategi dan kebijakan pada Renstra akan melibatkan keseluruhan elemen kelembagaan. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan program/kegiatan perlu adanya koordinasi dan sinkronisasi untuk mempermudah pencapaian tujuan dan sasaran dalam penyelenggaraan keamanan, ketertiban dalam arti luas.

Berikut penjabaran strategi dan kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026 dalam tabel sebagai berikut :



Tabel 1. 9

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026

VISI (RPJMD)		TERWUJUDNYA PROVINSI KALIMANTAN UTARA YANG BERUBAH, MAJU, DAN SEJAHTERA			
MISI (RPJMD)		Mewujudkan pembangunan SumberDaya Manusia yang sehat, cerdas, kreatif, inovatif, berakhlak mulia, produktif dan berdaya saing dengan berbasis Pendidikan wajib belajar 16 tahun dan berwawasan			
Tujuan		Sasaran		Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat	1	Meningkatnya perlindungan terhadap kehidupan masyarakat	1	Pengembangan prosedur kerja dan mekanisme kerja serta petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis	Menetapkan SOP sebagai acuan parameter personil Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas dan fungsi
	2	Meningkatnya penerapan penegakan hukum	2	Pengembangan kemitraan dengan Kepolisian dan aparat penegak hukum lainnya, Dinas/Instansi terkait dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penegakan supremasi hukum	Mengadakan kerjasama secara berkelanjutan dengan aparat Penegak Hukum melalui MOU atau nota kesepakatan
					Mendorong partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan keamanan dan ketertiban serta upaya meminimalisir pelanggaran peraturan daerah
			3	Peningkatan penyediaan sarana prasarana	Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana prasarana Penerbitan izin usaha kecil obat tradisional (ukot)
		4	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur	Memberikan pendidikan dan pelatihan kepada personil Satuan Polisi Pamong Praja dan meningkatkan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas.	

5. Arah Kebijakan Bidang Sosial

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial ditujukan untuk percepatan menurunnya jumlah PPKS dan meningkatnya peran PSKS dalam usaha kesejahteraan sosial. Intervensi terhadap keduanya dilakukan secara simultan, integrative dan berkelanjutan yang berperspektif HAM (pemenuhan hak dasar) yang berkelanjutan.

Pelayanan kesejahteraan sosial diupayakan melalui pelayanan langsung guna melaksanakan rehabilitasi sosial dasar PPKS di dalam panti pelayanan sosial, perlindungan dan jaminan sosial perorangan dan keluarga melalui metode Social Case Work (pekerjaan sosial perorangan/ individu), penanganan fakir miskin melalui metode Social Group Work (pekerjaan sosial dengan kelompok), serta pelayanan tidak langsung melalui kemitraan strategis dengan Pemerintah Kabupaten/ Kota dan masyarakat, dilaksanakan melalui 4 (empat) pilar yakni Perlindungan Sosial, Jaminan Sosial, Rehabilitasi Sosial dan Pemberdayaan Sosial.

Mendasar pada hal tersebut maka strategi penyelenggaraan kesejahteraan sosial 2021-2026 mengarah kepada 4 (empat) hal pokok yaitu:

1. Penanganan Fakir Miskin, meliputi:
 - a. Verifikasi, validasi dan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sebagai dasar penyusunan strategi penanganan fakir miskin.
 - b. Penanganan fakir miskin berbasis kewilayahan dan kelompok.
2. Penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial Dasar melalui Panti Pelayanan Sosial.
3. Penyelenggaraan Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi korban bencana dan PPKS non produktif.
4. Pemberdayaan sosial Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) guna meningkatkan peran dalam melaksanakan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS).

Kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial:

1. Program penanganan fakir miskin yang difokuskan pada kegiatan bimbingan sosial dan motivasional terhadap keluarga fakir miskin dan pengelolaan data kemiskinan dan PPKS lainnya dan diarahkan pada ketersediaan data fakir miskin yang telah tervalidasi.
2. Program rehabilitasi sosial yang difokuskan pada kegiatan pelayanan rehabilitasi



sosial dasar PPKS terlantar didalam panti milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan Panti milik masyarakat dan diarahkan pada presentase peningkatan pemenuhan kebutuhan sosial dasar PPKS terlantar didalam panti dan presentase keberfungsian sosial PPKS di dalam panti.

3. Program perlindungan dan jaminan sosial yang difokuskan pada kegiatan jaminan sosial bagi PPKS non produktif dan penanganan korban bencana pada saat dan pasca kejadian bencana provinsi dan diarahkan pada peningkatan presentase penyelenggaraan perlindungan sosial terhadap korban bencana provinsi dan penyelenggaraan jaminan sosial PPKS non produktif.

Program pemberdayaan sosial yang difokuskan pada kegiatan penguatan kapasitas PSKS dalam pelaksanaan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS) dan diarahkan pada peningkatan presentase peran PSKS dalam melaksanakan Usaha Kesejahteraan Sosial bagi PPKS.

BAB II**CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH****2.1 Capaian Kinerja Makro****Tabel 2. 1****Capaian Kinerja Makro Provinsi Kalimantan Utara**

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2022	Capaian Kinerja Tahun 2023	Perubahan (%)
1	Indeks Pembangunan Manusia	71,83	72,88	1,46
2	Angka Kemiskinan	6,77	6,45	-4,73
3	Angka Pengangguran	4,33	4,01	-7,39
4	Pertumbuhan Ekonomi	5,34	4,94	-7,14
5	Pendapatan Per Kapita	190,61	201,75	4,76
6	Ketimpangan Pendapatan	0,272	0,277	1,84

1. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*) dan standard hidup layak (*decent standard of living*). Keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara terpresentasikan dari capaian Indeks Pembangunan Manusia Kalimantan Utara Tahun 2023. Berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Utara, capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalimantan Utara tahun 2023 adalah 72,88, melebihi angka target yang ditetapkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023 yakni pada angka 72,00.

Capaian IPM Kalimantan Utara tahun 2023 mengalami peningkatan 1,05 poin atau 1,46 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Secara umum,

Pembangunan manusia di Provinsi Kalimantan Utara terus mengalami kemajuan. Sejak tahun 2020, status pembangunan manusia Provinsi Kalimantan Utara sudah berada di level “tinggi”. Selama 2020–2023, IPM Provinsi Kalimantan Utara rata-rata meningkat sebesar 0,88 persen per tahun, dari 71,00 pada tahun 2020 menjadi 72,88 pada tahun 2023.

1. Angka Kemiskinan

Berdasarkan data yang dirilis oleh BPS Provinsi Kalimantan Utara, persentase penduduk miskin Provinsi Kalimantan Utara pada periode Maret tahun 2023 adalah 6,45 persen atau sebanyak 47,97 ribu jiwa. Sementara persentase penduduk miskin provinsi Kalimantan Utara pada periode September tahun 2022 adalah 6,86 Persen atau sebanyak 50,58 ribu jiwa, berarti jumlah penduduk miskin berkurang 2,6 ribu jiwa atau secara presentase menurun 0,41 persen poin. Angka kemiskinan ini juga melebihi angka target yang ditetapkan pada RKPD Provinsi Kalimantan Utara yakni pada angka 6,70 – 6,00 persen. Dan berdasarkan data BPS periode September tahun 2023 Jumlah penduduk miskin daerah perkotaan mengalami penurunan baik secara absolut maupun persentase begitu juga dengan penduduk miskin daerah pedesaan mengalami penurunan secara absolut maupun persentase. Selama periode September 2022 - Maret 2023, penduduk miskin di daerah perkotaan menurun sebanyak 1,6 ribu jiwa dari 26,38 ribu orang pada September 2022 menjadi 24,75 ribu orang pada Maret 2023 atau secara persentase turun sebesar 0,40 persen dari 5,58 persen menjadi 5,18 persen. Penduduk Miskin di daerah pedesaan mengalami penurunan sebanyak 1,0 ribu jiwa dari 24,20 ribu orang pada September 2022 menjadi 23,22 ribu orang pada Maret 2023 atau secara persentase turun 0,41 persen dari 9,15 persen menjadi 8,74 persen. Jumlah penduduk miskin di daerah pedesaan lebih sedikit dibanding di daerah perkotaan. Meskipun begitu, persentase penduduk miskin yang berada di daerah pedesaan pada bulan Maret 2023 sebesar 8,74 persen, sedangkan di daerah perkotaan sebesar 5,18 persen. Pola ini sama dengan kondisi September 2022 persentase penduduk miskin di perkotaan 5,58 persen sedangkan di pedesaan lebih tinggi 9,15 persen.

2. Angka Pengangguran

Angka pengangguran atau disebut Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. Pada tahun 2023 terjadi penurunan TPT dari tahun sebelumnya. Berdasarkan data yang dirilis dari BPS Provinsi Kalimantan Utara periode Agustus tahun 2023 penurunan TPT mencapai 4,01 persen turun 0,32 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2022, angka ini melebihi angka target 4,45 persen pada RKPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023. TPT hasil Sakernas Agustus 2023 sebesar 4,01 persen. Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar empat orang penganggur. Pada Agustus 2023, TPT mengalami penurunan sebesar 0,32 persen poin dibandingkan Agustus 2022, dan mengalami penurunan sebesar 0,57 persen poin jika dibandingkan dengan Agustus 2021. Pada Agustus 2023, TPT laki-laki sebesar 4,22 persen, lebih tinggi dibanding TPT perempuan yang sebesar 3,64 persen. TPT laki-laki Agustus 2023 mengalami penurunan sebesar 0,57 persen poin sedangkan TPT perempuan mengalami kenaikan sebesar 0,20 persen poin apabila dibandingkan dengan Agustus 2022. Apabila dilihat menurut daerah tempat tinggal, TPT perkotaan (4,64 persen) lebih tinggi daripada daerah perdesaan (2,99 persen). Dibandingkan Agustus 2022, TPT perkotaan turun 0,84 persen poin dan perdesaan naik 0,51 persen poin. TPT dari tamatan Sekolah Menengah Atas (SMA) merupakan yang paling tinggi dibandingkan tamatan jenjang pendidikan lainnya yaitu sebesar 5,08 persen. Sementara TPT yang paling rendah adalah mereka dengan pendidikan SD ke bawah yaitu sebesar 2,16 persen. Dibandingkan Agustus 2022, TPT kategori pendidikan yang mengalami kenaikan adalah SMA, SMK, dan Perguruan Tinggi yaitu masing-masing sebesar 0,97 persen poin, 0,03 persen poin, dan 0,96 persen poin. Sedangkan SD dan SMP mengalami penurunan. Penurunan TPT terbesar adalah SMP yaitu sebesar 3,03 apabila dibandingkan dengan Agustus 2022.

3. Pertumbuhan ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk melihat kemajuan suatu negara/daerah serta hasil dari pembangunan yang dilaksanakan selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi juga menggambarkan tingkat kemakmuran masyarakat yang dilihat berdasarkan pendapatan perkapita atau pendapatan rata – rata dari penduduk sebuah negara/daerah. Berdasarkan data yang dirilis oleh BPS Provinsi Kalimantan

Utara bahwa laju pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Utara tahun 2023 dibandingkan tahun 2022 tumbuh 4,94 persen. Pertumbuhan terjadi pada semua lapangan usaha. Lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 18,58 persen. Disusul oleh lapangan usaha Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 12,38 persen; serta Konstruksi dan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum masing-masing sebesar 8,24 persen. Sementara itu, lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalan; serta Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Motor; yang memiliki peran cukup dominan juga tumbuh masing-masing sebesar 4,32 persen; 3,70 persen; dan 6,77 persen.

4. Pendapatan Perkapita

Pendapatan perkapita merupakan indikator yang menunjukkan tingkat kesejahteraan penduduk di suatu wilayah. Apabila pada tahun 2022 pendapatan perkapita Kalimantan Utara sebesar 190,61 juta maka di tahun 2023 meningkat menjadi 201,75 juta atau meningkat sebanyak 4,76 persen. Tren kenaikan ini sejalan dengan kenaikan indikator makro lainnya yaitu laju pertumbuhan ekonomi yang naik sebesar 4,94 persen.

5. Ketimpangan pendapatan

Ketimpangan pendapatan atau indeks gini merupakan indikator yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana pemerataan pengeluaran dan kesejahteraan antar individu dalam suatu wilayah tertentu (*Income Disparity*). Nilai Gini Ratio berkisar antara 0-1. Semakin tinggi nilai Gini Ratio menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi. Berdasarkan data yang dirilis BPS Provinsi Kalimantan Utara bahwa indeks gini Provinsi Kalimantan Utara periode Maret tahun 2023 tercatat sebesar 0,277 poin. Angka ini menurun jika dibandingkan dengan Gini Ratio periode yang sama ditahun sebelumnya sebesar 0,272, artinya ketimpangan pendapatan di Provinsi Kalimantan Utara mengalami penurunan sebesar 1,84 persen. Berdasarkan daerah tempat tinggal, Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,274 meningkat dibanding Gini Rasio September 2022 yang sebesar 0,256, sedangkan Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,270 turun dibandingkan Gini Rasio September 2022 yang sebesar 0,287.



2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)

Tabel 2. 2
Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1.	Pendidikan	1) Jumlah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/SLTA Negeri terakreditasi	103	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Data Terlampir pada dokumen pendukung
		2) Jumlah peserta didik sekolah menengah atas (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	1.000 Peserta Didik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Data Terlampir pada dokumen pendukung
		3) Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah kejuruan (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	10.508 Peserta Didik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Data Terlampir pada dokumen pendukung
		4) Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah atas (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	16.024 Peserta Didik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Data Terlampir pada dokumen pendukung
		5) Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah kejuruan (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	9.470 Peserta Didik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Data Terlampir pada dokumen pendukung
		6) Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah atas (Negeri dan Swasta)	1685 Pendidik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Data Terlampir pada dokumen pendukung
		7) Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah kejuruan (Negeri dan Swasta)	879 Pendidik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Data Terlampir pada dokumen pendukung



No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		8) Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah atas (Negeri dan Swasta)	1.335 Pendidik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Data Terlampir pada dokumen pendukung
		9) Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah kejuruan (Negeri dan Swasta)	606 Pendidik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Data Terlampir pada dokumen pendukung
		10) Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah atas (Negeri dan Swasta)	395 Tenaga Pendidik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Data Terlampir pada dokumen pendukung
		11) Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah kejuruan (Negeri dan Swasta)	270 Tenaga Pendidik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Data Terlampir pada dokumen pendukung
		12) Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah atas (Negeri dan Swasta)	57 Tenaga Pendidik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Data Terlampir pada dokumen pendukung
		13) Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah kejuruan (Negeri dan Swasta)	30 Tenaga Pendidik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Data Terlampir pada dokumen pendukung
		14) Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah atas (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (DIV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	633 Pendidik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Data Terlampir pada dokumen pendukung
		15) Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah kejuruan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	414 Pendidik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Data Terlampir pada dokumen pendukung
		16) Jumlah kepala sekolah menengah atas (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1), sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	38 Kepala Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Data Terlampir pada dokumen pendukung



No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		17) Jumlah kepala sekolah menengah kejuruan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D -IV) atau sarjana (S1), sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	19 Kepala Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Data Terlampir pada dokumen pendukung
		18) Jumlah tenaga laboratium pada jenjang sekolah menengah atas (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	4 Orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Data Terlampir pada dokumen pendukung
		19) Jumlah tenaga laboratorium/ bengkel/workshop pada jenjang sekolah menengah kejuruan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	2 Orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Data Terlampir pada dokumen pendukung
		20) Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah atas (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	209 Tenaga Penunjang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Data Terlampir pada dokumen pendukung
		21) Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah kejuruan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	126 Tenaga Penunjang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Data Terlampir pada dokumen pendukung
		22) Jumlah satuan pendidikan khusus yang terakreditasi (Negeri dan Swasta)	5 Satuan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Data Terlampir pada dokumen pendukung
		23) Jumlah peserta didik pendidikan khusus (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	513 Peserta Didik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Data Terlampir pada dokumen pendukung
		24) Jumlah peserta didik pada pendidikan khusus (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	596 Peserta Didik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Data Terlampir pada dokumen pendukung



No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		25) Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada pendidikan khusus (Negeri dan Swasta)	258 Pendidik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Data Terlampir pada dokumen pendukung
		26) Jumlah pendidik pada pendidikan khusus (Negeri dan Swasta)	65 Pendidik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Data Terlampir pada dokumen pendukung
		27) Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada pendidikan khusus (Negeri dan Swasta)	47 Tenaga Pendidik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Data Terlampir pada dokumen pendukung
		28) Jumlah tenaga kependidikan pada pendidikan khusus (Negeri dan Swasta)	2 Tenaga Pendidik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Data Terlampir pada dokumen pendukung
		29) Jumlah pendidik pada pendidikan khusus (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (DIV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	31 Pendidik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Data Terlampir pada dokumen pendukung
		30) Jumlah kepala sekolah pendidikan khusus (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D - IV) atau sarjana (S1), sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	2 Kepala Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Data Terlampir pada dokumen pendukung
		31) Jumlah tenaga penunjang lainnya pada pendidikan khusus (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	22	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Belum ada data (Surat Pernyataan)
2.	Kesehatan	1) Jumlah RS Rujukan provinsi yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	1 (Satu) Rumah Sakit	Dinas Kesehatan	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan Provinsi Kalimantan Utara
		2) Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	1 (Satu) Rumah Sakit	Dinas Kesehatan	Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan Provinsi Kalimantan Utara
		3) Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	3 Kelompok barang logistik	Dinas Kesehatan	Data Terlampir pada dokumen pendukung
		4) Jumlah pos kesehatan bagi penduduk terdampak krisis	Tidak Ada	Dinas Kesehatan	Tidak ada data (Surat Pernyataan)



No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi			
		5) Jumlah SDM kesehatan di pos kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	Tidak ada	Dinas Kesehatan	Tidak ada data (Surat Keterangan)
		6) Jumlah SDM kesehatan yang tergabung dalam tim penanggulangan krisis kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	18 Orang	Dinas Kesehatan	Data Terlampir pada dokumen pendukung
		7) Jumlah kegiatan edukasi pengurangan resiko krisis kesehatan bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi bencana	Tidak ada	Dinas Kesehatan	Tidak ada data (Surat Keterangan)
		8) Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Tidak ada	Dinas Kesehatan	Tidak Ada dukungan (Surat Pernyataan).
		9) Jumlah SDM kesehatan yang tergabung dalam Tim Gerak Cepat provinsi	18 Orang	Dinas Kesehatan	Data Terlampir pada dokumen pendukung
		10) Jumlah pelaksanaan kajian epidemiologi terhadap data/informasi tentang kemungkinan KLB lintas kabupaten/kota	Tidak ada	Dinas Kesehatan	Tidak ada data (Surat Pernyataan)
3.	Pekerjaan Umum	1) Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan provinsi (ha)	Tidak ada	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Dinas PUPR PERKIM)	Tidak ada data (Surat Pernyataan)
		2) Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan provinsi (m)	Tidak ada	Dinas PUPR PERKIM	Tidak ada data (Surat Pernyataan)
		3) Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi	Tidak ada	Dinas PUPR PERKIM	Tidak ada data (Surat Pernyataan)



No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		erosi dan akresi di WS kewenangan provinsi (ha)			
4)		Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan provinsi (m)	Tidak ada	Dinas PUPR PERKIM	Tidak ada data (Surat Pernyataan)
5)		Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan provinsi	Ada	Dinas PUPR PERKIM	Dilampirkan Review Pola Wilayah Sungai Kayan TA 2016 pada dokumen pendukung
6)		Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan provinsi	Ada	Dinas PUPR PERKIM	Dokumen pendukung terlampir
7)		Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah provinsi	Ada	Dinas PUPR PERKIM	Kanal Banjir = 94,8 Meter
8)		Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan provinsi (ha)	Tidak ada	Dinas PUPR PERKIM	Tidak ada data (Surat Pernyataan)
9)		Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan provinsi (m)	Tidak ada	Dinas PUPR PERKIM	Tidak ada data (Surat Pernyataan)
10)		Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan provinsi (ha)	Tidak ada	Dinas PUPR PERKIM	Tidak ada data (Surat Pernyataan)
11)		Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan provinsi (m)	Tidak ada	Dinas PUPR PERKIM	Tidak ada data (Surat Pernyataan)
12)		Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan provinsi	Ada	Dinas PUPR PERKIM	- Dokumen Masterplan Penanganan Abrasi Pantai di Kabupaten Bulungan TA 2014



No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
					- Dokumen Masterplan Penanganan Abrasi Pantai Kab. Nunukan TA 2014 - SID Penanganan Abrasi Pantai di Kabupaten Nunukan TA 2015 - SID Pengaman Abrasi Pantai di Kabupaten Bulungan TA 2015
		13) Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan provinsi	Ada	Dinas PUPR PERKIM	Dokumen Rencana Pengelolaan WS Kayan Tahap II TA. 2020
		14) Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah provinsi	Ada	Dinas PUPR PERKIM	Kanal Banjir = 94,8 meter (Pembangunan Kanal Pengendali Banir Tanjung Selor Tahap VI TA 2021)
		15) Persentase panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik	$\frac{1540}{4400} \times 100\%$ = 35 %	Dinas PUPR PERKIM	Data terlampir pada dokumen pendukung
		16) Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	$\frac{5430}{11965} \times 100\%$ = 45,38 %	Dinas PUPR PERKIM	Data terlampir pada dokumen pendukung
		17) Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik	Tidak ada	Dinas PUPR PERKIM	Tidak ada data (Surat Pernyataan)
		18) Pemenuhan dokumen RISPAM lintas kabupaten/kota	Ada	Dinas PUPR PERKIM	Laporan Akhir Penyusunan RISPAM Provinsi Kalimantan Utara TA 2021
		19) Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA provinsi	Tidak ada	Dinas PUPR PERKIM	Tidak ada data (Surat Pernyataan)
		20) Jumlah BUMD dan atau UPTD provinsi penyelenggaran SPAM	Tidak ada	Dinas PUPR PERKIM	Tidak ada data (Surat Pernyataan)



No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		21) Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM	Tidak ada	Dinas PUPR PERKIM	Tidak ada data (Surat Pernyataan)
		22) Jumlah kerja sama penyelenggaraan SPAM dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lain.	Tidak ada	Dinas PUPR PERKIM	Tidak ada data (Surat Pernyataan)
		23) Jumlah SPALD Regional	Tidak ada	Dinas PUPR PERKIM	Tidak ada data (Surat Pernyataan)
		24) Total kapasitas SPALD Regional	Tidak ada	Dinas PUPR PERKIM	Tidak ada data (Surat Pernyataan)
		25) Total volume limbah yang masuk ke SPALD Regional	Tidak ada	Dinas PUPR PERKIM	Tidak ada data (Surat Pernyataan)
		26) Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan limbah domestik	Ada 10 (sepuluh)	Dinas PUPR PERKIM	Pembangunan MCK Umum Kabupaten Bulungan sebanyak 8 Bilik Kamar Kecil, dan 2 Tempat Cuci
		27) Jumlah BUMD/UPTD/Badan Usaha Provinsi Pengelola Limbah Domestik (Ada/Tidak)	Tidak ada	Dinas PUPR PERKIM	Tidak ada data (Surat Pernyataan)
		28) Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan kepala daerah dalam SK jalan kewenangan provinsi	851.877 Km	Dinas PUPR PERKIM	SK Gubernur No.188.44-K.145-2018 Penetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Provinsi
		29) Dokumen rencana induk pengembangan jaringan jalan provinsi	Tidak ada	Dinas PUPR PERKIM	Tidak Ada Kegiatan untuk tahun 2021 (Surat Pernyataan, Dokumen pendukung yang sementara digunakan: 1. Laporan Akhir Penyusunan Masterplan Jaringan Jalan dan Jembatan di Provinsi Kalimantan Utara TA 2014; 2. RKA 2021 tentang Penyusunan Dokumen Kaji



No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
					Ulang Rencana Umum Jaringan Jalan Provinsi Kalimantan Utara yang pernah diusulkan.
		30) Panjang jalan yang dibangun	Tidak ada	Dinas PUPR PERKIM	Tidak Ada Kegiatan (Surat Pernyataan)
		31) Panjang jembatan yg dibangun	Tidak ada	Dinas PUPR PERKIM	Tidak ada kegiatan (Surat Pernyataan)
		32) Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)	9.054 Km	Dinas PUPR PERKIM	Data terlampir pada Dokumen Pendukung
		33) Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan	Tidak ada	Dinas PUPR PERKIM	Tidak ada Kegiatan (Surat Pernyataan)
		34) Panjang jalan yang direkonstruksi atau direhabilitasi	1.045 Km	Dinas PUPR PERKIM	Data terlampir pada Dokumen Pendukung
		35) Panjang jembatan yang direhabilitasi	Tidak ada	Dinas PUPR PERKIM	Tidak ada kegiatan (Surat Pernyataan)
		36) Panjang jalan yang dipelihara	74.405 Km	Dinas PUPR PERKIM	Data terlampir pada dokumen pendukung
		37) Panjang jembatan yang dipelihara	1 Unit	Dinas PUPR PERKIM	Data terlampir pada dokumen pendukung
		38) Jumlah Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah provinsi	6 Kali	Dinas PUPR PERKIM	Data Terlampir pada dokumen pendukung
		39) Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi	Ada 430 Orang	Dinas PUPR PERKIM	Data Terlampir pada dokumen pendukung
		40) Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah provinsi	430 Orang	Dinas PUPR PERKIM	Data Terlampir pada dokumen pendukung
		41) Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi cakupan provinsi yang aktif dengan data termutakhir	Ada	Dinas PUPR PERKIM	Website Sistem Informasi Jasa Konstruksi Daerah Kalimantan Utara (SIMJAKIDA)
		42) Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah provinsi yang bersumber dari APBD provinsi	Tidak ada	Dinas PUPR PERKIM	Tidak ada data (Surat Pernyataan)



No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		43) Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah provinsi yang bersumber dari APBN	Tidak ada	Dinas PUPR PERKIM	Tidak ada data (Surat Pernyataan)
		44) Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah provinsi yang bersumber dari pendanaan lainnya	Tidak ada	Dinas PUPR PERKIM	Tidak ada data (Surat Pernyataan)
		45) Tersedianya data dan profil OPD sub urusan jasa konstruksi provinsi	Ada	Dinas PUPR PERKIM	Data terlampir pada dokumen pendukung
		46) Tersedianya data dan informasi Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah provinsi yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPKK)	Ada	Dinas PUPR PERKIM	Pelatihan Jasa Konstruksi yang dilaksanakan melalui kerjasama Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi Kalimantan Utara
		47) Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli	Ada	Dinas PUPR PERKIM	Data terlampir pada dokumen pendukung
		48) Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah provinsi	Ada	Dinas PUPR PERKIM	Data terlampir pada dokumen pendukung
		49) Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk, dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Tidak ada	Dinas PUPR PERKIM	Tidak ada data (Surat Pernyataan)
		50) Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	Tidak ada	Dinas PUPR PERKIM	Tidak ada data (Surat Pernyataan)
		51) Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis,	Tidak ada	Dinas PUPR PERKIM	Tidak ada data (Surat Pernyataan)



No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya			
4.	Perumahan Rakyat	1) Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya	3 Rumah	Dinas PUPR PERKIM	Data terlampir pada Dokumen Pendukung
		2) Jumlah rumah yang terkena bencana alam	59 Rumah	Dinas PUPR PERKIM	Bencana Alam tanah longsor tanggal 28 September 2020 di Kota Tarakan (Daftar Terlampir pada data dukung)
		3) Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam	59 Rumah dan 1 Korban Jiwa Meninggal	Dinas PUPR PERKIM	Data terlampir pada Dokumen Pendukung
		4) Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	Tidak ada	Dinas PUPR PERKIM	Tidak ada (Surat Pernyataan)
		5) Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi	Ada 3 (tiga)	Dinas PUPR PERKIM	Data terlampir pada dokumen pendukung
		6) Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi	Ada 3 (tiga)	Dinas PUPR PERKIM	Data terlampir pada dokumen pendukung
		7) Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana	Tidak ada	Dinas PUPR PERKIM	Tidak ada (Surat Pernyataan)
		8) Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi	Ada 3 (tiga)	Dinas PUPR PERKIM	
		9) Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan	Tidak ada	Dinas PUPR PERKIM	Tidak ada data (Surat Pernyataan)
		10) Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Tidak ada	Dinas PUPR PERKIM	Tidak ada data (Surat Pernyataan)



No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		11) Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Tidak ada	Dinas PUPR PERKIM	Tidak ada data (Surat Pernyataan)
		12) Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Tidak ada	Dinas PUPR PERKIM	Tidak ada data (Surat Pernyataan)
		13) Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Tidak ada	Dinas PUPR PERKIM	Tidak ada data (Surat Pernyataan)
		14) Jumlah luasan (ha) kawasan pemukiman kumuh \geq 10-15 Ha	148,70 Ha	Dinas PUPR PERKIM	Data terlampir pada dokumen pendukung
		15) Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	Tidak Ada	Dinas PUPR PERKIM	Tidak Ada data (Surat Pernyataan)
		16) Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	3,39 Ha	Dinas PUPR PERKIM	Data terlampir pada dokumen pendukung
		17) Jumlah pemukiman yang terfasilitasi PSU	Ada 2 (dua)	Dinas PUPR PERKIM	Data terlampir pada dokumen pendukung
		18) Jumlah pengembang yang tersertifikasi	22	Dinas PUPR PERKIM	Data terlampir pada dokumen pendukung
		19) Jumlah pengembang yang teregistrasi	22	Dinas PUPR PERKIM	Data terlampir pada dokumen pendukung
		20) Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan	Tidak ada	Dinas PUPR PERKIM	Tidak ada data (Surat Pernyataan)
5.	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1) Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum lintas Kab/Kota yang ditangani	2 Pelanggaran	Satuan Polisi Pamong Praja	Daftar Terlampir pada Dokumen Pendukung
		2) Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	2.205 Orang	Satuan Polisi Pamong Praja	Daftar Terlampir pada Dokumen Pendukung



No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		3) Jumlah sarana prasarana minimal yang dipenuhi	150 Sarana Prasarana	Satuan Polisi Pamong Praja	Daftar Terlampir pada Dokumen Pendukung
		4) Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	Ada 3 Perda yang ditegakkan	Satuan Polisi Pamong Praja	Daftar Terlampir pada Dokumen Pendukung
		5) Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	Ada 3 (tiga) Orang	Satuan Polisi Pamong Praja	Daftar terlampir pada Dokumen Pendukung
		6) Jumlah SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan Trantibum	24 SOP	Satuan Polisi Pamong Praja	Daftar terlampir pada Dokumen Pendukung
		7) Penyediaan/pemutakhiran dokumen kajian risiko bencana provinsi	Ada 1 (satu)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	Data terlampir pada Dokumen Pendukung
		8) Penyediaan/pemutakhiran dokumen rencana penanggulangan bencana provinsi	Ada 1 (satu)	BPBD	Data terlampir pada Dokumen Pendukung
		9) Penyediaan/pemutakhiran dokumen rencana kontijensi provinsi	Tidak ada	BPBD	Tidak ada data (Surat Pernyataan)
		10) Pelaksanaan pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana provinsi dan kabupaten/kota	10 Kegiatan di 5 kabupaten/Kota	BPBD	Data terlampir pada Dokumen Pendukung
		11) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dalam perencanaan pemenuhan SPM sub-urusan bencana	5 kegiatan di 5 Kabupaten/ kota	BPBD	Data terlampir pada Dokumen Pendukung
		12) Penyediaan dokumen kaji cepat bencana provinsi	Ada	BPBD	Data terlampir pada Dokumen Pendukung
		13) Respon cepat penanganan darurat bencana provinsi	Ada	BPBD	Data terlampir pada Dokumen Pendukung
		14) Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana provinsi	Ada 1 (Satu) Kegiatan	BPBD	Kegiatan Evakuasi /Pembongkaran Makam Covid 19 terkait terjadinya tanah longsor di Juata Laut
		15) Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana provinsi	Ada	BPBD	Distribusi Logistik di distribusikan ke 5 Kabupaten/Kota



No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
6.	Sosial	1) Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang menerima paket permakanan dalam panti sesuai dengan standar gizi	8 Orang	Dinas Sosial	Daftar Terlampir pada Dokumen Pendukung
		2) Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang menerima paket sandang di dalam panti	8 Orang	Dinas Sosial	Daftar Terlampir pada Dokumen Pendukung
		3) Jumlah asrama yang tersedia dan mudah diakses (Panti)	1 Asrama	Dinas Sosial	Daftar Terlampir pada Dokumen Pendukung
		4) Jumlah alat bantu yang disediakan di dalam panti	Tidak ada	Dinas Sosial	Tidak ada data (Surat Pernyataan)
		5) Jumlah perbekalan kesehatan yang disediakan di dalam panti	Tidak ada	Dinas Sosial	Tidak ada data (Surat Pernyataan)
		6) Jumlah tenaga perawat yang disediakan di dalam panti	Tidak ada	Dinas Sosial	Tidak ada data (Surat Pernyataan)
		7) Jumlah perbekalan kesehatan (peralatan kesehatan) yang disediakan di dalam panti	Tidak ada	Dinas Sosial	Tidak ada (Surat Pernyataan)
		8) Jumlah tenaga Kesehatan yang disediakan di dalam panti	Tidak ada	Dinas Sosial	Tidak ada data (Surat Pernyataan)
		9) Jumlah paket bimbingan fisik, mental, spiritual, dan social yang dilaksanakan dalam panti	Tidak ada	Dinas Sosial	Tidak ada data (Surat Pernyataan)
		10) Jumlah paket bimbingan aktivitas hidup sehari-hari yang dilaksanakan di dalam panti	Tidak ada	Dinas Sosial	Tidak ada data (Surat Pernyataan)
		11) Jumlah pekerja sosial/ tenaga kesejahteraan sosial yang disediakan di dalam panti	Tidak ada	Dinas Sosial	Tidak ada data (Surat Pernyataan)
		12) Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang difasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan di dalam panti	Tidak ada	Dinas Sosial	Tidak ada data (Surat Pernyataan)
		13) Jumlah penyandang disabilitas terlantar di dalam panti yang	Tidak ada	Dinas Sosial	Tidak ada data (Surat Pernyataan)



No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		mendapatkan akses ke layanan Pendidikan dan Kesehatan dasar			
		14) Jumlah penyandang disabilitas terlantar di dalam panti yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga	Tidak ada	Dinas Sosial	Tidak ada data (Surat Pernyataan)
		15) Jumlah penyandang disabilitas terlantar di dalam panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga	Tidak ada	Dinas Sosial	Tidak ada data (Surat Pernyataan)
		16) Jumlah anak terlantar yang menerima paket permakanan dalam panti sesuai dengan standar gizi	351 Orang	Dinas Sosial	Daftar Terlampir pada Dokumen Pendukung
		17) Jumlah anak terlantar yang menerima paket sandang di dalam panti	Tidak ada	Dinas Sosial	Tidak ada data (Surat Pernyataan)
		18) Jumlah asrama yang tersedia dan mudah diakses (Panti)	7 Asrama	Dinas Sosial	Daftar Terlampir pada Dokumen Pendukung
		19) Jumlah alat bantu yang disediakan di dalam panti	Tidak ada	Dinas Sosial	Tidak ada data (Surat Pernyataan)
		20) Jumlah perbekalan Kesehatan (obat-obatan) yang disediakan di dalam panti	Tidak ada	Dinas Sosial	Tidak ada data (Surat Pernyataan)
		21) Jumlah tenaga perawat yang disediakan di dalam panti	Tidak ada	Dinas Sosial	Tidak ada data (Surat Pernyataan)
		22) Jumlah peralatan kesehatan yang disediakan di dalam panti	Tidak ada	Dinas Sosial	Tidak ada data (Surat Pernyataan)
		23) Jumlah tenaga Kesehatan (dokter, psikiater, peksos medis) yang disediakan di dalam panti	Tidak ada	Dinas Sosial	Tidak ada data (Surat Pernyataan)
		24) Jumlah pekerja sosial professional/tenaga kesejahteraan sosial yang disediakan di dalam panti	Tidak ada	Dinas Sosial	Tidak ada data (Surat Pernyataan)
		25) Jumlah paket bimbingan fisik, mental, spiritual dan social yang dilaksanakan di dalam panti	Tidak ada	Dinas Sosial	Tidak ada data (Surat Pernyataan)



No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		26) Jumlah paket bimbingan aktivitas hidup sehari-hari yang dilaksanakan di dalam panti	Tidak ada	Dinas Sosial	Daftar Terlampir pada Dokumen Pendukung
		27) Jumlah anak terlantar yang difasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan dan kartu identitas anak di dalam panti	Tidak ada	Dinas Sosial	Tidak ada data (Surat Pernyataan)
		28) Jumlah anak terlantar di dalam panti yang mendapatkan akses ke layanan Pendidikan dan Kesehatan dasar	351 Orang	Dinas Sosial	Daftar Terlampir pada Dokumen Pendukung
		29) Jumlah anak terlantar di dalam panti yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga	Tidak ada	Dinas Sosial	Tidak ada data (Surat Pernyataan)
		30) Jumlah anak terlantar di dalam panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga	Tidak ada	Dinas Sosial	Tidak ada data (Surat Pernyataan)
		31) Jumlah lanjut usia terlantar yang menerima paket permakanan dalam panti sesuai dengan standar gizi	10 Orang	Dinas Sosial	Data Terlampir dalam dokumen pendukung
		32) Jumlah lanjut usia terlantar yang menerima paket sandang di dalam panti	Tidak ada	Dinas Sosial	Tidak ada data (Surat Pernyataan)
		33) Jumlah asrama yang tersedia dan mudah diakses	1 Asrama	Dinas Sosial	Terlampir pada dokumen pendukung
		34) Jumlah alat bantu yang disediakan di dalam panti	Tidak ada	Dinas Sosial	Tidak ada data (Surat Pernyataan)
		35) Jumlah perbekalan kesehatan yang disediakan di dalam panti	Tidak ada	Dinas Sosial	Tidak ada data (Surat Pernyataan)
		36) Jumlah tenaga perawat yang disediakan di dalam panti	Tidak ada	Dinas Sosial	Tidak ada data (Surat Pernyataan)
		37) Jumlah paket bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial yang dilaksanakan di dalam panti	Tidak ada	Dinas Sosial	Tidak ada data (Surat Pernyataan)
		38) Jumlah tenaga Kesehatan (dokter, psikiater, peksos medis) yang disediakan di dalam panti	Tidak ada	Dinas Sosial	Tidak ada data (Surat Pernyataan)



No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		39) Jumlah pekerja social professional/ tenaga kesejahteraan sosial yang disediakan di dalam panti	Tidak ada	Dinas Sosial	Tidak ada data (Surat Pernyataan)
		40) Jumlah paket bimbingan aktivitas hidup sehari -hari yang dilaksanakan di dalam panti	Tidak ada	Dinas Sosial	Data Terlampir pada dokumen pendukung
		41) Jumlah lanjut usia terlantar yang difasilitasi Nomor Induk Kependudukan di dalam panti	Tidak ada	Dinas Sosial	Tidak ada data (Surat Pernyataan)
		42) Jumlah lanjut usia terlantar di dalam panti yang mendapat akses ke layanan dan Kesehatan dasar	10 Orang	Dinas Sosial	Tidak ada data (Surat Pernyataan)
		43) Jumlah lanjut usia terlantar di dalam panti yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga	Tidak ada	Dinas Sosial	Tidak ada data (Surat Pernyataan)
		44) Jumlah lanjut usia terlantar di dalam panti pelayanan reunifikasi keluarga	Tidak ada	Dinas Sosial	Tidak ada data (Surat Pernyataan)
		45) Jumlah lanjut usia terlantar yang mendapatkan layanan pemulasaran	Tidak ada	Dinas Sosial	Tidak ada data (Surat Pernyataan)
		46) Jumlah gelandangan dan pengemis yang menerima paket permakanan dalam panti sesuai dengan standar gizi	Tidak ada	Dinas Sosial	Tidak ada data (Surat Pernyataan)
		47) Jumlah gelandangan dan pengemis yang menerima paket sandang di dalam panti	Tidak ada	Dinas Sosial	Tidak ada data (Surat Pernyataan)
		48) Jumlah asrama yang tersedia dan mudah diakses	Tidak ada	Dinas Sosial	Tidak ada data (Surat Pernyataan)
		49) Jumlah alat bantu yang disediakan di dalam panti	Tidak ada	Dinas Sosial	Tidak ada data (Surat Pernyataan)
		50) Jumlah perbekalan kesehatan yang disediakan di dalam panti	Tidak ada	Dinas Sosial	Tidak ada data (Surat Pernyataan)
		51) Jumlah tenaga perawat yang disediakan di dalam panti	Tidak ada	Dinas Sosial	Tidak ada data (Surat Pernyataan)



No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		52) Jumlah paket bimbingan fisik, mental, spiritual dan social yang dilaksanakan di dalam panti	Tidak ada	Dinas Sosial	Tidak ada data (Surat Pernyataan)
		53) Jumlah tenaga Kesehatan (dokter, psikiater, peksos medis) yang disediakan di dalam panti	Tidak ada	Dinas Sosial	Tidak ada data (Surat Pernyataan)
		54) Jumlah pekerja sosial professional/ tenaga kesejahteraan sosial yang disediakan di dalam panti	Tidak ada	Dinas Sosial	Tidak ada data (Surat Pernyataan)
		55) Jumlah paket bimbingan aktivitas hidup sehari-hari yang dilaksanakan di dalam panti	Tidak ada	Dinas Sosial	Tidak ada data (Surat Pernyataan)
		56) Jumlah gelandangan dan pengemis yang mendapat bimbingan keterampilan dasar	Tidak ada	Dinas Sosial	Tidak ada data (Surat Pernyataan)
		57) Jumlah gelandangan dan pengemis yang difasilitasi pembuatan pembuatan Nomor Induk Kependudukan, KTP, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau KIA di dalam panti	Tidak ada	Dinas Sosial	Tidak ada data (Surat Pernyataan)
		58) Jumlah gelandangan dan pengemis di dalam panti yang mendapatkan layanan Pendidikan dan Kesehatan dasar	Tidak ada	Dinas Sosial	Tidak ada data (Surat Pernyataan)
		59) Jumlah gelandangan dan pengemis di dalam panti yang mendapatkan pelayanan penulusuran keluarga	Tidak ada	Dinas Sosial	Tidak ada data (Surat Pernyataan)
		60) Jumlah gelandangan dan pengemis yang mendapatkan layanan reunifikasi keluarga	Tidak ada	Dinas Sosial	Tidak ada data (Surat Pernyataan)
		61) Jumlah korban bencana yang mendapat makanan	5.100 Orang	Dinas Sosial	Data Terlampir pada dokumen pendukung
		62) Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	Tidak ada	Dinas Sosial	Tidak ada data (Surat Pernyataan)



No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran		Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		63)	Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	70 Unit	Dinas Sosial	Data Terlampir pada dokumen pendukung
		64)	Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan	2504 Paket	Dinas Sosial	Data Terlampir pada dokumen pendukung
		65)	Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	Tidak ada	Dinas Sosial	Tidak ada data (Surat Pernyataan)
		66)	Jumlah pekerja social professional/tenaga kesejahteraan social dan/atau relawan social yang tersedia	481 Orang	Dinas Sosial	Data Terlampir pada dokumen pendukung
7.	Tenaga Kerja	1)	Dokumen perencanaan tenaga kerja provinsi	RTK Provinsi telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 15 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Memperoleh Informasi Ketenagakerjaan dan Penyusunan Serta Pelaksanaan Perencanaan tenaga kerja dan juga telah sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.16/MEN/XI/2010 tentang Perencanaan Tenaga Makro	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (DISNAKERTRANS)	Dokumen RTK Provinsi telah beberapa kali diverifikasi oleh Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan Kementrian Ketenagakerjaan dan juga telah di tanda tangani oleh Gubernur Kalimantan Utara
		2)	Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja	$\frac{(100,18 + 98,94 + 99,11 + 98,90 + \dots)}{6} = 102,28 \%$	DISNAKERTRANS	Data Terlampir pada dokumen pendukung
		3)	Jumlah perusahaan yang Menyusun rencana tenaga kerja	80 Perusahaan	DISNAKERTRANS	Data Terlampir pada dokumen pendukung
		4)	Jumlah Kabupaten/Kota yang telah dibina dalam penyusunan RTK perusahaan	0 Kabupaten/Kota	DISNAKERTRANS	Tidak ada data (Surat Pernyataan)
		5)	Persentase penerapan program PBK dengan kualifikasi KKNi/okupasi	$\frac{51}{51} \text{ program } \times 100\% = 100\%$	DISNAKERTRANS	Data Terlampir pada dokumen pendukung



No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		6) Persentase instruktur bersertifikat kompetensi	$\frac{33}{71} \text{ orang} \times 100\%$ = 46,48%	DISNAKERTRANS	Data Terlampir pada dokumen pendukung
		7) Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan	$\frac{71}{2831} \text{ orang} \times 100\%$ = 2,51%	DISNAKERTRANS	Data Terlampir pada dokumen pendukung
		8) Persentase penganggur yang dilatih	$\frac{2832}{16.028} \text{ orang} \times 100\%$ = 17,67%	DISNAKERTRANS	Data Terlampir pada dokumen pendukung
		9) Persentase lulusan bersertifikat kompetensi	$\frac{2223}{2832} \text{ orang} \times 100\%$ = 78,50%	DISNAKERTRANS	Data Terlampir pada dokumen pendukung
		10) Persentase penyerapan lulusan	$\frac{2470}{2832} \text{ orang} \times 100\%$ = 87,22 %	DISNAKERTRANS	Data Terlampir pada dokumen pendukung
		11) Persentase LPK yang terakreditasi	$\frac{3}{19} \text{ LPK} \times 100\%$ = 15,79 %	DISNAKERTRANS	Tidak Ada LPK yang memenuhi Kualifikasi untuk terakreditasi
		12) Jumlah calon pekerja migran Indonesia/ calon tenaga kerja indonesia (CPMI/CTKI) yang diberikan pelatihan	Tidak ada	DISNAKERTRANS	Tidak ada data (Surat Pernyataan)
		13) Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CPMI/CTKI)	Tidak ada	DISNAKERTRANS	Tidak ada data (Surat Pernyataan)
		14) Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	$\frac{0}{1951} \text{ Perusahaan} \times 100\%$ = 0 %	DISNAKERTRANS	Tidak ada data (Surat Pernyataan)
		15) Persentase lembaga pemerintah, swasta dan pendidikan yang menjadi jejaring peningkatan produktivitas	$\frac{0}{19} \text{ lembaga} \times 100\%$ = 0 %	DISNAKERTRANS	Tidak ada data (Surat Pernyataan)



No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		16) Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	$\frac{263}{283}$ perusahaan x100% = 92,93%	DISNAKERTRANS	Data Terlampir pada dokumen pendukung
		17) Persentase perusahaan yang telah memiliki PKB	$\frac{102}{91}$ perusahaan x100% = 112,09%	DISNAKERTRANS	Data Terlampir pada dokumen pendukung
		18) Rekapitulasi tahunan jumlah anggota Serikat pekerja/serikat buruh di perusahaan pada tahun n	11.372 Orang	DISNAKERTRANS	Data Terlampir pada dokumen pendukung
		19) Persentase perusahaan yang sudah Menyusun struktur skala upah	$\frac{298}{262}$ perusahaan x100% = 113,31%	DISNAKERTRANS	Data Terlampir pada dokumen pendukung
		20) Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	$\frac{374}{1951}$ perusahaan x100% = 19,17%	DISNAKERTRANS	Data Terlampir pada dokumen pendukung
		21) Persentase perusahaan yang telah membentuk LKS Bipartit	$\frac{90}{1951}$ perusahaan x100% = 4,61%	DISNAKERTRANS	Data Terlampir pada dokumen pendukung
		22) Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	$\frac{16}{1951}$ perusahaan x100% = 0,82%	DISNAKERTRANS	Data Terlampir pada dokumen pendukung
		23) Jumlah mogok kerja	0 Kasus	DISNAKERTRANS	Data Terlampir pada dokumen pendukung
		24) Jumlah penutupan perusahaan	0 Perusahaan	DISNAKERTRANS	Data Terlampir pada dokumen pendukung
		25) Jumlah perselisihan kepentingan	6 Kasus	DISNAKERTRANS	Data Terlampir pada dokumen pendukung
		26) Jumlah perselisihan hak	29 Kasus	DISNAKERTRANS	Data Terlampir pada dokumen pendukung
		27) Jumlah perselisihan antar SP/SB di perusahaan	Tidak ada	DISNAKERTRANS	Tidak ada data (surat pernyataan)



No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		28) Jumlah perselisihan PHK	119 Kasus	DISNAKERTRANS	Data Terlampir pada dokumen pendukung
		29) Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK	145 Orang	DISNAKERTRANS	Data Terlampir pada dokumen pendukung
		30) Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartit	143 Kasus	DISNAKERTRANS	Data Terlampir pada dokumen pendukung
		31) Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit yang diberdayakan	Ada	DISNAKERTRANS	Data Terlampir pada dokumen pendukung
		32) Upah Minimum yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan	Rp. 3.016.738,00	DISNAKERTRANS	Terlampir SK UMP 2021 Kalimantan Utara
		33) Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Internasional	$\frac{8}{154} kasus \times 100\%$ = 5,19%	DISNAKERTRANS	Data Terlampir pada dokumen pendukung
		34) Jumlah rekomendasi persetujuan penempatan tenaga kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) yang diberikan oleh dinas provinsi	3 Rekomendasi	DISNAKERTRANS	Data Terlampir pada dokumen pendukung
		35) Jumlah surat persetujuan penempatan antar kerja lokal (SPP AKL) kabupaten/kota dalam satu wilayah provinsi yang diterbitkan oleh dinas provinsi	0 Surat Persetujuan	DISNAKERTRANS	Tidak Ada Permohonan
		36) Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan langsung oleh swasta dalam satu wilayah provinsi	0 Orang	DISNAKERTRANS	Belum ada Laporan
		37) Jumlah lowongan pekerjaan yang tersedia dalam satu wilayah provinsi	155 Lowongan Pekerjaan	DISNAKERTRANS	Terlampir jenis lowongan dan jabatan yang tersedia
		38) Jumlah tenaga kerja khusus terdaftar dalam satu provinsi	20 Orang	DISNAKERTRANS	Data Terlampir pada Dokumen Pendukung
		39) Jumlah pejabat fungsional pengantar kerja	4 Orang	DISNAKERTRANS	Pejabat Fungsional berada di Kota Tarakan
		40) Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) yang	0 Lembaga	DISNAKERTRANS	Tidak Ada Permohonan (Surat Pernyataan)



No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah Provinsi			
		41) Jumlah Lembaga Tenaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga (LPPRT) yang mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah Provinsi	0 Lembaga	DISNAKERTRANS	Tidak ada permohonan (Surat Pernyataan)
		42) Jumlah penempatan tenaga kerja melalui informasi pasar kerja (IPK) online/sistem informasi ketenagakerjaan (SISNAKER)	6 Orang	DISNAKERTRANS	Data Terlampir pada dokumen pendukung
		43) Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang difasilitasi kepulangannya	$\frac{758}{758} PMI \times 100\%$ = 100%	DISNAKERTRANS	Data Terlampir pada dokumen pendukung
		44) Jumlah ijin kantor cabang perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia (P3MI)/ perusahaan penempatan tenaga kerja Indonesia swasta (PPTKIS) yang diterbitkan	6 Ijin Kantor Cabang	DISNAKERTRANS	Data Terlampir pada dokumen pendukung
		45) Jumlah pos pelayanan keberangkatan dan kepulangan pekerja migran Indonesia (PMI)/ tenaga kerja Indonesia (TKI)	$\frac{1 \text{ Pos Pelayanan}}{1 \text{ Debarkasi/embarikasi}} \times 100\%$ = 100%	DISNAKERTRANS	Data Terlampir pada dokumen pendukung
		46) Jumlah perusahaan yang menerapkan norma kebebasan berserikat	90 Perusahaan	DISNAKERTRANS	Data Terlampir pada dokumen pendukung
		47) Jumlah perusahaan yang menerapkan norma waktu kerja dan waktu istirahat	90 Perusahaan	DISNAKERTRANS	Data Terlampir pada dokumen pendukung
		48) Jumlah perusahaan yang menerapkan norma pengupahan	90 Perusahaan	DISNAKERTRANS	Data Terlampir pada dokumen pendukung
		49) Jumlah perusahaan yang menerapkan norma jaminan sosial	90 Perusahaan	DISNAKERTRANS	Data Terlampir pada dokumen pendukung
		50) Jumlah perusahaan yang menerapkan norma kerja perempuan	90 Perusahaan	DISNAKERTRANS	Data Terlampir pada dokumen pendukung



No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran		Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		51)	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma keselamatan dan Kesehatan kerja	90 Perusahaan	DISNAKERTRANS	Data Terlampir pada dokumen pendukung
		52)	Jumlah penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan	0 Penyidikan	DISNAKERTRANS	tidak
		53)	Jumlah perusahaan yang mendaftarkan Wajib Laport Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP) online	1.951 Perusahaan	DISNAKERTRANS	Data Terlampir pada dokumen pendukung
8.	Perindungan Perempuan Dan Perindungan Anak	1)	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah provinsi yang telah dilatih PUG	42 Perangkat Daerah	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPPAPPKB)	Data Terlampir pada dokumen pendukung
		2)	Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat provinsi	61 Program	DPPPAPPKB	Data Terlampir pada dokumen pendukung
		3)	Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemprov (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	Ada 5 (lima)	DPPPAPPKB	Data Terlampir pada dokumen pendukung
		4)	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	Ada 1 (satu)	DPPPAPPKB	Data Terlampir pada dokumen pendukung
		5)	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	$\frac{169}{169} Kasus \times 100\%$ = 100%	DPPPAPPKB	Data Terlampir pada dokumen pendukung
		6)	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan	42 Lembaga	DPPPAPPKB	Data Terlampir pada dokumen pendukung
		7)	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan	14 Lembaga	DPPPAPPKB	Data Terlampir pada dokumen pendukung



No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		keuangan/fasilitas oleh Pemerintah Daerah Provinsi (APBD provinsi)			
		8) Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	43 Program	DPPPAPPKB	Data Terlampir pada dokumen pendukung
		9) Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan hak perempuan yang telah terstandarisasi	1 (satu) Lembaga	DPPPAPPKB	- UPTD PPA
		10) Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	$\frac{123}{123} \text{ Kasus} \times 100\%$ = 100%	DPPPAPPKB	Data Terlampir pada dokumen pendukung
		11) Jumlah lembaga layanan perempuan yang mendapat pelatihan	42 Lembaga	DPPPAPPKB	Data Terlampir pada dokumen pendukung
		12) Jumlah lembaga layanan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh Pemerintah Daerah Provinsi (APBD provinsi)	14 Lembaga	DPPPAPPKB	Data Terlampir pada dokumen pendukung
9.	Pangan	1) Tersedianya infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	Tidak ada	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Tidak ada (Surat Pernyataan)
		2) Tersedianya dan tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	Tidak ada	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Tidak ada (Surat Pernyataan)
		3) Tersedianya cadangan beras pemerintah provinsi	29,96 Ton	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Dibuktikan dengan table perhitungan Cadangan beras Pemerintah Provinsi (CBPP)
		4) Tersedianya harga referensi daerah untuk pangan lokal	Tidak ada	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Tidak ada regulasi harga referensi daerah untuk pangan lokal, dibuktikan dengan dilampirkan surat pernyataan



No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan	
		5)	Terpromosikannya target konsumsi pangan sesuai dengan angka kecukupan gizi	2 Kali	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Dilampirkan dengan adanya Sosialisasi diservikasi pangan lokal
		6)	Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan provinsi	Ada, PETA ketahanan dan kerentanan pangan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Dibuktikan dengan adanya dokumen FSVA
		7)	Tersedianya informasi situasi kerentanan pangan dan gizi provinsi	Tidak ada	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Tidak ada (Surat Pernyataan)
		8)	Tertanganinya kejadian kerawanan pangan	Tidak ada	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Tidak ada (Surat Pernyataan)
		9)	Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rawan bencana pangan	Tidak ada	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Tidak ada (Surat Pernyataan)
		10)	Teregistrasi dan tersertifikasi pangan segar di pasar modern	Ada (9 CV Teregistrasi dan Tersertifikasi)	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Dibuktikan dengan dilampirkannya data registrasi dan Sertifikasi pangan segar asal Tumbuhan (PSAT)
10.	Pertanahan	1)	Persentase Surat keputusan penetapan tanah lokasi	$\frac{1}{1} \times 100\%$ = 100%	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Data terlampir pada dokumen pendukung
		2)	Jumlah masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan yang terselesaikan	$\frac{1}{1} \times 100\%$ = 100%	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Data terlampir pada dokumen pendukung
		3)	SK Izin Lokasi yang diterbitkan oleh gubernur	Tidak ada	DPMPPTSP	Tidak ada data (Surat Pernyataan)
		4)	Dokumen Peletakan lokasi rencana penggunaan tanah yang telah jelas tahapan kegiatan dan penganggarannya	Tidak ada	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Tidak ada data (Surat Pernyataan)
11.	Lingkungan Hidup	1)	Hasil perhitungan provinsi terhadap : a. Indeks kualitas air (IKA) b. Indeks Kualitas Udara (IKU) c. Indeks tutupan hutan (ITH)	a. IKA : 57,46 b. IKU : 94,52 c. ITH : 100	Dinas Lingkungan Hidup	Data Terlampir pada dokumen pendukung
		2)	Data izin lingkungan PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi.	$\frac{31}{31} \text{ Ijin} \times 100\%$ = 100%	Dinas Lingkungan Hidup	Data Terlampir pada dokumen pendukung



No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan	
		3)	Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di provinsi terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah provinsi	6,45 %	Dinas Lingkungan Hidup	Tidak ada (Surat Pernyataan)
		4)	Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di dua atau lebih daerah kab/kota dalam 1 provinsi	Tidak ada	Dinas Lingkungan Hidup	Tidak ada (Surat Pernyataan)
		5)	Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH	Tidak ada	Dinas Lingkungan Hidup	Tidak ada (Surat Pernyataan)
		6)	Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH	Tidak ada	Dinas Lingkungan Hidup	Tidak ada (Surat Pernyataan)
		7)	Penanganan pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan dan atau izin PPLH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi dan usaha dan atau kegiatan yang lokasi dan berdampak lintas kabupaten/kota	$\frac{2}{2} \text{ pengaduan} \times 100\%$ = 100%	Dinas Lingkungan Hidup	Data Terlampir pada dokumen pendukung
12.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1)	Fasilitasi pelayanan Adminduk	$\frac{5}{5} \text{ kab/kota} \times 100\%$ = 100 %	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DISUKCAPIL)	Data Terlampir pada dokumen pendukung
		2)	Fasilitasi pelayanan Adminduk	$\frac{5}{5} \text{ kab/kota} \times 100\%$ = 100 %	DISDUKCAPIL	Data Terlampir pada dokumen pendukung
13.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1)	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	19 Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD)	Data Terlampir pada dokumen pendukung
		2)	Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	19 Desa	DPMD	Data Terlampir pada dokumen pendukung



No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan			
		3)	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	102 Lembaga	DPMD	Daftar terlampir pada data dukung		
		4)	Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	8 Lembaga	DPMD	Daftar terlampir pada data dukung		
		5)	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	19 Desa	DPMD	Data Terlampir pada dokumen pendukung		
		6)	Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	19 Desa	DPMD	Data Terlampir pada dokumen pendukung		
		7)	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	102 Lembaga	DPMD	Daftar terlampir pada data dukung		
		8)	Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	8 Lembaga	DPMD	Daftar terlampir pada data dukung		
		14.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1)	Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan	Ada	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPPAPPKB)	Data Terlampir pada dokumen pendukung
				2)	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	21,4 %	DPPPAPPKB	Data Terlampir pada dokumen pendukung



No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		3) Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15- 19)	33,9 %	DPPPAPPKB	Data Terlampir pada dokumen pendukung
		4) Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBP (advokasi dan KIE)	77,03 %	DPPPAPPKB	Data Terlampir pada dokumen pendukung
		5) Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBP	30 Orang	DPPPAPPKB	Data Terlampir pada dokumen pendukung
		6) Persentase Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	$\frac{352}{361} \text{ Faskes} \times 100\%$ = 97,5%	DPPPAPPKB	Data Terlampir pada dokumen pendukung
		7) Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	56,27 %	DPPPAPPKB	Data Terlampir pada dokumen pendukung
		8) Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki Kelompok Kerja KKBP yang efektif	13 POKJA	DPPPAPPKB	Data Terlampir pada dokumen pendukung
		9) Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	$\frac{7775}{17.513} \text{ Peserta} \times 100\%$ = 44,4 %	DPPPAPPKB	Data Terlampir pada dokumen pendukung
		10) Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah	33,19 %	DPPPAPPKB	Data Terlampir pada dokumen pendukung
		11) Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	49,62 %	DPPPAPPKB	Data Terlampir pada dokumen pendukung
15.	Perhubungan	1) Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe B	Belum Bisa Dinilai	Dinas Perhubungan	Hingga saat ini belum terdapat terminal penumpang angkutan jalan tipe B wilayah Kalimantan Utara



No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		2) Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam provinsi serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang melampaui 1 daerah kabupaten/kota dalam 1 daerah provinsi kelas ekonomi	$\frac{4}{4} \times 100\%$ = 100 %	Dinas Perhubungan	Data Terlampir pada dokumen pendukung
		3) Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untu jaringan jalan provinsi	$\frac{21.905}{50.636} \times 100\%$ = 43,26 %	Dinas Perhubungan	Data Terlampir pada dokumen pendukung
16.	Komunikasi dan Informatika	1) Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	$\frac{22}{42} OPD \times 100\%$ = 52,38 %	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (DKISP)	Daftar Terlampir pada dokumen pendukung
		2) Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	$\frac{22}{42} OPD \times 100\%$ = 52,38 %	DKISP	Daftar Terlampir pada dokumen pendukung
		3) Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah	Ada	DKISP	Data Terlampir pada dokumen pendukung
		4) Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrasi Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara	$\frac{149}{241} Kegiatan \times 100\%$ = 61,83 %	DKISP	Data Terlampir pada dokumen pendukung



No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		5) Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	$\frac{34}{42} OPD \times 100\%$ = 80,95 %	DKISP	Data Terlampir pada dokumen pendukung
		6) Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundangundangan	$\frac{42}{42} OPD \times 100\%$ = 100 %	DKISP	Data Terlampir pada dokumen pendukung
		7) Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	$\frac{15}{16} Layanan \times 100\%$ = 93,75 %	DKISP	Data Terlampir pada dokumen pendukung
		8) Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	$\frac{118}{241} Layanan \times 100\%$ = 48,96 %	DKISP	Data Terlampir pada dokumen pendukung
		9) Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	$\frac{85}{93} Layanan \times 100\%$ = 91,40 %	DKISP	Data Terlampir pada dokumen pendukung
		10) Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	$\frac{196}{289} Layanan \times 100\%$ = 67,82 %	DKISP	Data Terlampir pada dokumen pendukung
		11) Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	$\frac{34}{42} OPD \times 100\%$ = 80,95 %	DKISP	Data Terlampir pada dokumen pendukung
		12) Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	$\frac{36}{42} OPD \times 100\%$ = 85,71 %	DKISP	Data Terlampir pada dokumen pendukung
		13) Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai	$\frac{36}{42} OPD \times 100\%$	DKISP	Data Terlampir pada dokumen pendukung



No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	= 85,71 %		
		14) Persentase data yang dapat berbagi pakai	$\frac{247}{247} \text{ data} \times 100\%$ = 100 %	DKISP	Data Terlampir pada dokumen pendukung
		15) Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	$\frac{9}{42} \text{ OPD} \times 100\%$ = 21,43 %	DKISP	Data Terlampir pada dokumen pendukung
		16) Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	$\frac{10}{12} \text{ ASN} \times 100\%$ = 83,33 %	DKISP	Data Terlampir pada dokumen pendukung
		17) Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi egovernment	Ada 1. Laporan Akhir Blueprint Perencanaan Pengembangan E-Government Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara 2. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 51 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 3. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.584/2021 Tentang Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2021	DKISP	Data Terlampir pada dokumen pendukung
		18) Persentase masyarakat/mitra komunitas strategis pemerintah daerah provinsi yang menyebarkan informasi dan	$\frac{24}{32} \text{ Komunitas} \times 100\%$ = 75 %	DKISP	Data Terlampir pada dokumen pendukung



No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi			
		19) Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	$\frac{1046}{1046} \text{ Konten} \times 100\%$ = 100 %	DKISP	Data Terlampir pada dokumen pendukung
		20) Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	$\frac{8}{8} \text{ Layanan} \times 100\%$ = 100 %	DKISP	Data Terlampir pada dokumen pendukung
17.	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1) Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	0 %	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil dan Menengah (DISPERINDAGKOP UKM)	Tidak ada (Surat Pernyataan)
		2) Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam oleh koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	0%	DISPERINDAGKOP UKM	Tidak ada (Surat Pernyataan)
		3) Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	$\frac{30}{30} \text{ Koperasi} \times 100\%$ = 100 %	DISPERINDAGKOP UKM	Data Terlampir pada dokumen pendukung
		4) Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah	0%	DISPERINDAGKOP UKM	Tidak ada (Surat Pernyataan)



No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi			
		5) Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	$\frac{4}{30} \text{ Koperasi} \times 100\%$ = 413,33 %	DISPERINDAGKOP UKM	Data Terlampir pada dokumen pendukung
		6) Persentase jumlah anggota operasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	$\frac{12}{480} \text{ Anggota} \times 100\%$ = 2,5 %	DISPERINDAGKOP UKM	Data Terlampir pada dokumen pendukung
		7) Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	0 %	DISPERINDAGKOP UKM	Tidak ada (Surat Pernyataan)
		8) Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	$\frac{4}{30} \text{ Koperasi} \times 100\%$ = 13,34 %	DINAS KOMINFO	Data Terlampir pada dokumen pendukung
		9) Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	0 %	DISPERINDAGKOP UKM	Tidak ada (Surat Pernyataan)
		10) Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas	0 %	DISPERINDAGKOP UKM	Tidak ada (Surat Pernyataan)



No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi			
11)		Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	$\frac{30}{30} \text{ Koperasi} \times 100\%$ = 100 %	DISPERINDAGKOP UKM	Data Terlampir pada dokumen pendukung
12)		Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	0 %	DISPERINDAGKOP UKM	Tidak ada (Surat Pernyataan)
13)		Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala kecil	$\frac{2.757 - 1.957}{2.757} \text{ Wirausaha} \times 100\%$ = 30,47 %	DISPERINDAGKOP UKM	Data Terlampir pada dokumen pendukung
14)		Persentase jumlah usaha kecil yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)	$\frac{1.880}{2.757} \text{ Usaha Kecil} \times 100\%$ = 30,47 %	DISPERINDAGKOP UKM	Data Terlampir pada dokumen pendukung
15)		Persentase jumlah usaha kecil yang bermitra	$\frac{54}{2.757} \text{ Usaha Kecil} \times 100\%$ = 1,95 %	DISPERINDAGKOP UKM	Data Terlampir pada dokumen pendukung
16)		Persentase jumlah usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	$\frac{629}{2.757} \text{ Usaha Kecil} \times 100\%$ = 22,81 %	DISPERINDAGKOP UKM	Data Terlampir pada dokumen pendukung
17)		Persentase jumlah usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	$\frac{138}{2.757} \text{ Usaha Kecil} \times 100\%$ = 5,01 %	DISPERINDAGKOP UKM	Data Terlampir pada dokumen pendukung
18)		Rasio usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	$\frac{558}{2.757} \text{ Usaha Kecil} \times 100\%$	DISPERINDAGKOP UKM	Data Terlampir pada dokumen pendukung



No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
			= 20,24 %		
		19) Persentase usaha kecil yang diberikan pendampingan kelembagaan dan usaha	$\frac{125}{2.757} \text{ Usaha Kecil} \times 100\%$ = 4,53 %	DISPERINDAGKOP UKM	Data Terlampir pada dokumen pendukung
18.	Penanaman Modal	1) PERDA mengenai pemberian fasilitas/intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah provinsi	Tidak Ada	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)	Tidak ada (Surat Pernyataan)
		2) Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	Tidak Ada	DPMPTSP	Tidak Ada (Surat Pernyataan)
		3) Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	Tidak Ada	DPMPTSP	Tidak Ada (Surat Pernyataan)
		4) Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting	3 Kegiatan	DPMPTSP	Data Terlampir pada dokumen Pendukung
		5) Kegiatan pameran penanaman modal	2 Kegiatan	DPMPTSP	Data Terlampir pada dokumen Pendukung
		6) Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	4 Kegiatan	DPMPTSP	Data Terlampir pada dokumen Pendukung
		7) Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal	7 Konsultasi	DPMPTSP	Data Terlampir pada dokumen Pendukung
		8) Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	655 Izin	DPMPTSP	Daftar Terlampir pada dokumen Pendukung
		9) Laporan realisasi penanaman modal	Rp. 10.030.134.821.093	DPMPTSP	Data Terlampir pada dokumen Pendukung
		10) Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat provinsi serta kabupaten/kota	338 Orang	DPMPTSP	Data Terlampir pada dokumen Pendukung
		11) Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	80 Perusahaan	DPMPTSP	Data Terlampir pada dokumen Pendukung
		12) Tersedianya data dan informasi perizinan dan non peizinan provinsi kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	362 Permintaan	DPMPTSP	Data Terlampir pada dokumen Pendukung



No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
19.	Kepemudaan dan Olahraga	1) Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	450 Pemuda	Dinas Pemuda dan Olahraga	Daftar Terlampir pada Dokumen Pendukung
		2) Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan	Tidak ada	Dinas Pemuda dan Olahraga	Tidak Ada (Surat Pernyataan)
		3) Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda	42 Pemuda	Dinas Pemuda dan Olahraga	Daftar terlampir pada dokumen pendukung
		4) Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	Tidak ada	Dinas Pemuda dan Olahraga	Tidak Ada (Surat Pernyataan)
		5) Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan	28 Orang	Dinas Pemuda dan Olahraga	Data terlampir disertai dengan surat keterangan pada dokumen pendukung
		6) Jumlah atlit yang dibina pada SKO, PPLP dan PPLM	10 Orang Atlet PPLP	Dinas Pemuda dan Olahraga	Data Terlampir pada dokumen pendukung
		7) Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah	2 Multievent Olahraga (31 Cabor)	Dinas Pemuda dan Olahraga	Daftar terlampir pada dokumen pendukung
		8) Jumlah pemuda yang difasilitasi dalam pendidikan kepramukaan	18.536 Pemuda	Dinas Pemuda dan Olahraga	Daftar terlampir pada dokumen pendukung
		9) Jumlah organisasi kepramukaan (kwarda) yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi	1 Kwarda	Dinas Pemuda dan Olahraga	Daftar terlampir pada dokumen pendukung
20.	Statistik	1) Tersedianya buku profil daerah	Ada	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (DKISP)	Data Terlampir pada dokumen pendukung
		2) Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	Ada 21 (dua puluh satu) Survei Statistik Sektoral	DKISP	Data Terlampir pada dokumen pendukung
		3) Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	Ada 41 Kompilasi Statistik	DKISP	Data Terlampir pada dokumen pendukung
		4) Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS	Ada 21 (dua puluh satu) Survei Statistik Sektoral	DKISP	Data Terlampir pada dokumen pendukung



No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan	
		5)	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dr BPS	Ada 2 (dua) Kompilasi Statistik Sektoral	DKISP	Data Terlampir pada dokumen pendukung
		6)	Persentase kelengkapan metadada kegiatan statistik sektoral	$\frac{23}{23} \times 100\%$ = 100 %	DKISP	Data Terlampir pada dokumen pendukung
		7)	Persentase kelengkapan metadada indikator sektoral	$\frac{319}{433} \text{metadada} \times 100\%$ = 73,67 %	DKISP	Data Terlampir pada dokumen pendukung
21.	Persandian	1)	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan	$\frac{0}{0} \text{Kegiatan} \times 100\%$ = 0 %	DKISP	Tidak Ada (Surat Pernyataan)
		2)	Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah	$\frac{50}{50} \text{Sistem} \times 100\%$ = 100 %	DKISP	Data Terlampir pada dokumen pendukung
		3)	Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	$\frac{21}{50} \text{Sistem} \times 100\%$ = 42 %	DKISP	Data Terlampir pada dokumen pendukung
		4)	Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerin (PHKS) yang diterapkan pemerintah daerah berdasarkan pola hubungan komunikasi sandi	$\frac{0}{0} \text{Titik} \times 100\%$ = 0 %	DKISP	Tidak Ada (Surat Pernyataan)
22.	Kebudayaan	1)	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)	338 obyek	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Data Terlampir pada dokumen pendukung
		2)	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan	59 obyek	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Data Terlampir pada dokumen pendukung



No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		(penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman)			
		3) Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman kesejahteraan masyarakat)	36 obyek	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Data Terlampir pada dokumen pendukung
		4) Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)	71	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Data Terlampir pada dokumen pendukung
		5) Register cagar budaya (pendaftaran, pengjasian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	65 Cagar Budaya	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Data Terlampir pada dokumen pendukung
		6) Perlindungan cagar budaya provinsi (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran)	89 Cagar Budaya	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Data Terlampir pada dokumen pendukung
		7) Layanan perizinan membawa cagar budaya provinsi ke luar provinsi dengan dukungan data	Tidak ada	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Tidak Ada (Surat Pernyataan)
		8) Pengembangan cagar budaya Provinsi (penelitian, revitalisasi, adaptasi)	68 Cagar Budaya	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Data Terlampir pada dokumen pendukung
		9) Pemanfaatan cagar budaya Provinsi (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)	15 Cagar Budaya	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Data Terlampir pada dokumen pendukung
		10) Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	125	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Data Terlampir pada dokumen pendukung
		11) Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum	8532 Pengunjung	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Data Terlampir pada dokumen pendukung



No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum.	48 Orang		
		12) Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	125	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Data Terlampir pada dokumen pendukung
		13) Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	6 Tim	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Data Terlampir pada dokumen pendukung
		14) Pembentukan tim ahli cagar budaya provinsi	3 Tim	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Data Terlampir pada dokumen pendukung
		15) Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya	19 Tim	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Data Terlampir pada dokumen pendukung
		16) Pemetaan sdm cagar budaya dan permuseuman	87 Orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Data Terlampir pada dokumen pendukung
		17) Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan permuseuman	Tidak Ada	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Tidak Ada (Surat Pernyataan)
		18) Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman	Tidak ada	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Tidak Ada (Surat Pernyataan)
		19) Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	10 Kegiatan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Data Terlampir pada dokumen pendukung
23.	Perpustakaan	1) Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	$\frac{182.953}{726.989} \times 100\%$ = 0,25	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Data terlampir pada dokumen pendukung
		2) Persentase ketermanfaatkan perpustakaan oleh masyarakat	$\frac{237.656}{726.989} \times 100\%$ = 0,33 %	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Data Terlampir pada dokumen pendukung
		3) Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	$178 : 726.989 = 0,00024$	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Data Terlampir pada dokumen pendukung
		4) Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	$\frac{127}{332} \times 100\%$ = 0,146 %	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Data Terlampir pada dokumen pendukung
		5) Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat	24 Kegiatan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Data Terlampir pada dokumen pendukung



No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran		Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		6)	Jumlah KCKR Daerah yang dihimpun	108 Eksemplar	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Data Terlampir pada dokumen pendukung
		7)	Jumlah judul yang tercantum dalam katalog induk Daerah	1390 Judul	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Data Terlampir pada dokumen pendukung
		8)	Jumlah perpustakaan yang bergabung dalam katalog induk daerah	2 Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Data Terlampir pada dokumen pendukung
		9)	Jumlah terbitan yang terhimpun dalam bibliografi Daerah	92 Terbitan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Data Terlampir pada dokumen pendukung
		10)	Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/terdaftar yang ada di wilayahnya	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Tidak Ada (Surat Pernyataan)
		11)	Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Tidak Ada (Surat Pernyataan)
		12)	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)	8 Judul Koleksi	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Data Terlampir pada dokumen pendukung
24.	Kearsipan	1)	Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	16,67 %	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Data Terlampir pada dokumen pendukung
		2)	Persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	16,67 %	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Data Terlampir pada dokumen pendukung
		3)	Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	100%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Data Terlampir pada dokumen pendukung
		4)	Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	63,63%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Data Terlampir pada dokumen pendukung
		5)	Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	Tidak ada	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Tidak Ada (Surat Pernyataan)
		6)	Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK	Tidak ada	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Tidak Ada (Surat Pernyataan)
		7)	Penyelamatan arsip perangkat daerah provinsi yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran	Tidak ada	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Tidak Ada (Surat Pernyataan)



No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		daerah kabupaten/kota yang sesuai NSPK di provinsi			
		8) Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan provinsi yang sesuai NSPK	63,63%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Data Terlampir pada dokumen pendukung
		9) Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah provinsi yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK	Tidak ada	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Tidak Ada (Surat Pernyataan)
		10) Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah provinsi yang sesuai NSPK	Tidak ada	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Tidak Ada (Surat Pernyataan)
25.	Kelautan dan Perikanan	1) Jumlah laut pedalaman teritorial dan perairan kepulauan yang terkelola sumber daya ikannya (wpp)	WPP 716	Dinas Kelautan dan Perikanan	Data Terlampir pada dokumen pendukung
		2) Jumlah izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran 5 – 30 GT	74 Dokumen	Dinas Kelautan dan Perikanan	Data Terlampir pada dokumen pendukung
		3) Persentase pelabuhan perikanan yang memiliki standar operasional	$\frac{2}{6}$ pelabuhan $\times 100\%$ = 33,33%	Dinas Kelautan dan Perikanan	1. Pelabuhan Perikanan Tengkeyu II 2. SKPT Sebatik
		4) Jumlah izin pembangunan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran diatas 5-30 GT	103 Dokumen	Dinas Kelautan dan Perikanan	Daftar Terlampir
		5) Jumlah kapal yang terdaftar	44498 Unit	Dinas Kelautan dan Perikanan	Data Terlampir pada dokumen pendukung
		6) Jumlah izin usaha perikanan di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 provinsi yang diterbitkan	87 Dokumen	Dinas Kelautan dan Perikanan	Data Terlampir pada dokumen pendukung



No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		7) Persentase luas wilayah laut dan pesisir yang dikelola sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	$\frac{285.940,97}{691.179,52} \text{ ha} \times 100\%$ = 41,37%	Dinas Kelautan dan Perikanan	Data Terlampir pada dokumen pendukung
		8) Jumlah kawasan konservasi perairan atau kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil yang dikelola	$\frac{25.647,49}{29.370,80} \text{ ha} \times 100\%$ = 87,41%	Dinas Kelautan dan Perikanan	Data Terlampir pada dokumen pendukung
		9) Jumlah unit kapal perikanan (10-30GT) yang diperiksa kepatuhannya terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	35	Dinas Kelautan dan Perikanan	Data Terlampir pada dokumen pendukung
		10) Jumlah pembudidayaan ikan yang mempunyai izin usaha perikanan (IUP) provinsi dan kab/kota yang diperiksa kepatuhannya terhadap ketentuan peraturan perundangan	18 Orang	Dinas Kelautan dan Perikanan	Data Terlampir pada dokumen pendukung
		11) Jumlah unit usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan provinsi yang mempunyai izin usaha perikanan provinsi yang diperiksa kepatuhannya (compliance) terhadap peraturan perundangan yang berlaku.	33 UPI	Dinas Kelautan dan Perikanan	Data Terlampir pada dokumen pendukung
		12) Jumlah pemegang izin pemanfaatan ruang laut di bawah 12 mil laut (diluar minyak dan gas bumi) yang diperiksa kepatuhannya (compliance) terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	0 Pelaku Usaha	Dinas Kelautan dan Perikanan	Belum ada (Surat Keterangan)
		13) Jumlah POKMASWAS yang aktif dalam mendukung pengawasan SDKP	27 Pokmaswas	Dinas Kelautan dan Perikanan	Data Terlampir pada dokumen pendukung
		14) Jumlah izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan lintas daerah kab/kota dalam 1 daerah provinsi yang diterbitkan	11 UPI	Dinas Kelautan dan Perikanan	Data Terlampir pada dokumen pendukung



No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran		Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
26.	Pariwisata	1)	Jumlah entitas pengelolaan destinasi	14 Kelompok	Dinas Pariwisata	<p>Kelompok Sadar Wisata Kabupaten/Kota:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tarakan (1) - Nunukan (2) - Bulungan (5) - Malinau (6) <p><i>(Sumber data Dinas Pariwisata Kabupaten / Kota Th 2021)</i></p>
		2)	Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	1382 Infrastruktur Pariwisata	Dinas Pariwisata	<p>Ada, jenis Infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daya Tarik wisata 2. Kawasan pariwisata 3. Jasa transportasi wisata 4. Jasa perjalanan wisata 5. Jasa makan dan minuman 6. Penyedia akomodasi 7. Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi 8. Penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran 9. Jasa informasi pariwisata 10. Jasa konsultan pariwisata 11. Jasa pramuwisata 12. Wisata tirta 13. SPA
		3)	Jumlah nilai realisasi investasi di bidang pariwisata di tingkat provinsi	Rp. 325.727.400.000,00	Dinas Pariwisata	Terdiri dari realisasi investasi Penanaman



No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran		Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
						<p>Modal dalam Negeri (PMDN) sector</p> <ul style="list-style-type: none"> - Industri makanan sejumlah Rp. 270.038.000.000,00 - Hotel dan Restaurant Rp. 668.400.000,00 <p>Penanaman Modal Asing Sektor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Industri makanan sejumlah Rp. 52.162.000.000,00 - Hotel dan Restaurant Rp. 2.859.000,00 <p><i>(Sumber data: DPMPTSP Prov. Kaltara)</i></p>
		4)	Jumlah investasi per sektor usaha di bidang pariwisata	Rp. 325.727.400.000,00	Dinas Pariwisata	<p>Terdiri dari realisasi investasi Penanaman Modal dalam Negeri (PMDN) sector</p> <ul style="list-style-type: none"> - Industri makanan sejumlah Rp. 270.038.000.000,00 - Hotel dan Restaurant Rp. 668.400.000,00 <p>Penanaman Modal Asing Sektor: Industri makanan sejumlah Rp. 52.162.000.000,00</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hotel dan Restaurant Rp. 2.859.000,00 <p><i>(Sumber data: DPMPTSP Prov. Kaltara)</i></p>
		5)	Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di provinsi	579 Usaha Pariwisata	Dinas Pariwisata	Data Terlampir pada Dokumen Pendukung



No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan			
		6)	Rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara	2,53 Hari	Dinas Pariwisata	Sumber data BPS Kaltara Tahun 2021		
		7)	Rata-rata tinggal wisatawan nusantara tingkat hunian akomodasi	1,35 Hari	Dinas Pariwisata	Sumber data BPS Kaltara Tahun 2021		
		8)	Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	1461 Orang	Dinas Pariwisata	Data Terlampir pada Dokumen Pendukung		
		9)	Jumlah perjalanan wisatawan nusantara	308.298 Orang	Dinas Pariwisata	Total dari 5 Kabupaten/Kota (Sumber Data dari Dinas Pariwisata Kabupaten / Kota Tahun 2021)		
		10)	Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	6 Event Daerah	Dinas Pariwisata	Data terlampir pada dokumen pendukung		
		11)	Jumlah event luar negeri yang diikuti provinsi	Tidak ada	Dinas Pariwisata	Tidak Ada (Surat Pernyataan)		
		12)	Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada event promosi pariwisata di dalam negeri	37 Industri	Dinas Pariwisata	Data terlampir pada dokumen pendukung		
		13)	Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi	$\frac{300}{6027} \text{Orang} \times 100\%$ = 4,97 %	Dinas Pariwisata	Data terlampir pada dokumen pendukung		
		14)	Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	$\frac{320}{6207} \text{Orang} \times 100\%$ = 5,16 %	Dinas Pariwisata	Data terlampir pada dokumen pendukung		
		15)	Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	3 Lokasi	Dinas Pariwisata	Data terlampir pada dokumen pendukung		
		27.	Pertanian	1)	Jumlah Sarana dan prasana pertanian yang diberikan	Ada 23 Jenis	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Daftar terlampir pada Dokumen pendukung
				2)	Jumlah penerbitan sertifikasi dan pengawasan benih tanaman hortikultura	Tidak ada	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Belum tersedia dikarenakan belum ada kegiatan sertifikasi benih Hortikultura
				3)	Dokumen pengawasan benih yang beredar	1 Dokumen	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Dilampirkan Rekapitulasi Sertifikasi benih



No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
					perkebunan tahun 2021 Provinsi Kalimantan Utara
		4) Prasarana pertanian yang digunakan	11 Unit	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Bidang PSP dan Bidang Perkebunan
		5) Pengendalian penanggulangan serangan organisme pengganggu pertanian	444,3 Ha	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Data Terlampir pada dokumen pendukung
		6) Luas areal pengendalian dan penganggulangan bencana	1238 Ha	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Data Terlampir pada dokumen pendukung
		7) Penerbitan izin usaha pertanian	7 Pertimbangan Teknis	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Dilampirkan Rekapitulasi Permohonan Pertimbangan Teknis Izin Usaha Komoditi Pertanian di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021
		8) Persentase sarana pertanian yang digunakan	$\frac{18}{18} \times 100\%$ = 100 %	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Data terlampir pada dokumen pendukung
		9) Persentase fasilitasi penganggulangan bencana	$\frac{444,3}{1238} \times 100\%$ = 35,88 %	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Data Terlampir pada dokumen pendukung
		10) Persentase jumlah usulan usaha pertanian	$\frac{7}{7} Usulan \times 100\%$ = 100 %	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Data Terlampir pada dokumen pendukung
28.	Kehutanan	1) Dokumen penataan hutan wilayah KPH	$\frac{0}{5} Unit \times 100\%$ = 0 %	Dinas Kehutanan	Tidak Ada (Surat Pernyataan)
		2) Dokumen rencana pengelolaan hutan jangka panjang dan jangka pendek	$\frac{6 \text{ Dokumen}}{5 \text{ Unit}} \times 100\%$ = 120 % $\frac{5 \text{ Dokumen}}{5 \text{ Unit}} \times 100\%$ = 100 %	Dinas Kehutanan	Data Terlampir pada dokumen pendukung



No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		3) Luas lahan kritis yang direhabilitasi	5.476,62 Ha	Dinas Kehutanan	Data Terlampir pada dokumen pendukung
		4) Luas kebakaran hutan di hutan lindung dan hutan produksi	$\frac{370}{4.385.029,14} Ha \times 100\%$ = 0,008 %	Dinas Kehutanan	Data Terlampir pada dokumen pendukung
		5) Penurunan luas gangguan kawasan hutan melalui operasi pengamanan hutan (illegal logging dan perambahan)	$\frac{397}{4.3385.029,14} Ha \times 100\%$ = 0.009 %	Dinas Kehutanan	Data Terlampir pada dokumen pendukung
		6) Jumlah hasil izin usaha industri primer hasil hutan kayu dengan kapasitas izin 6.000m3 per tahun yang aktif	$\frac{7}{31} Unit \times 100\%$ = 22,58 %	Dinas Kehutanan	Data Terlampir pada dokumen pendukung
		7) Tersedianya dokumen rencana pengelolaan hutan	Tidak ada	Dinas Kehutanan	Tidak Ada (Surat Pernyataan)
		8) Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga	32 Kelompok	Dinas Kehutanan	Data Terlampir pada dokumen pendukung
		9) Pemulihan ekosistem pada Tahura	0 Ha	Dinas Kehutanan	Tidak Ada (Surat Pernyataan)
		10) Menurunnya gangguan kawasan Tahura	Tidak Ada	Dinas Kehutanan	Tidak Ada (Surat Pernyataan)
		11) Jumlah ketersediaan penyuluh kehutanan	$\frac{70 \text{ Orang}}{53 \text{ Kecamatan}} Unit \times 100\%$ = 132,07 %	Dinas Kehutanan	Data Terlampir pada dokumen pendukung
		12) Jumlah sarana dan prasarana kegiatan penyuluhan	$\frac{124 \text{ Unit}}{70 \text{ Orang}} \times 100\%$ = 177,14 %	Dinas Kehutanan	Data Terlampir pada dokumen pendukung
		13) Jumlah KTH yang diberikan pendidikan dan pelatihan	$\frac{20}{83} Unit \times 100\%$ = 24,10 %	Dinas Kehutanan	Data Terlampir pada dokumen pendukung



No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		14) Fasilitas kegiatan peningkatan kapasitas usaha pada kelompok perhutanan sosial	138 Kelompok	Dinas Kehutanan	Data Terlampir pada dokumen pendukung
		15) Terusunnya rencana pengelolaan DAS lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 provinsi	0 %	Dinas Kehutanan	Tidak Ada (Surat Pernyataan)
		16) Terbentuknya forum komunikasi DAS yang mendukung keterpaduan lintas sektor	1 Forum DAS	Dinas Kehutanan	Data Terlampir pada dokumen pendukung
29.	Energi dan Sumber Daya Mineral	1) Perda/Pergub terkait zonasi kawasan konservasi air tanah dalam daerah provinsi	Tidak ada	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (Dinas ESDM)	Tidak Ada (Surat Pernyataan)
		2) Peta konservasi air tanah dalam daerah provinsi	Tidak ada	Dinas ESDM	Tidak Ada (Surat Pernyataan)
		3) Perda/Pergub terkait izin penggalian, pemakaian dan izin perusahaan air tanah dalam area provinsi	Tidak ada	Dinas ESDM	Tidak Ada (Surat Pernyataan)
		4) Perda/Pergub terkait izin penggalian, pemakaian dan izin perusahaan air tanah dalam area provinsi	1	Dinas ESDM	Data Terlampir pada dokumen pendukung
		5) Perda/Pergub terkait penetapan nilai perolehan air tanah	1	Dinas ESDM	Data Terlampir pada dokumen pendukung
		6) Perda/Pergub terkait dengan tata ruang wilayah RZWP3K dalam daerah provinsi	Tidak ada	Dinas ESDM	Tidak Ada (Surat Pernyataan)
		7) Perda/Pergub terkait dengan perizinan mineral bukan logam dan batuan dalam daerah provinsi	Tidak ada	Dinas ESDM	Tidak Ada (Surat Pernyataan)
		8) Perda/Pergub terkait IUJP	Tidak ada	Dinas ESDM	Tidak Ada (Surat Pernyataan)
		9) Perda/Pergub terkait penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan sesuai UU 28/2009	2	Dinas ESDM	Data Terlampir pada dokumen pendukung
		10) Izin pemanfaatan langsung yang diterbitkan	Tidak ada	Dinas ESDM	Tidak Ada (Surat Pernyataan)



No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		11) Jumlah penerbitan SKT panas bumi dalam 1 tahun	Tidak ada	Dinas ESDM	Tidak Ada (Surat Pernyataan)
		12) SK izin usaha niaga bahan bakar nabati	Tidak ada	Dinas ESDM	Tidak Ada (Surat Pernyataan)
		13) Perda/Pergub terkait usaha penyediaan tenaga listrik dalam daerah provinsi (tata cara penerbitan, pembinaan dan pengawasan)	Tidak ada	Dinas ESDM	Tidak Ada (Surat Pernyataan)
		14) Penerbitan izin operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi	Tidak ada	Dinas ESDM	Tidak Ada (Surat Pernyataan)
		15) Perda/Pergub terkait penetapan tarif tenaga listrik pemegang izin yang ditetapkan oleh pemerintah daerah provinsi	Tidak ada	Dinas ESDM	Tidak Ada (Surat Pernyataan)
		16) Surat Persetujuan Gubernur terkait harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik, penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin yang ditetapkan oleh pemerintah daerah provinsi	Tidak ada	Dinas ESDM	Tidak Ada (Surat Pernyataan)
		17) Penerbitan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha dalam negeri/mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri kecuali untuk jasa pemeriksaan dan pengujian di bidang tenaga listrik tegangan rendah	Tidak ada	Dinas ESDM	Tidak Ada (Surat Pernyataan)
		18) Pelaksanaan pembangunan listrik perdesaan dan penyambungan listrik gratis bagi masyarakat tidak mampu	12.391 Rumah Tangga	Dinas ESDM	Data terlampir pada Dokumen Pendukung
30.	Perdagangan	1) Persentase pelaku usaha yang memperoleh fasilitas promosi dagang	$\frac{8}{10}$ Pelaku usaha $\times 100\%$ = 80 %	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil dan Menengah (DISPERINDAGKOP UKM)	Data Terlampir pada dokumen pendukung



No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		2) Persentase pelaku usaha yang memperoleh fasilitas pengembangan produk	0 %	DISPERINDAGKOP UKM	Tidak Ada (Surat Pernyataan)
		3) Persentase pelaku usaha yang memperoleh pelatihan/ fasilitas peningkatan kapasitas terkait ekspor	$\frac{214}{3.253} \text{ Pelaku usaha } \times 100\%$ = 6,58 %	DISPERINDAGKOP UKM	Data Terlampir pada dokumen pendukung
		4) Persentase pelaku usaha yang menjadi eksportir baru	0 %	DISPERINDAGKOP UKM	Tidak Ada (Surat Pernyataan)
		5) Jumlah penanganan pengaduan konsumen	1 Pengaduan Konsumen	DISPERINDAGKOP UKM	Data terlampir pada dokumen pendukung
		6) Jumlah konsumen dan pelaku usaha yang tereduksi	64	DISPERINDAGKOP UKM	Data Terlampir pada dokumen pendukung
		7) Jumlah komoditi potensial yang dipantau	0%	DISPERINDAGKOP UKM	Tidak Ada (Surat Pernyataan)
		8) Indeks Kinerja BPSMB	0%	DISPERINDAGKOP UKM	Tidak Ada (Surat Pernyataan)
		9) Persentase SIUP Minuman Beralkohol (MB) bebas bea yang diterbitkan	0%	DISPERINDAGKOP UKM	Tidak Ada (Surat Pernyataan)
		10) Persentase rekomendasi SIUP MB bagi Distributor yang diterbitkan	0%	DISPERINDAGKOP UKM	Tidak Ada (Surat Pernyataan)
		11) Persentase SIUP Bahan Berbahaya bagi pengecer yang diterbitkan	0%	DISPERINDAGKOP UKM	Tidak Ada (Surat Pernyataan)
		12) Persentase penerbitan SIUP MB Gol B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum di tempat	0%	DISPERINDAGKOP UKM	Tidak Ada (Surat Pernyataan)
		13) Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu	$\frac{1.900}{1.900} \text{ SKA } \times 100\%$ = 100 %	DISPERINDAGKOP UKM	Data Terlampir pada dokumen pendukung
		14) Pengawasan pupuk dan pestisida terhadap pengadaan penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi dan pestisida per tahun di provinsi	$\frac{7.246}{344.510.303} \times 100\%$ = 0,0021 %	DISPERINDAGKOP UKM	Data Terlampir pada dokumen pendukung



No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan	
		15)	Jumlah barang beredar yang diawasi	25.000 Barang	DISPERINDAGKOP UKM	Data Terlampir pada dokumen pendukung
		16)	Beroperasinya pusat distribusi yang melayani wilayah provinsi a. Tersedianya bangunan pusat distribusi b. Telah ditetapkannya badan usaha pengelola pusat distribusi c. Beroperasinya pusat industri d. Menguasai 20% pangsa pasar pada komoditas yang ditangani	$(0.25+0.25+0.25+0.25) \times 100 \%$ = 100 %	DISPERINDAGKOP UKM	Data Terlampir pada dokumen pendukung
		17)	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	16,11 %	DISPERINDAGKOP UKM	Data Terlampir pada dokumen pendukung
		18)	Persentase laporan harga harian melalui sistem informasi harga Kemendag	100 %	DISPERINDAGKOP UKM	Data Terlampir pada dokumen pendukung
31.	Perindustrian	1)	Persentase terselesaikannya dokumen RPIP sampai dengan ditetapkannya menjadi perda	100%	DISPERINDAGKOP UKM	Data Terlampir pada dokumen pendukung
		2)	Persentase jumlah izin usaha industri (IUI) besar yang diterbitkan	$\frac{2}{2} \text{ Izin} \times 100\%$ = 100 %	DISPERINDAGKOP UKM	Data Terlampir pada dokumen pendukung
		3)	Persentase jumlah izin perluasan industri IPUI) bagi industri besar yang diterbitkan	0%	DISPERINDAGKOP UKM	Tidak Ada (Surat Pernyataan)
		4)	Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 provinsi	0%	DISPERINDAGKOP UKM	Tidak Ada (Surat Pernyataan)
		5)	Persentase data perusahaan industri besar dan perusahaan kawasan industri lintas kabupaten/kota yang masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahaan industri besar	$\frac{22}{40} \text{ DATA} \times 100\%$ = 55 %	DISPERINDAGKOP UKM	Data Terlampir pada dokumen pendukung



No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan	
		dan perusahaan kawasan industri lintas kab/kota				
32.	Transmigrasi	1)	Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannya	3 Kawasan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (DISNAKERTRANS)	Data Terlampir pada dokumen pendukung
		2)	Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	1 SP	(DISNAKERTRANS)	Data Terlampir pada dokumen pendukung
		3)	Jumlah satuan permukiman transmigrasi yang difasilitasi pembinaannya	7 SP	(DISNAKERTRANS)	Data Terlampir pada dokumen pendukung

2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1.	Pendidikan	1)	Tingkat partisipasi warga negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah $\frac{26.409}{29.446} \times 100\%$ = 89,69 %	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Data Terlampir pada dokumen pendukung
		2)	Tingkat partisipasi warga negara usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus $\frac{533}{533} \times 100\%$ = 100 %	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Data Terlampir pada dokumen pendukung
2.	Kesehatan	1)	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan $\frac{976}{747.415} \times 100\%$ = 1,308 %	Dinas Kesehatan	Data Terlampir pada dokumen pendukung
		2)	Persentase RS Rujukan provinsi yang terakreditasi $\frac{5}{5} \text{ Rumah sakit} \times 100\%$ = 100 %	Dinas Kesehatan	Data Terlampir pada dokumen pendukung



No.	Urusan Pemerintahan		Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		3)	Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	$\frac{449}{449} \text{ Penduduk} \times 100\%$ = 100 %	Dinas Kesehatan	Tidak terjadi bencana maka tidak masuk dalam perhitungan
		4)	Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB provinsi	$\frac{399}{399} \text{ orang} \times 100\%$ = 100 %	Dinas Kesehatan	Data Terlampir pada dokumen pendukung
3.	Pekerjaan Umum	1)	Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	Tidak ada	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Dinas PUPR PERKIM)	Tidak Ada (Surat Pernyataan)
		2)	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan provinsi	Tidak ada	Dinas PUPR PERKIM	Tidak Ada (Surat Pernyataan)
		3)	Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi	$\frac{536,01}{1102} \times 100\%$ = 48,59 %	Dinas PUPR PERKIM	Data terlampir pada dokumen pendukung
		4)	Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota	Tidak ada	Dinas PUPR PERKIM	Tidak Ada (Surat Pernyataan)
		5)	Rasio pelayanan pengolahan limbah domestik oleh SPAL Regional	Tidak ada	Dinas PUPR PERKIM	Tidak Ada (Surat Pernyataan)
		6)	Rasio kemantapan jalan	$\frac{130.639}{851.877} \text{ Km} \times 100\%$ = 15,33 %	Dinas PUPR PERKIM	Data terlampir pada dokumen pendukung
		7)	Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang	$\frac{430}{720} \times 100\%$	Dinas PUPR PERKIM	Data terlampir pada dokumen pendukung



No.	Urusan Pemerintahan		Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
			dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli	= 59,72 %		
4.	Perumahan Rakyat	1)	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	$\frac{0}{2} \text{Rumah} \times 100\%$ = 0 %	Dinas PUPR PERKIM	Data terlampir pada dokumen pendukung
		2)	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	0 %	Dinas PUPR PERKIM	Tidak Ada (Surat Pernyataan)
		3)	Persentase Luas kawasan kumuh 10 – 15 Ha yang ditangani	$\frac{52,38}{147,46} \text{Ha} \times 100\%$ = 35,52 %	Dinas PUPR PERKIM	Data terlampir pada dokumen pendukung
		4)	Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU	$\frac{5}{71} \text{Perumahan} \times 100\%$ = 7,04 %	Dinas PUPR PERKIM	Dokumen RISPAM Beluma ada
5.	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1)	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	$\frac{1}{1} \text{Pengaduan} \times 100\%$ = 100 %	Satuan Polisi Pamong Praja	Data terlampir pada dokumen pendukung
		2)	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	$\frac{6}{6} \text{Perda} \times 100\%$ = 100 %	Satuan Polisi Pamong Praja	Data terlampir pada dokumen pendukung
		3)	Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	$\frac{3}{3} \text{Dokumen} \times 100\%$ = 100 %	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	Data terlampir pada dokumen pendukung
		4)	Persentase penanganan pra bencana	$\frac{5}{5} \text{Kab/Kota} \times 100\%$ = 100 %	BPBD	Tidak ada penanganan pra bencana (Surat Pernyataan)



No.	Urusan Pemerintahan		Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		5)	Persentase penanganan tanggap darurat bencana	$\frac{2}{2} Kab/Kota \times 100\%$ = 100 %	BPBD	Tidak ada penanganan tanggap darurat bencana (Surat Pernyataan)
6.	Sosial	1)	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	$\frac{6}{6} orang \times 100\%$ = 100 %	Dinas Sosial	Data Terlampir pada dokumen pendukung
		2)	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	$\frac{88}{928} orang \times 100\%$ = 9,482 %	Dinas Sosial	Data Terlampir pada dokumen pendukung
		3)	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	$\frac{48}{48} orang \times 100\%$ = 100 %	Dinas Sosial	Data Terlampir pada dokumen pendukung
		4)	Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	$\frac{0}{1} orang \times 100\%$ = 0 %	Dinas Sosial	Data Terlampir pada dokumen pendukung
		5)	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	$\frac{50342}{50342} orang \times 100\%$ = 100 %	Dinas Sosial	Data Terlampir pada dokumen pendukung
7.	Tenaga Kerja	1)	Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja	$\frac{3}{5} kab/kota \times 100\%$ = 60 %	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (DISNAKERTRANS)	Data Terlampir pada dokumen pendukung
		2)	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	$\frac{17.524}{372.270} orang \times 100\%$ = 4.33 %	DISNAKERTRANS	Data Terlampir pada dokumen pendukung
		3)	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	$\frac{Rp. 69.816.800.000.000}{372.270 jiwa}$ = Rp.187.543.450	DISNAKERTRANS	Data Terlampir pada dokumen pendukung



No.	Urusan Pemerintahan		Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		4)	Persentase perusahaan yang menerapkan tata Kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	$\frac{279}{5.678} \text{ perusahaan} \times 100\%$ = 4,91 %	DISNAKERTRANS	Data Terlampir pada dokumen pendukung
		5)	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	$\frac{1.669}{3835} \text{ orang} \times 100\%$ = 43,52 %	DISNAKERTRANS	Data Terlampir pada dokumen pendukung
		6)	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan	$\frac{502}{5.678} \text{ orang} \times 100\%$ = 8,84 %	DISNAKERTRANS	Data Terlampir pada dokumen pendukung
8.	Perlindungan Perempuan Dan Perlindungan Anak	1)	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	$Rp \frac{91.268.913.838}{3.511.931.897.820} \times 100\%$ = 2,60 %	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPPAPPKB)	Data Terlampir pada dokumen pendukung
		2)	Rasio kekerasan terhadap anak per 10.000 anak	$\frac{160}{252.782} \text{ orang} \times 100\%$ = 6,32 % Per 10.000 anak	DPPPAPPKB	Data Terlampir pada dokumen pendukung
		3)	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO per 100.000 penduduk perempuan	$\frac{145}{233.140} \text{ orang} \times 100\%$ =62,19 % Per 100.000 Penduduk Perempuan	DPPPAPPKB	Data Terlampir pada dokumen pendukung
9	Pangan	1)	Persentase Cadangan Pangan	$\frac{36.46}{28.283} \text{ Ton} \times 100\%$ = 77,57 %	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Data Terlampir pada dokumen pendukung
10.	Pertanahan	1)	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya	Tidak ada	DPMPPTSP	DPMPPTSP Belum pernah menerima pengajuan izin lokasi



No.	Urusan Pemerintahan		Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
			diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan			sehingga belum diterbitkan/untuk sementara belum ada record data izin lokasi (Surat Pernyataan)
		2)	Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu	$\frac{95.397 M2}{95.397 M2} \times 100\%$ = 100%	Dinas PUPR dan Perkim	Data Terlampir pada dokumen pendukung
		3)	Tersedianya Lokasi Pembangunan lintas kabupaten/kota	Tidak ada	Dinas PUPR dan Perkim	(Surat Pernyataan)
11.	Lingkungan Hidup	1)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi	$(55,93 \times 0,34) + (93,91 \times 0,428) + (100 \times 0,133) + (83,40 \times 0,099)$ = 80,77%	Dinas Lingkungan Hidup	Data Terlampir pada dokumen pendukung
		2)	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	$\frac{6}{20} \text{ ijin} \times 100\%$ = 30 %	Dinas Lingkungan Hidup	Data Terlampir pada dokumen pendukung
12.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1)	Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam satu tahun	$\frac{2}{2} \text{ kali} \times 100\%$ = 100 %	DISDUKCAPIL	Data Terlampir pada dokumen pendukung
		2)	Pemanfaatan data kependudukan	$\frac{11}{11} \text{ OPD} \times 100\%$ = 100 %	DISDUKCAPIL	Data Terlampir pada dokumen pendukung
13.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1)	Persentase pengentasan desa tertinggal	$\frac{46}{142} \text{ desa} \times 100\%$ = 32,39 %	DPMD	Data Terlampir pada dokumen pendukung
		2)	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	$\frac{19}{266} \text{ desa} \times 100\%$ = 7,14 %	DPMD	Data Terlampir pada dokumen pendukung



No.	Urusan Pemerintahan		Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
14.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1)	TFR (Angka Kelahiran Total)	2,28	DPPPAPPKB	Data Terlampir pada dokumen pendukung
		2)	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	$\frac{71.275}{108.357} \text{ pasangan} \times 100\%$ = 65,8 %	DPPPAPPKB	Data Terlampir pada dokumen pendukung
		3)	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	$\frac{26.864}{79.426} \text{ desa} \times 100\%$ = 14,1 %	DPPPAPPKB	Data Terlampir pada dokumen pendukung
15.	Perhubungan	1)	Rasio konektivitas provinsi	IK 1 = $4 \times \frac{1}{7} = 0,57$ IK 2 = $\frac{(9 \times 1) + (2 \times 0,8)}{14} = 0,76$ RK = $(0,57 \times 30) + (0,76 \times 70) = 68,9/100 = 0,70$	Dinas Perhubungan	Data Terlampir pada dokumen pendukung
		2)	V/C Ratio di Jalan Provinsi	0,061	Dinas Perhubungan	Data Terlampir pada dokumen pendukung
16.	Komunikasi dan Informatika	1)	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	$\frac{42}{42} \text{ OPD} \times 100\%$ = 100 %	DKISP	Data Terlampir pada dokumen pendukung
		2)	Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online Dan Terintegrasi	$\frac{91}{91} \text{ Layanan Publik} \times 100\%$ = 100 %	DKISP	Data Terlampir pada dokumen pendukung
		3)	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Provinsi	$\frac{504.534}{506.052} \times 100\%$ = 99,7 %	DKISP	Data Terlampir pada dokumen pendukung
17.	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1)	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	$\frac{3}{43} \text{ Koperasi} \times 100\%$ = 6,97 %	DISPERINDAGKOP UKM	Data Terlampir pada dokumen pendukung



No.	Urusan Pemerintahan		Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		2)	Meningkatnya Usaha Kecil yang menjadi wirausaha	$\frac{8293}{8293} \text{ Usaha Kecil} \times 100\%$ = 100 %	DISPERINDAGKOP UKM	Data Terlampir pada dokumen pendukung
18.	Penanaman Modal	1)	Persentase peningkatan investasi di provinsi	$\frac{(27.026.584.635.157 - 13.704.547.246.093)}{13.704.547.246.093} \times 100\%$ = 97,21%	DPMPTSP	Data terlampir pada dokumen pendukung
19.	Kepemudaan dan Olahraga	1)	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	$\frac{1.850}{193.690} \text{ Orang} \times 100\%$ = 0,82 %	Dinas Pemuda dan Olahraga	Data terlampir pada dokumen pendukung
		2)	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	$\frac{29.144}{193.690} \text{ Orang} \times 100\%$ = 15,05 %	Dinas Pemuda dan Olahraga	Data terlampir pada dokumen pendukung
		3)	Peningkatan Prestasi Olahraga	18 Medali	Dinas Pemuda dan Olahraga	Data terlampir pada dokumen pendukung
20.	Statistik	1)	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	$\frac{42}{42} \text{ OPD} \times 100\%$ = 100 %	DKISP	Data terlampir pada dokumen pendukung
		2)	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	$\frac{42}{42} \text{ OPD} \times 100\%$ = 95 %	DKISP	Data terlampir pada dokumen pendukung
21.	Persandian	1)	Tingkat keamanan informasi pemerintah	$\frac{303}{645} \times 100\%$ = 46,98 %	DKISP	Data terlampir pada dokumen pendukung
22.	Kebudayaan	1)	Terlestarikannya Cagar Budaya	$\frac{21}{55} \text{ cagar budaya} \times 100\%$ = 38,18 %	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Data terlampir pada dokumen pendukung
23.	Perpustakaan	1)	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	69,31 %	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Data terlampir dengan surat



No.	Urusan Pemerintahan		Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
						pernyataan sebagai dokumen pendukung
		2)	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	65,39 %	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Data terlampir pada dokumen pendukung
24.	Kearsipan	1)	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	60,39%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Data terlampir pada dokumen pendukung
		2)	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	12,41%	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Data terlampir pada dokumen pendukung
25.	Kelautan dan Perikanan	1)	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi (sumber data: one data KKP)	1.010.375,84 Ton	Dinas Kelautan dan Perikanan	Data Terlampir pada dokumen pendukung
		2)	Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	$\frac{\left(\frac{244}{386} \times 100\%\right) + \left(\frac{474}{581} \times 100\%\right)}{3}$ = 67,60%	Dinas Kelautan dan Perikanan	Data Terlampir pada dokumen pendukung
26.	Pariwisata	1)	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	$\frac{(499.664 - 520.585)}{520.585} \text{ Orang} \times 100\%$ = -4,02 %	Dinas Pariwisata	Data terlampir pada dokumen pendukung
		2)	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke provinsi	$\frac{(368.230 - 570.619)}{570.619} \text{ Orang} \times 100\%$ = -35,47 %	Dinas Pariwisata	Data terlampir pada dokumen pendukung
		3)	Tingkat hunian akomodasi	$\frac{431.480}{1.339.550} \times 100\%$ = 32,21 %	Dinas Pariwisata	Data terlampir pada dokumen pendukung



No.	Urusan Pemerintahan		Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		4)	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	$\frac{2.132,8 \text{ (miliar)}}{147.278,6 \text{ (miliar)}} \times 100\%$ <p>= 1,45 %</p>	Dinas Pariwisata	Data terlampir pada dokumen pendukung
27.	Pertanian	1)	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	$\frac{60.738 \text{ Ton}}{9.558 \text{ Ha}} \times 100\%$ <p>= 6,35 %</p>	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Data Terlampir pada dokumen pendukung
		2)	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	$\frac{6-0}{6} \text{ Kasus} \times 100\%$ <p>= 100 %</p>	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Data Terlampir pada dokumen pendukung
28.	Kehutanan	1)	Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial	$\frac{90}{90} \text{ Unit} \times 100\%$ <p>= 100 %</p>	Dinas Kehutanan	Data Terlampir pada dokumen pendukung
		2)	Persentase kerusakan hutan pertahun (deforestasi)	$\frac{785,6}{5.654.472,67} \text{ Ha} \times 100\%$ <p>= 0.014 %</p>	Dinas Kehutanan	Data Terlampir pada dokumen pendukung
		3)	Persentase Luas Lahan Kritis yang Direhabilitasi	$\frac{1.661,24}{176.855,83} \text{ Ha} \times 100\%$ <p>= 1 %</p>	Dinas Kehutanan	Data Terlampir pada dokumen pendukung
29.	Energi dan Sumber Daya Mineral	1)	Persentase Usaha Tambang Sesuai Kewenangan Provinsi yang Tidak Melanggar Perda	$\frac{29}{43} \text{ Usaha tambang} \times 100\%$ <p>= 67,44 %</p>	Dinas ESDM	Data Terlampir pada dokumen pendukung
		2)	Persentase Desa Yang Teraliri Listrik	$\frac{386}{482} \text{ Desa} \times 100\%$ <p>=80,08 %</p>	Dinas ESDM	Data Terlampir pada dokumen pendukung
30.	Perdagangan	1)	Pertumbuhan Nilai Ekspor Non Migas	$\frac{1.764.049.050,9-1.018.295.595,2}{1.018.295.595,2} \times 100\%$ <p>= 73,24 %</p>	DISPERINDAGKOP UKM	Data Terlampir pada dokumen pendukung
		2)	Persentase penanganan pengaduan konsumen	$\frac{0}{0} \text{ Pengaduan} \times 100\%$ <p>= 0 %</p>	DISPERINDAGKOP UKM	Tidak Ada (Surat Pernyataan)



No.	Urusan Pemerintahan		Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan		
		3)	Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku	0 %	DISPERINDAGKOP UKM	Tidak Ada (Surat Pernyataan)		
		4)	Tertib Usaha	0 %	DISPERINDAGKOP UKM	Tidak Ada (Surat Pernyataan)		
		5)	Persentase kinerja realisasi pupuk	$\frac{54.779 \times 19.787}{1.083.931.009} = 1.083.931.009 \text{ (Nilai RDKK)}$ $\frac{7.522}{1.083.931.009} \times 100\%$ = 0,001 %	DISPERINDAGKOP UKM	Data Terlampir pada dokumen pendukung		
		6)	Persentase Barang Beredar Yang Diawasi Yang Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-Undangan	$\frac{12.673}{14.000} \text{ Barang} \times 100\%$ = 90,52 %	DISPERINDAGKOP UKM	Data Terlampir pada dokumen pendukung		
		7)	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	$KVpt = \frac{2085.47 \times 100}{22.229}$ = 9,4 %	DISPERINDAGKOP UKM	Data Terlampir pada dokumen pendukung		
		31.	Perindustrian	1)	Pertambahan Jumlah Industri Besar di Provinsi	$\frac{40 - 35}{35} \text{ Industri} \times 100\%$ = 14,28 %	DISPERINDAGKOP UKM	Data Terlampir pada dokumen pendukung
				2)	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	89,27 %	DISPERINDAGKOP UKM	Data Terlampir pada dokumen pendukung
3)	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait			0 %	DISPERINDAGKOP UKM	Tidak Ada (Surat Pernyataan)		
4)	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) bagi Industri			0 %	DISPERINDAGKOP UKM	Tidak Ada (Surat Pernyataan)		



No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait			
		5) Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi yang dikeluarkan oleh instansi terkait	0 %	DISPERINDAGKOP UKM	Tidak Ada (Surat Pernyataan)
		6) Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	100%	DISPERINDAGKOP UKM	1 Sub ada 6 Sub Tidak Ada

2.2.3 Indikator Kinerja Kunci untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Tabel 2. 4

Indikator Kinerja Kunci untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

No.	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1.	Perencanaan dan Keuangan	1) Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	$\frac{324.547.341.946}{3.188.380.770.446} \times 100\%$ = 10,17 %	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Dokumen pendukung terlampir
		2) Rasio PAD	$\frac{980,06 \text{ (Juta Rupiah)}}{2.993,07 \text{ (Juta Rupiah)}} \times 100\%$ = 32,74 %	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Dokumen pendukung terlampir
		3) Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	$\frac{2.050.044.253.908,86 - 322.601.636.378,20}{2.612.861.708.527} \times 100\%$ = 57,16 %	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Dokumen pendukung terlampir
		4) Opini Laporan Keuangan	9 WTP	Inspektorat	Data terlampir pada dokumen pendukung



No.	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		5) Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level 3	Inspektorat	Data terlampir pada dokumen pendukung
		6) Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level 3	Inspektorat	Data terlampir pada dokumen pendukung
2.	Pengadaan	1) Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	$\frac{0}{1} \text{ Kontrak} \times 100\%$ = 0 %	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Data terlampir pada Dokumen Pendukung
		2) Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif	$\frac{3254}{6379} \text{ Paket} \times 100\%$ = 51,01 %	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Data terlampir pada Dokumen Pendukung
		3) Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	$\frac{1.355.800.000.000}{2.640.200.000.000} \times 100\%$ =52,35 %	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Data terlampir pada Dokumen Pendukung
		4) Persentase Peningkatan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	$\frac{4.594.000.000}{8.357.000.000} \times 100\%$ = 54,97 %	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Data terlampir pada Dokumen Pendukung
3.	Kepegawaian	1) Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	$\frac{2013}{2380} \text{ Orang} \times 100\%$ = 84,57 %	Badan Kepegawaian Daerah	Data Terlampir Pada Dokumen Pendukung
		2) Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	$\frac{570}{2380} \text{ Orang} \times 100\%$ = 84,57 %	Badan Kepegawaian Daerah	Data Terlampir Pada Dokumen Pendukung



No.	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		3) Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	$\frac{233}{570} \text{ Orang} \times 100\%$ = 39,12 %	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Data Terlampir Pada Dokumen Pendukung
4.	Manajemen Keuangan	1) Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	$\left[\frac{3.188.380.770.446}{2.997.361.701.915} \right] - 1 \times 100\%$ = 6,37 %	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Data Terlampir Pada Dokumen Pendukung
		2) Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	$\left[\frac{980.069.047.019,24}{791.574.904.915} \right] - 1 \times 100\%$ = 23,81 %	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Data Terlampir Pada Dokumen Pendukung
		3) Assets Management	1. Ya , Ada daftar asset tetap 2. Tidak ada manual untuk daftar asset tetap 3. Ya , Ada proses inventarisasi asset tahunan 4. Ya , Nilai asset tercantum dalam laporan anggaran	Badan Keuangan dan Aset Daerah	1. Ada 2. Tidak Ada 3. Ya 4. Nilai aset tercantum dalam laporan anggaran
		4) Cash Management: Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya	$\left[\frac{198.807.155.315,6}{2.404.941.922.372} \right] \times 100\%$ = 8,26 %	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Data Terlampir Pada Dokumen Pendukung
5.	Transparansi Dan Partisipasi Publik	1) Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units)	$\frac{38}{30} \times 100\%$ = 126,67 %	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Data terlampir pada dokumen pendukung
		2) Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)	$\frac{6}{12} \text{ Dokumen} \times 100\%$ = 50 %	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Data terlampir pada dokumen pendukung

2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah

Akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah menginformasikan capaian keberhasilan pemerintah daerah dalam pelaksanaan visi dan misi pemerintah daerah secara terukur, sebagaimana yang diperjanjikan dalam perjanjian kinerja kepala daerah. Informasi capaian akuntabilitas pemerintah daerah memuat:

a. Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Sesuai Perjanjian Kinerja target yang akan dicapai pada tahun 2023 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 5
Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja 2023

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET
1	Terjaganya Kondusifitas Wilayah	1) Meningkatnya Keamanan Dan Ketertiban Wilayah	a. Angka Kriminalitas Tertangani	100,00
			b. Indeks Demokrasi Indonesia	84,90
		2) Meningkatkan Kualitas Penanganan Bencana	Indeks Risiko Bencana	153,62
2	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Transparan, Akuntabel Dan Inovatif	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Profesional, Efisien, Efektif, Dan Fokus Pada Sistem Penganggaran Yang Berbasis Kinerja.	a. Predikat SAKIP	BB
			b. Maturitas SPIP	3,20
			c. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Baik
			d. Indeks Maturitas SPBE	2,90
3	Mewujudkan SDM Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing.	1) Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	72,68
			2) Meningkatnya Kualitas Pendidikan Dan Kebudayaan Masyarakat	a. Angka Harapan Lama Sekolah
		b. Angka Rata-Rata Lama Sekolah		9,40
		3) Meningkatnya Kemandirian Sosial Ekonomi Masyarakat	a. Angka Kemiskinan	6,70-6,00
			b. Tingkat Pengangguran Terbuka	4,45
4	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	1) Terwujudnya Pembangunan Rendah Karbon	Tingkat Penurunan Emisi GRK	6.523.255
			2) Meningkatnya Kualitas Air, Udara Dan Lahan	a. Indeks Kualitas Air
		b. Indeks Kualitas Udara		93,43



NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET
			c. Indeks Tutupan Lahan	100,00
			d. Indeks Kualitas Air Laut	81,52
5	Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Dasar	1) Meningkatnya Aksesibilitas Dan Konektivitas Antar Pusat-Pusat Kegiatan	Cakupan Layanan Transportasi Antar Pusat Kegiatan	65
			2) Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar	a. Cakupan Layanan Air Bersih
		b. Cakupan Akses Dan Layanan Telekomunikasi	88,00	
6	Mewujudkan Ekonomi Daerah Yang Berdaya Saing	Meningkatnya Produktivitas Dan Nilai Tambah Sektor Pertanian, Perdagangan, Jasa, Industri, Pariwisata	a. Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian	17,00
			b. Indeks Ketahanan Pangan	73,70
			c. Nilai Tukar Petani	110,12
			d. Nilai Tukar Nelayan	105,93
			e. Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri	6,73
			f. Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	1,80
			g. Pengeluaran Per Kapita	8.234
			h. Jumlah Kunjungan Wisatawan	796.268
7	Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Yang Harmonis	Meningkatnya Toleransi Antar Umat Beragama	a. Skor Dimensi Toleransi	79,25
			b. Skor Dimensi Kesetaraan	79,25
			c. Skor Dimensi Kerjasama	79,24
8	Mewujudkan Ketahanan Energi Daerah	Meningkatnya Aksesibilitas Terhadap Penggunaan Listrik Dan Energi Baru Terbarukan	a. Cakupan Rumah Tangga Teraliri Listrik	187.639,00 0
			b. Rasio Elektrifikasi	90,08
			c. Nilai Bauran Energi	4,68
9	Mewujudkan Kesetaraan Gender dan Milenial Dalam Pembangunan	1) Meningkatnya Pengarus- Utamaan Gender	a. Rasio Angka Harapan Hidup Perempuan:Laki	1,030
			b. Rasio Rata-Rata Lama Sekolah Perempuan: Laki	0,95
			c. Rasio Angka Harapan Lama Sekolah Perempuan : Laki	1,010
			d. Rasio Pengeluaran Perkapita Perempuan: Laki	0,60
		2) Meningkatnya Peran Serta Pemuda Dalam Pembangunan	Indeks Pembangunan Pemuda	57,40



NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET
10	Mewujudkan Ketahanan Ekonomi Kerakyatan	Meningkatnya Produktivitas Dan Daya Saing Koperasi Dan UMKM	a. Pertumbuhan Koperasi Sehat	5,76
			b. Persentase Pertumbuhan Kredit Perbankan Kepada UMKM	12,61
11	Mewujudkan Iklim Investasi Yang Kondusif	Meningkatnya Kepastian Hukum Berinvestasi	Rata-Rata Pertumbuhan Nilai Investasi	95
12	Mewujudkan Pemerataan Pendapatan Antar Wilayah Yang Berkeadilan	Menurunnya Kesenjangan Pendapatan Masyarakat	Indeks Gini	0,283
13	Mewujudkan Pembangunan Desa Yang Berkualitas	Meningkatnya Kemandirian Desa	a. Jumlah Desa Mandiri	37
			b. Jumlah Desa Tertinggal Dan Sangat Tertinggal	162
14	Mewujudkan Percepatan Pembentukan DOB	Meningkatnya Pengembangan Wilayah Administrasi Kecamatan Untuk Pemenuhan Syarat Pembentukan Dob Yang Diusulkan	Jumlah wilayah administrasi pemerintahan yang dikembangkan	4

b. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target perjanjian kinerja

Dalam melihat capaian kinerja pada tahun 2023 dapat disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 6
Pengukuran Capaian Sasaran Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya Keamanan Dan Ketertiban Wilayah	Angka Kriminalitas Tertangani	100,00	100,00	100,00
		Indeks Demokrasi Indonesia	84,90	Belum Rilis	N/A
2	Meningkatkan Kualitas Penanganan Bencana	Indeks Risiko Bencana	153,62	148,16	103,55
3		Predikat SAKIP	BB	BB	100,00

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	%
	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Profesional, Efisien, Efektif, Dan Fokus Pada Sistem Penganggaran Yang Berbasis Kinerja.	Maturitas SPIP	3,20	3,37	105,41
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Baik	belum Rilis	N/A
		Indeks Maturitas SPBE	2,90	2,83	97,59
4	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	72,68	72,59	99,88
5	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Dan Kebudayaan Masyarakat	Angka Harapan Lama Sekolah	13,28	13,20	99,40
		Angka Rata-Rata Lama Sekolah	9,40	9,34	99,36
6	Meningkatnya Kemandirian Sosial Ekonomi Masyarakat	Angka Kemiskinan	6,70-6,00	6,45	103,73
		Tingkat Pengangguran Terbuka	4,45	4,01	109,89
7	Terwujudnya Pembangunan Rendah Karbon	Tingkat Penurunan Emisi GRK	6.523.255		0,00
8	Meningkatnya Kualitas Air, Udara Dan Lahan	Indeks Kualitas Air	57,34	55,93	97,54
		Indeks Kualitas Udara	93,43	93,91	100,51
		Indeks Tutupan Lahan	100,00	100,00	100,00
		Indeks Kualitas Air Laut	81,52	83,40	102,31
9	Meningkatnya Aksesibilitas Dan Konektivitas Antar Pusat-Pusat Kegiatan	Cakupan Layanan Transportasi Antar Pusat Kegiatan	65	70,00	107,69
10	Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar	Cakupan Layanan Air Bersih	64,92		0,00
		Cakupan Akses Dan Layanan Telekomunikasi	88,00		0,00
11	Meningkatnya Produktivitas Dan Nilai Tambah Sektor Pertanian,Perdagang	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian	17,00	14,23	83,71
		Indeks Ketahanan Pangan	73,70		0,00
		Nilai Tukar Petani	110,12	111,57	101,32



No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	%
	an, Jasa, Industri, Pariwisata	Nilai Tukar Nelayan	105,93	103,19	97,41
		Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri	6,73	1,67	24,81
		Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	1,80	6,77	376,11
		Pengeluaran Per Kapita	8.234	9.734	118,22
		Jumlah Kunjungan Wisatawan	796.268		0,00
12	Meningkatnya Toleransi Antar Umat Beragama	Skor Dimensi Toleransi	79,25	80,67	101,79
		Skor Dimensi Kesetaraan	79,25	82,87	104,57
		Skor Dimensi Kerjasama	79,24	80,01	100,97
13	Meningkatnya Aksesibilitas Terhadap Penggunaan Listrik Dan Energi Baru Terbarukan	Cakupan Rumah Tangga Teraliri Listrik	187.639,000	214.940	114,55
		Rasio Elektrifikasi	90,08	91,19	101,23
		Nilai Bauran Energi	4,68	12,39	264,74
14	Meningkatnya Pengarus- Utamaan Gender	Rasio Angka Harapan Hidup Perempuan:Laki	1,030	1,054	102,33
		Rasio Rata-Rata Lama Sekolah Perempuan: Laki	0,95	0,930	97,89
		Rasio Angka Harapan Lama Sekolah Perempuan : Laki	1,010	1,036	102,57
		Rasio Pengeluaran Perkapita Perempuan: Laki	0,60	0,465	77,50
15	Meningkatnya Peran Serta Pemuda Dalam Pembangunan	Indeks Pembangunan Pemuda	57,40	Belum Rilis	N/A
16	Meningkatnya Produktivitas Dan Daya Saing Koperasi Dan UMKM	Pertumbuhan Koperasi Sehat	5,76	4,84	84,03
		Persentase Pertumbuhan Kredit Perbankan Kepada UMKM	12,61	-30,00	-237,91
17	Meningkatnya Kepastian Hukum Berinvestasi	Rata-Rata Pertumbuhan Nilai Investasi	95	105	110,53



No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	%
18	Menurunnya Kesenjangan Pendapatan Masyarakat	Indeks Gini	0,283	0,277	104,56
19	Meningkatnya Kemandirian Desa	Jumlah Desa Mandiri	37	58	134,89
		Jumlah Desa Tertinggal Dan Sangat Tertinggal	162	96	140,74
20	Meningkatnya Pengembangan Wilayah Administrasi Kecamatan Untuk Pemenuhan Syarat Pembentukan Dob Yang Diusulkan	Jumlah wilayah administrasi pemerintahan yang dikembangkan	4	-	N/A

c. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 2. 7

Capaian Kinerja dibandingkan dengan Tahun Sebelumnya

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Tahun 2023		
				Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya Keamanan Dan Ketertiban Wilayah	Angka Kriminalitas Tertangani	100,00	100,00	100,00	100,00
		Indeks Demokrasi Indonesia	79,38	84,90	Belum Rilis	N/A
2	Meningkatkan Kualitas Penanganan Bencana	Indeks Risiko Bencana	157,42	153,62	148,16	103,55
3	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Profesional, Efisien, Efektif, Dan Fokus Pada Sistem Penganggaran	Predikat SAKIP	BB	BB	BB	100,00
		Maturitas SPIP	3,24	3,20	3,37	105,41
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Baik	Baik	belum Rilis	N/A
		Indeks Maturitas SPBE	1,98	2,90	2,83	97,59



No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Tahun 2023		
				Target	Realisasi	%
	Yang Berbasiskan Kinerja.					
4	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	72,67	72,68	72,59	99,88
5	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Dan Kebudayaan Masyarakat	Angka Harapan Lama Sekolah	13,06	13,28	13,20	99,40
		Angka Rata-Rata Lama Sekolah	9,27	9,40	9,34	99,36
6	Meningkatnya Kemandirian Sosial Ekonomi Masyarakat	Angka Kemiskinan	6,86	6,70-6,00	6,45	103,73
		Tingkat Pengangguran Terbuka	4,33	4,45	4,01	109,89
7	Terwujudnya Pembangunan Rendah Karbon	Tingkat Penurunan Emisi GRK	97.185.067,00	6.523.255		0,00
8	Meningkatnya Kualitas Air, Udara Dan Lahan	Indeks Kualitas Air	54,46	57,34	55,93	97,54
		Indeks Kualitas Udara	94,52	93,43	93,91	100,51
		Indeks Tutupan Lahan	100,00	100,00	100,00	100,00
		Indeks Kualitas Air Laut	84,85	81,52	83,40	102,31
9	Meningkatnya Aksesibilitas Dan Konektivitas Antar Pusat-Pusat Kegiatan	Cakupan Layanan Transportasi Antar Pusat Kegiatan	69,00	65	70,00	107,69
10	Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar	Cakupan Layanan Air Bersih	37,91	64,92		0,00
		Cakupan Akses Dan Layanan Telekomunikasi	93,98	88,00		0,00
11	Meningkatnya Produktivitas Dan Nilai Tambah Sektor Pertanian, Perdagangan, Jasa, Industri, Pariwisata	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian	14,06	17,00	14,23	83,71
		Indeks Ketahanan Pangan	71,04	73,70		0,00
		Nilai Tukar Petani	109,35	110,12	111,57	101,32



No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Tahun 2023		
				Target	Realisasi	%
		Nilai Tukar Nelayan	104,58	105,93	103,19	97,41
		Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri	3,95	6,73	1,67	24,81
		Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	9,09	1,80	6,77	376,11
		Pengeluaran Per Kapita	9.350	8.234	9.734	118,22
		Jumlah Kunjungan Wisatawan	40.047	796.268		0,00
12	Meningkatnya Toleransi Antar Umat Beragama	Skor Dimensi Toleransi	83,43	79,25	80,67	101,79
		Skor Dimensi Kesenjangan	79,81	79,25	82,87	104,57
		Skor Dimensi Kerjasama	79,60	79,24	80,01	100,97
13	Meningkatnya Aksesibilitas Terhadap Penggunaan Listrik Dan Energi Baru Terbarukan	Cakupan Rumah Tangga Teraliri Listrik	186.918,00	187.639,00	214.940	114,55
		Rasio Elektrifikasi	86,44	90,08	91,19	101,23
		Nilai Bauran Energi	9,97	4,68	12,39	264,74
14	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender	Rasio Angka Harapan Hidup Perempuan Laki	1,05	1,030	1,054	102,33
		Rasio Rata-Rata Lama Sekolah Perempuan: Laki	0,91	0,95	0,930	97,89
		Rasio Angka Harapan Lama Sekolah Perempuan: Laki	1,02	1,010	1,036	102,57
		Rasio Pengeluaran Perkapita Perempuan: Laki	0,47	0,60	0,465	77,50
15	Meningkatnya Peran Serta	Indeks Pembangunan Pemuda	50,00	57,40	Belum Rilis	N/A



No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Tahun 2023		
				Target	Realisasi	%
	Pemuda Dalam Pembangunan					
16	Meningkatnya Produktivitas Dan Daya Saing Koperasi Dan UMKM	Pertumbuhan Koperasi Sehat	13,50	5,76	4,84	84,03
		Persentase Pertumbuhan Kredit Perbankan Kepada UMKM	11,95	12,61	-30,00	-237,91
17	Meningkatnya Kepastian Hukum Berinvestasi	Rata-Rata Pertumbuhan Nilai Investasi	108,5	95	105	110,53
18	Menurunnya Kesenjangan Pendapatan Masyarakat	Indeks Gini	0,270	0,283	0,277	104,56
19	Meningkatnya Kemandirian Desa	Jumlah Desa Mandiri	39	37	58	134,89
		Jumlah Desa Tertinggal Dan Sangat Tertinggal	142	162	96	140,74
20	Meningkatnya Pengembangan Wilayah Administrasi Kecamatan Untuk Pemenuhan Syarat Pembentukan Dob Yang Diusulkan	Jumlah wilayah administrasi pemerintahan yang dikembangkan	0	4	-	N/A



d. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Dalam Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD/RENSTRA)

Tabel 2. 8

Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Dalam Pembangunan Jangka Menengah

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Tahun 2023			Target Akhir RPJMD/Renstra 2026	Capaian 2023 Terhadap 2026	Kategori
				Target	Realisasi	%			
1	Meningkatnya Keamanan Dan Ketertiban Wilayah	Angka Kriminalitas Tertangani	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi
		Indeks Demokrasi Indonesia	79,38	84,90	Belum Rilis	N/A	83,90	-	N/A
2	Meningkatkan Kualitas Penanganan Bencana	Indeks Risiko Bencana	157,42	153,62	148,16	103,55	153,62	103,55	Sangat Tinggi
3	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Profesional, Efisien, Efektif, Dan Fokus Pada Sistem Penganggaran	Predikat SAKIP	BB	BB	BB	100,00	A	91,76	Sangat Tinggi
		Maturitas SPIP	3,24	3,20	3,37	105,41	3,5	96,37	Sangat Tinggi
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Baik	Baik	belum Rilis	N/A	Baik	-	N/A



No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Tahun 2023			Target Akhir RPJMD/Renstra 2026	Capaian 2023 Terhadap 2026	Kategori
				Target	Realisasi	%			
	Yang Berbasiskan Kinerja.	Indeks Maturitas SPBE	1,98	2,90	2,83	97,59	3,8	74,47	Sedang
4	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	72,67	72,68	72,59	99,88	72,80	99,71	Sangat Tinggi
5	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Dan Kebudayaan Masyarakat	Angka Harapan Lama Sekolah	13,06	13,28	13,20	99,40	13,75	96,00	Sangat Tinggi
		Angka Rata-Rata Lama Sekolah	9,27	9,40	9,34	99,36	9,82	95,11	Sangat Tinggi
6	Meningkatnya Kemandirian Sosial Ekonomi Masyarakat	Angka Kemiskinan	6,86	6,70-6,00	6,45	103,73	5,60-5,20	84,82	Tinggi
		Tingkat Pengangguran Terbuka	4,33	4,45	4,01	109,89	4,11	102,43	Sangat Tinggi
7	Terwujudnya Pembangunan Rendah Karbon	Tingkat Penurunan Emisi GRK	97.185.067,00	6.523.255		0,00	10.252.006	0,00	Sangat Rendah
8		Indeks Kualitas Air	54,46	57,34	55,93	97,54	55,50	100,77	Sangat Tinggi



No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Tahun 2023			Target Akhir RPJMD/Renstra 2026	Capaian 2023 Terhadap 2026	Kategori
				Target	Realisasi	%			
	Meningkatnya Kualitas Air, Udara Dan Lahan	Indeks Kualitas Udara	94,52	93,43	93,91	100,51	92,15	101,91	Sangat Tinggi
		Indeks Tutupan Lahan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi
		Indeks Kualitas Air Laut	84,85	81,52	83,40	102,31	75,15	110,98	Sangat Tinggi
9	Meningkatnya Aksesibilitas Dan Konektivitas Antar Pusat-Pusat Kegiatan	Cakupan Layanan Transportasi Antar Pusat Kegiatan	69,00	65	70,00	107,69	85,00	82,35	Tinggi
10	Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar	Cakupan Layanan Air Bersih	37,91	64,92		0,00	68,50	0,00	Sangat Rendah
		Cakupan Akses Dan Layanan Telekomunikasi	93,98	88,00		0,00	98,00	0,00	Sangat Rendah
11	Meningkatnya Produktivitas Dan Nilai Tambah Sektor Pertanian,	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian	14,06	17,00	14,23	83,71	18,00	79,06	Tinggi



No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Tahun 2023			Target Akhir RPJMD/Renstra 2026	Capaian 2023 Terhadap 2026	Kategori
				Target	Realisasi	%			
	Perdagangan, Jasa, Industri, Pariwisata	Indeks Ketahanan Pangan	71,04	73,70		0,00	74,30	0,00	Sangat Rendah
		Nilai Tukar Petani	109,35	110,12	111,57	101,32	104,00	107,28	Sangat Tinggi
		Nilai Tukar Nelayan	104,58	105,93	103,19	97,41	105,26	98,03	Sangat Tinggi
		Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri	3,95	6,73	1,67	24,81	6,86	24,34	Sangat Rendah
		Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	9,09	1,80	6,77	376,11	2,80	241,79	Sangat Tinggi
		Pengeluaran Per Kapita	9.350	8.234	9.734	118,22	7.487	130,01	Sangat Tinggi
		Jumlah Kunjungan Wisatawan	40.047	796.268		0,00	796.268	0,00	Sangat Rendah
12		Skor Dimensi Toleransi	83,43	79,25	80,67	101,79	82,51	97,77	Sangat Tinggi



No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Tahun 2023			Target Akhir RPJMD/Renstra 2026	Capaian 2023 Terhadap 2026	Kategori
				Target	Realisasi	%			
	Meningkatnya Toleransi Antar Umat Beragama	Skor Dimensi Kesetaraan	79,81	79,25	82,87	104,57	80,75	102,63	Sangat Tinggi
		Skor Dimensi Kerjasama	79,60	79,24	80,01	100,97	80,55	99,33	Sangat Tinggi
13	Meningkatnya Aksesibilitas Terhadap Penggunaan Listrik Dan Energi Baru Terbarukan	Cakupan Rumah Tangga Teraliri Listrik	186.918,00	187.639,00 0	214.940	114,55	208295,00	103,19	Sangat Tinggi
		Rasio Elektrifikasi	86,44	90,08	91,19	101,23	100,00	91,19	Sangat Tinggi
		Nilai Bauran Energi	9,97	4,68	12,39	264,74	6,93	178,79	Sangat Tinggi
14	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender	Rasio Angka Harapan Hidup Perempuan:Laki	1,05	1,030	1,054	102,33	1,00	105,430	Sangat Tinggi
		Rasio Rata-Rata Lama Sekolah Perempuan:Laki	0,91	0,95	0,930	97,89	1,00	93,040	Sangat Tinggi
		Rasio Angka Harapan Lama Sekolah	1,02	1,010	1,036	102,57	1,00	103,630	Sangat Tinggi



No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Tahun 2023			Target Akhir RPJMD/Renstra 2026	Capaian 2023 Terhadap 2026	Kategori
				Target	Realisasi	%			
		Perempuan: Laki							
		Rasio Pengeluaran Perkapita Perempuan: Laki	0,47	0,60	0,465	77,50	0,80	58,170	Rendah
15	Meningkatnya Peran Serta Pemuda Dalam Pembangunan	Indeks Pembangunan Pemuda	50,00	57,40	Belum Rilis	N/A	58,50	-	Sangat Tinggi
16	Meningkatnya Produktivitas Dan Daya Saing Koperasi Dan UMKM	Pertumbuhan Koperasi Sehat	13,50	5,76	4,84	84,03	5,00	96,80	Sangat Tinggi
		Persentase Pertumbuhan Kredit Perbankan Kepada UMKM	11,95	12,61	-30,00	-237,91	7,60	-394,74	Sangat Rendah
17	Meningkatnya Kepastian Hukum Berinvestasi	Rata-Rata Pertumbuhan Nilai Investasi	108,5	95	105	110,53	90	116,67	Sangat Tinggi
18	Menurunnya Kesenjangan	Indeks Gini	0,270	0,283	0,277	104,56	0,28	103,57	Sangat Tinggi



No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Tahun 2023			Target Akhir RPJMD/Renstra 2026	Capaian 2023 Terhadap 2026	Kategori
				Target	Realisasi	%			
	Pendapatan Masyarakat								
19	Meningkatnya Kemandirian Desa	Jumlah Desa Mandiri	39	37	58	134,89	46	82,86	Tinggi
		Jumlah Desa Tertinggal Dan Sangat Tertinggal	142	162	96	140,74	90	25,45	Sangat Rendah
20	Meningkatnya Pengembangan Wilayah Administrasi Kecamatan Untuk Pemenuhan Syarat Pembentukan Dob Yang Diusulkan	Jumlah wilayah administrasi pemerintahan yang dikembangkan	0	4	-	N/A	1	-	-



e. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan Dengan Hasil (Kinerja) Yang Telah Dicapai

Tabel 2. 9
Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan Dengan Hasil (Kinerja)

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN			Tingkat Efisiensi %
			Target	Realisasi	Capaian %	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %	
1.	Meningkatnya Keamanan Dan Ketertiban Wilayah	1) Angka Kriminalitas Tertangani	100,00	100,00	100,00	75.832.228.725,00	75.181.173.828,00	99,1415	0,86
		2) Indeks Demokrasi Indonesia	84,90	Belum Rilis	N/A				
2.	Meningkatkan Kualitas Penanganan Bencana	3) Indeks Risiko Bencana	153,62	148,16	103,55	49.377.017.218,44	45.600.566.526,00	92,35%	7,65%
3.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Profesional, Efisien, Efektif, Dan Fokus Pada Sistem Penganggaran Yang Berbasis Kinerja.	4) Predikat SAKIP	BB	BB	100,00	143.530.487.618,00	124.191.565.203,00	86,53%	13,47%
		5) Maturitas SPIP	3,20	3,37	105,41				
		6) Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Baik	belum Rilis	N/A				
		7) Indeks Maturitas SPBE	2,90	2,83	97,59				
4.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	8) Angka Harapan Hidup	72,68	72,59	99,88	60.568.618.200,00	55.734.854.126,00	92,02%	7,98%
5.	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Dan Kebudayaan Masyarakat	9) Angka Harapan Lama Sekolah	13,28	13,20	99,40	280.606.561.571,00	261.018.175.461,00	93,02%	6,98%
		10) Angka Rata-Rata Lama Sekolah	9,40	9,34	99,36				
6.		11) Angka Kemiskinan	6,70-6,00	6,45	103,73	419.205.474.379,00	388.284.578.455,00	92,62%	7,38%



No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN			Tingkat Efisiensi %
			Target	Realisasi	Capaian %	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %	
	Meningkatnya Kemandirian Sosial Ekonomi Masyarakat	12) Tingkat Pengangguran Terbuka	4,45	4,01	109,89				
7.	Terwujudnya Pembangunan Rendah Karbon	13) Tingkat Penurunan Emisi GRK	6.523.255		0,00	3.689.026.942,00	3.346.133.547,00	90,71%	9,29%
8.	Meningkatnya Kualitas Air, Udara Dan Lahan	14) Indeks Kualitas Air	57,34	55,93	97,54	24.350.872.115,44	21.468.029.620,00	88,16%	11,84%
		15) Indeks Kualitas Udara	93,43	93,91	100,51				
		16) Indeks Tutupan Lahan	100,00	100,00	100,00				
		17) Indeks Kualitas Air Laut	81,52	83,40	102,31				
9.	Meningkatnya Aksesibilitas Dan Konektivitas Antar Pusat-Pusat Kegiatan	18) Cakupan Layanan Transportasi Antar Pusat Kegiatan	65	70,00	107,69	260.347.281.815,00	224.596.797.504,00	86,27%	13,73%
10	Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar	19) Cakupan Layanan Air Bersih	64,92		0,00	5.279.879.515,00	4.954.256.981,00	93,83%	6,17%
		20) Cakupan Akses Dan Layanan Telekomunikasi	88,00		0,00				
11.	Meningkatnya Produktivitas Dan Nilai Tambah Sektor Pertanian, Perdagangan, Jasa, Industri, Pariwisata	21) Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian	17,00	14,23	83,71	379.939.076.999,00	336.285.316.383,00	88,51%	11,49%
		22) Indeks Ketahanan Pangan	73,70		0,00				



No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN			Tingkat Efisiensi %
			Target	Realisasi	Capaian %	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %	
		23) Nilai Tukar Petani	110,12	111,57	101,32				
		24) Nilai Tukar Nelayan	105,93	103,19	97,41				
		25) Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri	6,73	1,67	24,81				
		26) Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	1,80	6,77	376,11				
		27) Pengeluaran Per Kapita	8.234	9.734	118,22				
		28) Jumlah Kunjungan Wisatawan	796.268		0,00				
12.	Meningkatnya Toleransi Antar Umat Beragama	29) Skor Dimensi Toleransi	79,25	80,67	101,79	122.579.246.131,00	100.258.010.166,00	81,79%	18,21%
		30) Skor Dimensi Kesetaraan	79,25	82,87	104,57				
		31) Skor Dimensi Kerjasama	79,24	80,01	100,97				
13.	Meningkatnya Aksesibilitas Terhadap Penggunaan Listrik Dan Energi Baru Terbarukan	32) Cakupan Rumah Tangga Teraliri Listrik	187.639,000	214.940	114,55	4.535.750.000,00	4.262.056.530,00	93,97%	6,03%
		33) Rasio Elektrifikasi	90,08	91,19	101,23				
		34) Nilai Bauran Energi	4,68	12,39	264,74				



No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN			Tingkat Efisiensi %
			Target	Realisasi	Capaian %	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %	
14.	Meningkatnya Pengarus- Utamaan Gender	35) Rasio Angka Harapan Hidup Perempuan:Laki	1,030	1,054	102,33	281.225.541.835,00	261.852.809.453,00	93,11%	6,89%
		36) Rasio Rata-Rata Lama Sekolah Perempuan: Laki	0,95	0,930	97,89				
		37) Rasio Angka Harapan Lama Sekolah Perempuan: Laki	1,010	1,036	102,57				
		38) Rasio Pengeluaran Perkapita Perempuan: Laki	0,60	0,465	77,50				
15.	Meningkatnya Peran Serta Pemuda Dalam Pembangunan	39) Indeks Pembangunan Pemuda	57,40	Belum Rilis	N/A	342.454.553.081,00	320.665.324.050,00	93,64%	6,36%
16.	Meningkatnya Produktivitas Dan Daya Saing Koperasi Dan UMKM	40) Pertumbuhan Koperasi Sehat	5,76	4,84	84,03	9.273.541.764,00	8.270.352.913,00	89,18%	10,82%
		41) Persentase Pertumbuhan Kredit Perbankan Kepada UMKM	12,61	-30,00	-237,91				
17.	Meningkatnya Kepastian Hukum Berinvestasi	42) Rata-Rata Pertumbuhan Nilai Investasi	95	105	110,53	9.550.603.223,00	9.279.788.599,00	97,16%	2,84%
18.	Menurunnya Kesenjangan Pendapatan Masyarakat	43) Indeks Gini	0,283	0,277	104,56	9.698.185.597,00	8.968.672.622,00	92,48%	7,52%
19.	Meningkatnya Kemandirian Desa	44) Jumlah Desa Mandiri	37	58	134,89	93.093.574.961,00	79.431.783.199,00	85,32%	14,68%



No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN			Tingkat Efisiensi %
			Target	Realisasi	Capaian %	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %	
		45) Jumlah Desa Tertinggal Dan Sangat Tertinggal	162	96	140,74				
20.	Meningkatnya Pengembangan Wilayah Administrasi Kecamatan Untuk Pemenuhan Syarat Pembentukan DOB Yang Diusulkan	46) Jumlah wilayah administrasi pemerintahan yang dikembangkan	4	-	N/A	6.611.417.005,00	6.417.075.835,00	97,06%	2,94%

f. Analisis Program dan Kegiatan yang mendukung Pencapaian Target Kinerja

Tabel 2. 10

Analisis Program dan Kegiatan yang mendukung Pencapaian Target Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator	Capaian 2022	2023			Target Akhir RPJMD 2026	Capaian 2023 terhadap 2026	Kategori	Program	Anggaran	Realisasi		Efisiensi %
				Target	Realisasi	% Realisasi						Keuangan	%	
1	Meningkatnya Keamanan Dan Ketertiban Wilayah	Angka Kriminalitas Tertangani	100	100	100	100	100	Sangat Tinggi		8.731.092.310	8.362.337.986	0,9578	0,0422	
									PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	6.422.233.120	6.180.847.496	96,24%		
									Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	478.456.120	446.316.043	93,28%		
									Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	5.943.777.000	5.734.531.453	96,48%		
									PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	1.174.883.886	1.119.570.180	95,29%		
									Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	1.174.883.886	1.119.570.180	95,29%		
									PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	596.725.404	580.840.703	97,34%		
									Fasilitasi Bantuan Hukum	596.725.404	580.840.703	97,34%		



No	Sasaran Strategis	Indikator	Capaian 2022	2023			Target Akhir RPJMD 2026	Capaian 2023 terhadap 2026	Kategori	Program	Anggaran	Realisasi		Efisiensi %
				Target	Realisasi	% Realisasi						Keuangan	%	
											216.369.500	192.058.700	88,76%	
										Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	87.000.000	72.009.250	82,77%	
										Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan perempuan kewenangan Provinsi	129.369.500	120.049.450	92,80%	
										PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	320.880.400	289.020.907	90,07%	
										Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	190.380.400	183.491.347	96,38%	
										Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	130.500.000	105.529.560	80,87%	
		Indeks Demokrasi Indonesia	79,38	84,9	Belum Rilis dari BPS	0	83,9	-	N/A		67.101.136.415	66.818.835.842	0,9958	0,0042
										PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	64.076.229.796	64.062.283.955	99,98%	
										Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	64.076.229.796	64.062.283.955	99,98%	
										PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	2.524.906.619	2.256.551.887	89,37%	
										Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	2.524.906.619	2.256.551.887	89,37%	
										PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	500.000.000	500.000.000	100,00%	
										Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	500.000.000	500.000.000	100,00%	
2	Meningkatkan Kualitas Penanganan Bencana	Indeks Risiko Bencana	157,42	153,62	148,16	103,55	153,62	103,55	Sangat Tinggi		49.377.017.218	45.600.566.526	92,35%	7,65%
										PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.558.645.638	1.353.730.725	86,85%	
										Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	101.141.682	94.922.706	93,85%	
										Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	737.997.766	578.392.520	78,37%	
										Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	205.000.000	180.308.234	87,96%	



No	Sasaran Strategis	Indikator	Capaian 2022	2023			Target Akhir RPJMD 2026	Capaian 2023 terhadap 2026	Kategori	Program	Anggaran	Realisasi		Efisiensi %
				Target	Realisasi	% Realisasi						Keuangan	%	
										Penataan sistem dasar penanggulangan bencana	514.506.190	500.107.265	97,20%	
										PROGRAM PENANGANAN BENCANA	356.310.000	353.692.431	99,27%	
										Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	356.310.000	353.692.431	99,27%	
										PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	29.753.004.866	28.456.144.855	95,64%	
										Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	29.753.004.866	28.456.144.855	95,64%	
										PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	1.102.033.231	1.056.553.373	95,87%	
										Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	517.053.937	511.346.087	98,90%	
										PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERACUN DAN BERBAHAYA (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	50.000.000	46.846.800	93,69%	
										Pengumpulan limbah B3 lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 daerah provinsi	50.000.000	46.846.800	93,69%	
										PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IJIN LINGKUNGAN DAN IJIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	484.979.294	451.513.686	93,10%	
										Pembinaan dan pengawasan ijin lingkungan dan ijin PPLH yang di terbitkan oleh pemerintah	484.979.294	451.513.686	93,10%	
										PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	49.999.419	41.338.853	82,68%	
										Penyelenggaraan pendidikan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga pemasyarakatan tingkat provinsi	49.999.419	41.338.853	82,68%	
										PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	49.999.089	46.028.532	92,06%	
										Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat provinsi	49.999.089	46.028.532	92,06%	
										PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	256.999.139	237.058.123	92,24%	
										Penanganan sampah di TPA atau TPST regional	256.999.139	237.058.123	92,24%	
										PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	11.070.620.987	9.543.952.442	86,21%	
										Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	3.567.378.746	2.943.267.885	82,51%	
										Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	7.503.242.242	6.600.684.557	87,97%	
										PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	3.831.065.505	3.378.740.199	88,19%	



No	Sasaran Strategis	Indikator	Capaian 2022	2023			Target Akhir RPJMD 2026	Capaian 2023 terhadap 2026	Kategori	Program	Anggaran	Realisasi		Efisiensi %
				Target	Realisasi	% Realisasi						Keuangan	%	
										Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	3.831.065.505	3.378.740.199	88,19%	
										PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	310.070.000	164.661.500	53,10%	
										Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	310.070.000	164.661.500	53,10%	
										PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	503.290.050	470.305.007	93,45%	
										Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	503.290.050	470.305.007	93,45%	
3	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Profesional, Efisien, Efektif, Dan Fokus Pada Sistem Penganggaran Yang Berbasis Kinerja.										143.530.487.618	124.191.565.203	0,8653	0,1347
		Predikat SAKIP	BB	BB	BB	100	A	91,76	Sangat Tinggi	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	1.633.720.949	1.559.046.023	95,43%	
										Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	1.633.720.949	1.559.046.023	95,43%	
										PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	2.914.239.090	2.191.083.608	75,19%	
										Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	1.730.120.000	1.212.063.791	70,06%	
										Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	619.281.860	495.836.191	80,07%	
										Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	564.837.230	483.183.626	85,54%	
										PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	3.974.584.214	3.010.814.211	75,75%	
										Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	1.476.216.285	1.136.701.393	77,00%	
										Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	1.226.033.005	1.099.259.811	89,66%	
										Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	1.272.334.924	774.853.007	60,90%	
										PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	6.028.427.674	4.880.478.947	80,96%	
										Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	5.294.681.492	4.186.759.944	79,07%	
										Pengembangan Inovasi dan Teknologi	733.746.182	693.719.003	94,54%	
										PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	5.623.030.892	4.104.638.514	73,00%	
										Penyelenggaraan Pengawasan Internal	4.830.530.892	3.854.931.197	79,80%	
										Penyelenggaraan Pengawasan dengan tujuan tertentu	792.500.000	249.707.317	31,51%	



No	Sasaran Strategis	Indikator	Capaian 2022	2023			Target Akhir RPJMD 2026	Capaian 2023 terhadap 2026	Kategori	Program	Anggaran	Realisasi		Efisiensi %
				Target	Realisasi	% Realisasi						Keuangan	%	
										PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	6.283.891.406	4.932.365.399	78,49%	
										Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan	3.753.313.680	2.808.077.333	74,82%	
										pendampingan dan asistensi				
										Pendampingan dan Asistensi	2.530.577.726	2.124.288.066	83,94%	
										PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	2.067.758.555	1.746.199.651	84,45%	
										Pembahasan Kebijakan Anggaran	2.067.758.555	1.746.199.651	84,45%	
										PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	4.886.610.341	3.883.003.760	79,46%	
										Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	1.124.076.182	894.573.939	79,58%	
										Mutasi dan Promosi ASN	2.526.062.062	1.991.985.219	78,86%	
										Pengembangan Kompetensi ASN	609.955.633	487.529.384	79,93%	
										Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	626.516.464	508.915.218	81,23%	
										PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	2.143.604.370	1.376.936.687	64,23%	
										Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	2.143.604.370	1.376.936.687	64,23%	
										PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	3.145.509.595	2.445.198.400	77,74%	
										Pengelolaan Barang Milik Daerah	3.145.509.595	2.445.198.400	77,74%	
										PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	21.857.307.381	20.935.185.761	95,78%	
										Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	21.857.307.381	20.935.185.761	95,78%	
										PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	6.919.221.844	5.963.990.213	86,19%	
										1.Pengembangan Kompetensi Teknis	1.952.364.550	1.859.751.099	95,26%	
										2.Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	4.966.857.294	4.104.239.114	82,63%	
										PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	404.004.691	393.384.859	97,37%	
										Pelaksanaan Otonomi Daerah	404.004.691	393.384.859	97,37%	
		Maturitas SPIP	3.24	3,2	3,37	105,41	3,5	96,37	Sangat Tinggi	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	5.623.030.892	4.104.638.514	0,73	
										1.Penyelenggaraan Pengawasan Internal	4.830.530.892	3.854.931.197	79,80%	
										2.Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	792.500.000	249.707.317	31,51%	
										PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	2.530.577.726	2.124.288.066	83,94%	



No	Sasaran Strategis	Indikator	Capaian 2022	2023			Target Akhir RPJMD 2026	Capaian 2023 terhadap 2026	Kategori	Program	Anggaran	Realisasi		Efisiensi %
				Target	Realisasi	% Realisasi						Keuangan	%	
									Pendampingan dan Asistensi	2.530.577.726	2.124.288.066	83,94%		
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Baik	Baik	Belum Rilis dari Kemendagri	-	Baik	-	N/A	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	8.671.956.603	6.225.929.839	0,7179	
									1.Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	2.143.604.370	1.376.936.687	64,23%		
									2.Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	2.997.508.918	1.977.717.870	65,98%		
									3.Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	3.530.843.315	2.871.275.282	81,32%		
									PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	3.145.509.595	2.445.198.400	77,74%		
									Pengelolaan Barang Milik Daerah	3.145.509.595	2.445.198.400	77,74%		
									PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	2.294.957.230	1.695.247.417	73,87%		
									1.Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	1.730.120.000	1.212.063.791	70,06%		
									2.Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	564.837.230	483.183.626	85,54%		
									PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	5.294.681.492	4.186.759.944	79,07%		
									Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	5.294.681.492	4.186.759.944	79,07%		
									Pengembangan Inovasi dan Teknologi	733.746.182	693.719.003			
									PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	21.857.307.381	20.935.185.761	95,78%		
									Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	21.857.307.381	20.935.185.761	95,78%		
									PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.074.839.158	1.951.105.461	94,04%		
									Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	2.074.839.158	1.951.105.461	94,04%		
		Indeks Maturitas SPBE	1,98	2,9	2,8	96,55	3,8	73,68	Sedang	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	21.857.307.381	20.935.185.761	0,9578	
										Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	21.857.307.381	20.935.185.761	95,78%	
										PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.074.839.158	1.951.105.461	94,04%	
										Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	2.074.839.158	1.951.105.461	94,04%	
										PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	223.570.000	214.594.546	95,99%	
										Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	223.570.000	214.594.546	95,99%	
4	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	72,67	72,68	72,59	99,88	72,8	99,71	Sangat Tinggi		60.568.618.200	55.734.854.126	0,9202	0,0798



No	Sasaran Strategis	Indikator	Capaian 2022	2023			Target Akhir RPJMD 2026	Capaian 2023 terhadap 2026	Kategori	Program	Anggaran	Realisasi		Efisiensi %
				Target	Realisasi	% Realisasi						Keuangan	%	
										Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	63.187.820	62.635.822	99,13%	
6	Meningkatnya Kemandirian Sosial Ekonomi Masyarakat										419.205.474.379	388.284.578.455	0,9262	0,0738
		Angka Kemiskinan	6,86	6,70-6,00	6,45	103,73	5,60-5,20	84,82	Tinggi	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	555.361.850	497.610.938	0,896	
										Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	555.361.850	497.610.938	89,60%	
										PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.808.148.201	1.784.137.420	98,67%	
										Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	1.808.148.201	1.784.137.420	98,67%	
										PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	179.750.000	165.302.957	91,96%	
										Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	19.800.000	15.830.700	79,95%	
										Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	30.000.000	26.787.125	89,29%	
										Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	10.000.000	8.880.541	88,81%	
										Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	119.950.000	113.804.591	94,88%	
										PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	94.023.002	89.535.400	95,23%	
										Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	94.023.002	89.535.400	95,23%	
										PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	4.218.097.881	3.727.465.335	88,37%	
										Pengembangan usaha kecil dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha menengah	4.218.097.881	3.727.465.335	88,37%	
										PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	48.500.000	48.323.391	99,64%	
										Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	48.500.000	48.323.391	99,64%	
										PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	66.166.540	64.498.762	97,48%	
										Pengelolaan informasi pasar kerja	66.166.540	64.498.762	97,48%	
										PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	171.899.661	170.236.479	99,03%	
										Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan	171.899.661	170.236.479	99,03%	
										PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	6.747.090.124	6.224.895.289	92,26%	
										Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	5.461.108.449	4.976.780.001	91,13%	



No	Sasaran Strategis	Indikator	Capaian 2022	2023			Target Akhir RPJMD 2026	Capaian 2023 terhadap 2026	Kategori	Program	Anggaran	Realisasi		Efisiensi %
				Target	Realisasi	% Realisasi						Keuangan	%	
									Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	1.285.981.675	1.248.115.288	97,06%		
									PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU- PULAU KECIL	520.000.000	514.974.424	99,03%		
									Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	520.000.000	514.974.424	99,03%		
									PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	8.270.230.000	7.758.612.700	93,81%		
									Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	739.820.000	658.814.167	89,05%		
									Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1.817.200.000	1.779.131.000	97,91%		
									Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	5.713.210.000	5.320.667.533	93,13%		
									PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	6.408.660.000	4.087.602.743	63,78%		
									Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	6.408.660.000	4.087.602.743	63,78%		
									PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	310.070.000	164.661.500	53,10%		
									Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	310.070.000	164.661.500	53,10%		
									PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	1.402.154.805	1.100.773.146	78,51%		
									Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	1.402.154.805	1.100.773.146	78,51%		
									PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTULITAS UMUM (PSU)	55.363.679.654	51.924.169.329	93,79%		
									Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	55.363.679.654	51.924.169.329	93,79%		
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	29.753.004.866	28.456.144.855	95,64%		
									Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	29.753.004.866	28.456.144.855	95,64%		
									PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	278.318.970.710	258.975.200.861	93,05%		
									1.Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	186.635.972.733	174.599.173.664	93,55%		
									2.Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	79.319.602.758	73.240.385.669	92,34%		
									3.Pengelolaan Pendidikan Khusus	12.363.395.219	11.135.641.528	90,07%		
									PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.476.216.285	1.136.701.393	77,00%		



No	Sasaran Strategis	Indikator	Capaian 2022	2023			Target Akhir RPJMD 2026	Capaian 2023 terhadap 2026	Kategori	Program	Anggaran	Realisasi		Efisiensi %
				Target	Realisasi	% Realisasi						Keuangan	%	
										Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	1.476.216.285	1.136.701.393	77,00%	
										PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	194.725.232	193.413.110	99,33%	
										Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	194.725.232	193.413.110	99,33%	
										PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	4.422.112.862	4.215.897.834	95,34%	
										Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	4.422.112.862	4.215.897.834	95,34%	
										PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	3.831.065.505	3.378.740.199	88,19%	
										Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	3.831.065.505	3.378.740.199	88,19%	
										PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	519.567.540	515.873.767	99,29%	
										Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	81.505.000	81.466.600	99,95%	
										Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	438.062.540	434.407.167	99,17%	
										PROGRAM PENCATATAN SIPIL	333.453.625	328.141.770	98,41%	
										Pelayanan Pencatatan Sipil	333.453.625	328.141.770	98,41%	
										PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	157.000.000	156.554.682	99,72%	
										Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	157.000.000	156.554.682	99,72%	
										PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	80.317.500	72.120.900	89,79%	
										Penyediaan Profil Kependudukan	80.317.500	72.120.900	89,79%	
		Tingkat Pengangguran Terbuka	4,33	4,45	4,01	109,89	4,11	97,57	Sangat Tinggi	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	48.500.000	48.323.391	0,9964	
										Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	48.500.000	48.323.391	99,64%	
										PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	66.166.540	64.498.762	97,48%	
										Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	66.166.540	64.498.762	97,48%	
										PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	44.066.090	41.880.786	95,04%	



No	Sasaran Strategis	Indikator	Capaian 2022	2023			Target Akhir RPJMD 2026	Capaian 2023 terhadap 2026	Kategori	Program	Anggaran	Realisasi		Efisiensi %
				Target	Realisasi	% Realisasi						Keuangan	%	
									Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	44.066.090	41.880.786	95,04%		
									PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	95.103.258	95.102.863	100,00%		
									Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	95.103.258	95.102.863	100,00%		
									PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	171.899.661	170.236.479	99,03%		
									Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pematapan	171.899.661	170.236.479	99,03%		
									PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	555.361.850	497.610.938	89,60%		
									Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	555.361.850	497.610.938	89,60%		
									PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.808.148.201	1.784.137.420	98,67%		
									Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	1.808.148.201	1.784.137.420	98,67%		
									PROGRAM PEMBERDAYAAN UMKM	94.023.002	89.535.400	95,23%		
									Pemberdayaan usaha kecil yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan	94.023.002	89.535.400	95,23%		
									PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	4.218.097.881	3.727.465.335	88,37%		
									Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	4.218.097.881	3.727.465.335	88,37%		
									PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	2.828.051.316	2.442.044.588	86,35%		
									Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	2.828.051.316	2.442.044.588	86,35%		
									PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	3.831.065.505	3.378.740.199	88,19%		
									Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	3.831.065.505	3.378.740.199	88,19%		
									PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	194.725.232	193.413.110	99,33%		
									Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	194.725.232	193.413.110	99,33%		
7	Terwujudnya Pembangunan Rendah Karbon	Tingkat Penurunan Emisi GPK	97185067	6523255	0	10252006	0	Sangat Rendah		3.689.026.942	3.346.133.547	0,9071	0,0929	
									PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.226.033.005	1.099.259.811	89,66%		
									Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	1.226.033.005	1.099.259.811	89,66%		



No	Sasaran Strategis	Indikator	Capaian 2022	2023			Target Akhir RPJMD 2026	Capaian 2023 terhadap 2026	Kategori	Program	Anggaran	Realisasi		Efisiensi %
				Target	Realisasi	% Realisasi						Keuangan	%	
										PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	590.800.000	585.681.228	99,13%	
										Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	590.800.000	585.681.228	99,13%	
										PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	1.355.140.000	1.149.846.421	84,85%	
										Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	1.355.140.000	1.149.846.421	84,85%	
										PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	517.053.937	511.346.087	98,90%	
										Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	517.053.937	511.346.087	98,90%	
8	Meningkatnya Kualitas Air, Udara Dan Lahan										24.350.872.115	21.468.029.620	88,16%	11,84%
		Indeks Kualitas air	54,46	57,34	55,93	97,54	55,5	100,77	Sangat Tinggi	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	567.053.937	558.192.887	98,44%	
		Indeks Kualitas udara	94,52	93,43	93,91	100,51	92,15	101,91	Sangat Tinggi	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	517.053.937	511.346.087	98,90%	
		Indeks Tutupan lahan	100	100	100	100	100	100	Sangat Tinggi	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	50.000.000	46.846.800	0,9369	
		Indeks Kualitas Air laut	84,85	81,52	83,4	102,31	75,15	110,98	Sangat Tinggi	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	50.000.000	46.846.800	0,9369	
										PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	1.159.144.952	687.507.606	59,31%	
										Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	1.159.144.952	687.507.606	59,31%	
										PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	484.979.294	451.513.686	93,10%	
										Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin	484.979.294	451.513.686	93,10%	
										PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	49.999.419	41.338.853	82,68%	
										Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Masyarakat Tingkat Daerah Provinsi	49.999.419	41.338.853	82,68%	
										PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	49.999.089	46.028.532	92,06%	
										Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat	49.999.089	46.028.532	92,06%	
										PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	256.999.139	237.058.123	92,24%	
										Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	256.999.139	237.058.123	92,24%	



No	Sasaran Strategis	Indikator	Capaian 2022	2023			Target Akhir RPJMD 2026	Capaian 2023 terhadap 2026	Kategori	Program	Anggaran	Realisasi		Efisiensi %
				Target	Realisasi	% Realisasi						Keuangan	%	
										PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	11.070.620.987	9.543.952.442	86,21%	
										Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	3.567.378.746	2.943.267.885	82,51%	
										Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	7.503.242.242	6.600.684.557	87,97%	
										PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	344.848.453	308.643.200	89,50%	
										Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	344.848.453	308.643.200	89,50%	
										PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	3.831.065.505	3.378.740.199	88,19%	
										Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	3.831.065.505	3.378.740.199	88,19%	
										PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	858.585.000	765.290.200	89,13%	
										Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	858.585.000	765.290.200	89,13%	
										PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	1.122.876.540	1.036.996.694	92,35%	
										Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik	1.122.876.540	1.036.996.694	92,35%	
										PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU- PULAU KECIL	1.106.300.000	1.069.598.655	96,68%	
										Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	1.106.300.000	1.069.598.655	96,68%	
										PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.398.399.800	3.296.321.743	97,00%	
										Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	3.033.152.050	2.951.557.143	97,31%	
										Pengawasan sumber daya perikanan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi	365.247.750	344.764.600	94,39%	
9	Meningkatnya Aksesibilitas Dan Konektivitas Antar Pusat-Pusat Kegiatan	Cakupan Layanan Transportasi antar Pusat Kegiatan	69	65	70	107,69	85	82,35	Tinggi		260.347.281.815	224.596.797.504	0,8627	0,1373
										PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	3.745.363.559	3.716.539.351	99,23%	
										Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	1.933.870.000	1.912.431.717	98,89%	
										Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	135.015.000	134.162.644	99,37%	
										Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) Untuk Jalan Provinsi	38.310.000	37.364.500	97,53%	



No	Sasaran Strategis	Indikator	Capaian 2022	2023			Target Akhir RPJMD 2026	Capaian 2023 terhadap 2026	Kategori	Program	Anggaran	Realisasi		Efisiensi %
				Target	Realisasi	% Realisasi						Keuangan	%	
									Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan untuk Jalan Provinsi	54.998.609	53.983.850	98,15%		
									Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.583.169.950	1.578.596.640	99,71%		
									PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	13.675.837.999	9.206.348.333	67,32%		
									Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	2.152.635.200	2.145.203.444	99,65%		
									Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	11.523.202.799	7.061.144.889	61,28%		
									PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	242.926.080.257	211.673.909.820	87,14%		
									Penyelenggaraan Jalan Provinsi	242.926.080.257	211.673.909.820	87,14%		
10	Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur dasar									5.279.879.515	4.954.256.981	0,9383	0,0617	
		Cakupan Layanan Air Bersih	37,91	64,92	0	68,5	0	Sangat Rendah	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	2.174.980.000	2.002.500.143	92,07%		
									Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	2.174.980.000	2.002.500.143	92,07%		
									PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLAGIAN	578.980.000	568.823.120	98,25%		
									Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	265.830.000	262.512.500	98,75%		
									Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	253.150.000	250.965.000	99,14%		
									Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	60.000.000	55.345.620	92,24%		
		Cakupan Akses Dan Layanan Telekomunikasi	93,98	88	0	98	0	Sangat Rendah	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.074.839.158	1.951.105.461	94,04%		
									Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	2.074.839.158	1.951.105.461	94,04%		
									PROGRAM PENGELOLA PERBATASAN DAERAH	451.080.357	431.828.257	95,73%		
									Monitoring dan Evaluasi	451.080.357	431.828.257	95,73%		
11	Meningkatnya Produktivitas Dan Nilai Tambah Sektor Pertanian, Perdagangan, Jasa, Industri, Pariwisata									379.939.076.999	336.285.316.383	0,8851	0,1149	



No	Sasaran Strategis	Indikator	Capaian 2022	2023			Target Akhir RPJMD 2026	Capaian 2023 terhadap 2026	Kategori	Program	Anggaran	Realisasi		Efisiensi %
				Target	Realisasi	% Realisasi						Keuangan	%	
		Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian	14,06	17	14,23	83,71	18	79,06	Tinggi	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	11.534.051.692	10.831.910.327	0,9391	
										Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	4.786.961.568	4.607.015.038	96,24%	
										Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	5.461.108.449	4.976.780.001	91,13%	
										Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	1.285.981.675	1.248.115.288	97,06%	
										PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	5.613.130.755	5.397.172.450	96,15%	
										Penataan Prasarana Pertanian	5.613.130.755	5.397.172.450	96,15%	
										PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	398.850.000	357.150.700	89,55%	
										Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	398.850.000	357.150.700	89,55%	
										PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	2.300.361.434	799.912.027	34,77%	
										Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	235.617.632	229.898.775	97,57%	
										Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	2.300.361.434	799.912.027	34,77%	
										PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	519.857.500	513.432.482	98,76%	
										Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	519.857.500	513.432.482	98,76%	
										PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	171.899.661	170.236.479	99,03%	
										Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pematapan	171.899.661	170.236.479	99,03%	
										PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.947.381.943	1.697.926.141	87,19%	
										Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.947.381.943	1.697.926.141	87,19%	
		Indeks Ketahanan Pangan	71,04	73,7		0	74,3	0	Sangat Rendah	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	370.630.000	369.290.400	0,9964	
										Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi	370.630.000	369.290.400	99,64%	
										PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	339.435.000	313.657.500	92,41%	
										Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	339.435.000	313.657.500	92,41%	



No	Sasaran Strategis	Indikator	Capaian 2022	2023			Target Akhir RPJMD 2026	Capaian 2023 terhadap 2026	Kategori	Program	Anggaran	Realisasi		Efisiensi %
				Target	Realisasi	% Realisasi						Keuangan	%	
										PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	50.454.950	49.936.550	98,97%	
										Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	50.454.950	49.936.550	98,97%	
										PROGRAM STABILITAS HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN KEBUTUHAN PENTING	2.372.628.082	2.270.097.582	95,68%	
										Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	2.372.628.082	2.270.097.582	95,68%	
		Nilai Tukar Petani	109,35	110,12	111,57	101,32	104	107,28	Sangat Tinggi	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	11.534.051.692	10.831.910.327	0,9391	
										Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	4.786.961.568	4.607.015.038	96,24%	
										Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	5.461.108.449	4.976.780.001	91,13%	
										Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	1.285.981.675	1.248.115.288	97,06%	
										PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	5.613.130.755	5.397.172.450	96,15%	
										Penataan Prasarana Pertanian	5.613.130.755	5.397.172.450	96,15%	
										PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	398.850.000	357.150.700	89,55%	
										Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	398.850.000	357.150.700	89,55%	
										PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	2.300.361.434	799.912.027	34,77%	
										Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	235.617.632	229.898.775	97,57%	
										Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	2.300.361.434	799.912.027	34,77%	
										PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	94.023.002	89.535.400	95,23%	
										Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	94.023.002	89.535.400	95,23%	
										PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	49.990.000	46.706.800	93,43%	
										Pengawasan Pupuk dan Peptisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	49.990.000	46.706.800	93,43%	
										PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	519.857.500	513.432.482	98,76%	
										Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	519.857.500	513.432.482	98,76%	



No	Sasaran Strategis	Indikator	Capaian 2022	2023			Target Akhir RPJMD 2026	Capaian 2023 terhadap 2026	Kategori	Program	Anggaran	Realisasi		Efisiensi %
				Target	Realisasi	% Realisasi						Keuangan	%	
		Nilai Tukar Nelayan	104,58	105,93	103,19	97,41	105,26	98,03	Sangat Tinggi	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	2.557.020.000	2.437.945.167	0,9534	
										Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	739.820.000	658.814.167	89,05%	
										Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1.817.200.000	1.779.131.000	97,91%	
										PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	94.023.002	89.535.400	95,23%	
										Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	94.023.002	89.535.400	95,23%	
										PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	4.218.097.881	3.727.465.335	88,37%	
										Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	4.218.097.881	3.727.465.335	88,37%	
										PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	519.857.500	513.432.482	98,76%	
										Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	519.857.500	513.432.482	98,76%	
		Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri	3,95	6,73	1,67	24,81	6,86	24,34	Sangat Rendah	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	4.549.400.742	4.477.857.339	0,9843	
										Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	4.549.400.742	4.477.857.339	98,43%	
										PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1.318.238.000	1.280.383.464	97,13%	
										Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	693.323.000	677.886.843	97,77%	
										Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	624.915.000	602.496.621	96,41%	
		Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	9,09	1,8	6,77	376,11	2,8	241,79	Sangat Tinggi	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	46.333.000	45.696.918	0,9863	
										Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi Daerah Povinsi yang Telah ditetapkan sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	46.333.000	45.696.918	98,63%	
										PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	18.920.799.562	17.682.925.225	93,46%	
										Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	18.920.799.562	17.682.925.225	93,46%	
										PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	727.868.216	714.161.526	98,12%	



No	Sasaran Strategis	Indikator	Capaian 2022	2023			Target Akhir RPJMD 2026	Capaian 2023 terhadap 2026	Kategori	Program	Anggaran	Realisasi		Efisiensi %
				Target	Realisasi	% Realisasi						Keuangan	%	
										Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	149.999.646	129.634.100	86,42%	
										Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	727.868.216	714.161.526	98,12%	
										PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	934.948.065	924.402.186	98,87%	
										Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	934.948.065	924.402.186	98,87%	
										PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	352.955.000	350.830.000	99,40%	
										Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	352.955.000	350.830.000	99,40%	
										PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	452.362.212	386.212.366	85,38%	
										Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	452.362.212	386.212.366	85,38%	
										PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1.318.238.000	1.280.383.464	97,13%	
										Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	693.323.000	677.886.843	97,77%	
										Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	624.915.000	602.496.621	96,41%	
		Pengeluaran Per Kapita	9350	8234	9734	118,22	7487	130,01	Sangat Tinggi	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	648.400.000	646.058.000	0,9964	
										Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	648.400.000	646.058.000	99,64%	
										PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	693.323.000	677.886.843	97,77%	
										Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	693.323.000	677.886.843	97,77%	
		Jumlah Kunjungan Wisatawan	40047	796268		0	796268	0	Sangat Rendah	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.177.812.215	2.695.697.730	0,8483	
										Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	1.382.000.000	1.374.864.519	99,48%	
										Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	1.795.812.215	1.320.833.211	73,55%	
										PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	12.588.803.508	11.845.545.603	94,10%	
										Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	12.588.803.508	11.845.545.603	94,10%	
										PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	186.243.882	180.084.958	96,69%	



No	Sasaran Strategis	Indikator	Capaian 2022	2023			Target Akhir RPJMD 2026	Capaian 2023 terhadap 2026	Kategori	Program	Anggaran	Realisasi		Efisiensi %
				Target	Realisasi	% Realisasi						Keuangan	%	
									Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	186.243.882	180.084.958	96,69%		
									PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	947.906.605	933.265.261	98,46%		
									Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	633.147.331	623.437.865	98,47%		
									Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	314.759.274	309.827.396	98,43%		
									PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	1.874.756.800	1.625.447.818	86,70%		
									Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1.026.495.900	922.644.854	89,88%		
									Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	848.260.900	702.802.964	82,85%		
									PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	167.161.090	156.507.826	93,63%		
									Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	167.161.090	156.507.826	93,63%		
									PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	6.736.279.360	4.778.312.593	70,93%		
									Pengelolaan Museum Provinsi	6.736.279.360	4.778.312.593	70,93%		
									PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	242.926.080.257	211.673.909.820	87,14%		
									Penyelenggaraan Jalan Provinsi	242.926.080.257	211.673.909.820	87,14%		
									PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	94.023.002	89.535.400	95,23%		
									Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	94.023.002	89.535.400	95,23%		
									PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	4.218.097.881	3.727.465.335	88,37%		
									Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	4.218.097.881	3.727.465.335	88,37%		
									PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	21.857.307.381	20.935.185.761	95,78%		
									Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	21.857.307.381	20.935.185.761	95,78%		
									PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	1.683.795.438	1.602.639.739	95,18%		
									Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	1.683.795.438	1.602.639.739	95,18%		
12	Meningkatnya Toleransi Antar Umat Beragama									122.579.246.131	100.258.010.166	0,8179	0,1821	



No	Sasaran Strategis	Indikator	Capaian 2022	2023			Target Akhir RPJMD 2026	Capaian 2023 terhadap 2026	Kategori	Program	Anggaran	Realisasi		Efisiensi %
				Target	Realisasi	% Realisasi						Keuangan	%	
		Skor Dimensi Toleransi	83,43	79,25	80,67	101,79	82,51	97,77	Sangat Tinggi	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA.	131.331.399	123.682.975	0,9418	
										Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.	131.331.399	123.682.975	94,18%	
										PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	647.318.637	616.946.652	95,31%	
										Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	647.318.637	616.946.652	95,31%	
										PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	43.591.703.808	36.043.412.414	82,68%	
										Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	43.591.703.808	36.043.412.414	82,68%	
		Skor Dimensi Kesenjangan	79,81	79,25	82,87	104,57	80,75	102,63	Sangat Tinggi	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA.	131.331.399	123.682.975	0,9418	
										Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.	131.331.399	123.682.975	94,18%	
										PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	647.318.637	616.946.652	95,31%	
										Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.	647.318.637	616.946.652	95,31%	
										PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	31.465.865.425	24.368.326.085	77,44%	
										Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	24.420.646.334	19.638.140.069	80,42%	
										Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	7.045.219.091	4.730.186.016	67,14%	
										PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	500.000.000	500.000.000	100,00%	
										Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	500.000.000	500.000.000	100,00%	
		Skor Dimensi Kerjasama	79,6	79,24	80,01	100,97	80,55	99,33	Sangat Tinggi	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA.	131.331.399	123.682.975	0,9418	
										Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.	131.331.399	123.682.975	94,18%	
										PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	647.318.637	616.946.652	95,31%	
										Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.	647.318.637	616.946.652	95,31%	
										PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	43.591.703.808	36.043.412.414	82,68%	
										Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	43.591.703.808	36.043.412.414	82,68%	
										PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	1.094.022.982	1.080.970.372	98,81%	



No	Sasaran Strategis	Indikator	Capaian 2022	2023			Target Akhir RPJMD 2026	Capaian 2023 terhadap 2026	Kategori	Program	Anggaran	Realisasi		Efisiensi %
				Target	Realisasi	% Realisasi						Keuangan	%	
										Fasilitasi Kerjasama Daerah	1.094.022.982	1.080.970.372	98,81%	
13	Meningkatnya Aksesibilitas Terhadap Penggunaan Listrik Dan Energi Baru Terbarukan										4.535.750.000	4.262.056.530	0,9397	0,0603
		Cakupan Rumah Tangga Teraliri Listrik	186918	187639	214940	114,55	208295	103,19	Sangat Tinggi	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	1.397.980.000	1.366.921.810	0,9778	
										Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	1.397.980.000	1.366.921.810	97,78%	
		Rasio Elektrifikasi	86,44	90,08	91,19	101,23	100	91,19	Sangat Tinggi	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	1.782.630.000	1.745.288.299	97,91%	
										Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	384.650.000	378.366.489	98,37%	
										Penganggaran untuk kelompok tidak mampu pembangunan penyediaan tenaga listrik belum berkembang daerah terpencil dan perdesaan	1.397.980.000	1.366.921.810	97,78%	
		Nilai Baura Energin	9,97	4,68	12,39	264,74	6,93	178,79	Sangat Tinggi	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	1.355.140.000	1.149.846.421	84,85%	
										Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	1.355.140.000	1.149.846.421	84,85%	
14	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender										281.225.541.835	261.852.809.453	93,11%	6,89%
		Rasio Angka Harapan Hidup Perempuan : Laki	1,05	1,03	1,054	102,33	1	105,4	Sangat Tinggi	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	737.215.700	735.902.399	99,82%	
		Rasio RataRata Lama sekolah perempuan : laki	0,91	0,95	0,93	97,89	1	93	Sangat Tinggi	1.Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	145.089.850	143.777.399	99,10%	
		Rasio Angka Harapan Lama Sekolah Perempuan : Laki	1,02	1,01	1,036	102,57	1	103,6	Sangat Tinggi	2.Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	500.000.000	500.000.000	100,00%	
		Rasio Pengeluaran Perkapita Perempuan : Laki	0,4	0,6	0,465	77,5	0,8	58,13	Rendah	3.Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	92.125.850	92.125.000	100,00%	
										PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	194.725.232	193.413.110	99,33%	
										Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	194.725.232	193.413.110	99,33%	



No	Sasaran Strategis	Indikator	Capaian 2022	2023			Target Akhir RPJMD 2026	Capaian 2023 terhadap 2026	Kategori	Program	Anggaran	Realisasi		Efisiensi %
				Target	Realisasi	% Realisasi						Keuangan	%	
										PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	237.620.000	236.671.822	99,60%	
										Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	174.432.180	174.036.000	99,77%	
										Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	63.187.820	62.635.822	99,13%	
										PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	320.880.400	425.614.982	132,64%	
										Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	190.380.400	313.185.432	164,51%	
										Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	130.500.000	112.429.550	86,15%	
										PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	81.505.000	81.466.600	99,95%	
										Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	81.505.000	81.466.600	99,95%	
										PROGRAM PENCATATAN SIPIL	333.453.625	328.141.770	98,41%	
										Pelayanan Pencatatan Sipil	333.453.625	328.141.770	98,41%	
										PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	157.000.000	156.554.682	99,72%	
										Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	157.000.000	156.554.682	99,72%	
										PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	80.317.500	72.120.900	89,79%	
										Penyediaan Profil Kependudukan	80.317.500	72.120.900	89,79%	
										PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	279.082.824.378	259.622.923.188	93,03%	
										Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	186.635.972.733	174.599.173.664	96,40%	
										Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	79.319.602.758	73.240.385.669	86,41%	
										Pengelolaan Pendidikan Khusus	12.363.395.219	11.135.641.528	78,28%	
										PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	763.853.668	647.722.327	84,80%	
										Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi	763.853.668	647.722.327	84,80%	
15	Meningkatnya Peran Serta Pemuda Dalam Pembangunan										342.454.553.081	320.665.324.050	93,64%	6,36%
		Indeks Pembangunan Pemuda	50	57,4	Belum Rilis dari Kemenpora	N/A	58,5	N/A	N/A	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	3.208.954.154	3.128.820.801	97,50%	



No	Sasaran Strategis	Indikator	Capaian 2022	2023			Target Akhir RPJMD 2026	Capaian 2023 terhadap 2026	Kategori	Program	Anggaran	Realisasi		Efisiensi %
				Target	Realisasi	% Realisasi						Keuangan	%	
									Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	3.208.954.154	3.128.820.801	97,50%		
									PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	29.275.515.879	28.211.343.262	96,36%		
									Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	2.847.500.000	2.088.284.030	73,34%		
									Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	6.034.985.879	5.883.578.212	97,49%		
									Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi	1.443.230.000	1.393.660.000	96,57%		
									Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	18.949.800.000	18.845.821.020	99,45%		
									PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	900.000.000	900.000.000	100,00%		
									Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	900.000.000	900.000.000	100,00%		
									PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	278.318.970.710	258.975.200.861	93,05%		
									Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	186.635.972.733	174.599.173.664	93,55%		
									Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	79.319.602.758	73.240.385.669	92,34%		
									Pengelolaan Pendidikan Khusus	12.363.395.219	11.135.641.528	90,07%		
									PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	29.753.004.866	28.456.144.855	95,64%		
									Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	29.753.004.866	28.456.144.855	95,64%		
									PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	66.166.540	64.498.762	97,48%		
									Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	66.166.540	64.498.762	97,48%		
									PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	737.215.700	735.902.399	99,82%		
									1.Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	145.089.850	143.777.399	78,28%		
									2.Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	500.000.000	500.000.000	78,28%		
									3.Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	92.125.850	92.125.000	78,28%		
									PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	194.725.232	193.413.110	99,33%		
									Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	194.725.232	193.413.110	99,33%		



No	Sasaran Strategis	Indikator	Capaian 2022	2023			Target Akhir RPJMD 2026	Capaian 2023 terhadap 2026	Kategori	Program	Anggaran	Realisasi		Efisiensi %
				Target	Realisasi	% Realisasi						Keuangan	%	
16	Meningkatnya Produktivitas Dan Daya Saing Koperasi Dan UMKM									9.273.541.764	8.270.352.913	89,18%	10,82%	
		Pertumbuhan Koperasi sehat	13,5	5,76	4,84	84,03	5	96,8	Sangat Tinggi	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	50.000.000	48.000.000	96,00%	
										Pemeriksaan dan Pengawasan KOperasi yang Wilayah Keanggotaanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	50.000.000	48.000.000	96,00%	
										PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	4.218.097.881	3.727.465.335	88,37%	
										Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	4.218.097.881	3.727.465.335	88,37%	
		Persentase Pertumbuhan Kredit Perbankan Kepada UMKM	11,95	12,61	-30	-237,91	7,6	-394,74	Sangat Rendah	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	94.023.002	89.535.400	95,23%	
										Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	94.023.002	89.535.400	95,23%	
										PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	4.218.097.881	3.727.465.335	88,37%	
										Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	4.218.097.881	3.727.465.335	88,37%	
										PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	693.323.000	677.886.843	97,77%	
										Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	693.323.000	677.886.843	97,77%	
17	Meningkatnya Kepastian Hukum Berinvestasi									9.550.603.223	9.279.788.599	97,16%	2,84%	
		Rata-Rata Pertumbuhan Nilai Investasi	108,5	95	105	110,53	90	116,67	Sangat Tinggi	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	320.983.176	316.696.955	98,66%	
										1.Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	210.355.614	208.925.525	99,32%	
										2.Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	110.627.562	107.771.430	97,42%	
										PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	1.683.795.438	1.602.639.739	95,18%	
										Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	1.683.795.438	1.602.639.739	95,18%	
										PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	901.985.189	867.643.658	96,19%	
										1.Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	706.985.189	682.714.051	96,57%	
										2.Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	195.000.000	184.929.607	94,84%	



No	Sasaran Strategis	Indikator	Capaian 2022	2023			Target Akhir RPJMD 2026	Capaian 2023 terhadap 2026	Kategori	Program	Anggaran	Realisasi		Efisiensi %
				Target	Realisasi	% Realisasi						Keuangan	%	
										PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	833.700.075	816.419.639	97,93%	
										Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	833.700.075	816.419.639	97,93%	
										PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	40.000.000	39.849.000	99,62%	
										Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	40.000.000	39.849.000	99,62%	
										PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	897.399.300	873.439.205	97,33%	
										Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	897.399.300	873.439.205	97,33%	
										PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1.838.095.500	1.793.815.946	97,59%	
										1.Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	693.323.000	677.886.843	97,77%	
										2.Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	519.857.500	513.432.482	98,76%	
										3.Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	624.915.000	602.496.621	96,41%	
										PROGRAM PENDAPATAN DAERAH	2.443.844.545	2.375.863.229	97,22%	
										Pengelolaan Pendapatan Daerah	2.443.844.545	2.375.863.229	97,22%	
										PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	590.800.000	593.421.228	100,44%	
										Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	590.800.000	593.421.228	100,44%	
18	Menurunnya Kesenjangan Pendapatan Masyarakat										9.698.185.597	8.968.672.622	92,48%	7,52%
		Indeks Gini	0,27	0,283	0,277	102,12	0,28	101,07	Sangat Tinggi	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	619.281.860	495.836.191	80,07%	
										Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	619.281.860	495.836.191	80,07%	
										PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	2.702.249.290	2.235.961.204	82,74%	
										1.Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	1.476.216.285	1.136.701.393	77,00%	
										2.Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	1.226.033.005	1.099.259.811	89,66%	
										PROGRAM PENDAPATAN DAERAH	2.443.844.545	2.375.863.229	97,22%	
										Pengelolaan Pendapatan Daerah	2.443.844.545	2.375.863.229	97,22%	
										PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1.838.095.500	1.793.815.946	97,59%	



No	Sasaran Strategis	Indikator	Capaian 2022	2023			Target Akhir RPJMD 2026	Capaian 2023 terhadap 2026	Kategori	Program	Anggaran	Realisasi		Efisiensi %
				Target	Realisasi	% Realisasi						Keuangan	%	
										1.Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	693.323.000	677.886.843	97,77%	
										2.Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	519.857.500	513.432.482	98,76%	
										3.Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	624.915.000	602.496.621	96,41%	
										PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.808.148.201	1.784.137.420	98,67%	
										Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	1.808.148.201	1.784.137.420	98,67%	
										PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	48.500.000	48.323.391	99,64%	
										Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	48.500.000	48.323.391	99,64%	
										PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	66.166.540	64.498.762	97,48%	
										Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	66.166.540	64.498.762	97,48%	
										PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	171.899.661	170.236.479	99,03%	
										Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pematapan	171.899.661	170.236.479	99,03%	
19	Meningkatnya Kemandirian Desa										93.093.574.961	79.431.783.199	85,32%	14,68%
		Jumlah Desa Mandiri	39	43	58	134,88	70	82,86	Tinggi	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	1.243.992.506	1.081.856.779	86,97%	
		Jumlah Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal	142	162	96	140,74	55	25,45	Sangat Rendah	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1.243.992.506	1.081.856.779	86,97%	
										PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	4.422.112.862	4.215.897.834	95,34%	
										Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	4.422.112.862	4.215.897.834	95,34%	
										PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	171.899.661	170.236.479	99,03%	
										Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pematapan	171.899.661	170.236.479	99,03%	
										PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	29.753.004.866	28.456.144.855	95,64%	
										Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	29.753.004.866	28.456.144.855	95,64%	
										PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	848.260.900	702.802.964	82,85%	



No	Sasaran Strategis	Indikator	Capaian 2022	2023			Target Akhir RPJMD 2026	Capaian 2023 terhadap 2026	Kategori	Program	Anggaran	Realisasi		Efisiensi %
				Target	Realisasi	% Realisasi						Keuangan	%	
									Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	848.260.900	702.802.964	82,85%		
									PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	81.505.000	81.466.600	99,95%		
									Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	81.505.000	81.466.600	99,95%		
									PROGRAM PELAYANAN PENCATATAN SIPIL	333.453.625	328.141.770	98,41%		
									Pelayanan Pencatatan Sipil	333.453.625	328.141.770	98,41%		
									PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.074.839.158	1.951.105.461	94,04%		
									Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	2.074.839.158	1.951.105.461	94,04%		
									PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	94.023.002	89.535.400	95,23%		
									Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	94.023.002	89.535.400	95,23%		
									PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	4.218.097.881	3.727.465.335	88,37%		
									Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	4.218.097.881	3.727.465.335	88,37%		
									PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	46.260.000.000	35.112.699.535	75,90%		
									1.Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	44.312.618.057	33.414.773.394	75,41%		
									2.Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.947.381.943	1.697.926.141	87,19%		
									PROGRAM PENANGANAN BENCANA	356.310.000	353.692.431	99,27%		
									Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	356.310.000	353.692.431	99,27%		
									PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1.838.095.500	1.793.815.946	97,59%		
									1.Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	693.323.000	677.886.843	97,77%		
									2.Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	519.857.500	513.432.482	98,76%		
									3.Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	624.915.000	602.496.621	96,41%		
									PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	1.397.980.000	1.366.921.810	97,78%		



No	Sasaran Strategis	Indikator	Capaian 2022	2023			Target Akhir RPJMD 2026	Capaian 2023 terhadap 2026	Kategori	Program	Anggaran	Realisasi		Efisiensi %
				Target	Realisasi	% Realisasi						Keuangan	%	
									Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	1.397.980.000	1.366.921.810	97,78%		
20	Meningkatnya Pengembangan Wilayah Administrasi Kecamatan Untuk Pemenuhan Syarat Pembentukan DOB Yang Diusulkan									6.611.417.005	6.417.075.835	97,06%	2,94%	
		Jumlah wilayah administrasi pemerintahan yang dikembangkan	0	4	masih adanya moratorium	-	1	-	-	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	2.144.225.000	2.021.885.215	94,29%	
										1.Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	2.144.225.000	2.021.885.215	94,29%	
										PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	81.505.000	81.466.600	99,95%	
										Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	81.505.000	81.466.600	99,95%	
										PROGRAM PELAYANAN PENCATATAN SIPIL	333.453.625	328.141.770	98,41%	
										Pelayanan Pencatatan Sipil	333.453.625	328.141.770	98,41%	
										PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	80.317.500	72.120.900	89,79%	
										Penyediaan Profil Kependudukan	80.317.500	72.120.900	89,79%	
										PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	897.399.300	873.439.205	97,33%	
										Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	897.399.300	873.439.205	97,33%	
										PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	2.143.848.540	2.115.670.735	98,69%	
										1.Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	693.323.000	677.886.843	97,77%	
										2.Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	519.857.500	513.432.482	98,76%	
										3.Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	624.915.000	602.496.621	96,41%	
										PROGRAM PENGELOLA PERBATASAN DAERAH	930.668.040	924.351.410	99,32%	
										Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan	930.668.040	924.351.410	99,32%	



BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
- d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4406);
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323;

- k. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

2. Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan

Penyelenggaraan Tugas Pembantuan dilakukan melalui penugasan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemberi tugas pembantuan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari Pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota, dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa. Adapun norma, standar, prosedur, dan kriteria pelaksanaan kegiatan Tugas Pembantuan ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga. Pemberian tugas pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum. Tujuan pemberian tugas pembantuan adalah memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan, serta membantu penyelenggaraan pemerintahan, dan pengembangan pembangunan bagi daerah dan desa. Tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah kepada daerah dan/atau desa meliputi sebagian tugas - tugas Pemerintah yang apabila dilaksanakan oleh daerah dan/atau desa akan lebih efisien dan efektif. Tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah provinsi sebagai daerah otonom kepada Kab/Kota dan/atau desa meliputi sebagian tugas-tugas provinsi, antara lain dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas Kab/Kota dan sebagian tugas pemerintahan di bidang tertentu lainnya, termasuk juga sebagian tugas pemerintahan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan oleh Kab/Kota.

a. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan utara hanya memiliki 1 (satu) Tugas Pembantuan, yakni Tugas Pembantuan yang diterima dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Direktorat Jenderal Pembangunan Dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi. Dana APBN Tugas Pembantuan Bidang Transmigrasi terdiri dari Ditjen Penyiapan Kawasan Dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi. Adapun rincian Program dan

Kegiatan Tugas Pembantuan yang diterima oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara sebagai berikut:

- 1) Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi
 - Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi
- 2) Program Dukungan Manajemen
 - Dukungan Manajemen Eselon I Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi

b. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Program penganggaran sebagaimana tertuang dalam DIPA di Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara (Tugas Pembantuan) Tahun Anggaran 2023 meliputi Program Infrastruktur Konektivitas yang terdiri dari Kegiatan Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional. Lingkup dari kegiatan ini adalah:

- Layanan Penyiapan dan Pengendalian Pelaksanaan
- Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan
- Jalan Akses Simpul Transportasi (ProPN)(PEN)
- Preservasi Rutin Jembatan
- Jalan Akses Simpul Transportasi (ProPN)(PEN)
- Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal
- Layanan Umum

c. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Tugas Pembantuan yang diterima Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara berasal dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pertanian, yang disertai dengan petunjuk teknis dalam penggunaannya. Adapun tugas pembantuan yang diterima Terdiri atas 12 (dua belas) Program dengan rincian sebagai berikut:

- Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri
- Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas
- Program Dukungan Manajemen
- Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri
- Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas

- Program Dukungan Manajemen
- Program Nilai Tambah Dan Daya Saing Industri
- Program Dukungan Manajemen
- Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas
- Program Dukungan Manajemen
- Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri
- Program Dukungan Manajemen

d. Dinas Pariwisata

Berdasarkan Surat Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia dengan nomor: SK/19/KU.00.02/MK/2023 pada tanggal 3 Januari 2023 tentang Kegiatan yang Dilaksanakan melalui Tugas Pembantuan pada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun Anggaran 2023, Provinsi Kalimantan Utara memperoleh Kegiatan dengan Dana APBN Tugas Pembantuan pada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 1.285.000.000,-. Adapun kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Utara terkait Tugas Pembantuan adalah sebagai berikut :

1. Pelatihan Bidang Pariwisata dan Kebudayaan
2. Pelatihan Bidang Ekonomi Kreatif
3. Koordinasi Pengembangan Sistem Informasi Kepariwisata Nasional
4. Konferensi dan Event
5. Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat

3. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan

a. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara

Dana APBN Tugas Pembantuan Bidang Transmigrasi terdiri dari dari Ditjen Pembangunan Dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi sebesar Rp 440,348,000.00 yang terealisasi sebesar Rp 411,873,836.00 (93,53%) sehingga sisa anggaran Rp. 28.474.164,00.



Tabel 3. 1

Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara

PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR	TARGET		REALISASI	CAPAIAN (%)	KETERANGAN
		JUMLAH	SATUAN			
Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi						
Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi						
Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	Fasilitasi Layanan Sosial Budaya kepada masyarakat di Kawasan Transmigrasi	2	Orang	2	100	Pemilihan Transmigran Teladan dan Petugas Pelaksana Pengembangan SP (P3SP) Teladan Tahun 2023 sudah dilaksanakan di Jakarta Tanggal 13-19
Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga	Penempatan Transmigrasi luncuran	4	KK	4	100	Penempatan Transmigran Luncuran Tahun 2023 sebanyak 4 KK telah dilakukan pada akhir tahun 2023.
Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga	Fasilitasi pengurusan Sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigrasi	40	Orang	40	100	Kegiatan Rakor SHM telah dilakukan pada tanggal 4 Oktober 2023
Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga	Bantuan catu pangan untuk transmigrasi	24	KK	24	133,33	Pengadaan Catu Pangan Beras dan Angkutan Beras Ke Lokasi Transmigrasi Sudah Terlaksanakan.
Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	Bantuan Sarana produksi Pertanian di Satuan Permukiman dan Pusat SKP	1	Unit	1	100	Monitoring Sarana Produksi Pertanian telah dilaksanakan di Bulan Agustus
Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan perkantoran	1	Layanan	1	100	Progres capaian dihitung secara proporsional sesuai dengan bulan yang sudah dilalui

b. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Supaya rencana/target capaian kinerja yang ditetapkan di Perjanjian Kinerja dapat terukur dengan susunan indikator kinerja yaitu indikator output maupun outcome. Indikator tersebut mengacu pada sasaran program/kegiatan yang merupakan komitmen Satuan Kerja Perangkat Daerah Tugas Pembantuan (SKPD-TP) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara untuk dicapai dalam tahun 2023. Berkaitan dengan capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel 3. 2**Capaian Indikator Kinerja Sasaran Program TA. 2023**

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM	SAT	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	KET
Indikator Kinerja Program: Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional						
1.	Rating Kondisi Jalan Nasional	%	2,62	2,62	100%	
2.	Rating Keselamatan Jalan Nasional	%	-	-	-	
Sasaran Program : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya						
1.	Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR	%	100	100	100,00	

Tabel 3. 3**Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja TA. 2023**

NO	OUTPUT	SAT	TARGET		REALISASI	CAPAIAN (%)		KET
			AWAL	REVISI AKHIR		THD TARGET AWAL	THD TARGET REVISI AKHIR	
Sasaran Program : Meningkatkan Kinerja Pelayanan Jalan Nasional								
IKSP 2 : Rating Kondisi Jalan Nasional								
Indikator Kinerja Output								
1.	Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan	Km	35,11	35,11	35,11	100,00	100,00	
2.	Preservasi Rutin Jembatan	M	194,60	194,60	194,60	100,00	100,00	
3.	Preservasi Jembatan	M	20,00	20,00	20,00	100,00	100,00	
4.	Layanan Penyiapan dan Pengendalian Pelaksanaan	Dok	-	-	-	100,00	100,00	
Sasaran Program : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya								
IKSP : Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR								
Indikator Kinerja Output								
1.	Layanan Umum	Layanan	2,00	1,00	1,00	50,00	100,00	
2.	Layanan Perkantoran	Layanan	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	



Pada pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2023, satuan kerja SKPD-TP Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara mencapai realisasi pekerjaan fisik sebesar 100,00 % terhadap target revisi akhir.

c. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara

Adapun capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara di rincikan pada table berikut :

Tabel 3.4
Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan

N O	KODE SATKER	URUSAN	PROGRAM	ANGGARAN (RP)	REALISASI (RP)	PERSENTASE (%)
1	417659	Pertanian	- Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri - Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas - Program Dukungan Manajemen	3.555.217.000	3.022.757.520	85%
2	417668		- Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri - Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas - Program Dukungan Manajemen	3.577.061.000	2.835.585.774	79%
3	417670		- Program Nilai Tambah Dan Daya Saing Industri - Program Dukungan Manajemen	1.324.780.000	1.257.701.974	95%
4	417672		- Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas - Program Dukungan Manajemen	610.982.000	566.678.400	93%
5	417674		- Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri - Program Dukungan Manajemen	1.868.877.000	1.828.991.330	96,92
Total				10.936.917.000	9.511.714.998	86,97

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa alokasi anggaran dana tugas pembantuan yang diberikan oleh Kementerian Pertanian kepada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara yakni sebesar Rp. 10.936.917.000 dengan Realisasi anggaran dana tugas pembantuan tersebut sejumlah Rp. 9.511.714.998 dengan persentase 86,97%.

d. Dinas Pariwisata

Berdasarkan Surat Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia dengan nomor: SK/19/KU.00.02/MK/2023 pada tanggal 3 Januari 2023 tentang Kegiatan yang

Dilaksanakan melalui Tugas Pembantuan pada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun Anggaran 2023, Provinsi Kalimantan Utara memperoleh Kegiatan dengan Dana APBN Tugas Pembantuan pada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 1.285.000.000,-. Adapun kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Utara terkait Tugas Pembantuan adalah sebagai berikut :

1. Pelatihan Bidang Pariwisata dan Kebudayaan
SDM Pariwisata yang memperoleh Pelatihan untuk Pembekalan Kerja melalui Tugas Pembantuan Pelatihan bagi Pelatih Kepemanduan Wisata berbasis Kompetensi dengan tema “Bimbingan Teknis Pengelolaan Pariwisata Berkelanjutan / Sustainable Tourism yang dilaksanakan pada tanggal 5 Agustus 2023 di Hotel Diamong, Kota Tarakan dengan jumlah peserta 30 orang terdiri dari pengelola obyek dan daya tarik wisata 15 orang, anggota HPI Tarakan 2 orang, pengelola rumah makan 8 orang, dan ASN Dispar Tarakan 5 orang.
2. Pelatihan Bidang Ekonomi Kreatif
SDM Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Pelatihan Untuk Pembekalan Kerja melalui Tugas Pembantuan dengan tema Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Ekonomi Kreatif di Daerah Tugas Pembantuan yang dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus 2023 di Hotel Diamond, Tarakan dengan jumlah peserta 35 orang yang terdiri dari pelaku ekraf sektor kriya 10 orang, pelaku ekraf sektor kuliner 15 orang dan pelaku ekraf sektor fashion 10 orang.
3. Koordinasi Pengembangan Sistem Informasi Kepariwisata Nasional
Pelaksanaan Bimtek Pengembangan Tata Kelola Destinasi Pariwisata berbasis data dan Workshop Pemahaman Indikator dan pengisian data kepariwisataan dan ekonomi SISPARNA pada tanggal 26 – 27 Juni 2023 di Hotel Diamond, Tarakan dengan peserta yang terdiri dari 11 orang Dispar Kota Tarakan, 2 orang Dispar Kab Bulungan, 3 orang Dispar Kab Nunukan, 1 orang Dispar Kab Tana Tidung, 1 orang Dispar Kab Malinau, 5 orang Surveyor 5 Kab/Kota, 1 orang Koordinator Surveyor, 1 orang BPS dan 19 Pokdarwis 5 KAb/Kota.
4. Konferensi dan Event
Pendukung Event Daerah Lainnya (Tugas Pembantuan) melalui Sewa Media Videotron Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar Promosi Kegiatan Benuanta Fest 2k23 Provinsi Kalimantan Utara dengan ukuran 1.5 x 6 M, resolusi 1536x3884px, durasi tayangan 18 jam sehari, dengan periode tayangan pengiklanan 3 bulan (Oktober, November, Desember) Tahun 2023.

5. Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat

Pelaku ekraf yang mendapat pengembangan akses kepada ekosistem ekonomi kreatif melalui Tugas Pembantuan melalui Workshop Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 2023, bertempat 10 pelaku Ekonomi Kreatif dari Ibu Kota Tanjung Selor, 4 pelaku Ekonomi Kreatif Kabupaten Tana Tidung, 4 pelaku Ekonomi Kreatif Kabupaten Malinau, 6 pelaku Ekonomi Kreatif Kabupaten Nunukan. di Royal Tarakan dengan peserta 41 pelaku ekonomi kreatif dari Kota Tarakan

3.1 Tugas Pembantuan Pusat yang dilaksanakan oleh Daerah Provinsi

3.1.1 Target Kinerja

a. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Target kinerja adalah target program/kegiatan dan anggaran yang ditetapkan oleh kementerian/lembaga atas pelaksanaan penugasan yang tertuang dalam Peraturan Menteri atau dokumen/lembar penugasan. Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa target kinerja Tugas Pembantuan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023 berupa rincian output kegiatan sebagai berikut:

- 1) Fasilitasi Layanan Sosial Budaya kepada masyarakat di Kawasan Transmigrasi ditargetkan sebanyak 2 orang
- 2) Penempatan transmigrasi luncuran di targetkan 4 KK
- 3) Fasilitasi pengurusan sertifikat Hak milik atas tanah Transmigrasi ditargetkan berjumlah 40 orang.
- 4) Bantuan catu pangan untuk transmigran ditargetkan sebanyak 24 KK.
- 5) Bantuan sarana produksi pertanian di satuan pemukiman dan pusat SKP di targetkan 1 unit.
- 6) Layanan perkantoran di targetkan 1 layanan.

b. Dinas PUPR

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud

akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian Kinerja (PK) Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara (Tugas Pembantuan) mengacu pada target kinerja Unit Eselon III yakni Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Utara pada tahun anggaran 2023 yang diambil dari Dokumen Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bina Marga Tahun 2021-2026 dan RKA (Rencana Kerja Anggaran) disusun mengacu kepada klasifikasi anggaran yaitu belanja negara menurut organisasi, fungsi, program, kegiatan dan jenis belanja.

Rencana/target capaian kinerja yang ditetapkan di Perjanjian Kinerja dapat terukur dengan susunan indikator kinerja yaitu indikator output maupun outcome. Indikator tersebut mengacu pada sasaran program/kegiatan yang merupakan komitmen Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara (Tugas Pembantuan) untuk dicapai dalam tahun 2023.

Tabel 3. 9

Sandingan Outcome dan Target pada PK 2023 dengan Renstra 2023

NO	IKSP	SAT	TARGET			KET
			RENSTRA	PERJANJIAN KINERJA	REVISI AKHIR	
Sasaran Program : Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional						
1	Rating Kondisi Jalan Nasional	%	-	2,62	2,62	
2	Rating Keselamatan Jalan Nasional	%	-	-	-	
Sasaran Program : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya						
3	Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR	%	-	100	100	

Tabel 3. 10

Sandingan Output dan Target pada PK 2023 dengan Renstra 2023

NO	OUTPUT		SAT	TARGET			KET
				RENSTRA	PERJANJIAN KINERJA	REVISI AKHIR	
Sasaran Program : Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional							
IKSP 2 : Rating Kondisi Jalan Nasional							
Indikator Kinerja Output							
1	CDC 001	Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan	Km	20,42	35,11	35,11	
		- Pemeliharaan Rutin					



NO	OUTPUT		SAT	TARGET			KET
				RENSTRA	PERJANJIAN KINERJA	REVISI AKHIR	
		- Pemeliharaan Rutin Kondisi					
		- Penunjang/Holding					
2	CDF 001	Preservasi Rutin Jembatan	M	53,00	194,60	194,60	
		- Pemeliharaan Rutin Jembatan					
	CDF 002	Preservasi Jembatan	M	-	20,00	20,00	
3		- Pemeliharaan Berkala Jembatan					
	CBR 001	Layanan Penyiapan dan Pengendalian Pelaksanaan	Dok	-	-	-	
4	CDC 001	- Monitoring dan Evaluasi					
		Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan	Km	20,42	35,11	35,11	
Sasaran Program : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya							
IKSP : Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian							
Indikator Kinerja Output							
5	EBA 962	Layanan Umum	Layanan	-	2,00	1,00	
		- Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi					
		- Penyusunan Laporan Keuangan BMN					
6	EBA 994	Layanan Perkantoran	Layanan	-	1,00	1,00	
		- Operasional dan Pemeliharaan Kantor					

c. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara

Target kinerja pelaksanaan tugas pembantuan dari kegiatan bidang Prasarana dan sarana Pertanian Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara ada beberapa output kegiatan yang di hasilkan di antaranya sebagai berikut:

- 1) Terlaksananya Pembangunan Embung Pertanian untuk ketersediaan air irigasi pertanian sebanyak 3 (tiga) unit;
- 2) Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Irigasi Perpipaan di wilayah Provinsi Kalimantan Utara sebanyak 2 (dua) unit;



- 3) Terlaksananya kegiatan pembangunan irigasi perpompaan Besar di wilayah Provinsi Kalimantan Utara sebanyak 2 (dua) unit;
- 4) Terlaksananya kegiatan pembangunan irigasi perpompaan Menengah di wilayah Provinsi Kalimantan Utara sebanyak 2 (dua) unit;
- 5) Termonitornya kegiatan penyaluran pupuk bersubsidi di wilayah provinsi Kalimantan utara;
- 6) Terfasilitasinya kegiatan pembiayaan pertanian dan asuransi pertanian.
- 7) Terfasilitasinya kegiatan pendukung bidang Prasarana dan Sarana Pertanian.
- 8) Terfasilitasinya kegiatan Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian.



3.1.2 Realisasi

Tabel 3. 11

Realisasi Keuangan Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023

NO	NAMA BA	NAMA SATKER	DIPA	OUTSTANDING KONTRAK	REALISASI	%
1	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALIMANTAN UTARA	Rp 440.348.000	-	Rp 411.873.836	93,53%
2	KEMENTERIAN PERTANIAN	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA	Rp 10.936.917.000	-	Rp 9.511.714.998	86,97%
3	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA	Rp 5.437.752.000	-	Rp 5.436.892.818	99,98%
4	KEMENTERIAN PARIWISATA	DINAS PARIWISATA PROVINSI KALIMANTAN UTARA	Rp 1.285.000.000	-	Rp 1.167.512.183	90,86%
TOTAL			Rp 18.100.017.000	-	Rp 16.527.993.835	91,31%



Tabel 3. 12

Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan Oleh Daerah Provinsi

NO	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT, DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	(%)	KET
1	Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI	SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2023 NOMOR : SP DIPA-067.07.4.359001/2023	Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	Wilayah Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara	608.774.000	571.290.780	93,84			
			Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Wilayah Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara	533.692.000	498.837.991	93,47			
			Perkara Hukum Kelompok Masyarakat	Kab. Tana Tidung	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara	20.130.000	19.228.000	95,52	Kegiatan ini berupa Permasalahan Tanah Transmigrasi yang Difasilitasi Penyelesaiannya melalui Rapat Koordinasi Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Tanah/Lahan Transmigrasi di Kabupaten Tana Tidung dilaksanakan pada Tanggal 21 Juli 2023 melalui zoom meeting dan tempat luring di SDN 001 Tideng Pale, Kabupaten Tana Tidung. Pembahasan permasalahan lahan meliputi Kabupaten Bulungan (Sepunggur, Tanjung Buka SP. 6B dan Tanjung Buka SP. 10), Kabupaten Nunukan (Seimenggaris SP 1 dan 2, Sebuku SP 1, 2 dan 3), Kabupaten Tana Tidung (UPT Sambungan, UPT Tana Merah SP 1, Sesayap SP 3, UPT Linuang Kayam dan UPT. Menjelutung).	100	



NO	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT, DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	(%)	KET
			Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	SP Sambungan Kabupaten Tana Tidung	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara	22.600.000	21.400.000	94,69	Memfasilitasi pembinaan lembaga transmigrasi di UPT Sambungan Kabupaten Tana Tidung. Kegiatan ini berupa pemberian operasional pengelola permukiman transmigrasi seperti pemberian insentif petugas SP Sambungan Kabupaten Tana Tidung serta pemberian insentif kepada petugas kemanan	100	
			Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	SP Sambungan Kabupaten Tana Tidung	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara	59.990.000	56.017.771	93,38	Kegiatan ini berupa pemberian operasional layanan pendidikan seperti pemberian insentif guru SD dan insentif penjaga SD di UPT Sambungan Kabupaten Tana Tidung. Kemudian juga pemberian bantuan operasional Layanan kesehatan berupa insentif dokter, insentif paramedis, pembantu paramedis, bidan, belanja operasional puskesmas pembantu / posyandu, rujukan pasien, obat-obatan dan alat kesehatan serta insentif rohaniawan.	100	
			Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga	SP 10 Kab. Bulungan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara	87.052.000	78.625.000	90,32	Kegiatan ini berupa pelayanan Perpindahan dan Penempatan Warga Transmigrasi Asal di Lokasi Tanjung Buka SP.10 Kabupaten Bulungan yaitu sebanyak 20 KK yang terdiri dari 4 KK dari Jateng, 6 KK dari DIY, dan 10 KK dari Transmigran Setempat.	133,33	



NO	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT, DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	(%)	KET
			Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	Tanjung Selor, Kab. Bulungan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara	149.540.000	146.670.000	98,08	Kegiatan ini berupa tindak lanjut dari fasilitasi pengurusan SHM yaitu dengan adanya pendampingan kadastral di UPT Seimenggaris, koordinasi penyelesaian SHM dan Pengukuran dan Pembagian LU II Lok. Seimenggaris SP. 5, Kab. Nunukan.	100	
			Bantuan Keluarga	SP 10 Kab. Bulungan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara	132.600.000	125.656.220	94,76	Bantuan beras pada Tahun 2023 untuk 20 KK di SP 10 Kabupaten Bulungan sebanyak 2.650 kg dan Pengadaan Catu Pangan Non Beras sebanyak 60 Paket.	100	
			Bantuan Peralatan / Sarana	SP 10. Kabupaten Bulungan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara	33.780.000	23.471.000	69,48	Kegiatan ini berupa pemberian bantuan sarana produksi lahan pekarangan berupa benih sayuran, tanaman obat keluarga, pupuk, fungisida cair, pestisida dan hand sprayer untuk 20 KK.	100	
			Sarana Pengembangan Kawasan	SP 10. Kabupaten Bulungan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara	28.000.000	27.770.000	99,18	Monitoring pembangunan RTJK (Rumah Transmigrasi Jamban Keluarga) di SP 10 Kabupaten Bulungan 20 unit.	100	
			Program Dukungan Manajemen	Tanjung Selor, Kab. Bulungan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara	179.936.000	133.652.057	74,28			
			Dukungan Manajemen Eselon I Direktorat Jenderal Pembangunan dan	Tanjung Selor, Kab. Bulungan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara	75.082.000	72.452.789	96,50	Kegiatan ini berupa layanan perkantoran secara rutin sebanyak 1 layanan berupa pengelolaan keuangan dan kegiatan tugas pembantuan.	100	



NO	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT, DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	PERANGKA T DAERAH PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	(%)	KET	
			Pengembangan Kawasan Transmigrasi									
	TOTAL					608.774.000	571.290.780	93,84				
2	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Bina Marga	1. SP DIPA-033.04.4.417751/2023	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman							
		2. SP DIPA-033.04.4.417751/2023										
		3. SP DIPA-003.04.4.417751/2023										
				Rating Kondisi Jalan Nasional			Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman					
				Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan		Tanjung Selor, Tarakan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	3.033.235.000	3.002.364.000	98,98%	18,72 Km	100%
		Jalan Akses Simpul Transportasi (ProPN)(PEN)	Tanjung Selor, Tarakan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	7.090.881.000	7.067.527.000	99,67%	1,41 Km	100%			
		Preservasi Rutin Jembatan	Tanjung Selor, Tarakan	Dinas Pekerjaan Umum,	83.730.000	83.298.000	99,48%	1.22 M	100%			



NO	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT, DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	PERANGKA T DAERAH PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	(%)	KET
					Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman						
			Jalan Akses Simpul Transportasi (ProPN) (PEN)	Tarakan	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	595.000.000	188.363.000	31,66%	17 M	100%	
			Layanan Penyiapan dan Pengendalian Pelaksanaan	-	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	300.000.000	299.581.000	99,86%	1 Layanan	0%	
			TOTAL			37.049.822.000	37.048.664.000	100%			
3	Kementerian Pertanian	SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2023 NOMOR : SP DIPA - - 018.06.4.417659/2023 , tanggal 23 Nopember 2023 Kode Satker 417659	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Provinsi Kalimantan Utara	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan						
			Program Ketersediaan, akses dan konsumsi pangan berkualitas	Provinsi Kalimantan Utara	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan						
			Program Dukungan Manajemen	Tanjung Selor, Kab. Bulungan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan						
			TOTAL			4.138.276.000	3.943.004.155	95,28			



NO	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT, DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	PERANGKA T DAERAH PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	(%)	KET	
4	Kementerian Pertanian	SP DIPA - 108.03.4.417668/2023 Tanggal 23 November 2023 Kode satker 417668	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Provinsi Kalimantan Utara	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan							
			Program Ketersediaan, akses dan konsumsi pangan berkualitas	Provinsi Kalimantan Utara	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan							
			Program Dukungan Manajemen	Tanjung Selor, Kab. Bulungan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan							
TOTAL						3.364.549.000	3.215.596.418	95,57				
5	DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN , KEMENTERIA N PERTANIAN RI	SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2023 NOMOR : SP DIPA-018.05.417670/2023 Kode satker 417670	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Provinsi Kalimantan Utara	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan							
			Program Dukungan Manajemen	Tanjung Selor, Kab. Bulungan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan							
TOTAL						1.517.590.000	1.812.824.892	80,91				



NO	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT, DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	(%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	(%)	KET
6	Kementerian Pertanian	SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2023 NOMOR : SP DIPA-018.08.3.417671/2023 , tanggal 21 Oktober 2023 Kode Satker 417672	Program Ketersediaan, akses dan konsumsi pangan berkualitas	Provinsi Kalimantan Utara	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan						
			Program Dukungan Manajemen	Tanjung Selor, Kab. Bulungan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan						
TOTAL						2.160.335.000	2.144.369.455	99,26		97,7495	
7	Kementerian Pertanian	SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2023 NOMOR : SP DIPA-018.04.4.417674/2023 , tanggal 23 Nopember 2023 Kode Satker 417647	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Provinsi Kalimantan Utara	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan						
			Program Dukungan Manajemen	Tanjung Selor, Kab. Bulungan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan						
TOTAL						1.308.936.000	1.268.560.790	96,92			

3.2 Tugas Pembantuan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota

Pada tahun anggaran 2023 tidak ada tugas pembantuan dari daerah provinsi yang ditugaskan kepada daerah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara.

3.3 Permasalahan dan Kendala

a. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara

Dalam pelaksanaan kegiatan Tugas Pembantuan Tahun 2023, terdapat beberapa kendala dan permasalahan dalam pelaksanaannya pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara diantaranya sebagai berikut:

- a. Pada triwulan IV Tahun 2023 terjadi realokasi anggaran untuk belanja pembangunan tanggul di UPT Sepunggur Kabupaten Bulungan sehingga kebutuhan infrastruktur tersebut tidak terpenuhi.
- b. Sarana produksi pertanian (Saprotan) belum terakomodir di Tugas Pembantuan tahun 2023, padahal belanja tersebut wajib bagi penempatan awal transmigrasi.
- c. Banyak terjadinya pemblokiran anggaran sehingga mengakibatkan realisasi anggaran dan kinerja belum terpenuhi serta pembukaan blokir baru dilakukan pada Triwulan III dan IV Tahun 2023. Keterlambatan tersebut menghambat realisasi kinerja dan anggaran dana Tugas Pembantuan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut kami mengajukan usulan kembali belanja tanggul dan sarana produksi pertanian (Saprotan) dan berkoordinasi dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. Hasil koordinasi tersebut diketahui bahwa belanja Sarana produksi pertanian (Saprotan) dan Alat produksi pertanian (Alsintan) telah diakomodir pada Tugas Pembantuan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024

b. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara

Berbagai permasalahan dan kendala yang dihadapi serta strategi pemecahan yang telah dan akan dilaksanakan yaitu:

- 1) Ada beberapa ruas jalan Nasional yang perlu penanganan untuk pelebaran dan Peningkatan Struktur mengingat pertumbuhan ekonomi dan frekuensi kendaraan tiap tahun meningkat yang terjadi di beberapa daerah di dalam lingkup penanganan Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara



- 2) Penanganan Trotoar dan Drainase di dalam kota bersinggungan langsung dengan tempat usaha masyarakat (rumah tinggal, ruko, hotel, dll.), adanya utilitas (jaringan pipa air, pipa gas, kabel telkom) serta pohon peneduh jalan yang terdampak kegiatan sehingga dituntut bekerja cepat namun penuh kehati-hatian agar mendapatkan hasil yang baik dan dituntut untuk segera bisa difungsikan
- 3) Beberapa ruas jalan, struktur jalan existing kurang baik sehingga tidak hanya dilaksanakan pemeliharaan rutin, akan tetapi perlu dilaksanakan penanganan Rehabilitasi mayor bahkan Rekonstruksi.

c. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara

Tabel 3. 13
Permasalahan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Provinsi Kalimantan Utara

NO	KODE SATKER	PERMASALAHAN
1	417659	<ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan lelang yang pada tahun-tahun sebelumnya dapat dilakukan di LPSE Kaltara pada tahun 2023 sudah tidak dapat dilakukan lagi, sehingga harus dilakukan di LPSE Kementerian. Untuk mendapatkan user POKJA memutuhkan waktu sekitar 2 bulan karena server PKH diserang Hacker, sehingga memperlambat proses lelang.
2	417668	<ul style="list-style-type: none"> - Terlambatnya usulan dari Kabupaten/Kota untuk segera dilakukan penetapan SK KPA tentang Petani penerima manfaat dan pemilihan penyedia, - Keterbatasan jumlah dalam pengajuan Uang Perediaan (UP) yang sangat kecil, sehingga mempengaruhi cakupan kegiatan yang seharusnya dapat dilakukan dalam satu waktu, dan banyaknya persyaratan yang diberikan oleh pusat terkait pertanggung jawaban kegiatan yang telah dilakukan.
3	417670	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi dengan Kabupaten tidak intensif, dikarenakan pelaksanaan tugas di internal OPD Kabupaten yang menangani perkebun terbatas, sehingga memperlambat pelaksanaan kegiatan APBN Provinsi di wilayah Kabupaten - Alokasi anggaran masih kurang, sehingga pelaksanaan kegiatan belum maksimal - Pelaksanaan kegiatan STDB di Kabupaten Nunukan, untuk realisasi keuangan sebesar 20,59%, hal ini pembetulan tim pendataan, tim verifikasi dokumen dan tim pemetaan dan pemeriksaan lapangan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan baru berjalan pada triwulan ke – 3, selain itu kondisi kebun masyarakat yang tidak terjangkau dan waktu pelaksanaan yang tidak

NO	KODE SATKER	PERMASALAHAN
		mencukupi untuk pendataan di lapangan. Sehingga jumlah pekebun yang terdaftar tidak sesuai dengan target kegiatan penerbitan STDB Sawit Rakyat.
4	417672	<ul style="list-style-type: none">- Proses Pemilihan Kelompok Tani Penerima Bantuan oleh Kab. Kota dilakukan sampai dengan bulan April, sehingga menyebabkan pelaksanaan kegiatan berjalan lambat- Proses penyampaian berkas-berkas pencairan untuk tahap I dan Tahap II juga berjalan lambat sehingga menyebabkan pelaksanaan kegiatan tertunda.- Proses penyampaian nota belanja dari Kelompok Tani setelah dilakukan pencairan tahap II yang lambat, sehingga terjadi kendala dalam hal pelaporan MPO.- Pelaksanaan kegiatan dalam hal pembuatan bangunan mendekati akhir masa kontrak. Hal ini seyogyanya dapat dilaksanakan lebih cepat mengingat pekerjaan di Tahun 2023 bukan pekerjaan kompleks
5	417674	<ul style="list-style-type: none">- terlambatnya usulan dari Kabupaten/Kota tentang Petani penerima manfaat yang kemudian mempengaruhi waktu penetapan SK oleh KPA dan beredampak pada mundurnya pemilihan penyedia, keterbatasan jumlah dalam pengajuan Uang Perediaan (UP) yang sangat kecil, sehingga mempengaruhi cakupan kegiatan yang seharusnya dapat dilakukan dalam satu waktu, dan banyaknya persyaratan yang diberikan oleh pusat terkait pertanggung jawaban kegiatan yang telah dilakukan.

3.4 Saran dan Tindak Lanjut

a. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara

Untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara dan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bulungan melakukan koordinasi dan percepatan pembangunan rumah transmigrasi.

b. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara

Upaya yang dilakukan Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara (Tugas Pembantuan) mengatasi kendala tersebut diantaranya adalah:

- 1) Program preservasi jalan nasional melalui Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara (Tugas Pembantuan) dilaksanakan berkelanjutan



sehingga kemantapan dan aksesibilitas Jalan Nasional tetap terjaga dengan baik

- 2) Meningkatkan kerja sama dengan pemerintah daerah agar sinergi dalam pembangunan daerah khususnya wilayah perkotaan;
- 3) Perlunya peningkatan anggaran untuk penanganan trotoar dan drainase perkotaan;
- 4) Mendorong Penyedia Jasa agar meningkatkan mutu baik mutu SDM maupun mutu pekerjaan.

c. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara

Tabel 3. 14
Tindak Lanjut

NO	KODE SATKER	TINDAK LANJUT
1	417659	<ul style="list-style-type: none">- Mempercepat untuk mendapatkan user ID Pokja untuk proses lelang.- Menurunkan target kegiatan bagi petugas lapangan- Perlu dilakukan CP/CL pada tahun -1 guna mempersiapkan calon penerima bantuan dengan tepat dan cepat.- Melakukan monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran dan pelaksanaan kegiatan setiap bulannya.- Membuat Standar Operasional Prosedur untuk memudahkan dalam melaksanakan pekerjaan;- Mempercepat penyelesaian Pekerjaan dan LPJ setelah dilakukan pencairan keuangan
2	417668	<ul style="list-style-type: none">- Terhadap Kabupaten/Kota yang belum menyerahkan usulan CPCL, kami selalu komunikasi intensif agar usulan segera diserahkan sehingga pelaksanaan kegiatan dapat segera dimulai;- Terhadap kondisi pengajuan Uang Persediaan (UP) yang rendah, kami melakukan kebijakan dengan melakukan pekerjaan skala prioritas dan memfasilitasi anggaran terhadap usulan yang lebih dahulu masuk;- Untuk komponen persyaratan yang dimuat dalam juknis yang banyak, kami menyiasati dengan memuat persyaratan dimaksud kedalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang termuat dalam Kontrak kegiatan antara PPK dan Penyedia
3	417670	<ul style="list-style-type: none">- Koordinasi dengan Kabupaten secara intensif agar dapat memberdayakan petugas kabupaten terkait keterbatasan personil di Provinsi- Koordinasi dengan Kabuapten secara intensif, agar jadwal pelaksanaan kegaitan dapat berjalan maksimal- Koordinasi dengan Ditjen. Perkebunan, Kementerian Pertanian RI terkait permasalahan keterbatasan alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan



NO	KODE SATKER	TINDAK LANJUT
4	417672	<ul style="list-style-type: none">- CP/CL untuk tahun-tahun mendatang sebaiknya dilakukan T-1, sehingga penetapan kelompok tani penerima bantuan dapat dilakukan pada awal Tahun Anggaran- Berkas-berkas nota belanja harus disampaikan kepada penyuluh lapangan atau tim teknis kabupaten secepat mungkin, sehingga proses input data pada aplikasi MPO dapat berjalan dengan lancar- Mengingat pelaksanaan kegiatan di Tahun 2023 merupakan pekerjaan sederhana yang dilakukan oleh Kelompok Tani, maka perlu dibuat jadwal pelaksanaan kegiatan yang dilakukan maksimal selama 2 bulan
5	417674	<ul style="list-style-type: none">- Terhadap Kabupaten/Kota yang belum menyerahkan usulan CPCL, kami selalu komunikasi intensif agar usulan segera diserahkan sehingga pelaksanaan kegiatan dapat segera dimulai;- Terhadap kondisi pengajuan Uang Persediaan (UP) yang rendah, kami melakukan kebijakan dengan melakukan pekerjaan skala prioritas dan memfasilitasi anggaran terhadap usulan yang lebih dahulu masuk dan melakukan pembayaran pekerjaan melalui LS;- Untuk komponen persyaratan yang dimuat dalam juknis yang banyak, kami menyiasati dengan memuat persyaratan dimaksud kedalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang termuat dalam Kontrak kegiatan antara PPK dan Penyedia.



BAB IV

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

4.1. Urusan Pendidikan

4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar

Permendikbud Nomor 32 Tahun 2018 merupakan landasan hukum dalam melaksanakan SPM Bidang Pendidikan Menengah di Provinsi Kalimantan Utara. Jenis pelayanan dasar pada SPM Pendidikan di Provinsi Kalimantan Utara terdiri atas:

1. Pendidikan Menengah (SMA dan SMK); dan
2. Pendidikan Khusus

Standar Pelayanan Minimal Pendidikan ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran dan ketepatan sasaran dan. Pada Bab III Paragraf 4 pasal 11 ayat 2 Permendikbud nomor 32 Tahun 2018 telah mengatur tentang ketentuan pemenuhan SPM berupa perlengkapan dasar peserta didik dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan.

4.1.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Target pencapaian SPM Provinsi Kalimantan Utara bidang Pendidikan pada tahun 2023 baik jenis pelayanan dasar Pendidikan menengah maupun Pendidikan khusus adalah 100% sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4. 1
Target Pencapaian SPM Bidang Pendidikan

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR SPM	ELEMEN DATA	TARGET
1	Pendidikan Menengah	Jumlah Anak Usia 16 – 18 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan menengah	Jumlah Siswa Pada Satuan Pendidikan Menengah (SMA/SMK/MA)	100%
			Jumlah Anak Usia 16 – 18 Tahun	
		Rata-rata kompetensi Literasi berdasarkan Asesmen Nasional		1,85
		Rata-rata kompetensi Literasi berdasarkan Asesmen Nasional		1,75
2	Pendidikan Khusus	Jumlah Anak Usia 4 - 18 tahun yang termasuk dalam anak berkebutuhan khusus	Jumlah Anak Usia 4 – 18 tahun berkebutuhan khusus yang berpartisipasi dalam Pendidikan khusus	100%



NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR SPM	ELEMEN DATA	TARGET
		yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus	Jumlah Anak Usia 4–18 tahun berkebutuhan khusus	
		Rata-rata kompetensi Literasi berdasarkan Asesmen Nasional		1,80
		Rata-rata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional		1,70
		Rata-rata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional		1,80
		Rata-rata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional		1,70
		Rata-rata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional		1,85
		Rata-rata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional		1,75

4.1.1 Realisasi

Capaian pelaksanaan penerapan SPM bidang urusan Pendidikan di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023 dijabarkan dalam tabel berikut :

Tabel 4.2
Pencapaian target SPM Bidang Pendidikan

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR SPM	ELEMEN DATA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Pendidikan Menengah	Jumlah Anak Usia 16 – 18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	Jumlah Anak berpartisipasi dalam pendidikan menengah	100%	89,69%	89,69%
			Jumlah Anak Usia 16 - 18 tahun			
		Rata-rata kompetensi Literasi berdasarkan Asesmen Nasional		1,85	1,83	98,92%
		Rata-rata kompetensi Literasi berdasarkan Asesmen Nasional		1,75	1,69	96, 57 %

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR SPM	ELEMEN DATA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2	Pendidikan Khusus	Jumlah Anak Usia 4 - 18 tahun yang termasuk dalam anak berkebutuhan khusus yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus	Jumlah Anak Usia 4-18 tahun berkebutuhan khusus yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus	100%	= $(524/570) \times 100\%$	91,93%
			Jumlah Anak Usia 4-18 tahun berkebutuhan khusus		0,9193	
		Rata-rata kompetensi Literasi berdasarkan Asesmen Nasional		1,8	1,65	90%
		Rata-rata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional		1,7	1,51	88,82%
		Rata-rata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional		1,8	1,74	99,67%
		Rata-rata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional		1,7	1,65	97,06%
		Rata-rata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional		1,85	1,83	98,92%
		Rata-rata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional		1,75	1,69	96,57%

Selain itu, dalam pencapaian target standar pelayanan minimal bidang pendidikan tersebut tidak terlepas dari mutu pelayanan dasar. Adapun mutu pelayanan dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam pelayanan dasar pendidikan sesuai dengan standar teknis agar hidup secara layak. Provinsi Kalimantan Utara melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah memastikan mutu pelayanan dasar terpenuhi guna mendukung tercapainya target SPM sebagaimana tertuang dalam tabel berikut :



Tabel 4.3

Capaian Mutu SPM Bidang Pendidikan

NO	INDIKATOR KINERJA/JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN/OUTPUT			Total Pencapaian
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM	TUNTAS PARIPURNA			99.79 %
1	Pendidikan Menengah				100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	27432	27432	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	100.00 %
	1. Buku teks pelajaran	59,304	59,304	0	100.00 %
	2. Perlengkapan belajar	4,351	4,351	0	100.00 %
	3. Jumlah rombongan belajar di satuan pendidikan	1,023	1,023	0	100.00 %
	4. Satuan pendidikan yang berakreditasi minimal C	99	99	0	100.00 %
	5. Penyediaan biaya personil peserta didik	30,714	30,714	0	100.00 %
	6. Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	1363	1363	0	100.00 %
	7. Kualitas tenaga kependidikan (Kepala Sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	99	99	0	100.00 %
	8. Kualitas tenaga kependidikan (Tenaga Admin/Tenaga Lab/Admin) yang berkualifikasi SMA/ sederajat	168	168	0	100.00 %



NO	INDIKATOR KINERJA/JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN/OUTPUT			Total Pencapaian
2	Pendidikan Khusus				99.58 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	545	545	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	97.92 %
	1. Materi ajar sesuai dengan ragam disabilitas	545	545	0	100.00 %
	2. Perlengkapan belajar	545	545	0	100.00 %
	3. Satuan pendidikan yang berakreditasi minimal C	6	5	0	100.00 %
	4. Jumlah rombongan belajar di satuan pendidikan	150	150	0	100.00 %
	5. Penyediaan biaya personil peserta didik	545	545	0	100.00 %
	6. Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	125	125	0	100.00 %
	7. Kualitas tenaga kependidikan (Kepala Sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	6	6	0	100.00 %
	8. Kualitas tenaga kependidikan (Tenaga Admin/Tenaga Lab/Admin) yang berkualifikasi SMA/ sederajat	31	31	0	100.00 %

4.1.2 Alokasi Anggaran

Untuk mendukung tercapainya Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang urusan Pendidikan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara tahun 2023 mendapatkan anggaran sebesar Rp 639.406.205.120,00, terealisasi sebesar Rp 583.025.059.238,00 atau 91,18%. Dari realisasi tersebut terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp 56.381.145.882,00. Adapun anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 6 (enam) program dan 15 (lima belas) kegiatan dan 84 (delapan puluh empat) sub kegiatan di 3 (tiga) cabang dinas dan 2 (dua) UPTD dalam rangka pembangunan dan pengembangan pendidikan yang berkualitas serta nilai warisan budaya di Provinsi Kalimantan Utara. Program-program tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 4. 4
Alokasi Anggaran Pendidikan

NO	NAMA PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	347.850.415.127
2	Pengelolaan Pendidikan	278.318.970.710
2	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	763.853.668
3	Pengembangan Kebudayaan	1.874.756.800
4	Pengelolaan Permuseuman	720.000.000,00
5	Pengembangan Kesenian Tradisional	690.000.000
6	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	167.161.090
7	Program Pengelolaan Permuseuman	6.736.279.360

Dari alokasi anggaran sebesar Rp. 639.406.205.120,00, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara mengalokasikan 2 (dua) program guna pencapaian SPM yaitu program pengelolaan pendidikan dan program pendidik dan tenaga kependidikan.

4.1.3 Dukungan Personil

Dalam pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan melibatkan seluruh staf di lingkungan Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2023 dengan rincian pada tabel berikut :

Tabel 4. 5
Jumlah Aparatur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2023

NO	STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Eselon II	1	0	1
2	Eselon III	7	3	10
3	Eselon IV	7	9	16
4	Non eselon	32	18	50
5	Fungsional	28	8	36
	Jumlah	63	30	113

4.1.4 Permasalahan dan Solusi

Meskipun indikator Standar Pelayanan Minimal sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan telah tercapai, namun masih terdapat beberapa permasalahan sebagai berikut :

- a. Daftar Anak Usia 16-18 Tahun yang Tidak Bersekolah belum tersedia sehingga intervensi Provinsi terbatas pada Anak yang terancam putus sekolah.
- b. Belum meratanya sarana dan prasarana di satuan pendidikan yang berpengaruh pada terbatasnya Daya Tampung Satuan Pendidikan bagi Anak Usia Sekolah.
- c. Belum meratanya sarana dan prasarana menuju lokasi satuan pendidikan sehingga akses menuju satuan pendidikan cukup sulit.
- d. Kurangnya Kesadaran Masyarakat tentang Pentingnya Pendidikan.
- e. Masih terdapat lulusan SMK yang bekerja tidak sesuai bidang keahlian bahkan ada yang tidak bekerja karena menikah atau melanjutkan

pendidikan tinggi.

- f. Terdapat lulusan yang tidak memiliki sertifikat kompetensi.
- g. Terbatasnya sarana dan prasarana pengembangan kompetensi keahlian di satuan pendidikan.
- h. Hasil pemetaan dan pendistribusian guru pada satuan pendidikan menunjukkan Kaltara masih kekurangan PTK.
- i. Jumlah PTK bersertifikat pendidik, kompetensi, dan Guru Penggerak masih terbatas.
- j. Refleksi dan Perbaikan Pembelajaran oleh Pendidik masih perlu ditingkatkan.

Untuk mengatasi permasalahan dalam pelaksanaan penerapan SPM Pendidikan tahun 2023 tersebut, terdapat beberapa alternative solusi sebagai berikut:

- a. Melibatkan stakeholder terkait dalam rangka pendataan anak tidak sekolah seperti sensus/survey yang berkoordinasi dan bekerjasama dengan BPS, Disdukcapil, DPMPD, Cabang Dinas serta kepala desa ataupun kecamatan untuk melakukan pendataan anak tidak sekolah.
- b. Pemutakhiran Dapodik minimal 2 (dua) kali dalam setahun untuk menjamin kesesuaian data dengan kondisi satuan pendidikan khususnya pada verval PD, verval DO dan LTM melalui Supervisi/pendampingan, verifikasi dan validasi serta evaluasi kepada satuan pendidikan.
- c. Menyusun Roadmap Pengembangan Pendidikan yang didalamnya terdapat analisa kebutuhan penambahan sarana dan prasarana sebagai dasar penganggaran pembangunan di satuan pendidikan.
- d. Penyediaan sarana mobilitas berupa Bus Sekolah.
- e. Melibatkan stakeholder terkait seperti DPUPR, DKISP, DESDM terkait akses menuju satuan pendidikan seperti jalan, jaringan, listrik, dll.
- f. Melibatkan stakeholder terkait dalam rangka mengidentifikasi persepsi masyarakat secara umum terkait manfaat pendidikan melalui survey ataupun FGD

4.2. Urusan Kesehatan

4.2.1 Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 4 tahun 2019 tentang SPM, jenis pelayanan dasar pada SPM kesehatan daerah provinsi terdiri atas:



- a. Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi; dan
- b. Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi.

SPM bidang Kesehatan di Provinsi Kalimantan Utara diselenggarakan oleh 1 (satu) Perangkat Daerah yakni, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara. Standar teknis pemenuhan mutu pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal bidang Kesehatan meliputi :

Tabel 4. 6

Jenis Pelayanan Dasar SPM Provinsi Bidang Kesehatan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Penerima Layanan Dasar	Pernyataan Standar
1	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	Sesuai standar pelayanan penanggulangan krisis kesehatan	Penduduk yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	Penduduk yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi
2	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi	Sesuai standar pelayanan pada kondisi KLB kesehatan	Sesuai standar pelayanan pada kondisi KLB	Sesuai standar pelayanan pada kondisi KLB

4.2.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Oleh Daerah

Target pencapaian SPM Provinsi Kalimantan Utara Bidang kesehatan pada tahun 2023 baik Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi maupun Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi adalah 100% sebagaimana berikut



Tabel 4. 7

Target Pencapaian SPM Bidang Kesehatan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target
1	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	Jumlah penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%
2	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi	Jumlah penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%

4.2.3 Realisasi

Berdasarkan target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara pada Tahun 2023, Adapun capaian SPM bidang Kesehatan sebagai berikut :

Tabel 4. 8

Capaian Penerapan SPM Bidang Kesehatan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Tahun 2023		
			Jumlah Warga Negara yang berhak mendapatkan layanan	Jumlah Warga Negara yang terlayani	Capaian
1	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	Jumlah warga negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan	1.000	1.000	100%
2	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi	Jumlah penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan	1.000	1.000	100%

- Daerah rawan bencana di Kaltara (berdasarkan pemetaan rawan bencana BPBD):

- 1) Kabupaten Bulungan, Kecamatan Peso, rawan bencana tanah longsor. Jumlah penduduk yang ada di wilayah kecamatan Peso sebanyak 4.068 orang.

- 2) Kabupaten Malinau, desa salap, dengan jumlah penduduk 464 orang serta desa belayan dengan jumlah penduduk 2.144 orang. Kedua desa berada di wilayah rawan banjir.
- 3) Kabupaten Nunukan, Kecamatan Lumbis dengan jumlah penduduk 5.209 orang serta Kecamatan Sembakung dengan jumlah penduduk 6.102 orang. Kedua kecamatan berada di wilayah rawan banjir.

Total jumlah penduduk yang menjadi sasaran SPM: **17.987 jiwa**.

- Total jumlah penduduk yang menjadi sasaran SPM: **17.987 jiwa**, dan seluruh wilayah yang masuk di dalam peta rawan bencana telah dilakukan edukasi pengurangan risiko krisis kesehatan bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi bencana.



Tabel 4.9

Capaian Mutu SPM Bidang Kesehatan

NO	INDIKATOR KINERJA/JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN/OUTPUT			Total Pencapaian
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM	TUNTAS PARIPURNA			100.00 %
1.	Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi				100.00 %
		Tidak Terdapat Bencana (Tidak Akan Masuk Kedalam Perhitungan)			
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	17000	0	1700	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	100.00 %
	1 . Obat-obatan dan Bahan medis habis pakai	1000	1000		
	2 . Makanan tambahan/pendamping untuk kelompok rentan (MP ASI, MP Ibu Hamil, Pemberian Makanan untuk Bayi dan Anak [PMBA] dll.)	1000	1000		
	3 . Kelengkapan pendukung kesehatan perorangan (Hygiene Kit dan Family Kit)	0	0		
	4 . Dokter	6	6		
	5 . Perawat	7	7		
	6 . Bidan	1	1		
	7 . Tenaga kesehatan masyarakat terlatih yang memiliki kemampuan di bidang surveilans, gizi, epidemiologi, kesehatan lingkungan, kesehatan reproduksi, dan lain-lain	4	4		
	8 . Tenaga kesehatan terlatih yang memiliki kemampuan dalam penanganan kesehatan jiwa	1	1		
	9 . Apoteker dan/atau Asisten Apoteker	2	2		
	10 . Tenaga penyuluh/promosi kesehatan	2	2		



NO	INDIKATOR KINERJA/JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN/OUTPUT			Total Pencapaian
2.	Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi				
		Ya Terjadi Bencana			
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	1000	1000	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	100.00 %
	1 . Alat Perlindungan Diri (APD) sesuai dengan jenis penyakit	1000	1000	0	100.00 %
	2 . Profilaksis/Vitamin/Obat/Vaksin	1000	1000	0	100.00 %
	3 . Wadah pengiriman spesimen (Specimen Carrier)	1000	1000	0	100.00 %
	4 . Tempat sampah biologis	100	100	0	100.00 %
	5 . Formulir penyelidikan epidemiologi, Form/lembar KIE, Alat tulis yang diperlukan	1000	1000	0	100.00 %
	6 . Alat dan bahan pengambilan spesimen (Tabung, Pot, Media Amies, dll) untuk spesimen yang berasal dari manusia	1000	1000	0	100.00 %
	7 . Alat pemeriksaan fisik (Stetoskop, Termometer Badan, Tensimeter, Senter, Test Diagnosis Cepat, dll)	1000	1000	0	100.00 %
	8 . Dokter	6	6	0	100.00 %
	9 . Tenaga kesehatan masyarakat yang mempunyai kemampuan di bidang epidemiologi	2	2	0	100.00 %
	10 . Tenaga kesehatan masyarakat yang mempunyai kemampuan di bidang kesehatan lingkungan	1	1	0	100.00 %
	11 . Tenaga kesehatan masyarakat yang mempunyai kemampuan di bidang entomologi	1	1	0	100.00 %
	12 . Tenaga Laboratorium	2	2	0	100.00 %
	13 . Tenaga penyuluh/promosi kesehatan	2	2	0	100.00 %
	14 . Petugas yang terlibat dalam pelaksanaan penyelidikan epidemiologi disesuaikan dengan jenis KLB yang terjadi	1	1	0	100.00 %

Sumber : <https://spm.bangda.kemendagri.go.id/>



4.2.4 Alokasi Anggaran

Untuk mendukung tercapainya Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang urusan kesehatan di Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2023 Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara mengalokasikan anggaran tahun anggaran 2023 yang Termuat dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan sebesar Rp 62.509.822.368,00. Alokasi anggaran Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara tahun 2023 digunakan untuk membiayai 4 (empat) program dan 7 (tujuh) kegiatan. Program-program tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 4. 10
Alokasi Anggaran Kesehatan

No	Nama Program	Anggaran (Rp)
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	47.205.855.023
2	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	20.000.000
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	808.352.960

4.2.5 Dukungan Personil

Dinas kesehatan provinsi dalam menjalankan SPM nya bekerja sama dengan BPBD, Dinas Perhubungan, KKP, dan lintas sektor lainnya.

4.2.6 Permasalahan dan Solusi

Dalam pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM di Provinsi maupun Kabupaten/Kota pada Tahun 2023 setiap daerah mengalami kendala yang cukup signifikan dalam penerapannya khususnya pada tahap pengawasan, monitoring dan evaluasi. Adapun masalah dan kendala yang dihadapi yakni:

- Situasi Pandemi COVID-19, di samping melaksanakan pelayanan terhadap masyarakat yang terdampak atas wabah COVID-19 dari segi pengawasan, monitoring dan evaluasi terus dilakukan berkesinambungan dikarenakan perkembangan situasi wabah menjadi pandemic yang terjadi begitu cepat sehingga beban kerja yang tinggi (Jumlah kasus semakin meningkat setiap harinya) tidak proporsional dengan ketersediaan tenaga sumber daya

manusia (SDM), sehingga petugas perlu menyesuaikan beban kerja pelayanan sesuai perkembangan kasus namun monitoring, evaluasi maupun bimbingan teknis tetap dapat dilakukan baik melalui pertemuan tidak langsung (daring internet) maupun dengan monitoring dan evaluasi secara berkala ke daerah kabupaten/kota.

- b. Dalam pencapaian SPM Bidang Kesehatan Tahun 2023, terjadi Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) di seluruh provinsi di Indonesia termasuk di Kalimantan Utara sehingga kebijakan pemerintah untuk melakukan refocusing anggaran terkait penanganan kasus covid-19 di Kalimantan Utara namun dalam alokasi anggaran refocusing digunakan untuk Tim Satuan Tugas Penanganan Covid-19 secara keseluruhan yang terdiri atas Dinas Kesehatan, BPBD dan Lintas Sektor Lainnya yang terlibat dalam Surat Keputusan Gubernur dan difokuskan pada dukungan utama penyediaan sarana, prasarana dan SDM.
- c. Dalam pelaksanaan penanganan kasus Covid-19 dari segi keuangan belum memenuhi realisasi 100% dikarenakan dalam penggunaannya mempertimbangkan efektif dan efisiensi pelaksanaan program yang tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di daerah, namun secara fisik pelaksanaan kegiatan penanganan pencegahan dan pengendalian kasus telah dilaksanakan secara keseluruhan dan masih berlangsung hingga batas waktu kasus telah nihil (pertimbangan trendline kasus covid-19 di akhir tahun 2023 menunjukkan penurunan kasus)
- d. Secara teknis, Frekuensi dan intensitas kejadian bencana alam maupun non alam berdasarkan evident case based (kasus yang terjadi di tahun berjalan) serta laporan pada tahun-tahun sebelumnya sesuai dengan jumlah masyarakat yang berisiko terdampak krisis kesehatan akibat bencana di wilayah kabupaten dan kota yang berisiko tinggi.

Adapun untuk mengatasi permasalahan dalam penerapan SPM Kesehatan di Tahun berikutnya, terdapat beberapa solusi dilihat dari aspek situasi dan kondisi persiapan penerapan SPM Tahun 2023 sebagai berikut:

- a. Berdasarkan Permendagri No 90 Tahun 2019 tentang pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyediakan dan menyajikan informasi secara berjenjang dan mandiri berupa penggolongan/pengelompokan dalam perencanaan anggaran, telah diklasifikasikan penjabaran tanggung jawab dan kewenangan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Puskesmas guna mencapai Indikator Kinerja masing-masing daerah.

Terkhusus Pencapaian SPM Provinsi Nomenklatur penganggaran telah memisahkan antara pos alokasi tiap indikator SPM Provinsi.

- b. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan bimbingan teknis dilakukan secara berkesinambungan dengan pertimbangan telah berlangsung pelaksanaan vaksinasi COVID-19 sehingga peninjauan secara langsung ke lapangan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

4.3. Urusan Pekerjaan Umum

4.3.1 Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal bagian keempat SPM Pekerjaan Umum pasal 7 ayat yang berbunyi “Jenis pelayanan dasar pada SPM pekerjaan umum daerah provinsi terdiri atas:

- a. Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota; dan
- b. Penyediaan pelayanan pengelolaan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota.

SPM bidang pekerjaan umum di Provinsi Kalimantan Utara diselenggarakan oleh 1 (satu) Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara, yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Utara. Pemenuhan kebutuhan bagi masyarakat menjadi urusan wajib Pemerintah Daerah Kalimantan Utara yang di laksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Pemukiman dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dalam pelayanan dasar sebagai berikut :

Tabel 4. 11

Jenis Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum

No.	Pelayanan Dasar	Indikator
1.	Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota	Persentase Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang terbangun dan dikelola <ul style="list-style-type: none">- Jumlah pengembangan bangunan sistem distribusi air minum yang tersedia- Jumlah bangunan sistem distribusi air bersih
2.	Penyediaan Pelayanan Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none">- Persentase sistem pengelolaan air limbah yang dibangun dan dikelola Jumlah bangunan prasarana dan sarana air limbah/tinja

4.3.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Target yang ditetapkan pada peraturan Permendagri 100 Tahun 2018, sebagai acuan dalam pencapaian yang akan dilaksanakan Perangkat Daerah terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4. 12
Target Pencapaian Bidang Pekerjaan Umum

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian
1.	Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan air minum curah lintas Kabupaten/Kota	100%
2.	Penyediaan Pelayanan Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan air minum curah lintas Kabupaten/Kota	100%

Sumber : Permendagri 100 Tahun 2018

4.3.3 Realisasi

Tabel 4. 13
Realisasi Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum

No	Jenis Pelayanan	Standar Pelayanan Minimal		Keterangan
		Indikator	Capaian Tahun 2023	
1.	Pelayanan dan Penyediaan Air Minum	Persentase sistem penyediaan air minum (SPAM) yang terbangun dan dikelola	1 Paket	
		- Jumlah pengembangan bangunan sistem distribusi air minum yang tersedia		
		- Jumlah bangunan sistem distribusi air bersih	-	
2.	Pengelolaan Air Limbah	Persentase sistem pengelolaan air limbah yang dibangun dan dikelola	-	
		- Jumlah bangunan prasarana dan sarana air limbah/tinja	-	

4.3.4 Alokasi Anggaran

Untuk mendukung tercapainya Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang urusan pekerjaan Umum di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Kawasan Pemukiman Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2023 mengalokasikan anggaran dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA)



Perubahan sebesar Rp 410.967.565.927,00. Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk membiayai 9 (dua belas) program dan 14 (empat belas) kegiatan untuk pencapaian penerapan SPM bidang pekerjaan umum. Program-program tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 4. 14
Alokasi Anggaran SPM Bidang Pekerjaan Umum

No	Nama Program	Anggaran (Rp)
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	7.614.034.753
2	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	90.000.000
3	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	558.021.519
4	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	24.909.091
5	Program Pengembangan Permukiman	11.350.878.624
6	Program Penataan Bangunan Gedung	214.784.419.102
7	Program Penyelenggaraan Jalan	128.764.517.850
8	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	3.618.484.254
9	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	5.377.108.122

Secara umum alokasi anggaran di tahun 2023 dalam rangka pencapaian SPM untuk kegiatan Air Minum dan Sanitasi pada Bidang Pekerjaan Umum sebesar Rp. 1.393.305.000,00 (Satu Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Lima Ribu Rupiah).

4.3.5 Dukungan Personil

Dalam rangka pencapai SPM bidang Pekerjaan Umum tidak terlepas dari peranan sumber daya yang ada termasuk sumber daya manusia, sarana dan prasaran. Adapun sumber daya yang terdapat di bidang Pekerjaan Umum sampai akhir tahun 2023 memiliki dukungan personil aparatur khususnya air bersih/air minum dan air limbah sebanyak 3 (tiga) orang yang terdiri dari:

- 1 (satu) orang pejabat eselon IV (Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan, Air Bersih dan Sanitasi).
- 1 (satu) orang staf pelaksana Penelaah Penyehatan Lingkungan Permukiman (PPLP); dan
- 1 (satu) orang staf pelaksana di Bidang Cipta Karya.

4.3.6 Permasalahan dan Solusi

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat antara lain:

a. Permasalahan

- Kurangnya sumber air baku untuk daerah yang dikelilingi lautan;
- Masih terbatasnya penyediaan air bersih oleh PDAM
- Besarnya biaya operasional penyediaan air bersih
- Minimnya sumber daya/jaringan listrik untuk pengelolaan air bersih
- Hal kritis dalam Penyediaan Air Bersih Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)
- Konflik air baku maupun pendistribusiannya (antar warga, antar desa)
- Kurangnya sarana dan prasarana pendukung untuk pengolahan air limbah dan persampahan
- Tempat Pembuangan Akhir (TPA) masih menggunakan sistem open dumping
- Belum optimalnya sistem pengolahan air limbah dan sampah.

b. Solusi

- Meningkatkan kapasitas kelembagaan provinsi dalam penyelenggaraan sistem pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
- Meningkatkan cakupan pelayanan Air Minum dan Air Limbah
- Meningkatkan manajemen pengelolaan lembaga layanan Air Minum dan Air Limbah
- Meningkatkan peran aktif masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan sistem Air Minum dan Air Limbah

4.4. Urusan Perumahan Rakyat

4.4.1 Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal pada bagian kelima SPM Perumahan Rakyat pada pasal 8 ayat (2) yang berbunyi “Jenis pelayanan dasar pada SPM perumahan rakyat daerah provinsi terdiri atas:

- a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi; dan
- b. Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah provinsi.”



SPM bidang Perumahan Rakyat di Provinsi Kalimantan Utara diselenggarakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Provinsi Kalimantan Utara. Pemenuhan kebutuhan bagi masyarakat menjadi urusan wajib Pemerintah daerah Kalimantan Utara yang dilaksanakan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dalam pelayanan dasar sebagai berikut:

Tabel 4. 15
Jenis Pelayanan Dasar Urusan Perumahan Rakyat

No.	Pelayanan Dasar	Indikator
1.	Jenis Pelayanan Dasar Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana	Jumlah rumah yang dibangun untuk korban bencana provinsi : a) Renovasi rumah swadaya b) Pembangunan kembali c) Penyediaan rumah/relokasi type 36 d) Bantuan akses rumah sewa
2.	Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang kena relokasi program pemerintah daerah	e) Pendamping f) Pembinaan g) Penyuluhan h) Pelayanan informasi Pendataan lokasi rawan bencana dan lokasi terkena dampak bencana Provinsi Kalimantan Utara • Bantuan teknis i) Pendampingan pengganti kerugian • Penyusunan DED rumah umum dan rumah khusus j) Pembangunan rumah susun umum k) Pembangunan rumah khusus l) Pengadaan tanah untuk relokasi

4.4.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Target yang di tetapkan pada Permendagri 100 Tahun 2018, sebagai acuan dalam pencapaian yang akan dilaksanakan Perangkat Daerah terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat dapat dilihat pada tabel dibawah ini :



Tabel 4. 16

Target Pencapaian SPM Perumahan Rakyat

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Provinsi	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	100%

4.4.3 Realisasi

Adapun realisasi pencapaian pelaksanaan SPM bidang Pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat tahun 2023 dapat di lihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4. 17

Indikator dan Data SPM Bidang Perumahan Rakyat

No.	Jenis Pelayanan	Standar Pelayanan Minimal		Keterangan
		Indikator	Capaian Tahun 2023	
1.	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Bagi Korban Bencana Provinsi	Jumlah rumah yang dibangun untuk korban bencana provinsi	-	Belum ada dampak bencana meliputi lebih dari 1 (satu) wilayah administrasi Kabupaten/Kota. (dasar aturan : PERMEN PUPR 29/PRT/M/2018)
		- Renovasi rumah swadaya	-	
		- Pembangunan Kembali	-	
		- Penyediaan rumah/relokasi type 36	-	
		- Bantuan akses rumah sewa	-	
2.	Fasilitas Penyediaan Rumah Yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Kena Relokasi Program Pemerintah Daerah	- Pendampingan	-	Belum ada penyediaan rumah layak huni relokasi program pemerintah untuk memenuhi jumlah kekurangan sewa lebih dari 50 unit (dasar aturan dan dasar hukum : PERMEN PUPR 29/PRT/M/2018)
		- Pembinaan	-	
		- Penyuluhan	-	
		- Pelayanan Informasi	-	
		Pendataan Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi terkena Dampak Bencana Provinsi Kalimantan Utara	-	
		- Bantuan Teknis	-	
		Pendampingan penggantian kerugian	-	
		- Penyusunan DED Rumah Umum dan Rumah Khusus	-	



No.	Jenis Pelayanan	Standar Pelayanan Minimal		Keterangan
		Indikator	Capaian Tahun 2023	
		Pembangunan rumah susun umum	-	
		Pembangunan rumah khusus	-	
		Pengadaan tanah untuk relokasi	-	

Tabel 4. 18

Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat

NO	INDIKATOR KINERJA/JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN/OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM	TUNTAS PARIPURNA			100.00 %
1.	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Provinsi				100.00 %
		Ya Terjadi Bencana			
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	1	1	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20.00 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	100.00 %
	1 . Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana	1	1	0	100.00 %
	2 . Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	1	1	0	100.00 %
	3 . Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana	1	1	0	100.00 %
	4 . Pembangunan baru di lokasi baru/relokasi bagi korban bencana.	1	1	0	100.00 %
2.	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi				100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	1	1	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20.00 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	100.00 %
	1 . Fasilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan	1	1	0	100.00 %
	2 . Subsidi uang sewa	1	1	0	100.00 %
	3 . Penyediaan rumah layak huni	1	1	0	100.00 %

4.4.4 Alokasi Anggaran

Untuk mendukung tercapainya Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang urusan perumahan rakyat di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2023 mengalokasikan anggaran dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan sebesar Rp 410.967.565.927,00. Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk membiayai 3 (tiga) program dan 3 (tiga) kegiatan untuk pencapaian penerapan SPM bidang perumahan rakyat. Program-program tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 19
Alokasi Anggaran SPM Bidang Perumahan rakyat

No	Nama Program	Anggaran (Rp)
1	Program Pengembangan Perumahan	192.734.370
2	Program Kawasan Permukiman	1.274.596.030
3	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	10.107.098.887

4.4.5 Dukungan Personil

Dalam rangka percepatan pencapaian SPM, maka Bidang Perumahan Rakyat tidak terlepas dari peranan sumber daya yang ada termasuk sumber daya manusia, sarana dan prasarana. Adapun dukungan personil pada Bidang Perumahan Rakyat pada tahun 2023 telah dirincikan dalam struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara yaitu sebanyak 14 (empat belas) orang, yang terdiri dari 1 (satu) orang pejabat eselon II, 2 (dua) orang pejabat eselon III, 5 (lima) orang pejabat eselon IV dan 6 (enam) orang staf pelaksana.

4.4.6 Permasalahan dan Solusi

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat antara lain:

- Belum ada dampak bencana meliputi lebih dari 1 (satu) wilayah administrasi Kabupaten/Kota. (dasar aturan : PERMEN PUPR 29/PRT/M/2018)
- Belum ada penyediaan rumah layak huni relokasi program pemerintah untuk memenuhi jumlah kekurangan sewa lebih dari 50 unit (dasar aturan dan dasar hukum : PERMEN PUPR 29/PRT/M/2018)

Sedangkan solusi yang dapat digunakan dalam pemecahan masalah tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Pembangunan rumah bagi korban bencana dapat dilaksanakan dengan ketentuan.
 - Pada saat masa pasca bencana : JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum) Kementerian PUPR.
 - Surat penetapan bencana dari Gubernur
 - Dampak bencana meliputi lebih dari 1 (satu) wilayah administrasi kabupaten/kota.
- b) Penyediaan rumah layak huni relokasi program pemerintah dapat dilaksanakan untuk relokasi program pemerintah yang berdampak cukup massif dengan ketentuan jumlah kekurangan rumah sewa lebih dari 50 unit.

4.5. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

4.5.1 Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), Jenis pelayanan dasar pada SPM Bidang Trantibumlinmas di Provinsi Kalimantan Utara adalah Pelayanan ketenteraman dan ketertiban Umum Provinsi dengan mengacu capaian indikator yaitu Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara di Provinsi.

Selanjutnya terdapat 3 (tiga) jenis pelayanan dasar terkait bidang Penanggulangan Bencana, yaitu:

- a. Pelayanan informasi rawan bencana;
- b. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
- c. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;

Pelayanan dasar tersebut dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten/Kota wilayah Provinsi Kalimantan Utara.

4.5.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Target yang ditetapkan pada Permendagri 100 Tahun 2018, sebagai acuan dalam pencapaian yang akan dilaksanakan Perangkat Daerah terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat dapat dilihat pada tabel dibawah ini.



Tabel 4. 20

**Target Pencapaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan
Perlindungan Masyarakat**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target Capaian
1.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Provinsi	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada di Provinsi	100%

4.5.3 Realisasi

Dalam pelaksanaan SPM Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, terdiri dari 1 Program dan 4 kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 5.106.527.648,-, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. Rp. 4.855.196.537,- untuk rinciannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4. 21

**Realisasi Anggaran SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan
Perlindungan Masyarakat**

No	Program Pembangunan Daerah	Rencana dan Realisasi Anggaran per 31 Desember 2023				
	Kegiatan & Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa (Rp)	%
I	Program Peningkatan Ketentraman & Ketertiban Umum					
1	Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum lintas daerah kab/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi					
a	Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	238.630.000,-	205.630.700,-	86,17	32.999.300,-	13,83
b	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	100.586.816,-	99.036.260,-	98,46	1.550.556,-	1,54
2	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur					
a	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	4.677.980.000,-	4.467.903.977,-	95,51	210.076.023,-	4,49
b	Penanganan atas pelanggaran Perda dan Pergub	89.330.832,-	82.625.600,-	74,09	6.705.232,-	7,51
	Jumlah	5.106.527.648,-	4.855.196.537,-	95,07	251.331.111,-	4,93

Tabel. 4. 22

Capaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

NO	INDIKATOR KINERJA/JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN/OUTPUT			Total Pencapaian
		TUNTAS PARIPURNA			
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM				100.00 %
1.	Pelayanan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Provinsi				100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	1	1	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20.00 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	100.00 %
	1 . Warga Negara Yang Memperoleh Pelayanan Kerugian Materil	1	1	0	100.00 %
	2 . Warga Negara Yang Memperoleh Pelayanan Kerugian Pelayanan Pengobatan	1	1	0	100.00 %
	3 . Standar Operasional Prosedur Satpol PP	23	23	0	100.00 %
	4 . Standar Sarana Prasarana Satpol PP	34	34	0	100.00 %
	5 . Standar Peningkatan Kapasitas Anggota Satpol PP Dan Anggota Perlindungan Masyarakat	3	3	0	100.00 %
	6 . Standar Pelayanan Yang Terkena Dampak Gangguan Trantibum Akibat Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Perda Dan Perkada	1	1	0	100.00 %

4.5.4 Alokasi Anggaran

Untuk mendukung tercapainya Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2023 mengalokasikan anggaran dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan sebesar Rp 5.106.527.648,00. Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk membiayai 2 (dua) program dan 3 (tiga) kegiatan untuk pencapaian penerapan SPM bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Program-program tersebut adalah sebagai berikut.

**Tabel 4. 23****Alokasi Anggaran SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan
Perlindungan Masyarakat**

No	Nama Program	Anggaran (Rp)
1	Peningkatan Ketentraman & Keteriban Umum	5.106.527.648
2	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	570.002.460

4.5.5 Dukungan Personil

Adapun jumlah personil yang dimiliki oleh Satpol PP Provinsi Kalimantan Utara adalah sebagai berikut:

- Jumlah anggota Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2023 adalah 37 orang yang terdiri dari Laki-laki 28 orang dan perempuan 9 orang.
- Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Utara di dukung oleh 116 orang merupakan Tenaga Bantuan Polisi Pamong Praja (Banpolpp), 12 orang Tenaga Pemadam Kebakaran, 10 orang Tenaga Administrasi, 2 orang motoris & ABK dan 3 orang Pramু Bhakti.

Tabel 4. 24**Dukungan Personil SPM Trantibum**

STATUS	GOLONGAN (ORANG)					TOTAL (ORANG)
	IV	III	II	I	LAINNYA	
PNS	3	25	9	-	-	37
TPK/TA/PB/TKK	-	-	-	-	27	27
BANPOLPP	-	-	-	-	116	116
Total	3	25	9	-	143	180

4.5.6 Permasalahan dan Solusi

Pencapaian SPM Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat pada Tahun 2023 belum maksimal sehingga perlu menindaklanjuti beberapa permasalahan. Adapun beberapa permasalahan adalah sebagai berikut:

- Kurangnya Personel yang memiliki keahlian dan ketrampilan sesuai standar pelayanan; dan



- b) Kurangnya sarana dan prasarana untuk mendukung tupoksi guna mendapatkan capaian SPM.

Adapun solusi atau tindak lanjut yang harus dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a) Diperlukan pelatihan/ penyegaran bimtek pelayanan prima kepada petugas secara continue/ berkelanjutan; dan
- b) Diperlukan tambahan sarana dan prasarana yang memadai guna mendukung pencapaian SPM.

Tabel 4. 25

Kriteria, permasalahan dan Tindak Lanjut SPM Provinsi Kalimantan Utara

KRITERIA	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
Indikator	Perlu dilakukan peninjauan kembali, dengan menambahkan indicator sesuai dengan didaerah	Perlu adanya indicator yang lebih rinci dari setiap pelayanan dasar yang dilakukan dengan disesuaikan pada Tupoksi
Penentuan Rumus	Penentuan rumus tidak mengalami kendala hanya kurang terinci	Perlu adanya penajaman kata – kata mengenai hal – hal yang menjadi pembilang dan penyebut.
Data Dasar	<ul style="list-style-type: none">• Belum adanya pemetaan daerah – daerah rawan bencana, dll.	<ul style="list-style-type: none">• Perlu adanya pemetaan daerah – daerah rawan bencana yang kemudian dituangkan dalam Perda.
Tupoksi Satpol PP	<ul style="list-style-type: none">• Satpol PP yang bergabung dengan Pemadam Kebakaran mengakibatkan besarnya tugas yang dihadapi dikarenakan harus menangani dua tugas yang berbeda yaitu masalah hukum, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan bencana kebakaran	<ul style="list-style-type: none">• Perlu adanya pemisahan unit kerja antara Satpol PP dengan Pemadam Kebakaran
	<ul style="list-style-type: none">• Kurangnya sarana pendukung tupoksi guna mendapatkan target SPM yang ditentukan	<ul style="list-style-type: none">• Perlu adanya penambahan saran dan prasarana yang memadai guna pencapaian SPM
Pembinaan Kementerian atau lembaga	<ul style="list-style-type: none">• Pembinaan baru dilaksanakan oleh Biro Pemerintahan & Otonomi Daerah	<ul style="list-style-type: none">• Perlu adanya pembinaan lanjutan dan dukungan sarana dan prasarana dari Kementerian terkait mengenai SPM
Pembinaan Gubernur selaku Wakil Pemerintah	<ul style="list-style-type: none">• Telah dilakukan oleh pembinaan dari SKPD teknis dalam penyusunan SPM tetapi tidak pada masing – masing SKPD bersangkutan sehingga diperoleh kesamaan antara Satpol PP Provinsi dengan Kab/Kota	<ul style="list-style-type: none">• Perlu adanya pembinaan lanjutan dari Satpol PP Provinsi dan dukungan saran dan prasarana oleh instansi terkait/

4.6. Urusan Sosial

4.6.1 Jenis Pelayanan Dasar

SPM Bidang Urusan Sosial merupakan penjabaran dari target yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial RI berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

SPM Bidang Urusan Sosial mencakup 5 (lima) pelayanan dasar yaitu:

- Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Dalam Panti;
- Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar Di Dalam Panti;
- Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Di Dalam Panti;
- Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Di Dalam Panti;
- Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial.

Adapun dasar hukum jenis Pelayanan Dasar Bidang Urusan Sosial diatur dalam:

- Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

4.6.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Tabel 4. 26
Target SPM Bidang Sosial

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sasaran	Tahun Pencapaian	Target (%)
		Indikator Kinerja		
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Di Dalam Panti	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas telantar di dalam panti	2023	100 %
		Persentase (%) Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti		
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar Di Dalam Panti	Terpenuhinya kebutuhan dasar Anak Telantar di dalam Panti	2023	100 %
		Persentase (%) Anak Telantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti		
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Telantar Di Dalam Panti	Terpenuhinya kebutuhan dasar lanjut usia terlantar di dalam panti	2023	100 %
		Persentase (%) Lanjut Usia telantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti		
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Di Dalam Panti	Terpenuhinya kebutuhan dasar gelandangan dan pengemis	2023	100 %
		Persentase (%) Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti		
5		Terpenuhinya kebutuhan dasar Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	2023	100 %



No	Jenis Pelayanan Dasar	Sasaran	Tahun Pencapaian	Target (%)
		Indikator Kinerja		
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	Persentase (%) Korban Bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi		

4.6.3 Realisasi

Nilai rata-rata capaian SPM Bidang Urusan Sosial Dinas Sosial Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023 adalah 100% dengan rincian serta jenis pelayanan tercantum pada table dibawah ini.

Tabel 4. 27
Realisasi Capaian SPM Bidang Urusan Sosial Dinas Sosial
Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sasaran	Tahun Pencapaian	Realisasi		
		Indikator Kinerja		Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Di Dalam Pant	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas telantar di dalam panti	2023	100 %	100%	100%
		Persentase (%) Penyandang Disabilitas Telantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti				
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar Di Dalam Pant	Terpenuhinya kebutuhan dasar Anak Telantar di dalam Pant	2023	100 %	100 %	100 %
		Persentase (%) Anak Telantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti				
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Telantar Di Dalam Pant	Terpenuhinya kebutuhan dasar lanjut usia terlantar di dalam panti	2023	100 %	100%	100%
		Persentase (%) Lanjut Usia telantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti				
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Di Dalam Pant	Terpenuhinya kebutuhan dasar gelandangan dan pengemis	2023	0 %	0 %	0 %
		Persentase (%) Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Pant				
5	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	Terpenuhinya kebutuhan dasar Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	2023	100 %	100%	100%
		Persentase (%) Korban Bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi				



Tabel 4. 28

Realisasi Pencapaian SPM Bidang Sosial

NO	INDIKATOR	FORMULASI	DATA DAN FOMULASI	TARGET (%)	REALISASI (%)
1	Persentase (%) Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Dalam Panti	<i>Populasi Penyandang Diabiitas T</i>	88x 100 %	100 %	100 %
2	Persentase (%) Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Dalam Panti	<i>Populasi Anak Terlantar di daera</i>	351351x 100	100 %	100 %
3	Persentase (%) Lanjut Usia yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Dalam Panti	<i>Populasi Lanjut Usia di daerah p</i>	1010x 100 %	100 %	100%
4	Persentase (%) Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Dalam Panti	<i>Populasi Gelandangan dan Penge</i>	00x 100 %	100 %	0
5	Persentase (%) Korban Bencana Alam dan Sosial terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi	<i>Populasi Korban Bencana Alam d</i>	51005100x 1	100 %	100%

Berdasarkan Tabel diatas Pencapaian indokator kinerja dari lima Standar Pelayanan Minimal berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 yang terealisasi yaitu Lanjut Usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti, Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya Penyandang Disabilitas yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan Terpenuhinya kebutuhan dasar Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi serta Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti sebesar 100% sehingga persentase pencapaian kinerja berdasarkan kriteria kinerja masuk pada kriteria baik.

4.6.4 Alokasi Anggaran

Untuk mendukung tercapainya Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang urusan sosial Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2023 mengalokasikan anggaran dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA)



Perubahan sebesar Rp 12.590.572.939,00. Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk membiayai 5 (lima) program dan 10 (sepuluh) kegiatan untuk pencapaian penerapan SPM bidang sosial. Program-program tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 4. 29
Alokasi Anggaran SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan
Perlindungan Masyarakat

No	Nama Program	Anggaran (Rp)
1	Program Pemberdayaan Sosial	509.900.000
2	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	50.000.000
3	Program Rehabilitasi Sosial	262.200.000
4	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	262.200.000
5	Program Penanganan Bencana	486.000.000

4.6.5 Dukungan Personil

Dukungan pegawai menggambarkan jumlah pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM:

- a. PNS = 42 Orang
- b. Non-PNS = 16 Orang

4.6.6 Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan:

1) Sebaran Penduduk

Sebaran Penduduk Provinsi Kalimantan Utara yang belum merata menyebabkan aksesibilitas ke lokasi sasaran PMKS belum merata.

2) Asumsi Masyarakat

Asumsi Masyarakat yang menganggap bahwa Provinsi Kalimantan Utara memiliki sumber daya alam yang melimpah, menyebabkan Kalimantan Utara menjadi sasaran para pencari kerja dari daerah lain. Kedatangan pencari kerja tersebut tidaklah disertai dengan kemampuan dan keterampilan yang memadai, sehingga membuat permasalahan baru dengan bertambahnya penyandang masalah kesejahteraan sosial.

3) Belum Maksimal Penggunaan Data



Belum maksimalnya penggunaan data sehingga penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten/Kota sehingga menjadi penghambat dalam penyusunan program dan distribusi kegiatan untuk Kabupaten/ Kota

4) Sinkronisasi Program

Sinkronisasi program antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten/ Kota belum optimal.

5) Sumber daya Manusia

Belum optimalnya pendayagunaan sumber daya manusia dalam proses perencanaan dan mengimplementasikan penanganan program-program kesejahteraan sosial.

6) Sistem Regulasi

Kebijakan pemerintah yang sering mengalami perubahan dari segi peraturan dan perundang-undangan khususnya yang berhubungan dengan penganggaran baik pusat maupun daerah.

b. Solusi

Adapun Solusi yang dapat diambil untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas adalah:

1) Melengkapai sarana dan prasarana

Melengkapai sarana dan prasarana penunjang kegiatan sehingga pencapaian sasaran dapat diperoleh secara maksimal;

2) Sinkronisasi Sistem Pelaporan Kinerja Dinas

Meningkatkan sinkronisasi dan sistem pelaporan kinerja dinas-dinas/instansi sosial Kabupaten/Kota se Kalimantan Utara;

3) Mengoptimalkan anggaran

Lebih Mengoptimalkan anggaran berdasarkan program-program skala prioritas;

4) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan melaksanakan serta mengikutsertakan pegawai yang ada di lingkup Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara pada setiap kegiatan pelatihan/diklat baik ditingkat daerah maupun nasional.

4.7. Program dan Kegiatan

4.7.1 Bidang Pendidikan

Sebagaimana telah ditetapkan dalam Berita Acara Kesepakatan Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Integrasi Indikator SPM Bidang Pendidikan Ke Dalam Dokumen Perencanaan Daerah Tahun 2023 yang dilaksanakan pada 24 Mei Tahun 2023, program yang mendukung tercapainya indikator standar pelayanan minimal (SPM) bidang pendidikan adalah :

1. Program Pengelolaan Pendidikan
2. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pada tahun 2023, Pemerintah Kalimantan Utara melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara telah melaksanakan 6 (enam) program dan 13 (tiga belas) kegiatan dan 58 (lima puluh delapan) sub kegiatan dalam rangka pembangunan dan pengembangan pendidikan yang berkualitas serta nilai warisan budaya di Provinsi Kalimantan Utara. Dari total anggaran perubahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara tahun 2023 sebesar Rp 600.345.181.391,00, terealisasi sebesar Rp 563.672.664.459,00 atau 93,85%. Dari realisasi tersebut terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp 36.672.516.932,00. Adapun rincian Program dan Kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang mendukung pencapaian SPM bidang Pendidikan sebagai berikut :

Tabel 4. 30

Program dan Kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2023

No	Nama Program	Nama Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	188.216.027.700
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	98.638.031.569
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	7.411.680.160
2	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi	72.000.000

4.7.2 Bidang Kesehatan

Era otonomi daerah merupakan titik balik guna memberikan kekelulasaan daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri, namun di tengah perkembangan era otonomi daerah ini memberikan peluang untuk daerah membangun daerahnya masing, akan tetapi disatu sisi masih banyak yang belum siap terhadap sistem pemerintahan daerah dan otonomi daerah sehingga menyebabkan daerah yang tertinggal dan melupakan sebuah asas perencanaan dalam pembangunan, oleh karena itu dengan urgennya untuk mengejar ketertinggalan percepatan pembangunan daerah dibutuhkan sebuah perencanaan dan pembangunan.

Perencanaan pembangunan di daerah otonom harus memperhatikan adanya sinkronisasi, koordinasi dan integrasi dengan perencanaan pembangunan nasional. Karena capaian tujuan pembangunan daerah harus bersifat mendukung pencapaian tujuan pembangunan secara nasional. Keseluruhan atau berbagai dokumen dalam sebuah perencanaan pembangunan daerah otonom dalam memperlihatkan sebuah indikasi jangka panjang dan jangka menengah yang mampu mengatur visi dan misi arah tujuan pembangunan. Program kerja kepala daerah dan Organisasi Perangkat Daerah termasuk keuangan daerah, Rencana pembangunan tahunan daerah terdapat dua yaitu RKPD dan Renstra-SKPD memuat suatu kebijakan visi dan misi tujuan, strategi arah kebijakan daerah dalam proses dan berjalannya pembangunan daerah guna mewujudkan percepatan pembangunan daerah.

Adapun program dan kegiatan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023 yang mendukung pencapaian SPM bidang kesehatan tertuang dalam tabel berikut ini:

Tabel 4. 31
Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Tahun 2023

No	Nama Program	Nama Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	7.709.293.187
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	39.346.608.246



No	Nama Program	Nama Kegiatan	Anggaran (Rp)
		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	149.953.590
	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	20.000.000
	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	158.735.744
		Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	158.735.744
		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi	149.739.360

4.7.3 Bidang Urusan Pekerjaan Umum

Dalam meningkatkan dan mempercepat pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara tahun 2023 telah menetapkan program dan kegiatan yang sejalan dengan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur. Adapun program dan kegiatan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 4. 32
Program dan Kegiatan Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2023

No	Nama Program	Nama Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	Pengelolaan Sda Dan Bangunan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	5.568.640.753
		Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer Dan Sekunder Pada Daerah Irigasi Yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha Dan	2.045.394.000



No	Nama Program	Nama Kegiatan	Anggaran (Rp)
		Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
2	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Spam) Lintas Kabupaten/Kota	90.000.000
3	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	558.021.519
4	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	24.909.091
6	Program Pengembangan Permukiman	Penyelenggaraan Infrastruktur Pada Permukiman Di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	11.350.878.624
7	Program Penataan Bangunan Gedung	Penetapan Dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	214.784.419.102
8	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	128.764.517.850
9	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	2.171.716.202
		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	1.153.340.052
		Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	293.428.000
10	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	2.590.824.168
		Koordinasi Dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	1.114.626.052
		Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	1.671.657.902

4.7.4 Bidang Urusan Perumahan Rakyat

Dalam meningkatkan dan mempercepat pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020 telah menetapkan program dan kegiatan yang sejalan dengan

visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur. Adapun program dan kegiatan tersebut diuraikan sebagai berikut:

Tabel 4. 33
Program dan Kegiatan Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2023

No	Nama Program	Nama Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Program Pengembangan Perumahan	Pembangunan Dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Provinsi	192.734.370
2	Program Kawasan Permukiman	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha Sampai Dengan Di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	1.274.596.030
3	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	10.107.098.887

4.7.5 Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat

Program dan kegiatan serta pendanaan merupakan langkah nyata dari tindak lanjut permasalahan – permasalahan yang dihadapi sehingga presentase Standar Pelayanan Minimal dapat ditingkatkan, dari berbagai masalah yang dihadapi pemecahannya hanya pada jumlah anggota dan sarana prasarana serta pendidikan anggota baik Satuan Polisi Pamong Praja.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang pelaksanaan SPM Program Peningkatan ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 4. 34
Program dan Kegiatan Satuan Polisi pamong Praja Tahun 2023

No	Nama Program	Nama Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Peningkatan Ketentraman & Keteriban Umum	Penanganan Gangguan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	339.216.816
		Penegakan Peraturan Daerah Provinsi Dan Peraturan Gubernur	4.767.310.832
2	Program Pencegahan,	Program Pencegahan, Penanggulangan,	570.002.460



No	Nama Program	Nama Kegiatan	Anggaran (Rp)
	Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	

4.7.6 Bidang Sosial

Program dan kegiatan Dinas sosial yang terakit dengan penerapan dan pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 35
Program dan Kegiatan Dinas Sosial Tahun 2023

No	Nama Program	Nama Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Program Pemberdayaan Sosial	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	509.900.000
2	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dari Titik Debarkasi Di Daerah Provinsi Untuk Dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	50.000.000
3	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Di Dalam Panti	35.000.000
		Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar Di Dalam Panti	120.000.000
		Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Di Dalam Panti	7.200.000
		Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan Dan Pengemis Di Dalam Panti	100.000.000
4	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Pengangkatan Anak Antar Wni Dan Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua Tunggal	35.500.000
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	738.264.218
5	Program Penanganan Bencana	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Dan Sosial Provinsi	486.000.000

BAB V

PENUTUP

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023 ini disusun sebagai laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang diwujudkan melalui berbagai program dan kegiatan pembangunan, sebagaimana telah disampaikan kepada Pemerintah. Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah pada umumnya telah dilaksanakan dan berjalan dengan baik. Implementasi penyelenggaraan pemerintahan diawali dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan terhadap seluruh program dan kegiatan pembangunan.

Hasil pembangunan di Provinsi Kalimantan Utara pada hakikatnya merupakan hasil sinergi dan wujud efisiensi dan efektivitas pembangunan dari kinerja semua komponen Pemerintahan Daerah baik Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif pada tingkat Nasional, Provinsi serta Kabupaten/Kota, maupun pihak swasta serta masyarakat Provinsi Kalimantan Utara. Pencapaian target pembangunan tahun 2023 ini, masih perlu ditingkatkan kembali. Kekurangan, kelemahan dan permasalahan yang ada dalam pelaksanaan pembangunan tahun 2023 menjadi bahan evaluasi dan acuan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada tahun-tahun mendatang.

Keberhasilan capaian kinerja tahun 2023 tidak terlepas dari adanya solusi untuk mengatasi hambatan dan kendala yang bersifat internal maupun eksternal. Terhadap berbagai target capaian maupun yang tidak tercapai, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara akan melakukan langkah konstruktif dan konkrit melalui analisis dan evaluasi agar dapat dilakukan perbaikan dan penanganan di masa mendatang.

Kekurangan yang terjadi selama tahun 2023 menjadi catatan yang tentunya akan menjadi bahan evaluasi penyusunan kebijakan guna memperbaiki kinerja pada tahun mendatang, sasaran program yang belum tercapai seratus persen akan dievaluasi, sehingga seluruh sasaran program di tahun mendatang nantinya dapat dicapai lebih baik dari tahun sebelumnya. Evaluasi juga akan dilakukan terhadap capaian dari pembangunan jangka menengah agar kendala yang dihadapi dan resiko kegagalannya dapat ditekan dan diperbaiki sedini mungkin dan dicari solusi untuk mengatasinya.

Demikian LPPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023 ini disusun, semoga di tahun-tahun mendatang, keberhasilan senantiasa mengiringi segala upaya dan perjuangan kita demi kemajuan Provinsi Kalimantan Utara.



**PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN UTARA**